Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara

Rancangan Akhir

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2025 - 2029



Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara

Rancangan Akhir

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 7
1.3.1 Hubungan RPJMD dengan RPJPD 8
1.3.2 Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dengan RPJMN 8
1.3.3 Hubungan RPJMD dengan RTRW 8
1.3.4 Hubungan RPJMD dengan KLHS 8
1.3.5 Hubungan RPJMD dengan RKPD, Renstra, Renja, dan APBD 9
1.3.6 Hubungan RPJMD dengan Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2024-2028 (RPB) 9
1.4 Maksud dan Tujuan 10
1.5 Sistematika Penulisan 11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 13
2.1 Aspek Geografi dan Demografi 13
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah 13
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam 15
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 29
2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 34
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas 40
2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 47
2.1.7 Demografi 57
2.2 Aspek kesejahteraan Masyarakat 66
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 66

2.2.2 Kesehatan untuk Semua 83
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata 87
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif 92
2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 94
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif . 99
2.3 Aspek Daya Saing Daerah 108
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia 108
2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 109
2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru 113
2.3.4 Transformasi Digital 114
2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 120
2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi . 123
2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro 125
2.4 Aspek Pelayanan Umum 127
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 127
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial 130
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan 133
2.4.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah 135
2.5 Gambaran Keuangan Daerah 138
2.5.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 138
2.5.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030 204
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah 224
2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 225
2.6.2 Isu Strategis Daerah 229
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 238
3.1 Visi dan Misi 238
3.2 Tujuan dan Sasaran 249

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan 254
3.4 Program Prioritas 267
3.5 Dukungan Program RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Kegiatan Prioritas Utama RPJM Nasional Tahun 2025-2029 291
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 293
4.1 Program Perangkat Daerah 293
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 348
4.1.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) 348
4.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah 378
BAB V PENUTUP 381

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Struktur Sistematika Penulisan RPJMD 11

Tabel 2. 1 Ibukota, Luas, Jumlah Kecamatan, dan Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota 14
Tabel 2. 2 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 15
Tabel 2. 3 Hasil Hutan Provinsi Kalimantan Utara 2018-2023 17
Tabel 2. 4 Luas Jasa Lingkungan berdasarkan Status Jasa di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 17
Tabel 2. 5 Jasa Wisata Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara 18
Tabel 2. 6 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2023 21
Tabel 2. 7 Area Tambak dan Status Lahan Tiap Kota/Kabupaten Provinsi Kalimantan Utara 22
Tabel 2. 8 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2022..... 24
Tabel 2. 9 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Utara (Miliar Rupiah) Tahun 2018-2022 25
Tabel 2. 10 Produksi Komoditas Pertambangan Kalimantan Utara 2018-2023..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 11 Tenaga Kerja Sektor Pertambangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 12 Indeks Ketahanan Energi Nasional tahun 2018-2023 26
Tabel 2. 13 Penilaian Indeks Ketahanan Daerah per Aspek..... 26
Tabel 2. 14 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022..... 27
Tabel 2. 15 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 16 Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah 28
Tabel 2. 17 Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2023 29

Tabel 2. 18 Status Daya Dukung Penyediaan Air Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 30
Tabel 2. 19 Status Daya Dukung Daya Penyediaan Air Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 30
Tabel 2. 20 Status Daya Dukung Daya Penyediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 33
Tabel 2. 21 Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2023 35
Tabel 2. 22 Skor Tiga Pilar Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara 2022 & 2023 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 23 Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara 2018-2023 37
Tabel 2. 24 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019–2023 38
Tabel 2. 25 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2023 40
Tabel 2. 26 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2023 41
Tabel 2. 27 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2023 41
Tabel 2. 28 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2023 42
Tabel 2. 29 Indeks Kualitas Air Laut di Provinsi Kalimantan Utara 2018-2023..... 43
Tabel 2. 30 Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Utara 2018-2023 43
Tabel 2. 31 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2019–2023. 45
Tabel 2. 32 Indikator Urusan Pekerjaan Umum 46
Tabel 2. 33 Indeks Risiko per Ancaman Bencana Provinsi Kalimantan Utara 2022..... 48
Tabel 2. 34 Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota 52
Tabel 2. 35 Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Tanah Longsor 54
Tabel 2. 36 Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota..... 56
Tabel 2. 37 Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2018-2023 56
Tabel 2. 38 Persebaran dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara 2023 61

Tabel 2. 39 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 . 63
Tabel 2. 40 Proyeksi Kepadatan Penduduk Bruto Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 63
Tabel 2. 41 Proyeksi Kepadatan Penduduk Netto Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 64
Tabel 2. 42 Proyeksi Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 65
Tabel 2. 43 PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) 68
Tabel 2. 44 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 20202-2024 (%) 74
Tabel 2. 45 PDRB ADHB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 76
Tabel 2. 46 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 78
Tabel 2. 47 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023 80
Tabel 2. 48 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 82
Tabel 2. 49 PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 110
Tabel 2. 50 Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 112
Tabel 2. 51 Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Kalimantan Utara (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024 120
Tabel 2. 52 Net Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Utara (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024 122
Tabel 2. 53 Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020-2024 124
Tabel 2. 54 Jenis Permukaan Jalan Kewenangan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020-2024 124
Tabel 2. 55 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023 127
Tabel 2. 56 Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2023 128
Tabel 2. 57 Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020–2023 129
Tabel 2. 58 Indeks Daya Saing Daerah Kalimantan Utara Tahun 2022 - 2024 134
Tabel 2. 59 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 - 2024 135

Tabel 2. 60 Capaian Indikator Kinerja Kunci Provinsi Kalimantan Utara 135
Tabel 2. 61 Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 140
Tabel 2. 62 Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 143
Tabel 2. 63 Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024..... 164
Tabel 2. 64 Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 181
Tabel 2. 65 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Utara 183
Tabel 2. 66 Kapasitas Fiskal Daerah dan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 184
Tabel 2. 67 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 187
Tabel 2. 68 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029..... 205
Tabel 2. 30 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 208
Tabel 2. 31 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026-2030.... 213
Tabel 2. 32 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026-2030 218
Tabel 2. 77 Isu Strategis Daerah..... 230

Tabel 3. 1 Keterkaitan Asta Cita RPJMN dan Misi RPJMD 248
Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 251
Tabel 3. 3 Strategi Provinsi Kalimantan Utara 255
Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Setiap Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 263
Tabel 3. 5 Program Prioritas RPJMD Kalimantan Utara Tahun 2025-2029..... 268
Tabel 3. 6 Penyelarasan Program dan Kegiatan Prioritas RPJMN dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 291

Tabel 4. 1. Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara..... 294
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kalimantan Utara 378
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Utara 348

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RPJMD 3
Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 7

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kalimantan Utara 14
Gambar 2. 2 Produksi Ikan dan Udang di Provinsi Kalimantan Utara 23
Gambar 2. 3 Status Daya dukung daya tampung penyedia air Provinsi Kalimantan Utara 32
Gambar 2. 4 Status daya dukung daya tampung penyedia air di Provinsi Kalimantan Timur 34
Gambar 2. 5 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan 36
Gambar 2. 6 Peta Sebaran Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 44
Gambar 2. 7 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024 47
Gambar 2. 8 Peta indeks Kerentanan Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Utara 51
Gambar 2. 9 Luas Areal dengan Tingkat Bahaya Banjir di Provinsi Kalimantan Utara (Ha) 53
Gambar 2. 10 Luas Areal dengan Tingkat Bahaya Tanah Longsor 54
Gambar 2. 11 Proporsi Bencana di Provinsi Kalimantan Utara 55
Gambar 2. 12 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 58
Gambar 2. 13 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 59
Gambar 2. 14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%) 67
Gambar 2. 15 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Utara Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah) 70
Gambar 2. 16 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 71
Gambar 2. 17 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%) 72
Gambar 2. 18 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2024 (%) 73
Gambar 2. 19 PDRB ADHB per Kapita Provinsi Kalimantan Utara dan PDB ADHB Indonesia Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 75

Gambar 2. 20 PDRB ADHB per Kapita Menurut Provinsi Tahun 2024 (Juta Rupiah)..... 75
Gambar 2. 21 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024..... 77
Gambar 2. 22 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Tahun 2024 (%) 77
Gambar 2. 23 Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024 79
Gambar 2. 24 Indeks Gini Menurut Provinsi Tahun 2024..... 79
Gambar 2. 25 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024..... 81
Gambar 2. 26 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Tahun 2024 82
Gambar 2. 27 Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Hasil Long Form SP2020 Tahun 2020-2024..... 83
Gambar 2. 28 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2020-2024..... 85
Gambar 2. 29 Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024..... 86
Gambar 2. 30 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024..... 88
Gambar 2. 31 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 90
Gambar 2. 32 Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024..... 91
Gambar 2. 33 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024 92
Gambar 2. 34 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2024..... 95
Gambar 2. 35 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2019-2023..... 96
Gambar 2. 36 Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2019-2023..... 98
Gambar 2. 37 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023 101
Gambar 2. 38 Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024..... 102
Gambar 2. 39 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 104

Gambar 2. 40 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 105
Gambar 2. 41 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 107
Gambar 2. Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023..... 113
Gambar 2. Indeks Pembangunan TIK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023 . 115
Gambar 2. Sub Indeks Pembangunan TIK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023 116
Gambar 2. Indeks Layanan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2023 123
Gambar 2. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 (%) 125
Gambar 2. Inflasi Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024 126
Gambar 2. Grafik Indeks Demokrasi Indonesia 130
Gambar 2. Indeks Rasa Aman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2023..... 131
Gambar 2. Grafik Indeks Ketentraman dan Ketertiban..... 132
Gambar 2. Indeks Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Dimensi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024..... 133
Gambar 2. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 144
Gambar 2. Perkembangan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024..... 145
Gambar 2. Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024..... 146
Gambar 2. Derajat Desentralisasi Fiskal (Kemandirian) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024..... 148
Gambar 2. Rasio Ketergantungan (RK) Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 149
Gambar 2. Rasio Efektifitas PAD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024..... 151
Gambar 2. Perkembangan Realisasi Komponen PAD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024..... 153
Gambar 2. Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Utara..... 154
Gambar 2. Perkembangan Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Provinsi Kalimantan Utara 156

Gambar 2. Perkembangan Realisasi Komponen Transfer Pusat 157
Gambar 2. Proporsi Komponen Pendapatan Transfer Pusat (Persen) Provinsi Kalimantan Utara 158
Gambar 2. Perkembangan Realisasi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 161
Gambar 2. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 ... 165
Gambar 2. Proporsi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 167
Gambar 2. Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Operasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 168
Gambar 2. Proporsi Belanja Operasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 ... 170
Gambar 2. Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Modal..... 172
Gambar 2. Proporsi Belanja Modal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 174
Gambar 2. Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Tak Terduga 176
Gambar 2. Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Transfer Provinsi Kalimantan Utara..... 178
Gambar 2. Proporsi Belanja Transfer Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 .. 179
Gambar 2. Realisasi Pembiayaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 182
Gambar 2. Rasio Belanja Modal Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 191
Gambar 2. Modal Kerja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 193
Gambar 2. Rasio Lancar Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024..... 194
Gambar 2. Rasio Kas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024..... 196
Gambar 2. Rasio Cepat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 198
Gambar 2. Rasio Solvabilitas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 199
Gambar 2. Rasio Utang Terhadap Modal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 201
Gambar 2. Rasio Utang Terhadap Aset Modal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 203
Gambar 3. 1 Cascading Kinerja Visi, Tujuan dan Sasaran 250
Gambar 3. 2 Pentahapan Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 254
Gambar 3. 3 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Utara..... 257

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Hal tersebut telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dikembangkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mendefinisikan proses perencanaan sebagai proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Proses perencanaan dalam pembangunan daerah memiliki peran yang sentral dan strategis bagi efektivitas pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah pada era otonomi daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga merupakan manifestasi dari ruang interaksi yang terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah dalam konteks pemerintahan yang berjejaring dan pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah memiliki dua pendekatan utama yang masing-masing berorientasi pada proses dan berorientasi pada hasil. Pendekatan yang berorientasi proses terdiri dari:

a. Pendekatan teknokratik, yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

b. Pendekatan partisipatif, yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;

c. Pendekatan politis, yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD; dan

d. Pendekatan atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)*, yaitu hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Adapun pendekatan perencanaan yang berorientasi hasil, yaitu:

a. Pendekatan holistik-tematik, yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
b. Pendekatan integratif, yang menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
c. Pendekatan spasial, yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang bersifat jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara periode 2025-2029, yaitu Dr. H. Zainal Paliwang, SH., M.Hum dan Ingkong Ala, SE., M.Si., pada tanggal 20 Februari 2025 menjadi permulaan periode pembangunan daerah yang baru yang perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan RPJMD 2025-2029. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat berbagai ketentuan seperti visi, misi, dan program Kepala Daerah. Ketiga aspek ini dijabarkan melalui berbagai komponen perencanaan seperti tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah. RPJMD juga memuat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang bersifat indikatif dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, RPJMD juga menjadi pedoman dalam mewujudkan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat mendukung perwujudan tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Penyusunan RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui dalam penyusunan RPJMD. Dokumen RPJMD bertujuan untuk menjabarkan secara lebih rinci dari perencanaan-perencanaan lain yang perlu diacu dalam proses perencanaan pembangunan daerah jangka menengah, yang diantaranya adalah RPJPD, RTRW, dan dokumen perencanaan lain yang relevan. Proses tahapan penyusunan RPJMD secara umum diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RPJMD

Proses penyusunan RPJMD dimulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang), perumusan rancangan akhir, hingga dilakukan penetapan RPJMD. Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah

satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 membutuhkan perencanaan pembangunan jangka menengah yang baru untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam program-program pembangunan daerah. Penyusunan rancangan RPJMD nantinya dilakukan dengan memerhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang akan direspons melalui rumusan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas daerah. Selain itu, dokumen RPJMD juga memuat terkait prinsip pembangunan berkelanjutan. Memastikan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara berdasar pada prinsip pembangunan berkelanjutan, maka dalam dokumen RPJMD ini juga diintegrasikan terhadap KLHS RPJMD yang telah tervalidasikan. Dengan demikian, diharapkan isu strategis KLHS, komponen tujuan pembangunan berkelanjutan, serta rekomendasi yang telah dirumuskan dalam dokumen KLHS dapat terakomodir di dalam dokumen RPJMD.

Substansi dari ketetapan-ketetapan yang telah termuat dalam RPJMD akan menjadi acuan dasar bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam merumuskan kebijakan perencanaan strategis instansi daerah melalui rencana strategis perangkat daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, diperlukan berbagai rujukan regulasi yang menjadi dasar hukum penyusunan. Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 mengacu pada beberapa regulasi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

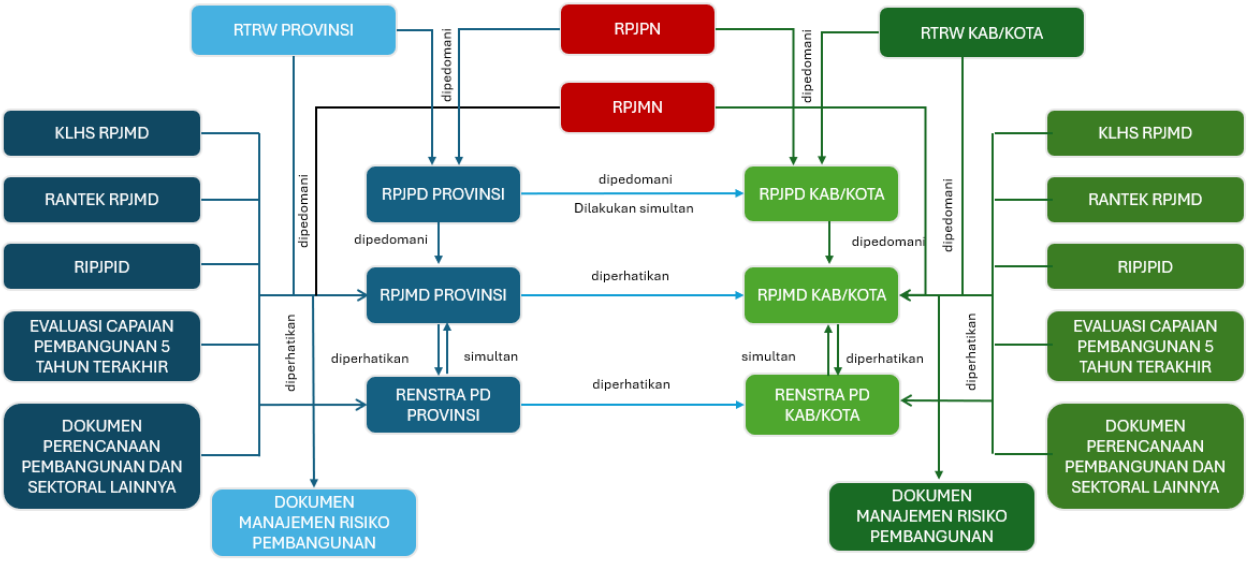
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 14).

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027.

1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Rangkaian proses penyusunan RPJMD dimulai dengan tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, rancangan akhir hingga penetapan peraturan daerah tentang RPJMD. Dalam proses penyusunan RPJMD keseluruhan, seluruh pendekatan perencanaan digunakan dan dipadukan di dalam dokumen. Selain pendekatan yang berorientasi proses, pendekatan perencanaan yang berorientasi substansi juga digunakan. Pendekatan ini berupa tematik-holistik, integratif, dan spasial yang menjadikan dokumen RPJMD harus memiliki keterkaitan kuat dengan rencana tata ruang wilayah. Hubungan RPJMD dengan seluruh dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025, diolah

Berdasarkan gambaran tersebut, hubungan antara RPJMD dengan berbagai dokumen perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1 Hubungan RPJMD dengan RPJPD

RPJMD sebagai penjabaran tahap perencanaan jangka panjang mulai mengacu pada substansi dokumen RPJPD . Substansi RPJPD yang ditelaah dan diacu antara lain isu-isu strategis jangka panjang, visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan periode pertama dan sasaran pokok. Telaah tersebut diharapkan mampu merumuskan isu strategis jangka menengah dalam rangka merespons isu jangka panjang, serta perumusan rekomendasi kebijakan sebagai bagian dari penjabaran arah kebijakan periode pertama pembangunan jangka panjang.

1.3.2 Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dengan RPJMN

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara berkesesuaian waktu dengan RPJMN. Kondisi ini merupakan modal penting untuk membangun sinergi antara pembangunan jangka menengah daerah dengan nasional. RPJMN tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari RPJPN yang memiliki tema periode berupa “perkuatan fondasi transformasi”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan jangka menengah daerah juga memiliki agenda besar berupa perkuatan fondasi transformasi daerah.

1.3.3 Hubungan RPJMD dengan RTRW

Sinkronisasi antara perencanaan makro dengan perencanaan tata ruang diperlukan dalam RPJMD karena perkembangan Provinsi Kalimantan Utara yang dinamis memberikan implikasi kebijakan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Utara. Penataan ruang Provinsi Kalimantan Utara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan berdaya saing melalui kegiatan pertanian, perikanan, perindustrian, dan energi yang berkelanjutan sebagai wilayah pintu gerbang internasional dengan tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.3.4 Hubungan RPJMD dengan KLHS

Dalam dokumen KLHS terdapat isu-isu strategis pembangunan yang kemudian akan menjadi salah satu landasan bagi perumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, seluruh rekomendasi pembangunan berkelanjutan dari KLHS akan menjadi landasan dan diintegrasikan ke dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program RPJMD. Hal tersebut menunjukkan bahwa integrasi

dokumen KLHS di dalam RPJMD untuk memastikan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) telah menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan.

1.3.5 Hubungan RPJMD dengan RKPD, Renstra, Renja, dan APBD

RPJMD harus membangun keterhubungan yang sinergis dengan perencanaan yang lebih operasional dan penganggaran tahunan. Keterhubungan ini membangun perencanaan yang sinergis mulai dari jangka panjang, menengah hingga tahunan dan penganggaran. Hal tersebut diharapkan dapat tercapainya pendekatan perencanaan dan penganggaran yang berupa *money follow program, program follow result*, serta penganggaran yang berbasis kinerja.

1.3.6 Hubungan RPJMD dengan Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2024-2028 (RPB)

Rencana penanggulangan bencana daerah (RPB) menjadi dokumen yang penting untuk diintegrasikan ke dalam dokumen pembangunan jangka menengah daerah di provinsi Kalimantan Utara. Hal tersebut dilatar belakangi dengan posisi geografis Provinsi Kalimantan Utara yang secara eksisisting memiliki potensi kebencanaan. Diakomodirnya substansial dokumen RPB ke dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap penanggulangan bencana secara taktis dan tepat sekaligus semakin menguatkan tingkat ketahanan daerah. Hasil identifikasi isu strategis terkait kebencanaan dalam dokumen RPB mencakup sebagai berikut:

1. Pengeloalan mitigasi bencana yang belum optimal;
2. Pembangunan pemukiman yang belum mempertimbangkan upaya pengurangan risiko bencana: Alih fungsi lahan, Pemukiman di sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan resapan air;
3. Kerusakan ekosistem diwilayah pesisir (mangrove, terumbu karang) dan pegunungan (Hutan) yang terus meningkat;
4. Sebagian besar masyarakat Kalimantan Utara bermukirn pada wilayah rawan bencana;
5. Perubahan iklim meningkatkan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologis;

6. Kesadaran masyarakat akan menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah yang belum maksimal.

Masing-masing isu strategis tersebut, direspon dalam tujuan dan sasaran yang disusun berdasarkan nilai budaya moral dan kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang baik dalam masyarakat Kalimantan Utara, dengan tetap memperhatikan nilai yang bersifat universal merupakan dasar yang diambil untuk membangun dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana. Prinsip ini terbentuk dari nilai komunitas yang dicita-citakan oleh masyarakat sebagai dasar karakter daerah. Selain itu, didalam dokumen RPB juga termuat strategi dan arah kebijakan dari setiap isu strategis yang telah dirumuskan, yang selanjutnya dapat diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD, sebagai respon atas permasalahan dan isu strategis, khususnya terkait penanggulangan kebencanaan di Provinsi Kalimantan Utara.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen yang menjadi acuan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam mengoperasionalisasikan visi, misi dan program unggulan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Selain itu, dokumen RPJMD juga memuat berbagai target pembangunan daerah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Penyusunan RPJMD juga dimaksudkan untuk menjamin keselarasan pembangunan daerah demi mencapai tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Mengoperasionalisasikan visi, misi, dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang sesuai dengan kaidah perencanaan;

2. Menjadi panduan bagi penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Utara;
3. Menjaga sinergitas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan pembangunan kabupaten/kota di dalamnya serta pembangunan nasional;
4. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) hingga tahun 2030.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 dilakukan dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Struktur Sistematika Penulisan RPJMD

Bab	Penjelasan
Bab I **Pendahuluan**	Bab I memuat tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen.
Bab II **Gambaran Umum Daerah**	Bab II memuat gambaran umum meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Bab ini juga turut memuat gambaran keuangan daerah serta permasalahan dan isu strategis daerah.
Bab III **Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**	Bab III memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD yang dilengkapi dengan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.
Bab IV **Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	Bab IV memuat daftar program perangkat daerah yang digunakan untuk mencapai kinerja pembangunan daerah disertai dengan indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah.

Bab	Penjelasan
Bab V **Penutup**	Bab V memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah (IKD).

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Provinsi Kalimantan Utara terletak di bagian utara Pulau Kalimantan dengan posisi antara 114º35'22" - 118º03'00" Bujur Timur dan antara 1º21'36" – 4º24'55" Lintang Utara. Provinsi ini secara geostrategis berada di perbatasan negara, sehingga memiliki posisi strategis dalam pertahanan dan keamanan negara. Provinsi ini juga berada di jalur pelayaran Alur Laut Kepulauan Indonesia (*Archipelagic Sea Lane Passage*) yang merupakan pintu keluar/outlet ke Asia Pasifik.

Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari wilayah pegunungan dan wilayah kepulauan. Pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Utara terletak di Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Jumlah pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Utara adalah 161 pulau dengan luas total mencapai 3.597 m^2. Pulau-pulau terbesar diantaranya yaitu Pulau Tarakan (249 m^2), Pulau Sebatik (245 m^2), Pulau Nunukan (233 m^2), dan Pulau Tanah Merah (352 m^2). Provinsi ini memiliki garis pantai sepanjang 3.955 km, yang meliputi 908 km (23%) garis pantai daratan, dan 3.047 Km (77%) garis pantai kepulauan.

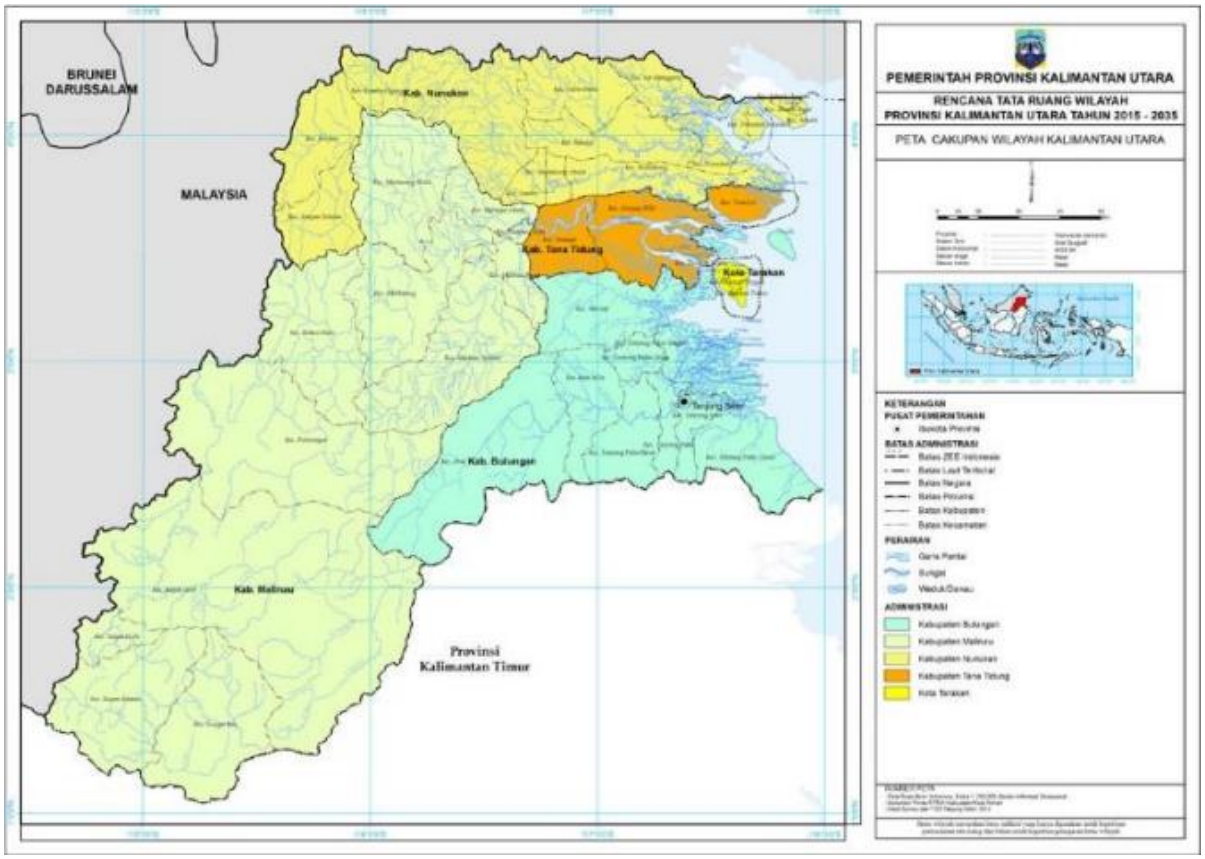
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah 70.101 km^2, dengan lautan yang memiliki luas 11.579 km^2 atau 13 persen dari luas wilayah total. Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan negara Malaysia pada negara bagian Sabah di sebelah utara dan Sarawak di sebelah barat. Sementara sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau, Kutai Timur dan Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur).

Tabel 2. 1 Ibukota, Luas, Jumlah Kecamatan, dan Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (km²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
Malinau	Malinau Kota	38.902	15	109
Bulungan	Tanjung Selor	13.880	10	81
Tana Tidung	Tideng Pale	3.504	5	32
Nunukan	Nunukan	13.564	21	240
Tarakan	Tarakan	251	4	20
Kalimantan Utara	Bulungan	70.101	55	482

Sumber: BPS Kalimantan Utara, 2025

Secara administrasi wilayah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 kabupaten/kota dengan luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Malinau 38.902 km^2, Kabupaten Bulungan 13.880 km^2, Kabupaten Tana Tidung 3.504 km^2, Kabupaten Nunukan 13.564 km^2, dan Kota Tarakan 251 km^2. Selain itu, terdapat 196 pulau yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, yang sekitar 58,67 persen pulau diantaranya terdapat di Kabupaten Bulungan.



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kalimantan Utara

Sumber: Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2023-2042

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam suatu daerah sangat bergantung pada kondisi geografis, dan iklim wilayahnya. Sumber daya alam tersebut, selanjutnya menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, dan lebih lanjut lagi mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Namun demikian, dalam mengelola pemanfaatannya, tetap harus memperhatikan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan, dengan harapan ketahanan ekologi tetap terjaga dan perekonomian dapat berjalan.

Posisi geografis dan kondisi iklim menjadikan ketersediaan sumber daya alam yang beragam di Provinsi Kalimantan Utara. Keberagaman tersebut mencakup sumber daya alam hayati dan non hayati, potensi sumber daya kelautan dan kepesisiran, serta pariwisata berbasis alam. Berikut disajikan terkait potensi sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara.

2.1.2.1 Hutan

Kalimantan Utara memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 6631/MenLHK-PKTL/KUH/PIA.2/10/ 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara, luas kawasan hutan yaitu sekitar 5.657.120,14 ha. Luasnya kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan potensi yang sangat besar bagi pemerintah Kalimantan Utara dalam pengelolaan hutan.

Tabel 2. 2 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan						
		Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi dapat dikonversi	Areal Penggunaan Lain	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	Malinau	696.642,58	988.017,02	1.545.892,31	375.548,72	30.174,11	324.691,48	3.636.274,74
2	Bulungan	205.594,03	-	465.097,91	272.791,71	5.596,71	429.203,18	949.080,36
3	Tana Tidung	-	-	9.084,28	153.005,90	9.678,05	169.530,96	171.768,23
4	Nunukan	150.459,78	284.073,98	169.713,70	274.082,76	14.598,87	461.421,55	892.929,09
5	Tarakan	7.067,72	-	-	-	-	17.282,89	7.067,72
Provinsi Kalimantan Utara		**1.059.764,11**	**1.272.092,00**	**2.189.788,20**	**1.075.429,09**	**60.047,74**	**1.402.131,06**	**5.657.120,14**

Sumber: RPJPD Kalimantan Utara 2025-2045

Pemerintah menetapkan HL, HK, HP, dan HPT sebagai hutan tetap yang hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan kehutanan atau lewat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). HPK dan Area Penggunaan Lain (APL) dapat dicadangkan untuk kegiatan pemanfaatan lain, misalnya pertanian dan perkebunan yang kewenangan pelepasan kawasan ada di menteri untuk HPK dan bupati untuk APL. Hal tersebut terkait dengan rencana pengelolaan kawasan perbatasan, pengelolaan kawasan lindung, dan pengelolaan kawasan budidaya yang termasuk ke dalam ruang lingkup program-program kegiatan *Heart of Borneo* (*HoB)* atau Kawasan Jantung Borneo.

Kabupaten Malinau merupakan kabupaten terluas baik dilihat dari wilayah maupun kawasan hutan. Hutan Produksi Terbatas merupakan kawasan hutan yang paling luas di antara bentuk kawasan hutan lainnya yaitu 1.545.892,31 ha. Wilayah dengan kawasan hutan paling kecil yaitu Kota Tarakan dengan hutan lindung seluas 7.067,72 ha. Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang dimaksud merupakan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 1.272.092,00 ha yang terdapat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Kawasan konservasi tersebut merupakan wilayah pemangkuan pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Dominasi wilayah hutan di Provinsi Kalimantan Utara, menjadikan hutan memiliki banyak potensi dan fungsi secara ekonomis melalui hasil hutan dan ekologis melalui jasa ekosistem. Secara ekonomis, hasil pemanfaatan hutan di Provinsi Kalimantan Utara dapat berupa produksi hutan kayu dan non kayu. Produksi hasil hutan kayu menunjukkan adanya jumlah yang fluktuatif dengan tren yang menurun. Berdasarkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (2024), pada tahun 2024, terdapat 7 perizinan berusaha pengelolaan hasil hutan (PBPHH) yang aktif dari 31 PBPHH yang tersedia. Sedangkan, produksi hutan non kayu dapat berupa stok cadangan karbon, jasa ekosistem, dan produk kehutanan berupa tanaman obat, madu, ekstrak tanaman dan lain-lain yang secara keseluruhan belum dapat diidentifikasi secara kuantitatif. Hasil non kayu terus dikembangkan guna mengurangi pemanfaatan hasil kayu mengingat besarnya potensi hutan Kalimantan Utara yang sangat luas untuk menghasilkan karbon sebagai penyerap CO_2 dan dapat menstabilkan iklim dunia. Hal ini diharapkan dapat selaras dengan upaya dan peran sektor kehutanan di Indonesia dalam menghadapi perkembangan tantangan

kehutanan dan dampak perubahan iklim. Hal ini juga selaras dengan prinsip multi usaha kehutanan yang meliputi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan.

Tabel 2. 3 Hasil Hutan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024

Keterangan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi hasil hutan non kayu	-	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	
Produksi hasil hutan kayu	m3	1.375.690,56	1.484.807,43	1.453.642,67	1.636.055,00	1.546.911,62
Produksi kayu bulat	m3	1.294.479,12	1.369.565,00	1.341.107,60	1.516.176,41	1.426.411,52
Produksi kayu olahan	m3	81.211,44	115.242,43	112.535,07	119.878,59	120.500,10

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam Sidara Cantik, 2025

Kemudian secara ekologis, hutan provinsi turut memiliki kontribusi terhadap lingkungan melalui jasa lingkungan dan wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Potensi jasa lingkungan tersebut meliputi penyerap dan penyimpan karbon, penyedia pangan, penyedia air, pengatur air, pengatur iklim, mitigasi bencana banjir, mitigasi bencana longsor, dan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Kontribusi jasa lingkungan dan wisata pada Provinsi Kalimantan Utara dapat dirincikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 4 Luas Jasa Lingkungan berdasarkan Status Jasa di Provinsi Kalimantan Utara

Jasa Lingkungan	Luas Status Jasa Lingkungan (Ha)				
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Penyediaan pangan	156.444	4.409.511	2.199.845	225.795	3.126
Penyediaan air	13.820	2.410.609	3.274.129	895.208	400.954
Pengatur pemurnian air	3.986.374	1.709.005	540.191	723.686	35.466
Pengatur iklim	4.921.367	1.476.279	222.609	353.060	21.405
Mitigasi bencana banjir	5.391.297	1.164.455	324.638	97.488	16.844
Mitigasi bencana longsor	5.440.652	716.859	513.971	310.410	12.828
Mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan	3.953.559	2.132.002	692.890	185.839	30.432

Sumber: Dokumen Renja Folu NetSink Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 2. 5 Jasa Wisata hutan di Provinsi Kalimantan Utara

A. KPPP 2 Bebatu dan sekitarnya Tema: Wisata Minat Khusus					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
1.	-	-	1.	Bekantan Mangrove Desa Sengkong	Kecamatan Sesayap Hilir
B. KPPP 3 Binusan dan sekitarnya Tema: Wisata Alam					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
1.	Kebun Raya dan Air Terjun Binusan	Kecamatan Nunukan	1.	Hutan Mangrove Belaga One	Kecamatan Nunukan Selatan
			2	Hutan Mangrove Sei Fatimah	Kecamatan Nunukan
C. KSPP 1 Tanjung Selor dan sekitarnya Tema: Wisata Budaya dan Wisata Sungai					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
1.	-	-	4.	Mangrove Ardimulyo Kecamatan Tanjung Palas Utara	
D. KSPP 2 Gunung Rian dan sekitarnya Tema: Wisata Alam dan Budaya					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi

1.	-	-	1.	Hutan Mangrove Tideng Pale Timur	Kecamatan Sesayap
			2.	Ekowisata Kujau	Kecamatan Betayau
			3.	RTH Joesoef Abdullah	Kecamatan Sesayap
			4.	Hutan Pinus	Kecamatan Sesayap

E. KSPP 4 Long Bawan dan sekitarnya

Tema: Wisata Alam

DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
1.	Bukit Yuvai Semaring	Kecamatan Krayan	1.	-	-

F. KSPP 6 Setulang-Pulau Sapi dan sekitarnya

Tema: Wisata Budaya dan Alam

DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
1.	Hutan Adat Tane Olen	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	1.	-	-

Sumber: Dokumen Ripparda Provinsi Kalimantan Utara

Pemanfaatan sumber daya hutan pada hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi diharapkan dapat dirasakan bagi masyarakat dalam maupun sekitar kawasan hutan. Pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung, legalitas pemanfaatan akses oleh masyarakat setempat dapat didorong dengan percepatan legalitas Perhutanan Sosial. Pengelolaan Perhutanan Sosial, sebagai Program Prioritas Nasional, dilakukan dalam skema kelola kawasan, kelola lembaga, dan kelola sosial ekonomi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari. Kinerja kelola kawasan ditunjukkan dengan areal indikatif Persetujuan Perhutanan Sosial baru mencapai luasan 162.185 ha dari luasan PS Kalimantan Utara yaitu 522.418 Ha. Kinerja kelola lembaga ditunjukkan oleh masih terdapat 7 KTH yang belum diberikan

akses legal dari total 97 KTH yang teregistrasi. Kelola sosial ekonomi masyarakat ditunjukkan dengan kurangnya sarana prasarana peningkatan ekonomi produktif masyarakat serta kurangnya pendampingan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pemanfaatan hutan sesuai peraturan yang berlaku menjadi hambatan utama bagi masyarakat tersebut untuk dapat mengelola hasil sumber daya hutan secara optimal.

2.1.2.2 Kelautan dan Perikanan

Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Utara merupakan laut sehingga mempunyai sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpahnya. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sementara ini masih didominasi dengan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap dan budidaya setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Pendapatan dari sektor perikanan di Provinsi Kalimantan Utara cukup besar karena hasil produksi perikanan seperti kepiting, udang, dan ikan diekspor keluar negeri. Provinsi Kalimantan Utara dikenal sebagai salah satu daerah penghasil udang organik yang menjadi komoditas ekspor penting di Indonesia.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki wilayah pesisir yang panjang, dengan panjang garis pantai mencapai 3.995 km. Panjang garis pantai tersebut kurang lebih 0,5% dari panjang garis pantai Indonesia, yaitu sepanjang 81.000 km. Selain memiliki pesisir yang cukup panjang, Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki wilayah perairan laut dengan potensi sumber daya perikanan yang cukup besar. Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara berhadapan langsung dengan WPP 716 (Wilayah Pengelolaan Perikanan). Kawasan WPP 716 mempunyai potensi lestari sebesar 476.432,00 ton/tahun dan Provinsi Kalimantan Utara sementara ini baru dapat memanfaatkan sekitar 6% saja. Potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah utama yang menjadi hambatan peningkatan produksi perikanan laut adalah armada perikanan tangkap masih sangat terbatas (mayoritas berukuran <10 GT) dan pada tahun 2023 hanya ada satu kapal ikan dengan tonase 30 GT. Hal ini disebabkan belum adanya pelabuhan perikanan yang memadai, karena saat ini hanya ada pelabuhan perikanan

pantai (PPP) sehingga tidak layak untuk pendaratan kapal ikan dengan tonase >30 GT. Sedangkan armada yang berukuran <10 GT hanya mampu menjangkau perairan laut tidak lebih dari 4 mil laut, sehingga potensi perikanan yang besar belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Selain perikanan tangkap laut, juga memiliki perairan umum (perikanan tangkap di perairan umum), yaitu sungai dan danau yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menangkap ikan. Namun demikian, hasil tangkapan dari perairan umum memang tidak sebesar hasil perikanan tangkap laut. Meskipun demikian, perairan umum masih potensial untuk dikembangkan secara proporsional, sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi perikanan terutama perikanan tangkap.

Tabel 2. 6 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Perikanan Tangkap Laut		Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan		Perikanan Budidaya	
	Volume (Ton)	Nilai (Juta Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Juta Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Juta Rp)
2020	25.230,04	775.771,13	574,3	21.892	536.897,93	1.890.136,36
2021	33.151,95	890.698,08	546,59	20.558,44	642.010,36	2.052.148,37
2022	29.709,68	807.578,65	587,3	24.032,75	803.336,59	3.236.732,17
2023	31.789,24	1.030.027,85	745,87	31.156,96	981.131,02	2.874.364,32
2024	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2025

Produksi perikanan budidaya terbesar pada tahun 2021 adalah produksi rumput laut yang mencapai 627.876 ton dan total nilai produksi perikanan budidaya mencapai Rp1.034.678.500,00. Produksi rumput laut berada di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Produksi rumput laut di Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 mencapai 416.230 ton dengan nilai produksi Rp531.607.783,00 dan produksi rumput laut di Kota Tarakan mencapai 211.646 ton dengan nilai produksi Rp503.070.717,00. Namun demikian, rumput laut yang dihasilkan belum menciptakan nilai tambah dan peluang kerja baru akibat belum adanya industri pengolahannya meskipun kuantitas produksi cukup besar dan tersedia secara kontinyu. Belum adanya industri terkait pengolahan rumput laut tersebut diantaranya disebabkan karena pasokan air bersih dan listrik masih terbatas serta adanya isu lingkungan akibat penggunaan botol plastik untuk pelampung dalam budidaya rumput laut.

Produksi perikanan budidaya secara umum didominasi oleh Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Produksi perikanan budidaya di Kalimantan Utara masih didominasi oleh komoditas rumput laut (Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan), udang dan ikan bandeng yang tersebar di Kabupaten Nunukan, Tana Tidung, Bulungan dan Kota Tarakan. Sedang jenis komoditas yang lain, seperti ikan karper, patin, lele, nila dan sebagainya masih dalam jumlah yang relatif kecil. Permasalahan utama dalam pengembangan perikanan budidaya di Provinsi Kalimantan adalah seperti keterbatasan bibit baik untuk bibit rumput laut, ikan, maupun benur udang. Sedangkan, untuk budidaya ikan dan udang masalah lainnya ada pakan ikan/udang dan status lahan budidaya khususnya untuk tambak yang mayoritas berada pada kawasan hutan, baik HK (hutan produksi), APL (area penggunaan Lain), maupun HPK (Hutan Produksi Konversi).

2.1.2.3 Pesisir

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, garis pantai dan wilayah laut 12 mil dengan panjang garis pantai 3.519,19 km dan batas wilayah laut 12 mil dengan luas 7.316,43 km^2 atau setara dengan 731.642,77 ha. Area tambak dengan luas 116.465,37 Ha. Area tambak di Provinsi Kalimantan Utara tersebar di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. Adapun untuk Kabupaten Malinau tidak memiliki luasan tambak di wilayah pesisir. Luasan area tambak terluas di Provinsi Kalimantan Utara berada di Kabupaten Nunukan yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 7 Area Tambak di wilayah pesisir pada setiap Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara

No.	Kabupaten/Kota	Luas Tambak (Ha)
1	Tarakan	599,97
2	Bulungan	66.619
3	Nunukan	12.285,40
4	Tana Tidung	36.961
Provinsi Kalimantan Utara		116.465,37

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Kawasan pesisir di Provinsi Kalimantan Utara area dengan luasan tambak sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah merupakan kawasan penyumbang produksi perikanan yang cukup besar. Produksi perikanan budidaya khususnya ikan

bandeng dan udang yang dibudidayakan di kawasan pesisir mencapai 14.372,33 ton pada tahun 2023.



Gambar 2. 2 Produksi Ikan dan Udang di Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2025

Berdasarkan data dari BPS, menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya di Provinsi Kalimantan Utara sebagian besar merupakan hasil budidaya di tambak (kawasan pesisir) yaitu mencapai 96-99% dari total produksi ikan/udang budidaya atau 32-34% dari total produksi ikan/udang diluar dari rumput laut. Dengan demikian kawasan pesisir dapat dikatakan sebagai kawasan utama atau tulang punggung dalam produksi perikanan budidaya khususnya ikan bersirip dan udang. Namun demikian, produktivitas budidaya ikan/udang di tambak di Provinsi Kalimantan Utara masih rendah (rata-rata 95,84 kg/ha/tahun). Peningkatan produktivitas tambak di Provinsi Kalimantan Utara akan dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir, mengingat hasil produksinya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan sudah dikenal di pasar internasional sebagai produk udang organik.

2.1.2.4 Pertanian

Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan luas lahan pertanian yang cukup besar. Ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penunjang dalam mengembangkan pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian merupakan salah satu

sektor yang mempunyai peran vital dalam ekonomi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Atas dasar tersebut, kegiatan pertanian di provinsi ini harus didorong untuk berkembang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep pengembangan dan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumber daya alam daerah secara berkelanjutan, yaitu dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang.

Dalam pembangunan pertanian sebagai pilar ekonomi masyarakat, maka harus memperhatikan atau menetapkan komoditas unggulan yang ramah lingkungan dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pertanian tanaman pangan yang potensial untuk dikembangkan meliputi padi dan palawija (jagung, kacang-kacangan), ubi-ubian, dan hortikultura (sayuran dan buah-buahan). Beras merupakan bahan makanan pokok masyarakat, sehingga untuk dapat mencukupi kebutuhan beras secara aman, maka tanaman padi mendapat skala prioritas dalam pengembangan dan peningkatan produksi untuk dapat mengimbangi pertambahan penduduk agar tidak terjadi bahaya kelaparan. Namun demikian, Provinsi Kalimantan Utara) sampai saat ini belum mampu swasembada beras dan masih harus mendatangkan beras dari luar wilayah terutama dari Pulau Jawa untuk mencukupi kebutuhan beras penduduk.

Tabel 2. 8 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Komponen	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Kalimantan Utara	Luas Panen Padi (Ha)	9.883,00	8.881,00	8.604,00	6.500,00	8.282,00
	Produksi Padi (Ton)	33.574,00	29.967,00	30.533,00	23.602,00	30.080,00
	Produktivitas (Ton/Ha)	3,4	3,37	3,55	3,63	3,63

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2025

Luas panen padi hingga tahun 2024 sebesar 8.282,00 hektar. Adapun Produktivitas padi hingga 2024 mencapai 3,63 Ton/Ha dengan produksi padi sebesar 30.080 ton. Kualitas produksi padi ini adalah kualitas produksi gabah kering giling.

2.1.2.5 Pertambangan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi yang baik dalam bidang pertambangan, menurut nilai bruto hasil tambang, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini tentunya akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan. Kalimantan utara juga memiliki lahan yang cukup luas, yang dapat dilakukannya kegiatan pertambangan.

Tabel 2. 9 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Utara (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertambangan minyak, gas dan panas bumi	3.132,38	3.396,76	4.222,09	3.842,24	3.481,03
2	Pertambangan batubara dan lignit	16.369,45	20.174,15	38.752,99	238.985,20	30.668,72
3	Pertambangan bijih logam	1.799,49	2.057,67	2.300,66	2.231,18	2.139,53
4	Pertambangan dan penggalian lainnya	4.270,31	4.769,18	4.924,66	5.279,19	5.874,81
Pertambangan dan Penggalian		**25.571,63**	**30.397,76**	**50.200,40**	**250.337,81**	**42.164,09**

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2025

Aktivitas pertambangan yang dilakukan antara lain pertambangan minyak gas dan panas bumi, pertambangan batu bara dan lignit, pertambangan biji logam, pertambangan dan penggalian lainnya. Potensi terbesar berada pada lapangan usaha untuk pertambangan batu bara dan lignit. Produksi komoditas pertambangan batu bara mengalami tren kenaikan pada tahun 2020 hingga 2024.

2.1.2.6 Energi

Energi memiliki peran penting dan strategis dalam mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Kenaikan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi juga berimplikasi pada peningkatan kebutuhan energi sehingga pentingnya pengelolaan energi yang optimal dan efisien secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.

Pada skala nasional, kondisi ketersediaan energi digambarkan dalam indeks ketahanan energi yang diukur melalui indikator 4A yaitu: *availability* (ketersediaan secara fisik), *accessibility* (kemudahan dalam mendapatkannya), *affordability* (keterjangkauan terhadap harganya), dan *acceptability* (bagaimana kualitas yang

dapat diterima) yang juga secara umum digambarkan melalui elemen bauran energi serta keberlanjutan sistem penyediaan-permintaan energi yang ada. Pada tahun 2024, indeks ketahanan energi nasional sesuai dengan aspek penilaian dapat ditunjukkan sebagaimana berikut.

Tabel 2. 10 Indeks Ketahanan Energi Nasional tahun 2020-2024

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks	**69,10**	**79,83**	**78,58**	**88,99**	**80,96**

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian ESDM, 2023

Tabel 2. 11 Penilaian Indeks Ketahanan Daerah per Aspek

Aspek	Ketersediaan	Aksesibilitas	Pengembangan Teknologi dan Efisiensi (Keterjangakauan)	Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial (Penerimaan)
Bobot (persen)	40,65	26,12	19,1	14,13
Parameter	• Diversifikasi energi • Potensi energi baru dan terbarukan	• Kehandalan infrastruktur BBM • Kehandalan infrastruktur Gas • Kehandalan infrastruktur LPG Kehandalan infrastruktur listrik • Optimalisasi pemanfaatan batu bara • Penyiapan infrastruktur EBT	• Efiesiensi penggunaan energi • Produktivitas energi sektoral • Harga BBM • Tarif listrik • Harga LPG	• Emisi Gas Rumah Kaca

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian ESDM

Kondisi penyediaan energi di Provinsi Kalimantan Utara dapat digambarkan melalui kondisi kelistrikan dan kondisi potensi air dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara. Berikut adalah data energi listrik dan air yang tersedia:

1. **Listrik**

Listrik merupakan barang kebutuhan utama manusia yang berbahan dasar dari barang tambang. Aktivitas manusia sangat bergantung pada ketersediaan listrik, khususnya di zaman serba modern ini. Biasanya pembangkit listrik menggunakan energi alternatif seperti angin, air dan cahaya matahari. Namun, ada pula barang tambang yang berfungsi sebagai pembangkit listrik, yaitu batu bara.

Ketersediaan tenaga listrik akan memicu tumbuhnya industri turunan dan pendukung dari industri pengolahan mineral. Misalnya nikel, akan memicu industri baja tahan karat (*stainless steel*) dan industri pendukungnya seperti industri gas, industri pengolahan air, industri listrik dan industri konstruksi lainnya. Efek berantai akan membuat konsumsi dalam wilayah tersebut meningkat sehingga rencana investasi lainnya akan lebih *feasible*. Efek berantai ini akan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB).

Tabel 2. 12 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Nama Data	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (PLN) Menurut Kabupaten / Kota	KK	157.776	168.936	182.069	210.791,00	234.896,00
Bulungan	KK	33.462	36.283	41.151	47.642,00	51.333,00
Malinau	KK	14.575	16.268	17.210	19.410,00	21.546,00
Nunukan	KK	37.758	42.377	45.581	60.267,00	72.252,00
Tana Tidung	KK	5.129	5.778	6.342	7.238,00	8.395,00
Tarakan	KK	66.852	68.230	71.785	76.234,00	81.370,00

Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2025

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Kota Tarakan memiliki jumlah pelanggan listrik terbesar di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu 34,64 persen dari total jumlah pelanggan di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan memiliki jumlah pelanggan listrik terbesar kedua, yaitu sebesar 30,75 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bulungan yang memiliki jumlah pelanggan listrik sebesar 21,85 persen.

2. Air

Di Provinsi Kalimantan Utara, air menjadi bagian dari kekayaan alam dan sebagai sumber mata pencaharian yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Air memiliki banyak manfaat atau kegunaan bagi kelangsungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan dan tentunya semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini.

Energi air adalah satu dari lima sumber terbesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Berbeda dengan sumber energi terbarukan lainnya air akan terus menghasilkan tenaga non-stop dan ketersediaannya terus dihasilkan oleh adanya siklus hidrologi. PLTMH (Pembangkit listrik tenaga mikro hidro) di Desa Long

Berini, Kecamatan Bahan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dengan kapasitas 26 kW menjadi salah satu contoh diversikasi pemanfaatan sumber daya air menjadi energi baru terbarukan sekaligus sebagai energi alternatif pendukung dalam pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Kalimantan Utara.

2.1.2.7 Pariwisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi perekonomian wilayah. Eksistensinya mampu menjadi generator sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan penyedia akomodasi. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sektor pariwisata turut berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian wilayah adalah melalui besar jumlah kunjungan maupun jumlah wisatawan, serta kontribusinya terhadap PDRB. Masing-masing kabupaten/kota memiliki obyek wisata andalan dan yang potensial berkembang di masa depan. Berikut merupakan tabel perwilayahan destinasi pariwisata, kawasan pengembangan pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Tabel 2. 13 Perwilayahan Pariwisata di Provinsi Kalimantan Utara

DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP)		KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP)		KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	
DPP 1	Bulungan, Tana Tidung, dan Tarakan	KPPP 1	Pantai Tana Kuning dan sekitarnya	KSPP 1	Tanjung Selor dan sekitarnya
DPP 2	Nunukan dan Malinau	KPPP 2	Bebatu dan sekitarnya;	KSPP 2	Gunung Rian dan sekitarnya;
		KPPP 3	Binusan dan sekitarnya;	KSPP 3	Kota Tarakan dan sekitarnya;
		KPPP 4	Sei Menggaris dan sekitarnya;	KSPP 4	Pulau Sebatik dan sekitarnya;
		KPPP 5	Lumbis Pansiangan dan sekitarnya;dan	KSPP 5	Long Bawan dan sekitarnya; dan
		KPPP 6	Long Alango-Long Pujungan dan sekitarnya;	KSPP 6	Setulang-Pulau Sapi dan sekitarnya

Sumber: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Utara

Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan. Kondisi tersebut didorong dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara yang juga mengalami kenaikan hingga tahun 2024. Kunjungan wisatawan di Provinsi Kalimantan Utara dipengaruhi oleh pengembangan daya tarik destinasi, promosi pariwisata, kualitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif secara berkesinambungan.Peningkatan kunjungan wisatawan sangat penting untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata.

Tabel 2. 14 Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Wisatawan Mancanegara (Wisman)	263.443	408.371	592.888	520.906	988.946
Wisatawan Nusantara (Wisnus)	255.516	401.668	570.619	493.257	962.342
Jumlah Kunjungan Wisatawan	**7.927**	**6.703**	**22.269**	**27.649**	**26.604**

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan adalah batas teratas dari pertumbuhan suatu populasi saat jumlah populasi tidak dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya dan lingkungan yang ada. Daya dukung lingkungan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan hasil atau produk di suatu daerah dari sumber daya alam yang terbatas dengan mempertahankan jumlah dan kualitas sumber dayanya. Sesuai dengan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa daya dukung lingkungan tidak hanya diukur dari kemampuan lingkungan dan sumber daya alam dalam mendukung kehidupan manusia, tetapi juga dari kemampuan menerima beban pencemaran dan bangunan. Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua komponen yaitu kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*). Kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) adalah kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Adapun kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*) adalah kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan di dalamnya.

Berdasarkan UU 32/2009, *supportive capacity* merupakan daya dukung lingkungan hidup.

2.1.3.1 Penyediaan Air

Analisis ambang batas dan status DDLH penyedia air secara kuantitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: perhitungan ketersediaan air, perhitungan kebutuhan air untuk lahan dan domestik, perhitungan ambang batas penduduk, serta penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid. Daya dukung dan daya tampung air di Provinsi Kalimantan Utara merupakan agregasi nilai DDDTLH seluruh grid-grid pada wilayah yang telah dikaji jasa ekosistemnya/jasa lingkungannya, dan teridentifikasi bahwa untuk daya dukung dan daya tampung penyedia air "Belum Terlampaui".

Tabel 2. 15 Status Daya Dukung Penyediaan Air Provinsi Kalimantan Utara

Ketersediaan (m^3/tahun)	Kebutuhan Air Total (m^3/tahun)	Indikasi Status	Belum Terlampaui		Terlampaui	
			(ha)	(%)	(ha)	%
91.170.199.901,80	**5.024.576.396,36**	**Belum Terlampaui**	**6.839.654,86**	**97,6**	**170.463,14**	**2,4**

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029

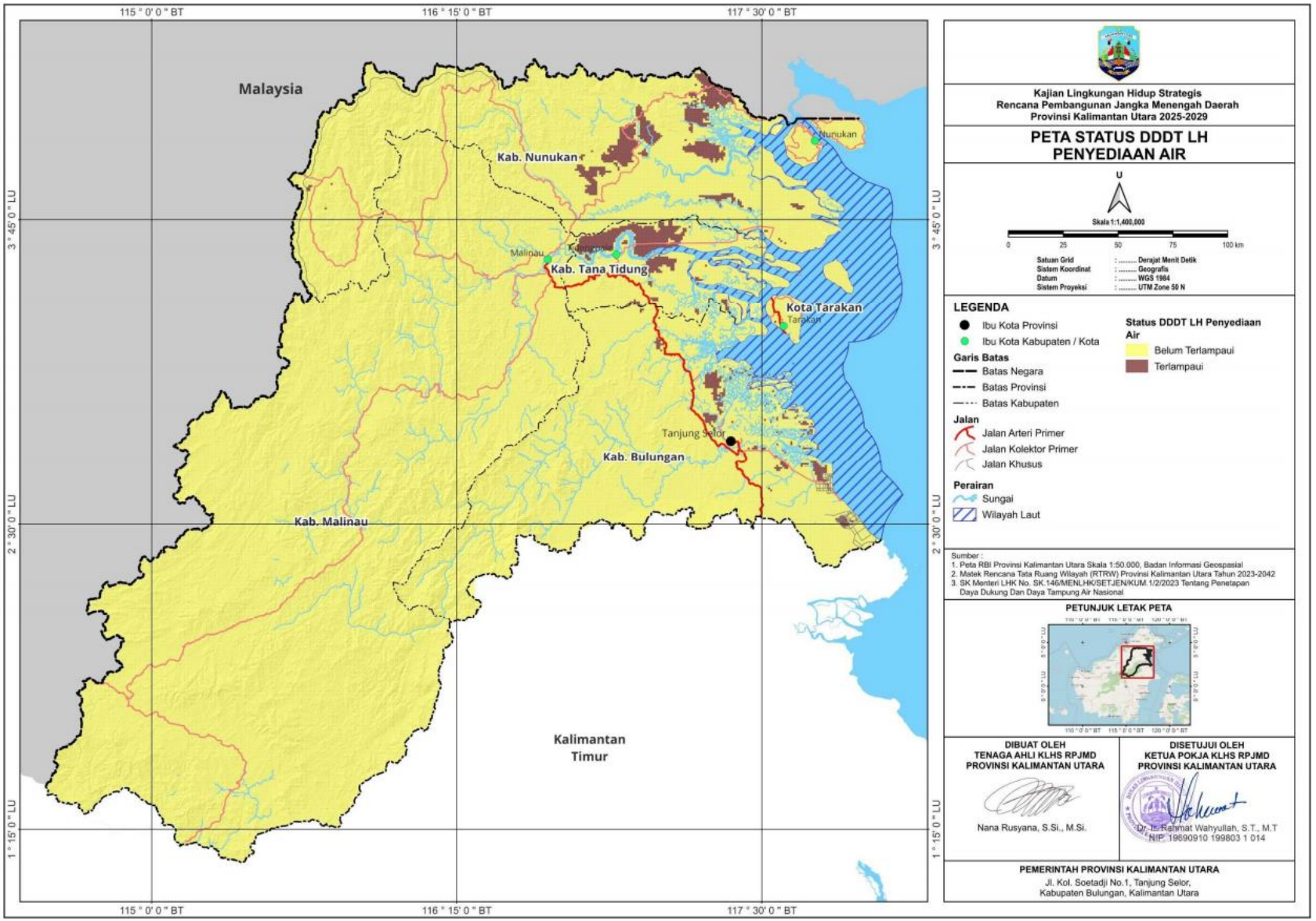
Berdasarkan Lampiran I Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2023 Tanggal 17 Februari 2023 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, Provinsi Kalimantan Utara berada pada indikasi status belum terlampaui. Adapun luas areal yang status penyediaan airnya sudah terlampaui terhitung seluas 20.416,95 ha atau hanya sebesar 0,29% dari total luas wilayah provinsi.

Tabel 2. 16 Status Daya Dukung Daya Penyediaan Air Provinsi Kalimantan Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Menurut Status (Ha)		Luas (Ha)
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
1	Bulungan	1.256.705	31.505	1.288.210
2	Malinau	3.954.814	1.132	3.955.946
3	Nunukan	1.347.571	96.102	1.443.673
4	Tana Tidung	255.342	42.207	297.549
5	Kota Tarakan	24.655	86	24.741
Luas Total		6.760.475	249.643	7.010.118
Persentase (%)		**97,6**	**2,4**	

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029

Hasil analisis spasial dengan penutupan lahan tahun 2021, luas penyedia air yang terlampaui bertambah menjadi 249.643 ha atau sebesar 3,56%. Sedangkan luas penyedia air yang belum terlampaui yaitu 6.760.475 ha atau sebesar 96,44%. Daerah dengan luas penyedia air belum terlampaui yang paling besar terdapat di Kabupaten Malinau. Berikut disajikan distribusi dari status daya dukung daya tampung penyedia air di Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 2. 3 Status Daya dukung daya tampung penyedia air Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara

2.1.3.2 Penyediaan Pangan

Penentuan status DDLH indikatif jasa lingkungan penyedia pangan dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk. Ambang batas penduduk adalah jumlah penduduk maksimal yang dapat dilayani oleh ketersediaan jasa lingkungan, dan status DDLH indikatif dapat diketahui dengan membandingkan antara ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk pada waktu tertentu.

Perhitungan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem. Perhitungan DDLH penyedia pangan dilakukan pada peta dengan resolusi 30”x30” (±0.9 km x 0.9 km) dalam bentuk grid, sehingga pada setiap luasan area tersebut, dapat diketahui jumlah kebutuhan pangan, ketersediaan pangan, ambang batas penduduk, dan status DDLH-nya.

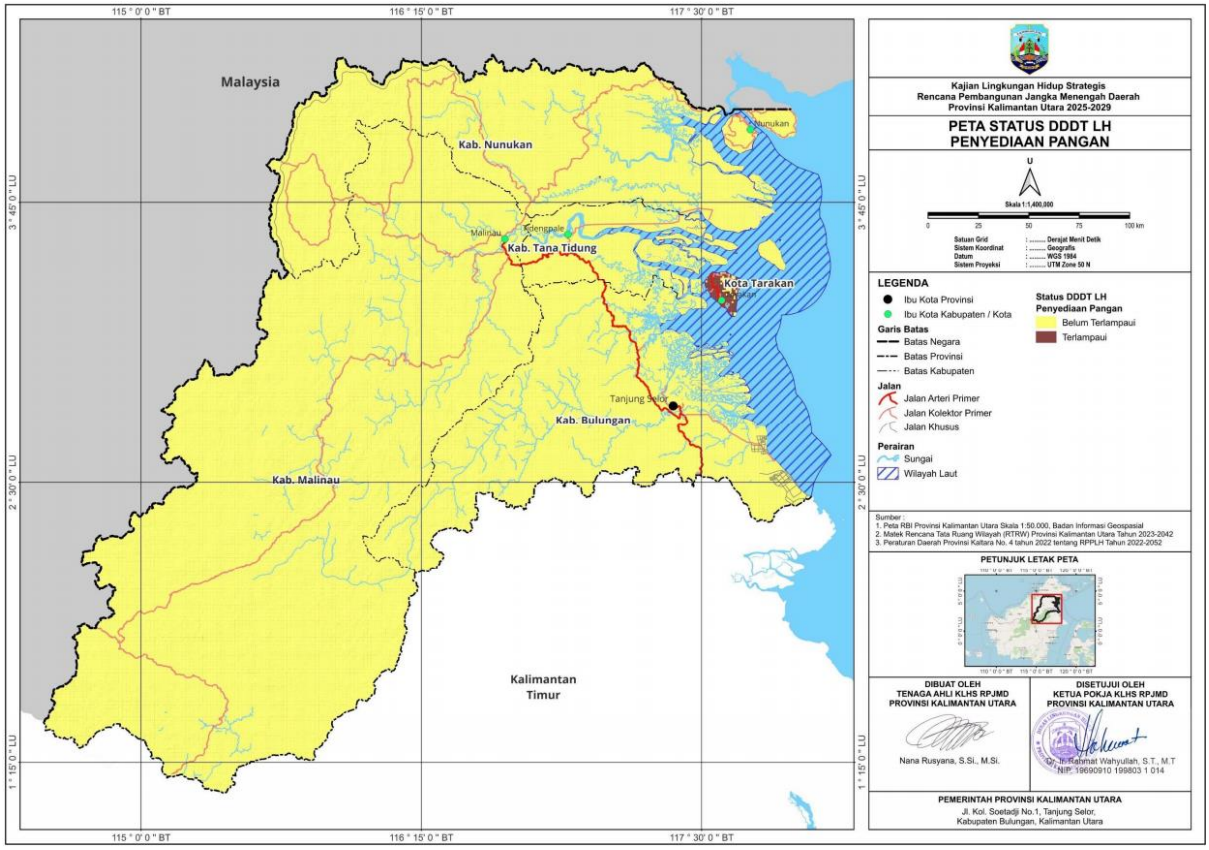
Ambang batas penduduk diperoleh melalui pembagian ketersediaan bahan pangan atau energi pangan dengan kebutuhan energi pangan per kapita. Hasil perhitungan DDDTLH penyedia pangan menunjukkan bahwa jika nilai Daya Dukung Daya Tampung pada grid ke-I bernilai positif, maka menunjukkan bahwa Daya Dukung Daya Tampung pada grid yang dihitung masih mampu mendukung kebutuhan pangan pada wilayah grid tersebut. Namun, jika nilai Daya Dukung Daya Tampung pada grid ke-I bernilai negatif, maka daya dukung dan daya tampung penyedia pangan pada wilayah grid telah melampaui ambang batasnya. Daya dukung dan daya tampung penyedia pangan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan agregasi nilai DDDTLH seluruh grid-grid pada wilayah yang telah dikaji jasa ekosistemnya/jasa lingkungannya, dan teridentifikasi bahwa untuk daya dukung dan daya tampung penyedia pangan “Belum Terlampaui”.

Tabel 2. 17 Status Daya Dukung Daya Penyediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Menurut Status (Ha)		Luas (Ha)
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
1	Bulungan	1.370.995	-	1.370.995
2	Kota Tarakan	4.765	19.718	24.483
3	Malinau	3.902.853	-	3.902.853
4	Nunukan	1.421.956	647	1.422.602
5	Tana Tidung	289.186	-	289.186
Luas Total		**6.989.753**	**20.364**	**7.010.118**
Persentase (%)		**99,71**	**0,29**	

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2030

Status daya dukung penyediaan pangan di Kota Tarakan sebagian besar sudah terlampaui. Namun secara keseluruhan, pada tahun 2021 hanya 0,29% dari wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang daya dukung penyediaan pangannya sudah terlampaui dan lokasinya sebagian besar berada di Kota Tarakan seluas 19.718 ha dan di Kabupaten Tana Tidung seluas 647 ha. Berikut disajikan distribusi dari status daya dukung daya tampung penyedia pangan di Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 2. 4 Status daya dukung daya tampung penyedia air di Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks ketahanan pangan yang

mengacu pada definisi ketahanan pangan dan sub sistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

Indeks ketahanan pangan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan intervensi dan lokus program penguatan ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat kabupaten/kota. Sembilan Indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Pilar pertama yaitu ketersediaan yang perlu dipenuhi adalah ketersediaan pangan domestik, cadangan pangan, dan kegiatan ekspor-impor terkait pangan. Pada pilar kedua yaitu keterjangkauan, indikator yang perlu dipenuhi yaitu terkait distribusi, stabilitas harga, distribusi logistik, daya beli masyarakat, dan manajemen stok. Terakhir yaitu pilar pemanfaatan pangan yang perlu dipenuhi adalah perbaikan pola konsumsi, gizi, dan keamanan mutu pangan.

Hasil perhitungan IKP berdasarkan pada 9 indikator untuk wilayah kabupaten dan 8 indikator untuk wilayah kota dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. IKP mencerminkan pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten kota. Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 18 Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

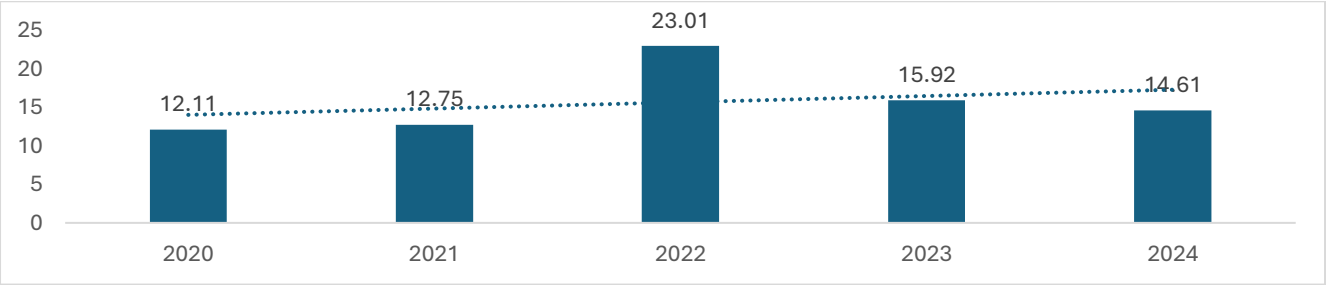
Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Pangan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bulungan	77,63	77,19	77,00	77,11	76,61
Malinau	70,78	73,66	67,25	73,08	74,67
Nunukan	77,45	76,25	75,87	76,17	78,80
Tana Tidung	53,76	56,00	57,17	60,54	61,25
Kota Tarakan	79,91	82,02	77,90	86,06	87,53
Provinsi Kalimantan Utara	**71,90**	**73,02**	**71,04**	**74,59**	**75,77**

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan nilai IKP dari 71,90 di tahun 2021 menjadi 75,77 pada tahun 2024. Secara umum, Kota Tarakan memiliki nilai IKP yang lebih baik bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan wilayah dengan nilai IKP paling rendah berada di Kabupaten Tana Tidung. Nilai IKP kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan. Wilayah ini bergantung pada suplai pangan dari wilayah lain yang merupakan daerah sentra untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, secara keseluruhan dari nilai IKP yang diperoleh selama lima tahun berturut-turut menunjukkan bahwa Kalimantan Utara termasuk ke dalam kategori IKP sangat tahan.

2.1.4.2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. *Undernourishment* berbeda dengan *malnutrition* dan *undernutrition*, dimana *malnutrition* dan *undernutrition* adalah *outcome* terkait status gizi. Walaupun *undernourishment* adalah kondisi individu, namun karena pertimbangan konsep dan data yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri, sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami *undernourished* (ketidakcukupan konsumsi pangan). Berikut disajikan capaian dari prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 2. 5 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Kalimantan Utara mengalami fluktuasi. Capaian terakhir tahun 2024, menunjukkan terjadi penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, yang mana dari tahun 2020 menunjukkan angka yang semakin meningkat, khususnya dan mencapai puncaknya di tahun 2022. Meskipun telah mengalami tren menurun hingga tahun 2024, masih diperlukan upaya yang dapat memberikan intervensi dengan optimal terhadap penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya dalam memenuhi target nasional, sebesar 5% hingga tahun 2030.

2.1.4.3 Konsumsi Listrik Per Kapita

Kondisi kelistrikan ini dapat digambarkan melalui rasio elektrifikasi yang menunjukkan jumlah rumah tangga yang terjangkau jaringan kelistrikan. Lebih lanjut, Rasio elektrifikasi dihitung sebagai perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses listrik dengan total jumlah rumah tangga di wilayah tersebut.

Tabel 2. 19 Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024

Nama Data	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Kalimantan Utara	**%**	**78,96**	**80,71**	**86,44**	**91,19**	**95,08**

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Kalimantan Utara 2024

Rasio elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan angka 95,08 persen tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan adanya rumah tangga yang masih belum terjangkau jaringan kelistrikan karena adanya keterbatasan dalam jaringan distribusi yang melalui jaringan jalan dalam menjangkau wilayah pedalaman.

Tabel 2. 20 **Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024**

Kabupaten/Kota	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Bulungan	Persen	82,53	84,53	95,01	98,75	99,17
Malinau	Persen	73,36	75,56	79,63	84,25	88,72
Nunukan	Persen	67,34	71	75,51	83,65	91,4
Tana Tidung	Persen	73,93	75,13	79,05	83,99	90,06
Tarakan	Persen	88,23	88,44	93,05	96,38	98,58

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Kalimantan Utara 2024

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Malinau masih memiliki rasio elektrifikasi terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yaitu sebesar 88,72 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa akses terhadap layanan energi kelistrikan masih

belum merata. Berikut disajikan distribusi sumber penerangan utama di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2. 21 Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Utama di Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik
Malinau	74,84	22,72	2,44
Bulungan	99,3	0,69	0,01
Tana Tidung	98,94	0,24	0,82
Nunukan	97,5	1,87	0,64
Tarakan	100	0	0
Kalimantan Utara	**96,18**	**3,31**	**0,51**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan memastikan akses listrik yang merata, termasuk di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dengan semakin meratanya akses listrik bagi masyarakat, diharapkan dapat menciptakan dampak ikutan yang positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara, seperti peningkatan produktivitas ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat.

2.1.4.4 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Infrastruktur yang juga memiliki arti penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat adalah infrastruktur air minum. Jangkauan layanan infrastruktur air minum dapat dilihat melalui akses rumah tangga terhadap air minum layak. Air minum yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup dengan layak. Berikut adalah capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2. 22 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Malinau	80,76	70,85	74,65	73,56	72,60
Bulungan	77,44	75,44	73,88	77,49	73,67
Tana Tidung	81,23	85,88	93,15	95,61	94,40
Nunukan	90,12	85,46	94,42	93,43	93,13
Tarakan	98,98	98,73	99,64	99,91	99,23

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Utara	**89,50**	**86,80**	**89,96**	**90,19**	**89,42**

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka, 2025

Akses rumah tangga terhadap air minum layak mengalami penurunan di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat penurunan sebesar 0,77% dibandingkan tahun 2023. Upaya untuk meningkatkan cakupan layanan air minum yang layak bagi masyarakat perlu untuk dioptimalkan kembali di Provinsi Kalimantan Utara, dengan pertimbangan capaian yang masih belum memenuhi target yang ditetapkan nasional dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni sebesar 100%. Secara lebih khusus lagi, apabila ditinjau dari capaian kabupaten/kota, Kabupaten Malinau dan Bulungan perlu secara akseleratif meningkatkan capaian terhadap indikator ini. Ketercapaian pemenuhan terhadap indikator ini cukup memiliki urgensi yang tinggi bagi masyarakat, dengan pertimbangan kebutuhan air menjadi sangat vital bagi kehidupan dan lebih luas lagi bagi pembangunan daerah.

Akses terhadap air minum yang layak dan sistem pengolahan air limbah domestik yang memadai merupakan bagian penting dari pelayanan dasar bidang pekerjaan umum yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Pemenuhan layanan ini diatur melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan air minum dan pengelolaan air limbah domestik pada kawasan strategis provinsi dan lintas kabupaten/kota, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari serta menyediakan layanan pengolahan air limbah domestik di wilayahnya masing-masing. Namun hingga saat ini, capaian pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum di Provinsi Kalimantan Utara belum sepenuhnya optimal. Akses rumah tangga terhadap air minum layak dan aman masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah pedalaman dan kawasan perbatasan.

Demikian pula dengan penyediaan sistem pengolahan air limbah domestik, yang belum merata baik dari sisi cakupan maupun efektivitas pengelolaan limbah cair rumah tangga. Capaian akses air minum layak dan aman di Provinsi Kalimantan Utara

masih berada di bawah rata-rata nasional, dan belum seluruh kabupaten/kota memiliki unit layanan pengelolaan air limbah domestik yang berfungsi secara optimal. Kondisi ini berimplikasi terhadap kesehatan lingkungan serta peningkatan risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan penyakit kulit. Ke depan, integrasi capaian SPM pekerjaan umum ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat, dengan menekankan pentingnya investasi pada infrastruktur air minum dan sanitasi, peningkatan kapasitas penyelenggara layanan, serta kemitraan dengan masyarakat dan sektor swasta. Pemenuhan layanan dasar ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan yang sehat, berkelanjutan, serta berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan wilayah.

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan indikator yang menggambarkan kondisi pengelolaan lingkungan yang menjadi bahan informasi pendukung proses pengambilan kebijakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks lingkungan hidup mencakup akumulasi dari tiga komponen yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas air laut, dan indeks kualitas tutupan lahan yang memiliki bobot nilai untuk setiap komponennya.

Tabel 2. 23 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Utara

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks	78,8	80,95	80,67	80,77	79,95

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara diakses melalui sidaracantik.kaltaraprov.go.id

Indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren fluktuatif dari tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan kelestarian lingkungan di Provinsi Kalimantan Utara perlu untuk dioptimalkan lagi pengelolaannya. Secara lebih lanjut lagi, komponen indeks kualitas lingkungan hidup disajikan sebagai berikut ini.

1. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air merupakan tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu. Semakin tinggi suatu indeks kualitas air, semakin baik status mutu air tersebut.

Tabel 2. 24 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air di Provinsi Kalimantan Utara

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks	60,47	57,34	54,46	55,93	54,31

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara diakses melalui sidaracantik.kaltaraprov.go.id

Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Namun pada tahun 2020 hingga 2024, secara tren, Indeks Kualitas Air mengalami kondisi yang relatif menurun. Dalam menjaga kualitas air diperlukan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha yang berada di sekitar aliran sungai untuk tidak membuang limbah secara langsung ke badan sungai, namun melakukan pengolahan terlebih dahulu.

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah hasil pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pencemaran udara di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara dihitung menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP 45/MENLH/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. Parameter ISPU adalah diameter partikulat (PM10), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO_2), nitrogen dioksida (NO_2), dan ozon (O_3). Semakin tinggi hasil pengukurannya, semakin berbahaya kualitas udara tersebut. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kalimantan Utara tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 25 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara di Provinsi Kalimantan Utara

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks	94,23	93,43	94,52	93,91	92,99

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara diakses melalui sidaracantik.kaltaraprov.go.id

Pengukuran Indeks Kualitas Udara tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa kualitas udara cenderung mengalami kondisi yang menurun. Capaian terakhir di tahun 2024, kondisi kualitas udara mengalami penurunan dibandingkan tahun

sebelumnya, meskipun nilai tersebut termasuk masih dalam kategori sangat baik. Menurunnya nilai kualitas udara ini dapat disebabkan oleh peningkatan tingkat pencemaran udara yang berasal dari kebakaran hutan, aktivitas industri, dan penggunaan kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Utara.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah indeks yang mengukur kualitas beberapa aspek seperti aspek konservasi dan aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial. Indeks ini dihitung dengan mengakumulasi nilai beberapa indeks penyusun yang diberikan bobot, yaitu indeks tutupan hutan, indeks *performance* hutan, indeks kondisi tutupan tanah, indeks konservasi badan air, dan indeks kondisi habitat. Nilai yang dihasilkan dari pengukuran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pembukaan lahan, kebakaran hutan dan lahan, penebangan liar, rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi kawasan pesisir, pemulihan lahan bekas tambang, dan pemulihan lahan terkontaminasi B3. Semakin tinggi nilai terukur, semakin baik kualitas tutupan lahannya.

Tabel 2. 26 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan Provinsi Kalimantan Utara

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks	79,03	99,96	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara diakses melalui sidaracantik.kaltaraprov.go.id

Indeks Kualitas Tutupan Lahan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan ini terjadi karena semakin bertambahnya luasan tutupan lahan baik dari lahan bekas pertambangan maupun lahan lainnya yang tidak tergarap lagi. Pada tahun 2024, indeks tutupan lahan meningkat cukup signifikan menjadi 100. Kategori capaian tersebut tergolong pada kategori sangat baik. Dengan demikian tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Utara perlu untuk diperhatikan melalui upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti pemanfaatan lahan sesuai tata ruang, mempertahankan cakupan kawasan hutan primer untuk dilindungi, serta mempertahankan luasan ruang terbuka hijau.

4. Indeks Kualitas Air Laut

Indeks kualitas air laut atau IKAL merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah

pada waktu tertentu. Baku mutu yang digunakan dalam mengukur kualitas air laut dapat dibagi menjadi dua peruntukan yaitu untuk wisata bahari dan biota laut. Indeks kualitas air laut memiliki peranan penting dalam menggambarkan kondisi pencemaran pada ekosistem pesisir dan laut.

Tabel 2. 27 Indeks Kualitas Air Laut di Provinsi Kalimantan Utara

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks	74,74	81,52	84,85	83,4	84,65

Sumber: BPS Indonesia dan Dinas Lingkungan Hidup diakses melalui sidaracantik.kaltaraprov.go.id

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kondisi kualitas air laut di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan fluktuasi dengan tren peningkatan. Dalam hal ini kondisi ekosistem pesisir dan laut perlu menjadi perhatian khusus mengingat adanya ekosistem pesisir dan laut ini berperan penting dalam jasa lingkungan dan kondisi ekonomi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang juga akan berpengaruh pada kondisi kualitas air laut.

5. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut

Indeks kualitas ekosistem gambut atau IKEG merupakan nilai yang menggambarkan kondisi ekosistem gambut dihitung melalui nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks tersebut dihitung menggunakan pendekatan perhitungan dari parameter luas terdampak kanal, luas areal bekas kebakaran, dan luas tutupan lahan baik pada fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Tabel 2. 28 Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Utara

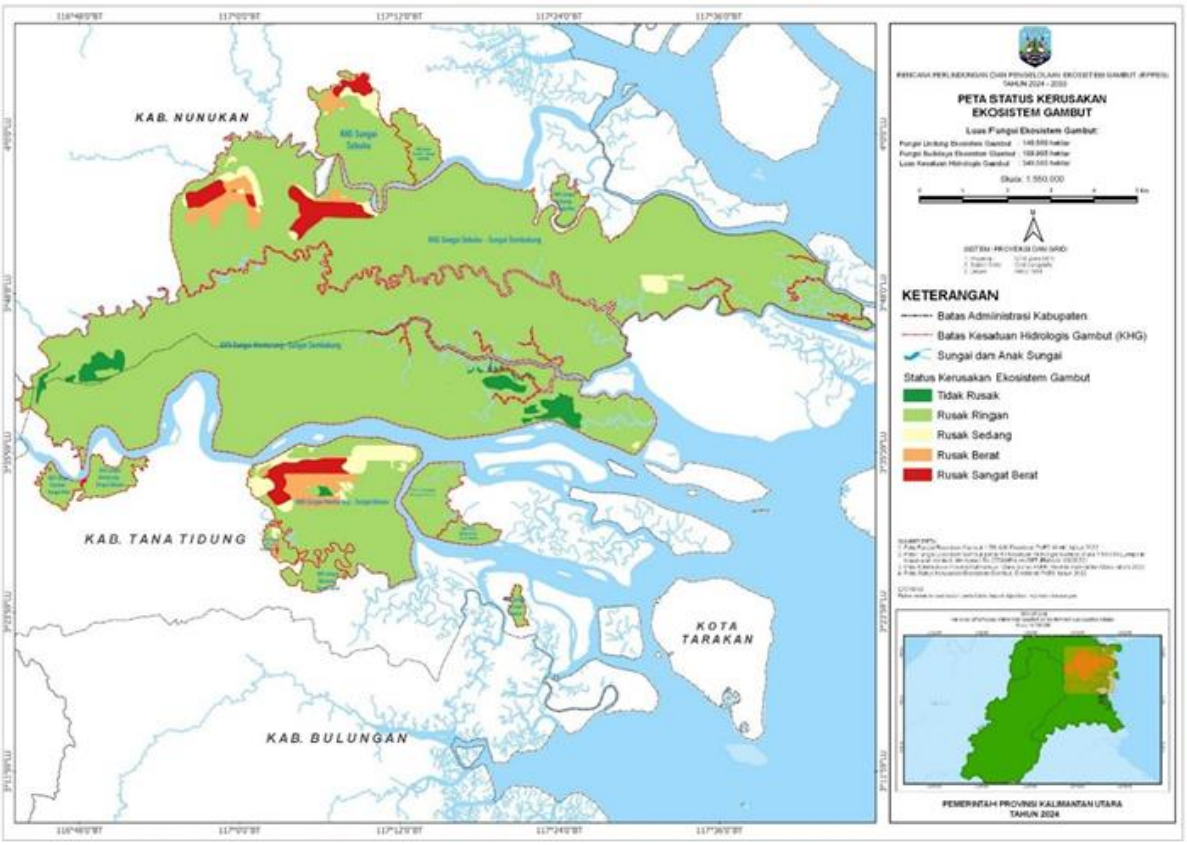
Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks	84,04	84,9	79,49	79,20	79,61

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kondisi kualitas ekosistem gambut di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021-2023 dengan nilai 84,9 menjadi 79,2, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan perlu menjadi perhatian khusus.

Penurunan kualitas ekosistem gambut disebabkan adanya indikasi perubahan penutupan lahan, adanya perizinan di atas lahan hutan gambut, dan adanya area

perhutanan sosial pada ekosistem gambut. Dengan adanya kegiatan tersebut, kondisi ekosistem gambut dapat terganggu dan menimbulkan kerusakan. Berdasarkan analisis data kerusakan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut (PKEG) – KLHK tahun 2022, terdapat 5 (lima) kategori kerusakan mulai dari kategori tidak rusak sampai kategori rusak sangat berat, yang memiliki persebaran di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana berikut.



Gambar 2. 6 Peta Sebaran Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Sumber: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Utara 2024-2053

Dalam peta tersebut, terdapat kerusakan ekosistem gambut dengan didominasi dengan kategori rusak ringan dan terdapat beberapa kawasan dengan kategori rusak sedang, berat, dan sangat berat. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) juga akan menjadi salah satu faktor dalam penentuan indeks kualitas lahan. Pemulihan ekosistem gambut erat kaitannya dengan tata air gambut agar gambut tetap basah, tidak mengalami kekeringan dengan menjaga tinggi muka air tanah < 0,4 m. Penurunan tinggi muka air tanah akan menyebabkan gambut mudah terbakar dan berpotensi kehilangan air yang pada musim kemarau dapat menyebabkan kekeringan.

Ekosistem gambut memiliki peranan penting secara ekologis yang sangat rentan apabila terjadi gangguan dan salah kelola. Oleh karena itu, melihat dari kondisi kualitas ekosistem gambut yang menurun tersebut, perlunya perhatian khusus dalam perlindungan dan pemanfaatannya termasuk perlindungan dari dampak suatu pembangunan termasuk di dalamnya adalah peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah. Pejabat pengawas perlu menjadi perhatian terutama dalam pengawasan terkait penaatan kewajiban perusahaan yang terdapat di ekosistem gambut.

Terkait dengan pelaku usaha yang memiliki konsesi di ekosistem gambut, terdapat kewajiban pelaku usaha yaitu kewajiban dalam penyusunan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut sesuai PP 71/2014 jo PP 57/2016 tentang perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut. Berdasarkan Dokumen RPPEG Provinsi Kalimantan Utara (2023), fungsi lindung pada ekosistem gambut telah dibebani izin pemanfaatan perkebunan sawit dan kehutanan seluar 81.589,42 ha atau sekitar 54 persen. Sedangkan fungsi budidaya ekosistem gambut telah dibebani izin sebanyak 30 persen atau seluas 71.252,72 ha.

2.1.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses terhadap sanitasi layak juga menjadi bagian penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Melalui sanitasi yang layak diharapkan dapat memutus siklus penyakit dan mengurangi potensi pencemaran air. Adapun capaian akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 29 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Malinau	86,72	67,88	89,90	89,24	89,29
Bulungan	92,21	93,04	92,37	93,54	94,91
Tana Tidung	89,56	83,29	70,89	90,67	96,03
Nunukan	78,13	78,49	72,59	74,31	76,42
Tarakan	77,64	77,58	83,95	84,57	84,64
Kalimantan Utara	**82,09**	**79,80**	**82,22**	**84,22**	**85,17**

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka, 2025

Akses rumah tangga terhadap sanitasi layak juga cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun demikian, capaian tersebut masih perlu untuk terus ditingkatkan, hingga memenuhi target nasional yakni 90%. Adapun secara lebih khusus, apabila ditinjau dari capaian kabupaten/kota, Kabupaten Nunukan menjadi daerah yang memiliki akses sanitasi layak paling rendah di Provinsi Kalimantan Utara hingga tahun 2024. Kondisi tersebut tentu perlu untuk menjadi perhatian, dengan pertimbangan sanitasi yang layak sangat mempengaruhi komponen pembangunan yang lain, seperti terhadap penuntasan stunting.

2.1.5.3 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah di Provinsi Kalimantan Utara semakin mengalami peningkatan. Kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari pertambahan jumlah penduduk yang juga semakin meningkat, dan diversifikasi aktivitas dari masyarakat dan menghasilkan keluaran berupa persampahan. Tercatat hingga tahun 2024, timbulan sampah di Provinsi Kalimantan Utara yang berhasil terhimpun mencapai 51.567,58 ton dalam kurun waktu satu tahun terakhir, dengan total sampah harian sebesar 141,28 ton. timbulan sampah ini tentu memerlukan perhatian yang lebih untuk meningkatkan efektivitas pengelolaannya.

Tabel 2. 30 Tingkat pengurangan sampah di perkotaan

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persen	55,29	63,50	74,65	72	t.a.d

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

Timbulan sampah terolah di Kalimantan Utara, belum mencapai angka yang ditargetkan oleh nasional, yakni untuk penanganan sampah sebesar 80%.Pengolahan timbulan sampah di fasilitas yang memadai bukan lagi sekadar opsi, namun merupakan kebutuhan dengan urgensi tinggi dalam upaya menciptakan daerah yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Peningkatan proporsi sampah yang diolah dengan tepat, diharapkan tidak hanya dapat mengurangi tekanan terhadap lingkungan, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi sirkular yang inklusif.

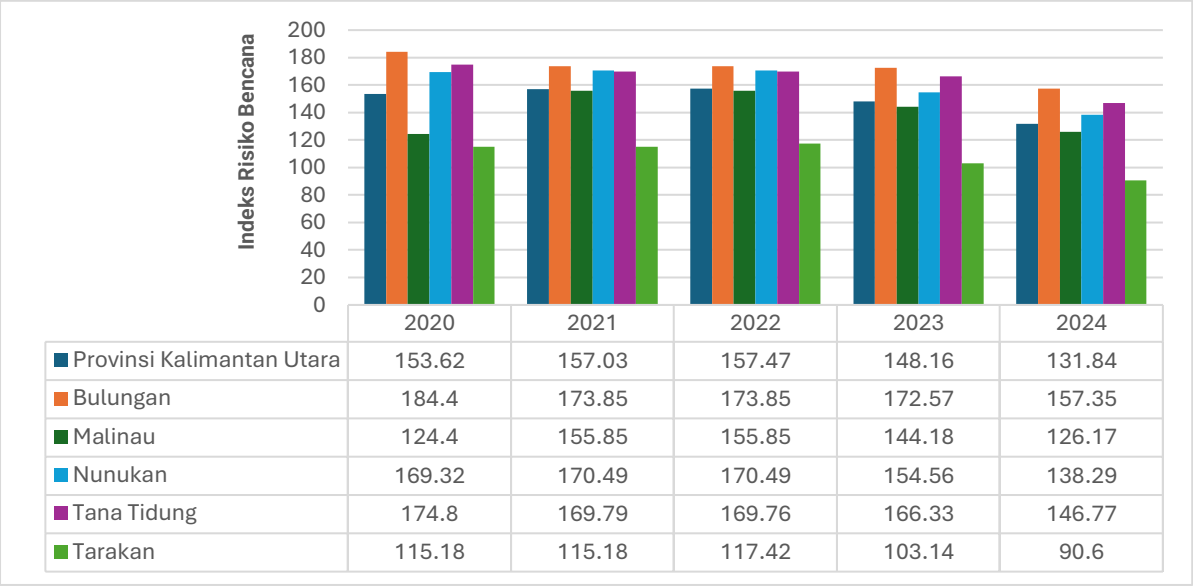
2.1.5.4 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Layanan pengumpulan sampah yang efektif tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga pada kesehatan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam. Untuk menilai efektivitas layanan ini, digunakan indikator proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah.

2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.6.1 Indeks Risiko Bencana

Dari segi fisiografis hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara berada pada Cekungan Tarakan yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) cekungan tersier utama yang terdapat di bagian timur continental margin Kalimantan yang dicirikan oleh hadirnya batuan sedimen klastik sebagai penyusunnya yang dominan. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai potensi bencana hidrometeorologi khususnya bencana banjir dan kebakaran hutan, serta potensi gempa dan tsunami karena berbatasan dengan Selat Makassar. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024, Provinsi Kalimantan Utara memiliki indeks risiko sedang dengan nilai indeks 131,84.



	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Kalimantan Utara	153.62	157.03	157.47	148.16	131.84
Bulungan	184.4	173.85	173.85	172.57	157.35
Malinau	124.4	155.85	155.85	144.18	126.17
Nunukan	169.32	170.49	170.49	154.56	138.29
Tana Tidung	174.8	169.79	169.76	166.33	146.77
Tarakan	115.18	115.18	117.42	103.14	90.6

Gambar 2. 7 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024

Sumber: BNPB, 2025

IRB terus mengalami penurunan sejak tahun 2023 hingga 2024. Penurunan yang signifikan terjadi dari tahun 2023 menuju 2024, yang mana terjadi penurunan sebesar 16,32 poin. Hal tersebut menunjukkan penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Utara terus ditingkatkan. Meskipun terjadi kenaikan, IRB Provinsi Kalimantan Utara masih berada pada kondisi sedang, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas oleh seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana.

Tabel 2. 31 Indeks Risiko per Ancaman Bencana Provinsi Kalimantan Utara

Bencana	Bulungan		Nunukan		Tana Tidung		Malinau		Kota Tarakan	
	Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko
Multi ancaman	173,85	Tinggi	170,49	Tinggi	169,76	Tinggi	155,85	Tinggi	117,42	Sedang
Banjir	36	Tinggi	24	Tinggi	34,98	Tinggi	-	-	-	-
Gempa bumi	10,8	Sedang	10,8	Sedang	10,5	Sedang	10,8	Sedang	8,79	Sedang
Tsunami	16	Sedang	4,8	Sedang	9,33	Sedang	4	Rendah	11,81	Sedang
Kebakaran hutan	36	Tinggi	36	Tinggi	34,98	Tinggi	36	Tinggi	29,28	Tinggi
Tanah longsor	24	Tinggi	24	Tinggi	11,66	Sedang	24	Tinggi	9,76	Sedang
Gelombang ekstrim dan abrasi	24	Tinggi	24	Tinggi	23,32	Tinggi	-	-	-	-
Kekeringan	24	Tinggi	36	Tinggi	34,98	Tinggi	36	Tinggi	19,52	Tinggi
Cuaca ekstrim	13,6	Tinggi	13,6	Tinggi	10,11	Sedang	13,6	Tinggi	11,06	Sedang

Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana 2024

Indeks Risiko Bencana pada setiap kabupaten/kota menunjukkan bahwa bencana kebakaran hutan dan kekeringan memiliki indeks risiko yang tinggi. Adapun berdasarkan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2023-2042 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten dan kota memiliki kawasan rawan bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi yang tinggi. Kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi pada Kabupaten Bulungan, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan serta kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi pada Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung.

2.1.6.2 Penurunan Intensitas Emisi GRK

Perubahan iklim merupakan ancaman yang telah nyata dirasakan Indonesia, bahkan telah menyebabkan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana

hidrometeorologi ini. Salah satu tujuan nasional 13 TPB adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Provinsi Kalimantan Utara menjadi salah satu daerah yang juga turut memberikan dukungan terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global tersebut. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan hasil capaian penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) yang terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Artinya, capaian tersebut bernilai positif dan perlu untuk semakin dioptimalkan capaiannya, dengan harapan dapat semakin memberikan kontribusi terhadap upaya penanganan dampak perubahan iklim yang secara nyata telah dirasakan.

Tabel 2. 32 Penurunan emisi GRK

Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	67,7	81,6	87,5	101,1	t.ad

Sumber: Satu data Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Lebih lanjut lagi, Peningkatan ketahanan bencana dan iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan iklim. Ancaman perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Utara antara lain meningkatkan kerentanan terhadap bencana banjir, kekeringan, tanah longsor dan kebakaran hutan. Berikut disajikan hasil inventaris kejadian bencana alam di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2. 33 Luasan kawasan terdampak bencana alam di Provinsi Kalimantan Utara

Nama Data	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Kawasan Rawan Longsor	Hektar	4.336.672	4.316.755	5.907.422	5.907.422	5.907.422
Luas Kawasan Rawan banjir	Hektar	1.100.493	1.310.560	772.692	772.692	772.692
Luas Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	Hektar	6.263.941	6.911.866	2.948.610	2.948.610	2.948.610
Luas Kawasan Rawan Gempa Bumi	Hektar	7.002.188	6.937.043	7.546.770	7.546.770	7.546.770
Luas Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Abrasi	Hektar	71.514	32.839	31.539	31.539	31.539
Luas Kawasan Rawan Tsunami	Hektar	34.861	33.308	50.754	50.754	50.754
Luas Kawasan Rawan Kekeringan	Hektar	0	6.939.501	7.546.770	7.546.770	7.546.770

Nama Data	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Kawasan Rawan Epidemi Wabah Penyakit	Hektar	0	6.868.360	2.776.762	2.776.762	2.776.762
Jumlah Luas Kawasan Rawan Bencana Alam	**Hektar**	**18.809.669**	**33.482.639**	**27.581.319**	**27.581.319**	**27.581.319**

Sumber: Satu data Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Indonesia sangat berkepentingan dalam menangani penanggulangan pemanasan global dan perubahan iklim. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi 31 – 43 % pada tahun 2030, dengan sektor kehutanan dan lahan gambut sebagai target utama reduksi emisi. Hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam dokumen Enhanced NDC tahun 2022. Kebijakan nasional terkait perubahan juga iklim telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan GRK dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional. Provinsi Kalimantan Utara juga berkomitmen untuk mendukung target nasional dengan dikeluarkannya SK Gubernur Tahun 2015 tentang POKJA RAD GRK dalam rangka melaksanakan tugas Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Kalimantan Utara dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Dalam Dokumen RAD GRK, emisi terbesar di Provinsi Kalimantan Utara adalah bidang penggunaan lahan, kehutanan dan lahan gambut. Lima kegiatan utama dari Provinsi Kalimantan Utara yang akan menjadi prioritas utama aksi mitigasi bidang berbasis lahan. Aksi–aksi mitigasi prioritas Provinsi Kalimantan Utara adalah: 1. Patroli pengamanan hutan; 2. Reboisasi/rehabilitasi lahan di lima kabupaten/kota; 3. Penanaman pohon mangrove; 4. Pengembangan hutan tanaman rakyat; 5. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terbuka. Relevansi muatan RPPEG dengan RAD GRK Provinsi Kalimantan Utara sangat kuat dan relevan, di mana RPPEG akan mendukung dan memperkuat implementasi penurunan emisi gas rumah kaca khususnya pada lahan gambut.

Lebih lanjut lagi, menurut Sistem Informasi dan Data Indeks Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK) teridentifikasi sebanyak 9 desa di 4 kecamatan di Kabupanten Bulungan yang berada pada tingkat “sangat rentan” terhadap perubahan iklim. Adapun

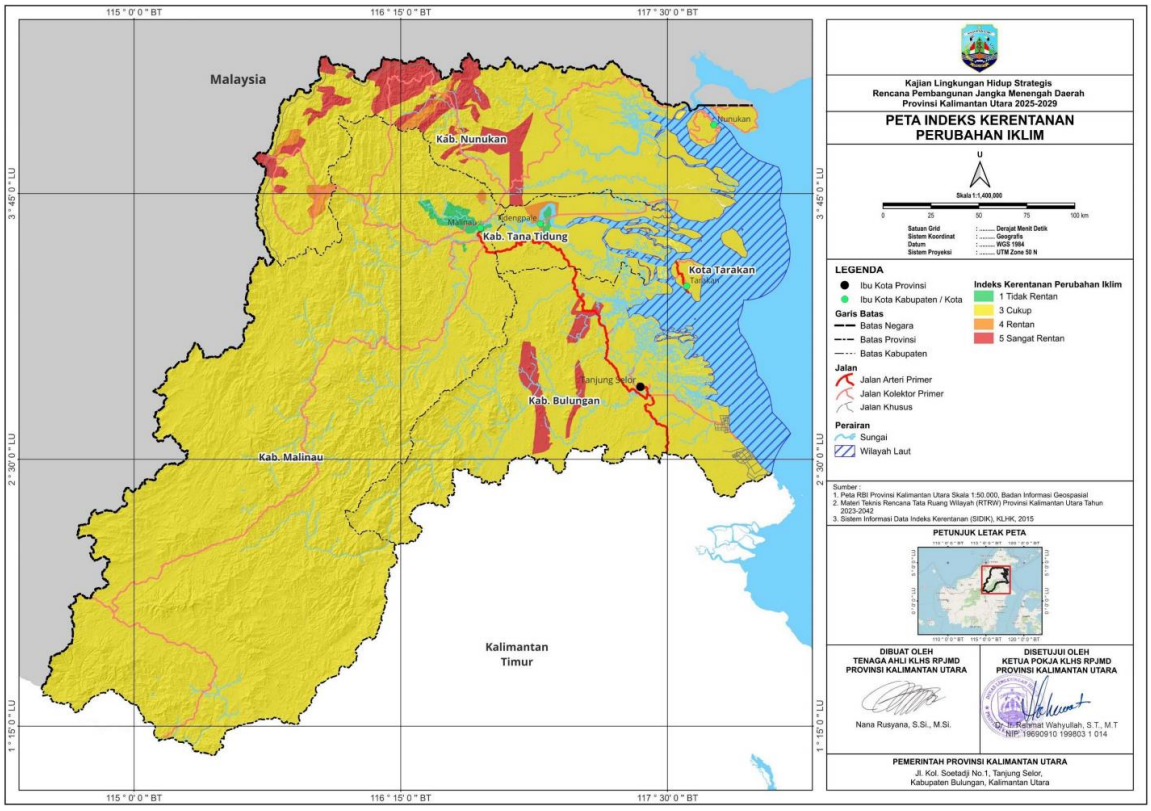
jumlah desa dengan tingkat sangat rentan di Provinsi Kalimantan Utara selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 34 Jumlah Desa Berdasarkan Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah desa menurut tingkat kerentanan berdasarkan Data SIDIK					Total
	Tidak Rentan	Agak Rentan	Cukup Rentan	Rentan	Sangat Rentan	
Malinau	21	15	68	2	3	109
Bulungan	13	20	39	0	9	81
Tana Tidung	1	7	14	0	1	23
Nunukan	1	33	129	20	53	236
Tarakan	8	0	11	1	0	20
Kalimantan Utara	**44**	**75**	**261**	**23**	**66**	**469**
Persentase	9,38	15,99	55,65	4,90	14,07	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

Lebih lanjut lagi, sebaran dari kerentanan perubahan iklim di Provinsi Kalimantan utara disajikan sebagai berikut ini.



Gambar 2. 8 *Peta indeks Kerentanan Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Utara*

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

Provinsi Kalimantan Utara didominasi dengan nilai indeks kerentanan perubahan iklim dengan kategori yang cukup, dan beberapa wilayah memiliki kategori sangat rentan. Sebagian besar wilayah dengan kategori sangat rentan berada di wilayah pesisir, yang mana pada zona tersebut seringkali lebih sensitif terhadap dampak yang ditimbulkan dari dinamika perubahan iklim global. Lebih lanjut lagi rincian dari potensi kebencanaan yang dipengaruhi oleh dinamika perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Utara diuraikan sebagai berikut ini.

1. **Kerentanan Bencana Banjir**

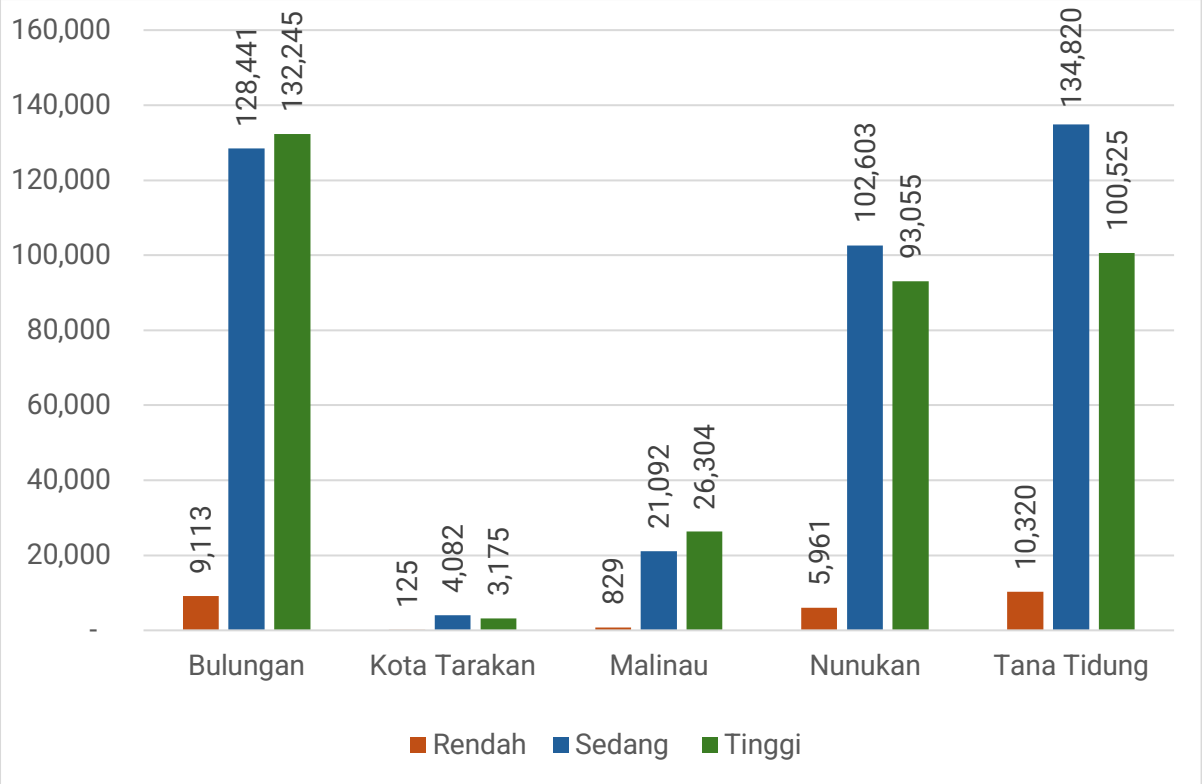
Banjir besar terjadi pada periode tahunan, lima tahunan atau sepuluh tahunan dengan jumlah debit air melebihi kapasitas daya tampung sungai. Di samping faktor curah hujan, banjir juga disebabkan oleh berkurangnya daya tampung sungai akibat erosi maupun longsoran sedimen yang masuk ke badan sungai, sedangkan di daerah perkotaan sedimentasi juga disebabkan oleh pembuangan sampah yang sembarangan. Selama periode tahun 2015 hingga Juni 2023, tercatat sebanyak 128 kejadian bencana banjir, dengan kejadian terbanyak di Kabupaten Nunukan dengan jumlah 48 kejadian.

Tabel 2. 35 Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Luas Menurut Kategori (ha)					Luas Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bulungan	12.677	51.829	110.347	266.739	937.078	1.378.669
Malinau	1.921	7.168	10.277	407.936	3.476.314	3.903.611
Nunukan	1.721	23.557	90.147	372.184	872.766	1.360.374
Tana Tidung	1.214	12.159	115.949	121.722	92.015	343.059
Kota Tarakan	-	3.653	2.622	11.138	6.992	24.405
Luas	17.533	98.361	329.342	1.179.718	5.385.164	7.010.118
Persentase	0,25	1,40	4,70	16,83	76,82	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029

Jasa ekosistem pencegahan terhadap bencana banjir di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh kategori sangat tinggi dengan persentase 76,82% atau seluas 5.385.164 ha, dan yang terluas berada di Kabupaten Malinau.



Gambar 2. 9 Luas Areal dengan Tingkat Bahaya Banjir di Provinsi Kalimantan Utara (Ha)

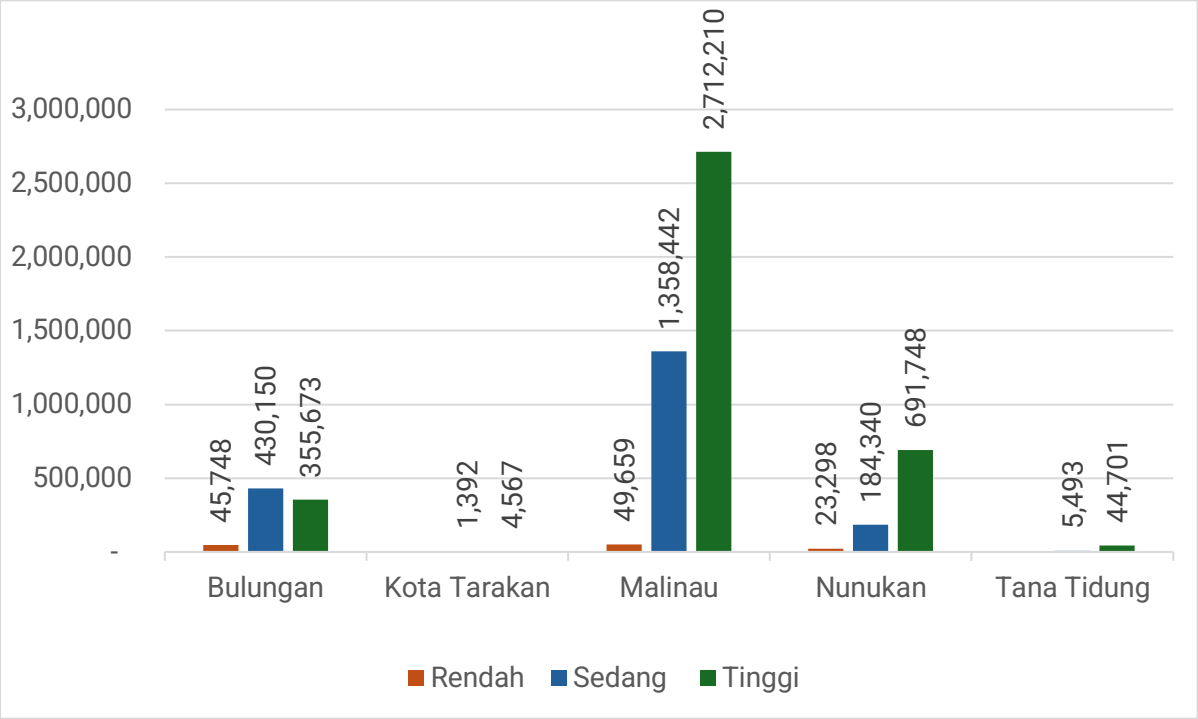
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029

Wilayah Kabupaten Bulungan seluas 132.245 ha teridentifikasi merupakan areal yang tingkat bahaya banjirnya berada dalam kategori tinggi. Demikian halnya di Kabupaten Nunukan seluas 93.055 ha dan Kabupaten Tana Tidung seluas 100.525 ha juga teridentifikasi tinggi bahaya banjir. Sementara di Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan, luas areal dengan bahaya banjir yang tinggi masih berada di bawah tiga kabupaten lainnya.

2. Kerentanan Bencana Tanah Longsor

Provinsi Kalimantan Utara mempunyai potensi atau kerawanan terhadap gerakan tanah. Gerakan tanah sangat dipengaruhi kestabilan lereng yang sangat bergantung oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lereng antara lain besarnya lereng, komponen penyusun lereng, struktur geologi yang ada pada lereng tersebut, sedangkan faktor eksternal antara lain tutupan lereng (vegetasi), intensitas dan besarnya curah hujan, kondisi muka air tanah, getaran atau gempa bumi. Getaran tanah terjadi jika gaya pendorong melebihi gaya penahan pada suatu lereng. Selama periode tahun 2015 hingga bulan Juni 2023, tercatat

sebanyak 252 kejadian bencana tanah longsor, dan yang terbanyak berada di Kota Tarakan dengan jumlah 210 kejadian.



Gambar 2. 10 Luas Areal dengan Tingkat Bahaya Tanah Longsor

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029

Areal dengan tingkat bahaya tanah longsor kategori tinggi tidak teridentifikasi di Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung. Paling luas berada di Kabupaten Malinau seluas 2.712.210 ha dan di Kabupaten Nunukan seluas 691.746 ha. Kabupaten Malinau menjadi wilayah yang paling rawan akan bahaya tanah longsor.

Tabel 2. 36 Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota

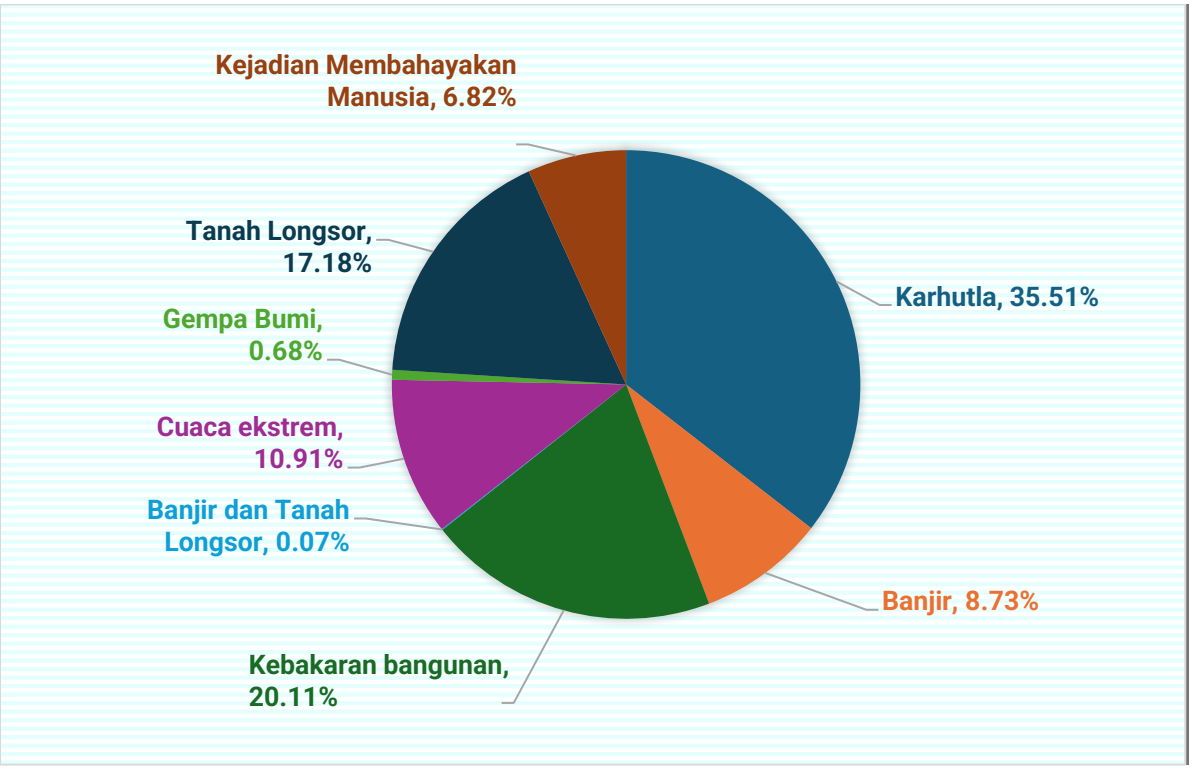
Kabupaten/Kota	Luas Menurut Kategori (ha)					Luas Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bulungan	-	147.419	108.379	261.642	861.229	1.378.669
Malinau	507	9.147	26.724	170.262	3.696.971	3.696.971
Nunukan	5.499	47.096	309.229	191.064	807.485	1.360.374
Tana Tidung	6.904	107.342	87.540	89.827	51.445	343.059
Kota Tarakan	-	5.046	4,665	10.422	4.272	24.405
Luas	**12.911**	**316.051**	**536.538**	**723.217**	**5.421.402**	**7.010.118**
Persentase	**0,18**	**4,51**	**7,65**	**10,32**	**77,34**	**100,00**

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029

Luas areal dengan jasa ekosistem pencegahan bencana tanah longsor memiliki luas terbesar pada kategori sangat tinggi dengan persentase 77,34%. Sedangkan pada kategori sangat rendah memiliki persentase 0,18%. Wilayah paling luas dengan kategori sangat tinggi yaitu Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan memiliki luasan paling kecil untuk kategori sangat tinggi. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Malinau, sebagian wilayah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan mempunyai risiko sangat tinggi.

3. Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Sebesar 35% bencana yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara berupa kebakaran hutan dan lahan. Penyebabnya beragam, mulai dari musim kemarau, siklus El Nino, pembukaan lahan dengan cara dibakar, sampai pada pembakaran hutan yang disengaja untuk kepentingan pemanfaatan sumber daya alam.



Gambar 2. 11 Proporsi Bencana di Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029

Jasa ekosistem pencegahan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan didominasi oleh kategori sangat tinggi dengan persentase 56,28% atau seluas 3.945.254 ha, dan yang terluas berada di Kabupaten Malinau. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 37 Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Luas Menurut Kategori (ha)					Luas Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bulungan	12.677	57.517	182.788	695.829	429.857	1.378.669
Malinau	2.191	8.986	91.731	942.695	2.858.007	3.903.611
Nunukan	12.000	52.474	308.117	397.608	590.175	1.360.374
Tana Tidung	4.302	64.439	104.363	104.822	65.134	343.059
Kota Tarakan	-	3.653	9.685	8.986	2.080	24.405
Luas	**31.170**	**187.069**	**696.684**	**2.149.941**	**3.945.254**	**7.010.118**
Persentase	**0,44**	**2,67**	**9.94**	**30,67**	**56,28**	**100,00**

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029

Kabupaten Malinau memiliki kerawanan paling tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan juga sering terjadi. Selain karena kegiatan *illegal logging*, kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi karena perubahan iklim yang cukup signifikan. Mitigasi bencana hutan dan lahan perlu menjadi prioritas utama di wilayah Kalimantan Utara.

2.1.6.3 Indeks Ketahanan Daerah

Pengukuran terhadap indeks ketahanan daerah bertujuan untuk menilai kapasitas penanggulangan bencana pada suatu wilayah administrasi dengan asumsi bahwa bahaya dan ancaman bencana serta kerentanan di wilayah tersebut bernilai tetap. Indeks ketahanan daerah dilakukan untuk memonitor adanya penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah dalam mengurangi indeks risiko bencana. Penguatan kapasitas kelembagaan dilaksanakan secara lintas sektor di bawah koordinasi BPBD.

Tabel 2. 38 Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks	**0,2**	**0,2739**	**0,2657**	**0,4276**	**t.a.d**

Sumber: BPBD Provinsi Kalimantan Utara, 2018-2023

Berdasarkan tabel tersebut, Indeks Ketahanan Daerah menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2022 dari 0,2657 menjadi 0,4276 di tahun 2023. Sehingga, sebagai hasilnya indeks risiko bencana juga turut menurun dari tahun 2022-2023 yang disebabkan adanya penguatan terhadap kondisi ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana.

2.1.7 Demografi

Demografi memainkan peran krusial dalam proses perencanaan suatu wilayah. Hal tersebut dikarenakan perubahan dalam struktur penduduk berdampak secara langsung terhadap kebutuhan akan infrastruktur, pelayanan publik, dan perencanaan tata ruang. Elemen-elemen seperti laju pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan, serta pola migrasi turut menentukan arah perkembangan suatu wilayah dan kemampuannya dalam menghadapi tantangan di masa depan.

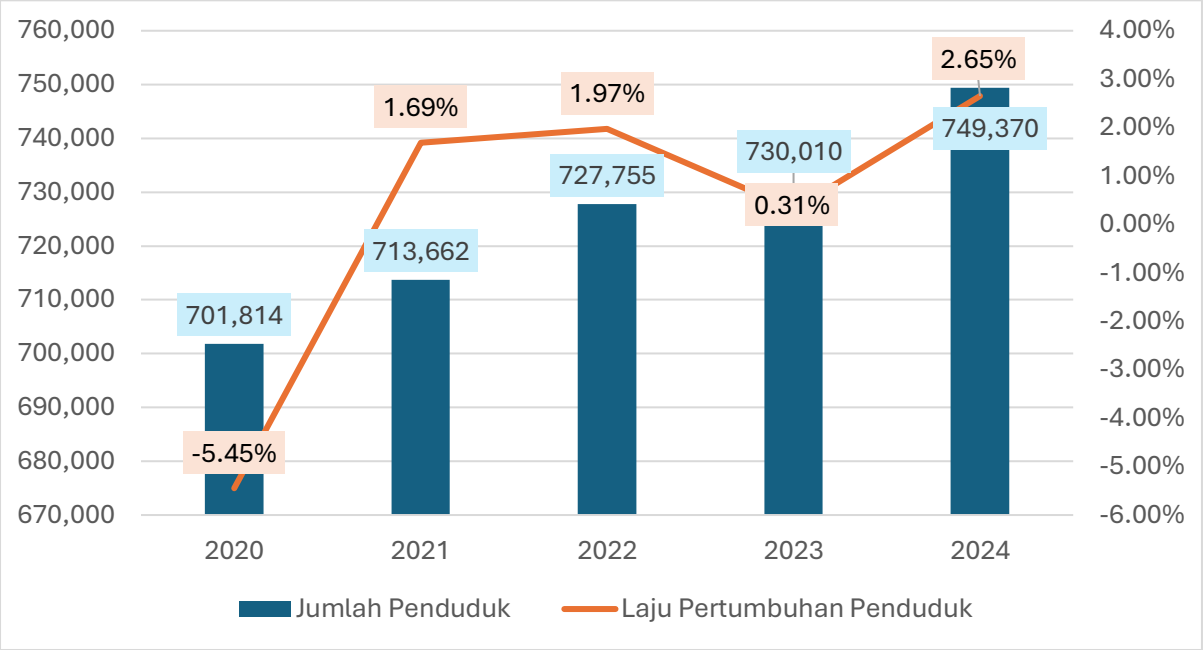
Wilayah dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan strategi perencanaan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan akan hunian, sistem transportasi, dan sarana publik. Selain itu, arus perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan mengakibatkan perubahan sosial dan ekonomi yang perlu direspons melalui kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, penggunaan data demografi secara terpadu dalam perencanaan wilayah menjadi hal yang esensial guna mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi demografi Provinsi Kalimantan Utara bersifat fluktuatif, dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian, serta mobilitas penduduk masuk dan keluar wilayah. Data demografis mencakup jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan, dan struktur komposisi penduduk. Informasi ini menjadi fondasi dalam menyusun proyeksi kependudukan untuk lima tahun mendatang di Provinsi Kalimantan Utara.

2.1.7.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator utama dalam analisis demografi suatu wilayah. Jumlah penduduk mencerminkan besaran populasi yang menetap di suatu daerah pada periode tertentu, sedangkan laju pertumbuhan penduduk menggambarkan dinamika perubahan jumlah penduduk akibat kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk. Analisis terhadap kedua aspek ini penting untuk memahami perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan infrastruktur serta layanan publik di suatu wilayah. Dengan mengetahui tren pertumbuhan penduduk, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Berikut

merupakan grafik jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hingga 2024 di Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2. 12 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

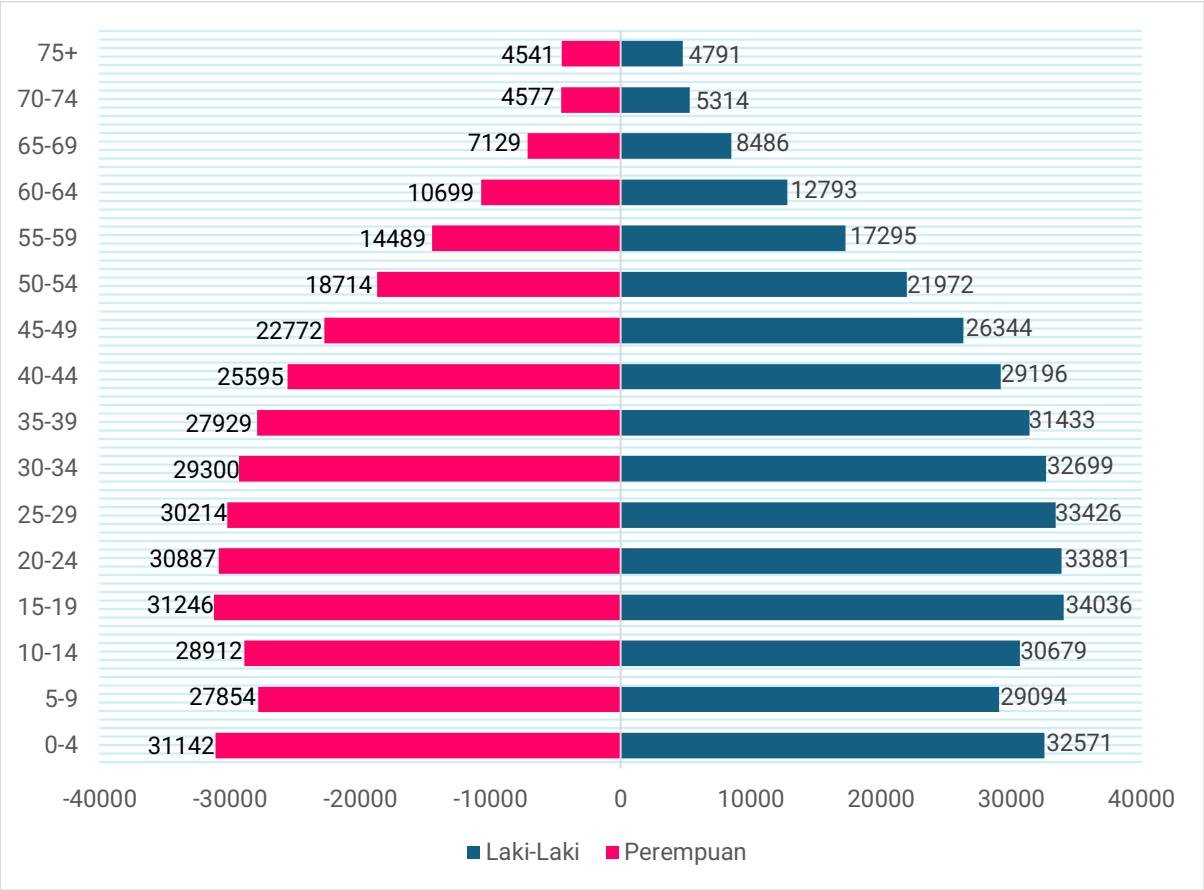
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka 2021-2025

Badan Pusat Statistik melalui laporan tahunan Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka 2025 menyebutkan bahwa terdapat 749.370 penduduk yang berada di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024. Data tersebut merupakan gabungan dari 393.130 penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan 356.240 lainnya adalah perempuan. Jumlah tersebut telah mengalami peningkatan sebanyak 19.360 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Banyaknya jumlah penambahan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara dipengaruhi oleh persentase laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk per tahun rata-rata sebesar 0,24 persen per tahun. Perhitungan laju pertumbuhan penduduk per tahun tersebut dari tahun 2020-2024. Penggunaan tahun 2020 sebagai tahun awal perhitungan laju pertumbuhan penduduk per tahun karena terdapat perbedaan basis data antara tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya

2.1.7.2 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk merujuk pada pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu, seperti aspek geografis,

biologis, sosial, atau ekonomi. Komposisi penduduk di suatu wilayah dapat dianalisis melalui kategori usia dan jenis kelamin. Komposisi penduduk memberikan gambaran mengenai berbagai aspek, seperti proporsi tenaga kerja produktif dan non-produktif, potensi bonus demografi, serta angka ketergantungan. Faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan penetapan kebijakan. Komposisi penduduk di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2. 13 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka 2024

Penduduk Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 didominasi penduduk usia produktif atau berumur 15-64 tahun dengan jumlah 514.920 jiwa. Sedangkan penduduk usia tidak produktif sebesar 215.090 jiwa dengan rincian untuk 0-14 tahun sebesar 180.252 jiwa dan penduduk usia 65 ke atas sebesar 34.838 jiwa.

2.1.7.3 Rasio Penduduk

Rasio penduduk di Provinsi Kalimantan Utara dapat dianalisis melalui perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Penghitungan rasio ini

berperan dalam memahami proporsi penduduk laki-laki dan perempuan, yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih terarah. Perbandingan jumlah penduduk ini tercermin dalam data rasio jenis kelamin atau *sex ratio* yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Tabel 2. 39 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Kelamin 2018-2025

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
2018	380.011	336.396	716.407	113
2019	393.395	348.850	742.245	112,8
2020	370.650	331.164	701.814	111,9
2021	376.407	337.215	713.662	116,6
2022	383.382	344.373	727.755	111,3
2023	384.010	346.000	730.010	111
2024	388.620	351.150	739.780	110,7
2025	393.130	356.24	749.37	110,4

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka 2019-2025

Perubahan demografi dapat dilihat dari komposisi jenis kelamin, untuk membantu penyusunan perencanaan kebijakan berdasarkan karakteristik setiap sumber daya manusia yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Data sex ratio di Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2019 hingga 2025 didominasi laki-laki dengan jumlah paling besar dibandingkan perempuan. Besarnya angka sex ratio tahun 2025 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 110,4 menunjukkan bahwa di antara 100 penduduk perempuan terdapat 111 penduduk laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara. Angka sex ratio ini mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu 111,3. Penurunan angka sex ratio disebabkan karena banyaknya kelahiran bayi perempuan, bertambahnya jumlah penduduk perempuan melalui migrasi masuk, dan adanya penurunan jumlah laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara.

2.1.7.4 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan indikator yang menggambarkan bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Indikator kepadatan penduduk menghitung jumlah individu pada suatu populasi dibagi dengan satuan luas atau ruang yang ditempati pada periode tertentu. Data terkait tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Provinsi Kalimantan Utara pada rentang tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 40 Persebaran dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk Bruto (jiwa per km$^{2)}$	Kepadatan Penduduk Netto (jiwa per km$^{2)}$
Malinau	85.530	2	2.164
Bulungan	158.050	12	1.710
Tana Tidung	27.470	8	1.881
Nunukan	207.870	16	3.191
Tarakan	251.090	1.012	6.612
Provinsi Kalimantan Utara	730.010	11	2.924

Sumber: Kalimantan Utara Dalam Angka 2024, diolah

Jumlah penduduk sebesar 730.010 jiwa tersebar ke dalam lima kabupaten/kota yang ada. Kota Tarakan menjadi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 251.090 jiwa. Sedangkan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kabupaten Tana Tidung dengan jumlah penduduknya 27.470 jiwa.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki kepadatan penduduk bruto sebesar 11 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk bruto menghitung semua area dalam suatu wilayah sehingga area yang tidak ditinggali juga terhitung. Untuk mengetahui kepadatan penduduk netto area yang dihitung hanya area permukiman sehingga menjadikan kepadatan penduduk netto sebesar 2.924 jiwa/km^2. Kota Tarakan menjadi kabupaten/kota dengan kepadatan penduduk tertinggi baik untuk kepadatan penduduk bruto maupun netto. Kepadatan penduduk bruto Kota Tarakan sebesar 1.012 jiwa/km^2 dengan kepadatan netto sebesar 6.612 jiwa/km^2. Kabupaten Malinau menjadi kabupaten dengan kepadatan bruto terendah yaitu sebesar 2 jiwa/km^2 dengan kepadatan nettonya sebesar 2.164 jiwa/km^2. Kabupaten Bulungan menjadi kabupaten dengan kepadatan netto terendah yaitu sebesar 1.710 jiwa/km^2 dan kepadatan bruto sebesar 12 jiwa/km^2.

2.1.7.5 Keberadaan Masyarakat Adat

Masyarakat adat merujuk pada kelompok atau komunitas yang tumbuh tak terpisahkan dan memiliki hubungan organik dengan lingkungannya. Masyarakat adat cenderung memiliki ikatan yang kuat antar anggota kelompoknya dan bersifat sukarela. Umumnya setiap anggota masyarakat adat memiliki hukum adat yang

mengatur dan menjadi pedoman dalam penyelesaian berbagai macam persoalan yang terjadi pada lingkungan adat terkait.

2.1.7.6 Proyeksi Penduduk

Proyeksi demografi berfokus untuk menganalisis perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan pengelompokannya, seperti data penduduk berdasarkan jumlah, kepadatan penduduk, dan penduduk berdasarkan umur di Provinsi Kalimantan Utara. Data tersebut dianalisis lebih mendalam untuk mengetahui kondisi penduduk lanjut usia, penduduk usia sekolah, rasio ketergantungan, dan bonus demografi. Berikut merupakan hasil proyeksi kependudukan di Provinsi Kalimantan Utara selama rentang tahun 2025 hingga 2029.

1. **Jumlah dan Laju Pertumbuhan penduduk**

Proyeksi penduduk memiliki peran strategis dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang. Proyeksi ini memberikan estimasi mengenai jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu, seperti merujuk pada tren historis maupun pengaruh kebijakan yang sedang atau akan diterapkan. Informasi dari proyeksi penduduk sangat berguna sebagai dasar penetapan kebijakan dan penentuan target dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, ketahanan pangan, perumahan, dan sektor strategis lainnya.

Proyeksi penduduk juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi efektivitas program pembangunan, mengidentifikasi kesenjangan pelaksanaan perencanaan, serta menyusun kebijakan lanjutan secara lebih terarah. Dalam analisis proyeksi, aspek-aspek seperti jumlah penduduk, laju pertumbuhan, dan tingkat kepadatan menjadi indikator utama yang saling melengkapi dan memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika kependudukan suatu wilayah. Proyeksi demografi di Provinsi Kalimantan Utara menggunakan data tahun 2020 sebagai acuan dasar. Berikut ini disajikan hasil proyeksi jumlah dan pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Utara untuk periode tahun 2025 hingga 2029.

Tabel 2. 41 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

No	Wilayah	Jumlah Penduduk 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Utara (Jiwa)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Malinau	85.530	88.985	90.101	91.197	92.268	93.312
2	Bulungan	158.050	156.246	158.206	160.130	162.011	163.844
3	Tana Tidung	27.470	28.161	28.514	28.861	29.200	29.530
4	Nunukan	207.870	212.741	215.409	218.029	220.590	223.086
5	Tarakan	251.090	263.120	266.420	269.661	272.828	275.915
	Kalimantan Utara	730.010	749.370	758.770	768.000	777.020	785.810

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara 2023; Diolah

Hasil proyeksi penduduk dalam kurun waktu perencanaan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara, di mana BPS melakukan penghitungan proyeksi penduduk yang didasarkan pada penduduk menurut usia. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk tersebut, laju pertumbuhan penduduk dalam rentang waktu tersebut memiliki kecenderungan menurun, salah satu penyebabnya adalah dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB). Pada tahun 2025, pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara ini diproyeksikan sebesar 1,38 persen dan menunjukkan penurunan hingga tahun 2029 menjadi 1,13 persen.

2. Kepadatan Penduduk

Aspek demografi yang juga menjadi pokok pertimbangan kebijakan adalah tingkat kepadatan penduduk. Provinsi Kalimantan Utara memiliki peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat yang dirumuskan harus didasarkan pada kondisi kependudukan dalam hal ini tingkat kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk dilihat dari perbandingan kondisi demografi dengan geografis daerah. Berikut merupakan hasil proyeksi kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 hingga 2029.

Tabel 2. 42 Proyeksi Kepadatan Penduduk Bruto Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

No	Wilayah	Luas Wilayah (Km^2)	Proyeksi Kepadatan Penduduk Bruto Provinsi Kalimantan Utara				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Malinau	38.902	2	2	2	2	2
2	Bulungan	13.880	11	11	12	12	12

No	Wilayah	Luas Wilayah (Km^2)	Proyeksi Kepadatan Penduduk Bruto Provinsi Kalimantan Utara				
			2025	2026	2027	2028	2029
3	Tana Tidung	3.504	8	8	8	8	8
4	Nunukan	13.564	16	16	16	16	16
5	Tarakan	251	1.048	1.061	1.074	1.087	1.099
	Kalimantan Utara	70.101	11	11	11	11	11

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara 2023; Diolah

Berdasarkan hasil proyeksi dapat diketahui pula prediksi kepadatan penduduk baik bruto maupun netto di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 hingga 2029. Pada tahun 2023, kepadatan penduduk bruto di provinsi ini tercatat sebesar 10 jiwa/km^2, dengan kepadatan penduduk bruto tertinggi tercatat di Kota Tarakan dengan besaran 1.000 jiwa/km^2, sementara kepadatan penduduk bruto terendah tercatat di Kabupaten Malinau dengan besaran dua jiwa/km^2. Pada tahun 2025, kepadatan penduduk bruto di provinsi ini meningkat menjadi 11 jiwa/km^2 dan menunjukkan besaran yang sama sampai dengan tahun 2029. Kota Tarakan masih menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk bruto tertinggi dengan besaran masing-masing 1.099 jiwa/km^2 dan Kabupaten Malinau secara bruto tetap tercatat memiliki kepadatan penduduk sebesar dua jiwa/km^2.

Tabel 2. 43 Proyeksi Kepadatan Penduduk Netto Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

No	Wilayah	Luas Permukiman/ Lahan Terbangun (Km^2)	Proyeksi Kepadatan Penduduk Netto Provinsi Kalimantan Utara				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Malinau	39,53	2.251	2.279	2.307	2.334	2.361
2	Bulungan	92,45	1.690	1.711	1.732	1.752	1.772
3	Tana Tidung	14,6	1.929	1.953	1.976	2.000	2.022
4	Nunukan	65,13	3.266	3.307	3.347	3.387	3.425
5	Tarakan	37,97	6.929	7.016	7.101	7.184	7.266
	Kalimantan Utara	**249,69**	**3.001**	**3.039**	**3.076**	**3.112**	**3.147**

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara 2023; Diolah

Berdasarkan kepadatan penduduk nettonya, besaran kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 2.924 jiwa/km^2 pada tahun 2023. Capaian tersebut menunjukan kecenderungan meningkat dalam rentang tahun perencanaan, di mana pada tahun 2025 kepadatan netto di provinsi ini tercatat sebesar 3.001 jiwa/km^2 dan dalam perkembangannya bertumbuh menjadi 3.147 jiwa/km^2. Wilayah

dengan capaian kepadatan netto tertinggi di provinsi ini tercatat di Kota Tarakan dengan besaran 6.929 jiwa/km^2 di tahun 2025 dan bertumbuh menjadi 7.266 jiwa/km^2 di tahun 2029. Sementara itu, Kabupaten Bulungan merupakan wilayah dengan besaran kepadatan penduduk netto terendah di provinsi ini dengan capaian 1.772 jiwa/km^2

3. Penduduk Usia Produktif

Proyeksi penduduk yang dapat menjadi dasar kebijakan di Provinsi Kalimantan Utara salah satunya adalah proyeksi penduduk usia produktif. Jumlah penduduk usia produktif menjadi salah satu kriteria yang diproyeksi karena mampu memberikan gambaran penduduk yang masuk dalam usia kerja di Provinsi Kalimantan Utara. Penduduk usia kerja tersebut berada di antara usia 15-64 tahun.

4. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan penduduk usia kerja dengan penduduk usia tidak bekerja. Angka ketergantungan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Angka ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi angka ketergantungan maka semakin tinggi beban penduduk produktif membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dan sebaliknya.

Tabel 2. 44 Proyeksi Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

No	Indikator	Proyeksi Rasio Ketergantungan (Persen)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	<15 th dan >64 th	220.870	224.620	228.900	233.530	238.340
2	15-64 th	528.500	534.150	539.100	543.490	547.470
3	Rasio Ketergantungan	41,79	42,05	42,46	42,97	43,53

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara 2023; Diolah

Hasil proyeksi menurut kelompok umur di Provinsi Kalimantan Utara baik jumlah penduduk non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) maupun penduduk produktif (15-64 tahun) menunjukkan kecenderungan meningkat. Jumlah penduduk

usia non produktif meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,92 persen per tahun, di mana pada tahun 2025 jumlah penduduk non produktif ini tercatat sebanyak 220.870 jiwa dan meningkat menjadi 238.340 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk usia produktif menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,89 persen per tahun. Pada tahun 2025, jumlah penduduk produktif di provinsi ini tercatat sebesar 528.500 jiwa dan meningkat menjadi 547.470 jiwa di tahun 2029.

5. **Bonus Demografi**

Bonus demografi dimaknai sebagai masa di mana penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia non produktif dengan proporsi lebih dari 60 persen dari total jumlah penduduk. Proporsi tersebut dapat dilihat melalui hasil proyeksi komposisi penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. Selain dari aspek komposisi penduduk, ada atau tidaknya momentum bonus demografi di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat melalui angka ketergantungan yang dimiliki. Provinsi Kalimantan Utara dianggap mendapatkan bonus demografi apabila angka ketergantungannya di bawah 45 persen.

6. **Penduduk Usia Lanjut**

Perubahan komposisi penduduk Provinsi Kalimantan Utara di atas berdampak pada bertambahnya penduduk lanjut usia karena adanya penurunan fertilitas dan peningkatan angka harapan hidup. Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas.

2.2 Aspek kesejahteraan Masyarakat

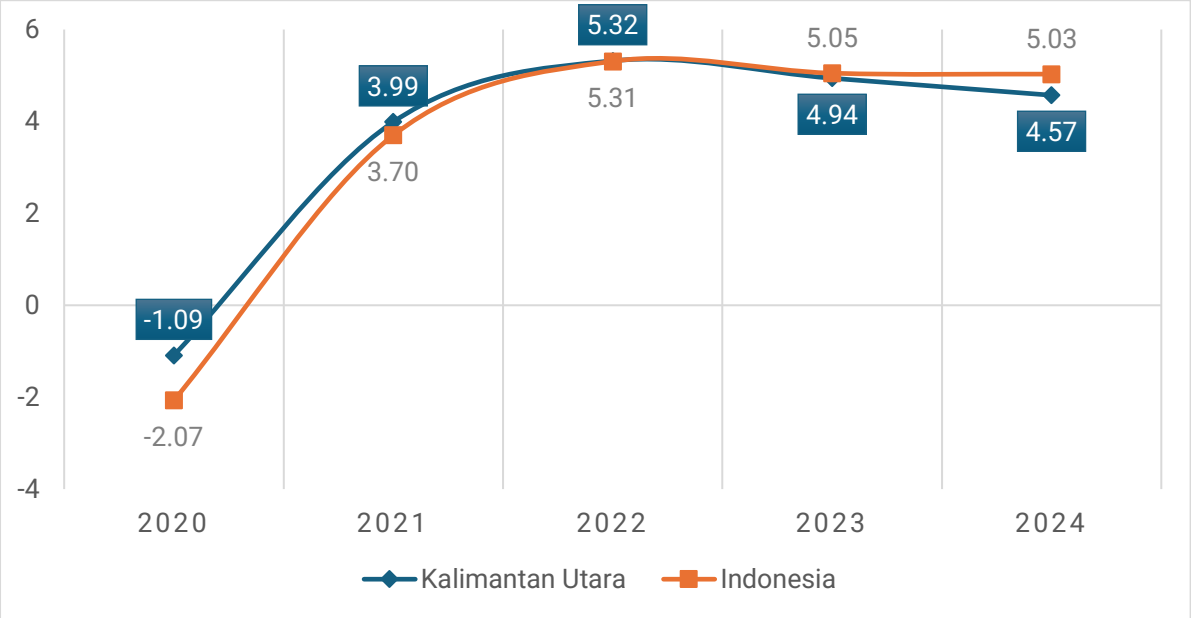
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Bagian ini menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi yang dapat dilihat dari sejumlah indikator makro ekonomi yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, dan indeks pembangunan manusia.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui sejumlah indikator salah satunya laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang mengukur pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu

wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu yang ditunjukkan oleh perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan selisih nilai PDRB ADHK tahun tertentu (*t*) terhadap tahun sebelumnya *(t-1)*. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi mengindikasikan aktivitas ekonomi yang semakin menguat.



Gambar 2. 14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: diolah dari BPS, 2025

Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan pertumbuhan yang positif. PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 73 triliun rupiah pada tahun 2024. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang sejalan dengan nasional yakni sama-sama terkontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 lalu kembali tumbuh positif seiring dengan pemulihan ekonomi daerah dan nasional. Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,55 persen per tahun lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,40 persen per tahun pada periode 2020-2024.

Tabel 2. 45 PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

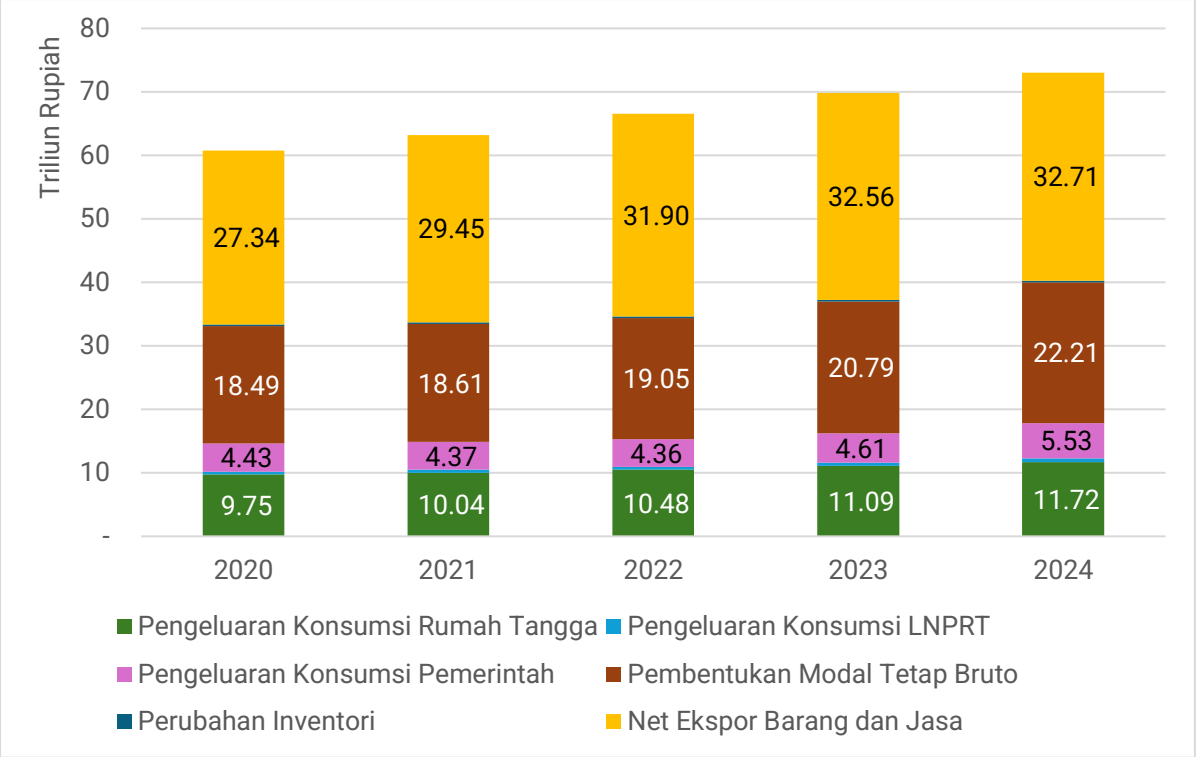
No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.925,64	11.301,51	11.719,33	12.229,93	12.444,24	3,51
B	Pertambangan dan Penggalian	15.664,22	16.710,77	17.913,47	18.561,42	18.613,78	2,20
C	Industri Pengolahan	5.413,47	5.548,87	5.768,31	5.864,74	6.062,09	1,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	44,35	46,81	50,13	59,44	59,45	8,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42,94	43,79	45,96	48,70	52,28	5,20
F	Konstruksi	7.905,16	7.858,10	7.680,74	8.351,57	9.349,77	3,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.799,64	7.282,83	7.949,28	8.453,70	9.282,15	6,57
H	Transportasi dan Pergudangan	3.820,95	3.826,14	4.223,34	4.457,13	4.702,90	3,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	858,32	881,96	978,42	1.059,04	1.184,75	5,89
J	Informasi dan Komunikasi	1.937,71	2.090,22	2.267,20	2.414,32	2.538,04	6,91
K	Jasa Keuangan	696,33	746,25	814,49	915,36	974,00	7,12
L	Real Estate	575,23	587,53	615,49	637,72	666,00	3,14
M,N	Jasa Perusahaan	145,89	149,04	158,57	164,13	169,25	2,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.163,83	3.171,73	3.268,51	3.370,89	3.518,10	2,37
P	Jasa Pendidikan	1.597,21	1.670,88	1.782,71	1.875,54	1.977,96	5,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	753,50	817,90	828,81	848,77	874,51	5,07
R,S,T,U	Jasa Lainnya	401,82	428,66	469,62	504,39	538,72	8,08
PDRB Migas		60.746,21	63.162,97	66.534,39	69.816,76	73.007,99	3,55
PDRB Tanpa Migas		58.852,05	61.213,74	64.571,38	67.933,56	71.318,95	3,76

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara didorong oleh kinerja positif seluruh lapangan usaha, khususnya sektor perdagangan besar dan eceran; pertanian, kehutanan dan perikanan; dan pertambangan dan penggalian. Kinerja ketiga sektor tersebut menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah pada tahun 2020-2024. Pada saat pandemi Covid 19 terjadi, kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tetap tumbuh positif yakni sebesar 4,3 persen menjadi penyelamat perekonomian daerah dari kontraksi yang jauh lebih dalam. Komoditas udang, ikan, rumput laut, dan kelapa sawit menjadi komoditas unggulan daerah yang mendorong PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus mengalami kenaikan.

Kinerja sektor perdagangan besar dan eceran juga memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah selama periode 2020-2024. Pertumbuhan sektor perdagangan tercatat mencapai 6,57 persen per tahun di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 mencapai 9,8 persen. Pertumbuhan sektor perdagangan berkontribusi hingga 25,96 persen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2024. Tingginya aktivitas perdagangan di Provinsi Kalimantan Utara didorong oleh tingginya konsumsi masyarakat, khususnya untuk produk konsumsi non mobil dan sepeda motor.

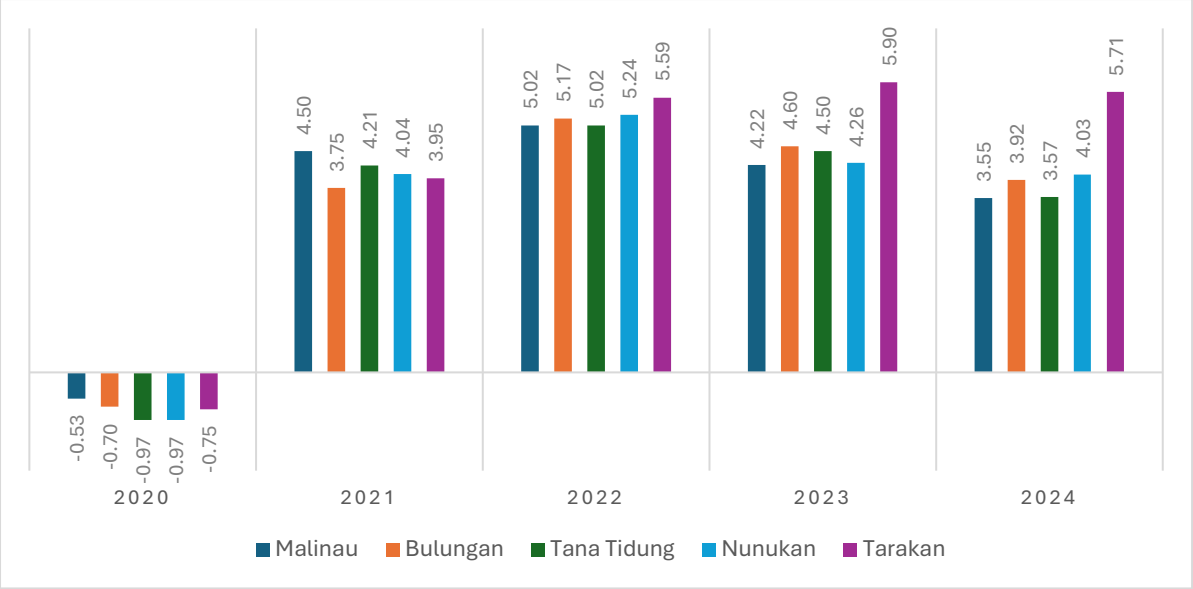
Sektor lain yang turut berperan cukup besar terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Utara adalah sektor pertambangan dan penggalian meskipun pertumbuhannya cenderung menurun. Pertumbuhan sektor ini tertahan akibat pergerakan permintaan komoditas batu bara yang cenderung menurun di tengah upaya peralihan energi di negara-negara tujuan ekspor. Meskipun demikian, permintaan batu bara dalam negeri tetap terjaga seiring dengan kebutuhan untuk pembangkit listrik dan smelter.



Gambar 2. 15 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Utara Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah)

Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Dari segi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara didorong oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 3,19 persen per tahun dan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 3,66 persen per tahun pada periode 2020-2024. Kondisi ini mengindikasikan daya beli masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara tetap terjaga sejalan dengan tingkat inflasi yang terkendali. Ekspor Provinsi Kalimantan Utara juga menunjukkan kinerja yang baik jika dilihat besaran net ekspor yang positif. Net ekspor yang positif mencerminkan adanya kelebihan produksi yang dihasilkan di dalam Provinsi Kalimantan Utara yang kemudian diekspor ke luar yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan impor yang masuk ke daerah.



Gambar 2. 16 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

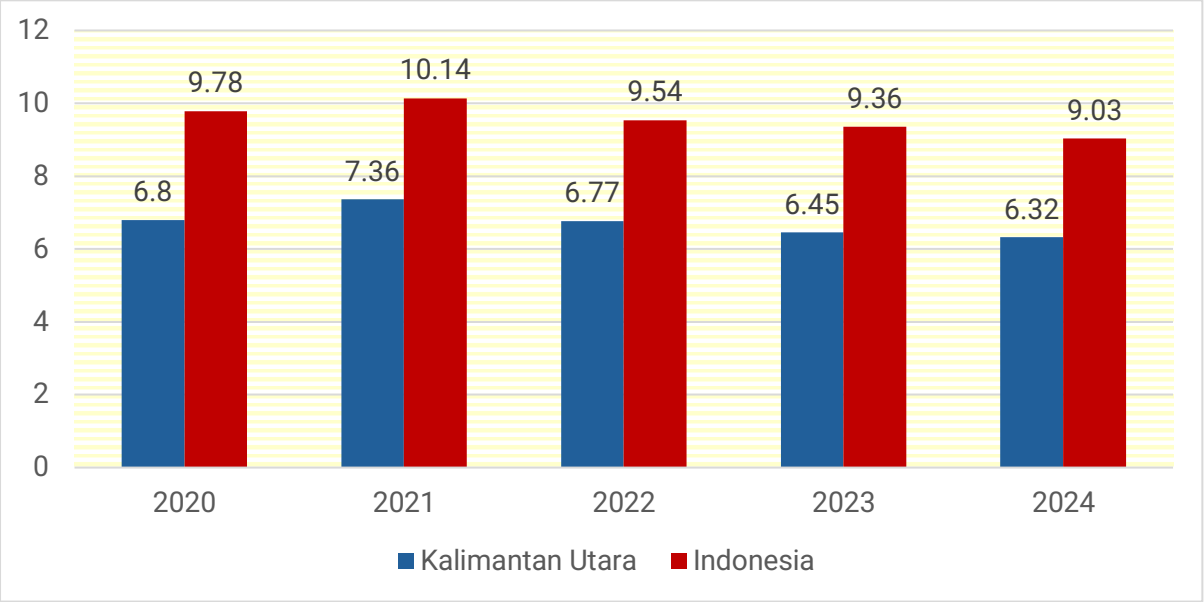
Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara juga didorong oleh pertumbuhan PDRB di tingkat kabupaten/kota. Pertumbuhan PDRB setiap kabupaten/kota memberikan kontribusi yang berbeda. Pada tahun 2024, pertumbuhan PDRB Kota Tarakan menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dengan kontribusi mencapai 43,91 persen diikuti oleh Kabupaten Nunukan sebesar 21,99 persen, Kabupaten Bulungan sebesar 17,80 persen, Kabupaten Malinau sebesar 11,02 persen, dan Kabupaten Tana Tidung sebesar 5,29 persen. Rendahnya kontribusi Kabupaten Tana Tidung terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat dari nilai PDRB daerah yang berada di bawah kabupaten/kota lainnya. PDRB Kabupaten Tana Tidung sebesar 4,1 triliun rupiah sedangkan PDRB Kota Tarakan mencapai 25,6 triliun rupiah pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.

2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan digambarkan oleh indikator persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk di suatu wilayah. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung, seperti tingkat pendapatan,

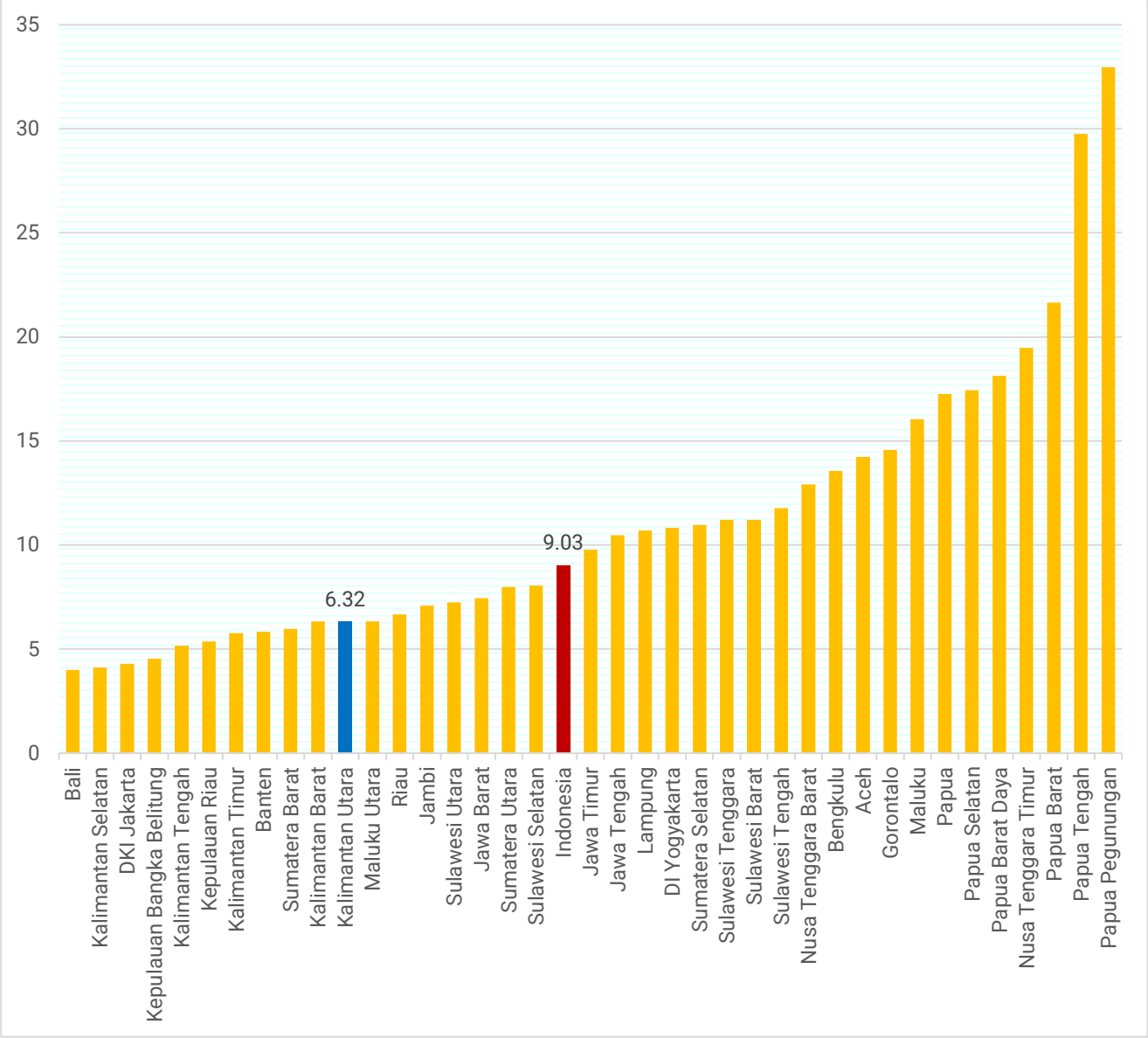
tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, harga barang dan jasa, dan lainnya. Berikut ini adalah gambaran kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2. 17 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: BPS, 2025

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan penurunan sebesar 1,63 persen per tahun selama periode 2020-2024. Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 6,32 persen pada 2024. Angka tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Posisi tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara cenderung lebih rendah dibandingkan dengan 27 provinsi lainnya di Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di wilayah Pulau Kalimantan, tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara merupakan yang tertinggi pada tahun 2024.



Gambar 2. 18 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2024 (%)

Sumber: BPS, 2025

Penurunan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara didorong oleh berbagai upaya Pemerintah Daerah dalam menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Kondisi ini dapat dilihat dari keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menurunkan jumlah penduduk miskin meskipun garis kemiskinan menunjukkan kenaikan sebesar 5,84 persen per tahun pada periode 2020-2024. Terjaganya kenaikan garis kemiskinan tersebut mengindikasikan pengendalian harga barang kebutuhan pokok berjalan dengan baik.

Tabel 2. 46 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 20202-2024 (%)

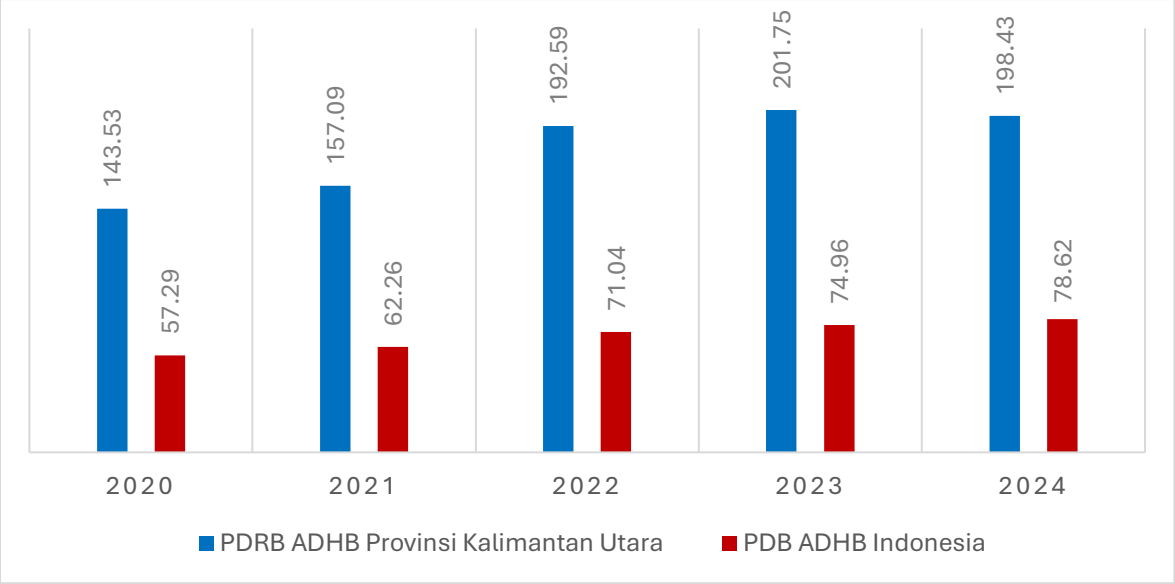
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Malinau	6,63	7,3	6,64	6,54	6,94
Bulungan	9,06	10,03	9,32	8,99	8,76
Tana Tidung	4,81	5,15	4,45	4,62	4,47
Nunukan	6,36	6,79	6,13	5,53	5,73
Tarakan	6,24	6,71	6,3	6,1	5,56

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara juga dipengaruhi oleh kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di dalamnya. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Bulungan yakni mencapai 8,76 persen pada tahun 2024, sedangkan kemiskinan terendah terjadi di Kabupaten Tana Tidung yaitu 4,47 persen. Keempat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren penurunan kemiskinan selama periode 2020-2024, sedangkan Kabupaten Malinau justru menunjukkan kenaikan. Tingkat kemiskinan yang beragam menjadi sebuah penanda bahwa penanganan kemiskinan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara masih menjadi tantangan mengingat karakteristik wilayah yang berbeda antara kabupaten/kota yang satu dengan yang lainnya.

2.2.1.3 PDRB per Kapita

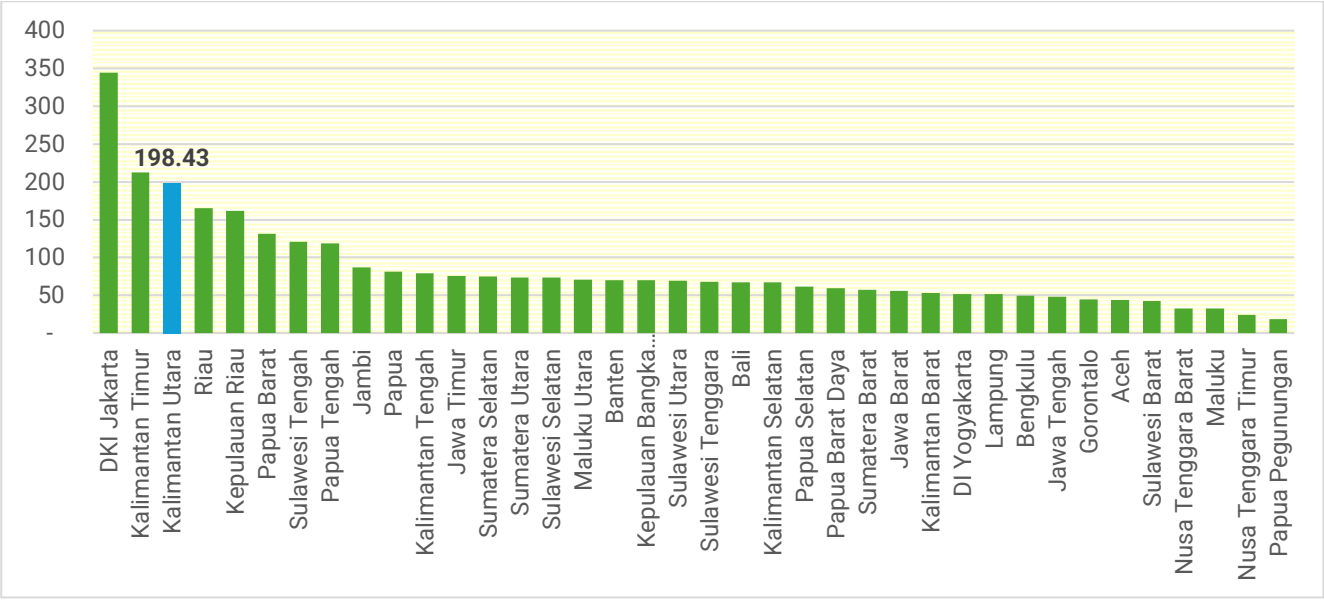
PDRB per kapita merupakan indikator yang menunjukkan tingkat produktivitas penduduk di suatu wilayah. Indikator ini juga digunakan sebagai indikator kesejahteraan karena dianggap mampu menggambarkan tingkat pendapatan setiap penduduk sebagai imbal hasil atas nilai tambah yang dihasilkan terhadap perekonomian daerah. Berikut ini adalah besaran PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2. 19 PDRB ADHB per Kapita Provinsi Kalimantan Utara dan PDB ADHB Indonesia Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS, 2025

PDRB nominal per kapita Provinsi Kalimantan Utara lebih tinggi dibandingkan dengan PDB Indonesia selama periode 2020-2024. PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara lebih tinggi hingga 152 persen dibandingkan PDB nasional pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024, PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara mencapai 198,43 juta atau mengalami kenaikan sebesar 54,90 juta rupiah dibandingkan tahun 2020.



Gambar 2. 20 PDRB ADHB per Kapita Menurut Provinsi Tahun 2024 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS, 2025

PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara merupakan ketiga tertinggi setelah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Timur. Tingginya PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara didorong oleh karakteristik perekonomian yang sama yakni ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian, khususnya komoditas batu bara. PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta merupakan yang tertinggi mencapai 344,35 juta rupiah. Berbeda dengan Provinsi Kalimantan Utara, perekonomian DKI Jakarta ditopang oleh sektor jasa sehingga nilai tambah yang dihasilkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang masih bergantung pada sektor primer.

Tabel 2. 47 PDRB ADHB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

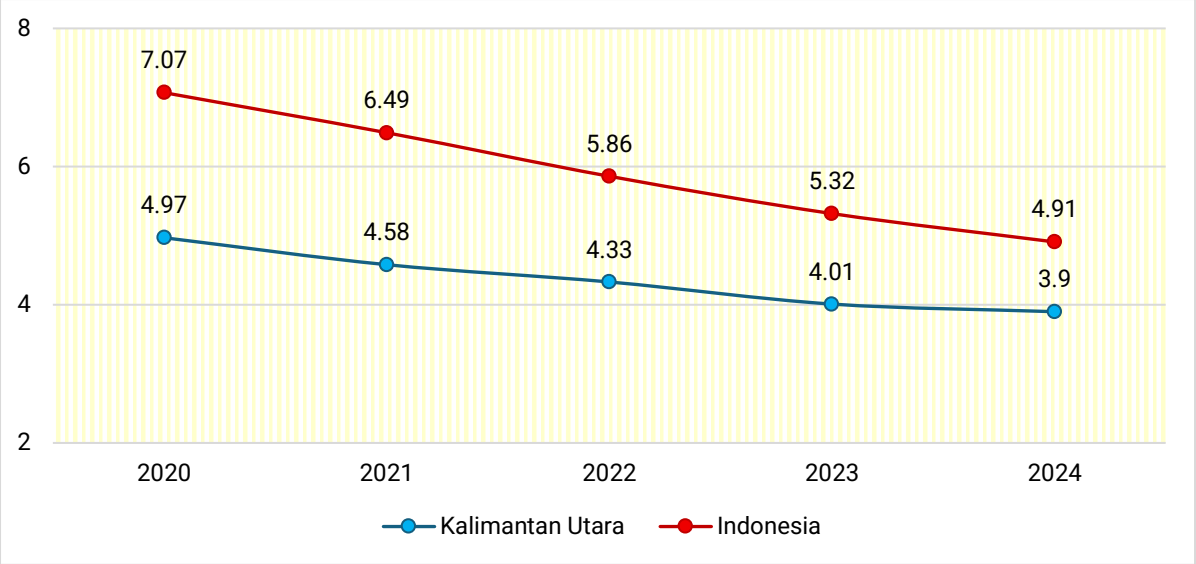
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Malinau	135,57	154,01	211,91	218,89	210,43
Bulungan	123,79	131,81	156,18	162,24	160,71
Tana Tidung	231,65	258,11	330,50	337,03	330,15
Nunukan	132,69	147,67	195,65	204,64	192,21
Tarakan	156,96	170,70	190,21	208,19	221,39
Kalimantan Utara	**143,53**	**157,09**	**192,59**	**201,75**	**198,43**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara didorong oleh PDRB yang dihasilkan oleh kabupaten/kota di wilayahnya. Capaian tertinggi tercatat di Kabupaten Tana Tidung dengan PDRB per kapita mencapai 330,15 juta rupiah sedangkan terendah tercatat di Kabupaten Bulungan sebesar 160,71 juta rupiah pada tahun 2024.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

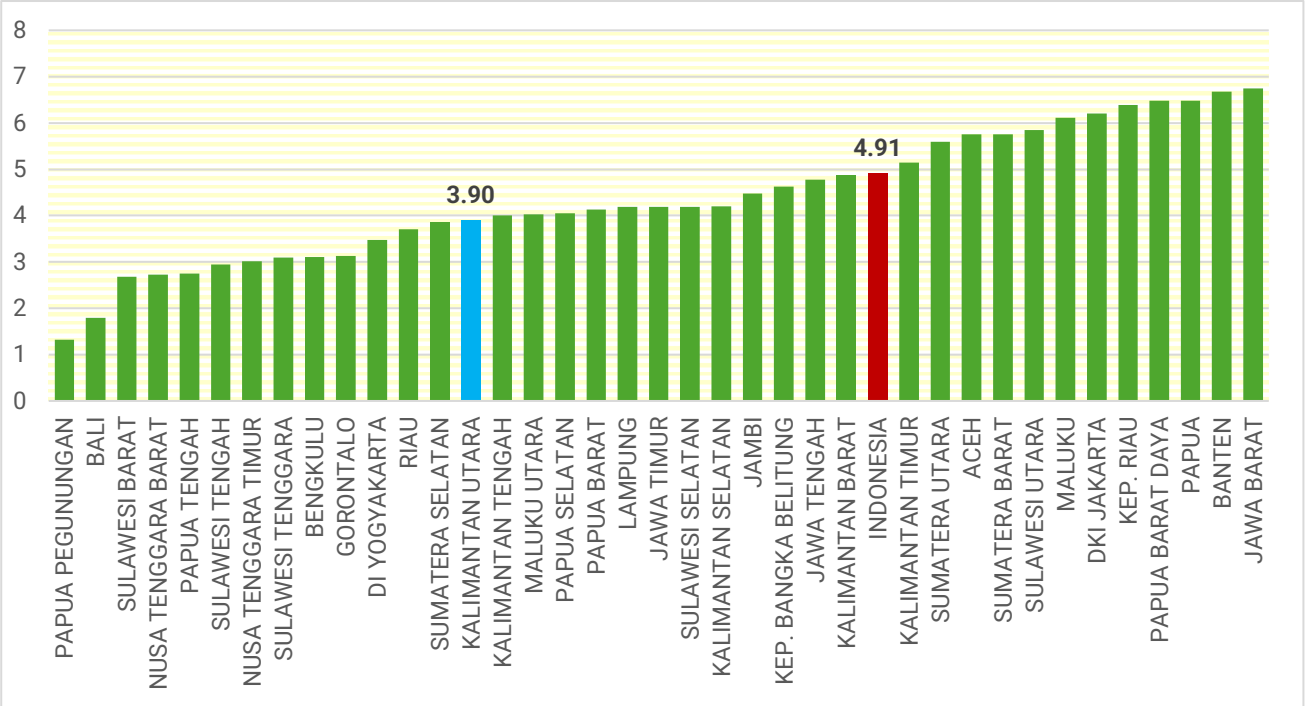
Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah juga dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan. Pembangunan ekonomi yang inklusif diharapkan dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan sehingga setiap penduduk dapat menghasilkan nilai tambah terhadap perekonomian daerah yang kemudian berdampak pada tingkat kesejahteraan. Tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tenaga kerja di suatu wilayah. Berikut ini adalah tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2. 21 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Tingkat pengangguran Provinsi Kalimantan Utara lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional. Pada periode 2020-2024, TPT Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan penurunan sebesar 5,86 persen per tahun mendorong tingkat pengangguran daerah ke angka 3,9 persen pada tahun 2024.



Gambar 2. 22 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Tahun 2024 (%)

Sumber: BPS, 2025

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan 37 provinsi lainnya di Indonesia, capaian TPT Provinsi Kalimantan Utara tercatat berada pada urutan ke-14, sekaligus menempati urutan pertama terbaik apabila dibandingkan dengan empat provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.

Tabel 2. 48 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

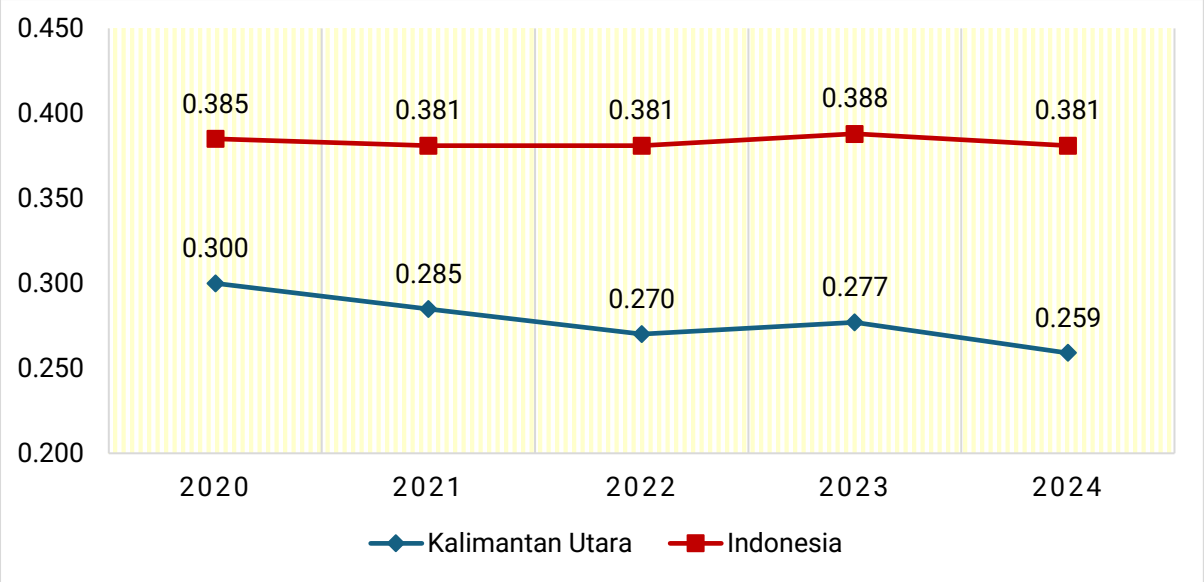
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Malinau	5,08	4,14	3,3	3,19	3,1
Bulungan	4,45	4,54	5,03	4,54	4,33
Tana Tidung	4,83	5,26	3,33	3,24	3,67
Nunukan	4,14	4,24	2,74	2,69	2,71
Tarakan	5,86	4,94	5,76	5,25	5,11
Kalimantan Utara	4,97	4,58	4,33	4,01	3,9

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Capaian TPT di lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Hal tersebut ditandai dengan turunnya TPT di seluruh kabupaten/kota selama periode 2020-2024. TPT tertinggi tercatat di Kabupaten Tarakan mencapai 5,11 persen sedangkan terendah tercatat di Kabupaten Nunukan pada tahun 2024.

2.2.1.5 Indeks Gini

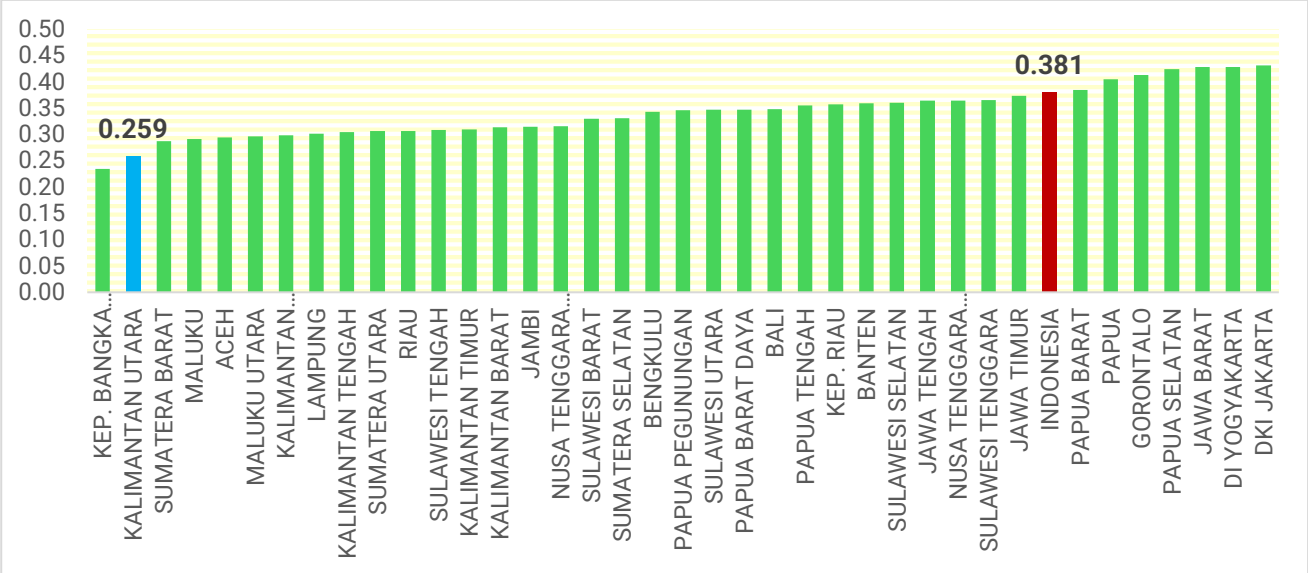
Pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh kelompok masyarakat akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu wilayah tidak selalu merata. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan di antara kelompok masyarakat. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat, yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing—masing kelompok penduduk. Besaran nilai Indeks Gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Capaian Indeks Gini yang semakin mendekati nol dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik, sebaliknya apabila angka koefisien semakin mendekati satu, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar.



Gambar 2. 23 Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Indeks Gini baik di Provinsi Kalimantan Utara maupun nasional menunjukkan kondisi yang semakin membaik, yang ditunjukkan dengan menurunnya nilai Indeks Gini sebesar 3,54 persen per tahun pada periode 2020-2024. Dalam rentang waktu yang sama, capaian Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kondisi yang lebih baik apabila dibandingkan dengan capaian nasional, di mana dalam kurun waktu tersebut kondisi ketimpangan Provinsi Kalimantan Utara berada dalam kategori ketimpangan rendah atau di bawah 0,3.



Gambar 2. 24 Indeks Gini Menurut Provinsi Tahun 2024

Sumber: BPS, 2025

Apabila dibandingkan dengan 37 provinsi lain di Indonesia, capaian Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara berada pada urutan kedua setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan empat provinsi lain di Pulau Kalimantan, maka capaian Provinsi Kalimantan Utara menempati pada urutan pertama terbaik, di mana capaian provinsi tersebut seluruhnya berada pada ketimpangan moderat. Rendahnya nilai indeks gini di Provinsi Kalimantan Utara mengindikasikan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat tergolong rendah meskipun jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinannya, kondisi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara masih perlu untuk ditingkatkan.

Tabel 2. 49 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Malinau	0,295	0,304	0,260	0,285	0,283
Bulungan	0,290	0,338	0,287	0,305	0,274
Tana Tidung	0,259	0,312	0,279	0,281	0,280
Nunukan	0,262	0,261	0,265	0,262	0,270
Tarakan	0,295	0,261	0,267	0,253	0,232
Kalimantan Utara	0,300	0,285	0,270	0,277	0,264

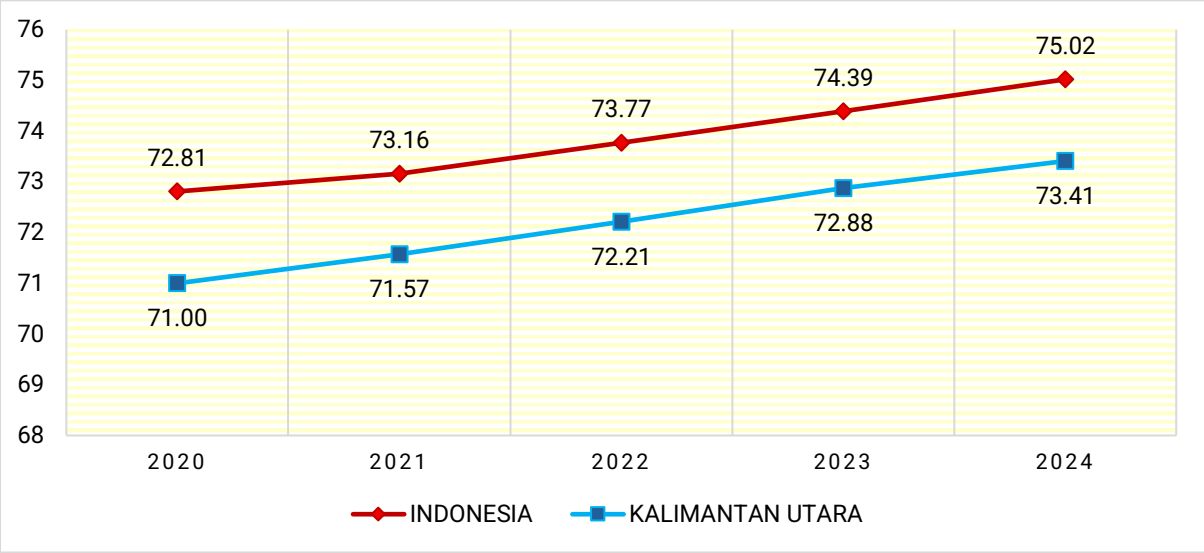
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Capaian Indeks Gini menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara cukup beragam, di mana dalam rentang waktu lima tahun terakhir seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Pada tahun 2023, capaian Indeks Gini di Kabupaten Bulungan berada pada ketimpangan moderat, sementara capaian pada empat wilayah lainnya berada pada kriteria ketimpangan rendah, sedangkan pada tahun 2024 seluruh kabupaten/kota tercatat memiliki ketimpangan rendah. Ketimpangan tertinggi tercatat pada Kabupaten Malinau yaitu sebesar 0,283 sedangkan ketimpangan terendah tercatat di Kota Tarakan sebesar 0,232.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. IPM dapat digunakan untuk melihat keberhasilan suatu daerah dalam melakukan pembangunan manusia yang telah dilakukan. Pencapaian pembangunan manusia ini diukur melalui tiga dimensi, yaitu

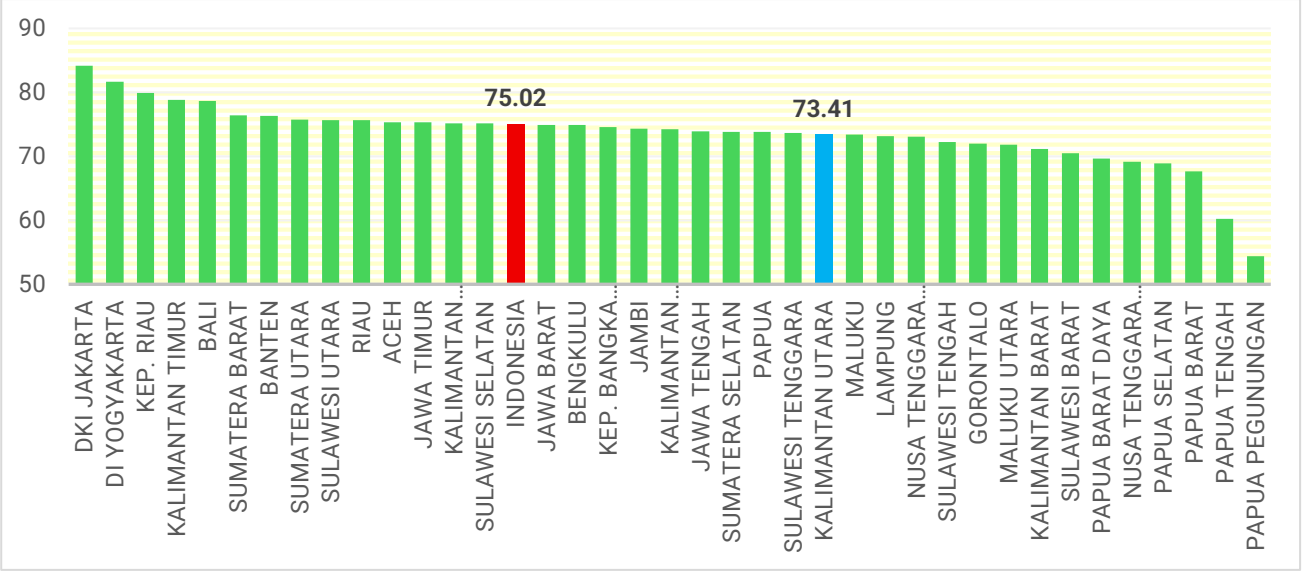
dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Berikut adalah capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2. 25 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,84 persen per tahun. Pada tahun 2024, IPM Kalimantan Utara mencapai angka 73,41 mengalami kenaikan sebesar 2,41 poin dibandingkan tahun 2020. Pada periode 2020-2024, IPM Provinsi Kalimantan Utara tergolong tinggi tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM nasional. Pada tahun 2024, IPM Provinsi Kalimantan Utara lebih rendah 1,61 poin dibandingkan dengan nasional.



Gambar 2. 26 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Tahun 2024

Sumber: BPS, 2025

Capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara menempati urutan ke-25 apabila dibandingkan dengan 37 provinsi lain di Indonesia. Sementara itu, jika dibandingkan dengan empat provinsi lain di Pulau Kalimantan, provinsi ini menempati urutan keempat setelah Provinsi Kalimantan Timur (78,79), Provinsi Kalimantan Selatan (75,19), dan Provinsi Kalimantan Tengah (74,28). Capaian tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih memiliki tugas untuk terus bekerja keras dalam mengupayakan peningkatan pembangunan manusia di daerah.

Tabel 2. 50 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Malinau	72,73	73,12	73,55	74,00	74,72
Bulungan	71,56	72,27	72,56	73,20	73,83
Tana Tidung	67,79	68,59	69,45	70,06	70,95
Nunukan	66,50	67,18	67,88	68,43	69,27
Tarakan	75,89	76,30	76,75	77,61	78,03
Kalimantan Utara	71,00	71,57	72,21	72,88	73,41

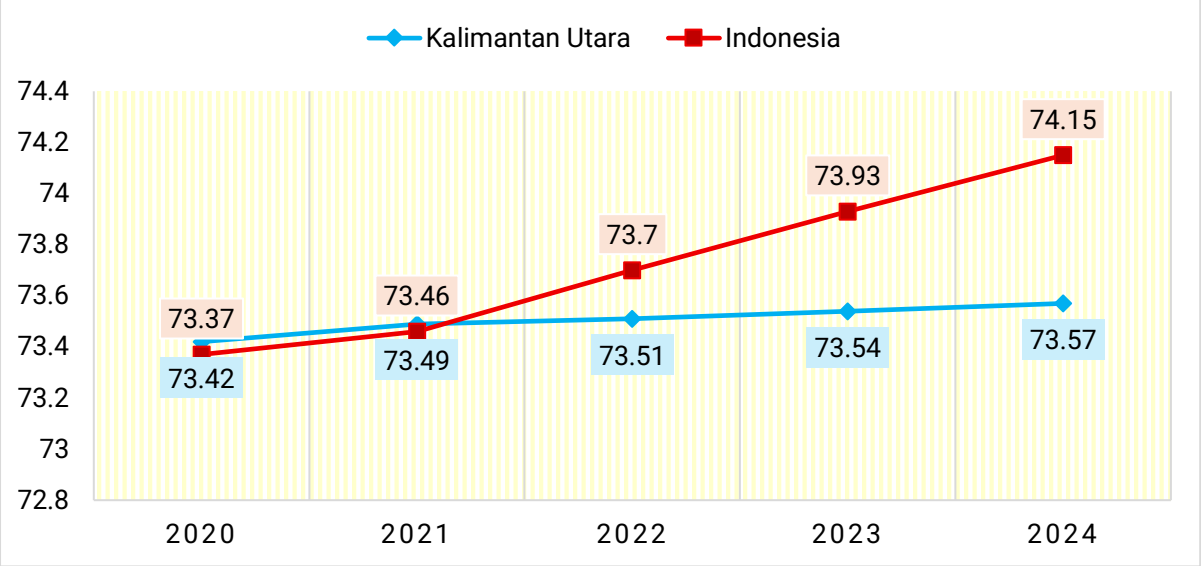
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Capaian IPM di lima kabupaten/kota menunjukkan kecenderungan membaik pada periode 2020-2024, meskipun masih terdapat satu wilayah dengan capaian IPM pada kriteria sedang, yakni Kabupaten Nunukan dengan capaian sebesar 69,27 pada 2024. Sementara itu, empat wilayah lainnya telah mampu mencapai kriteria IPM tinggi,

sekaligus memiliki capaian yang telah melampaui capaian IPM provinsi. Kota Tarakan merupakan wilayah dengan capaian IPM tertinggi di provinsi ini dengan capaian 78,03, dan diikuti oleh Kabupaten Malinau sebesar 74,72 dan Kabupaten Bulungan sebesar 73,83.

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Salah satu indikator yang mencerminkan kualitas kesehatan yakni usia harapan hidup (UHH). UHH merupakan rata-rata banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir pada tahun suatu tahun tertentu. UHH menjadi salah satu indikator pembentuk dari indeks pembangunan manusia (IPM). Semakin tinggi UHH mengindikasikan semakin baik derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah. Berikut capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2. 27 Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Hasil Long Form SP2020 Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Indonesia, 2025

Selama periode 2020-2024, capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang meningkat. Selama periode tersebut, capaian UHH Provinsi Kalimantan Utara meningkat sebesar 0,15 poin. Kenaikan UHH mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara

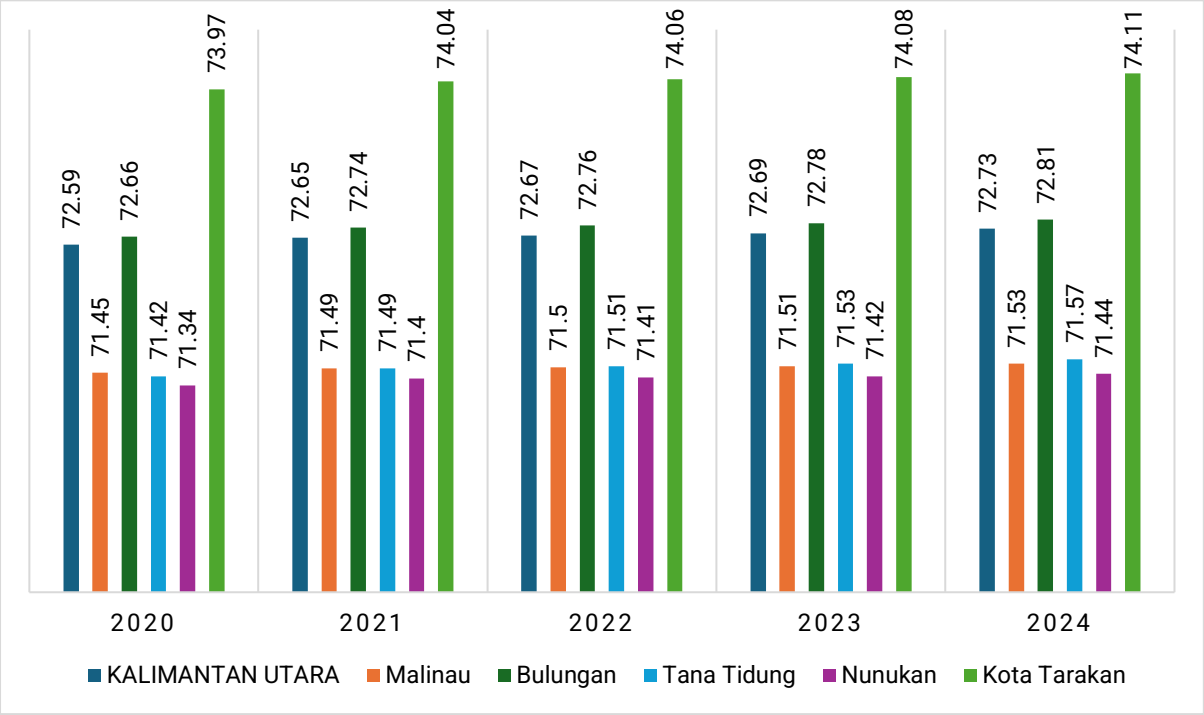
berjalan cukup baik. Pada tahun 2024, capaian UHH Provinsi Kalimantan Utara sebesar 73,57. Artinya, bayi yang baru lahir di tahun 2024 memiliki kesempatan rata-rata usia hingga 73,57 tahun.

Pada tahun 2020-2021, capaian UHH Provinsi Kalimantan Utara berada di atas nasional. Namun, pada tahun 2022-2024 capaian UHH Provinsi Kalimantan Utara berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara cenderung melambat. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan UHH Provinsi Kalimantan Utara selama lima tahun terakhir sebesar 0,05 persen, sedangkan rata-rata nasional sebesar 0,26 persen. Dengan demikian, dibutuhkan upaya percepatan pembangunan kesehatan yang signifikan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

Disisi lain, capaian indikator Usia Harapan Hidup (UHH) belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh aspek pelayanan dasar kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. SPM kesehatan mencakup 12 jenis layanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah, antara lain pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, dan nifas; pelayanan bayi dan balita; pelayanan imunisasi dasar; serta penanggulangan penyakit menular seperti tuberkulosis dan HIV. Oleh karena itu, untuk menilai capaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh, diperlukan pula pemantauan dan pelaporan capaian indikator SPM kesehatan di seluruh kabupaten/kota. Hal ini penting agar kebijakan dan program intervensi kesehatan dapat lebih tepat sasaran dan berkeadilan, terutama di daerah-daerah dengan akses layanan kesehatan yang masih terbatas. Kedepan, integrasi data capaian SPM kesehatan dalam perencanaan pembangunan daerah akan menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan pemenuhan hak dasar kesehatan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara.

Usia Harapan Hidup (UHH) dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, akses pemenuhan gizi, penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta penyediaan fasilitas sanitasi, air bersih dan pengelolaan sampah yang memadai. Dalam peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berhasil mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) dengan persentase 84,67 persen kepesertaan jaminan kesehatan aktif pada

tahun 2024. Secara lebih rinci, berikut capaian UHH pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2. 28 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

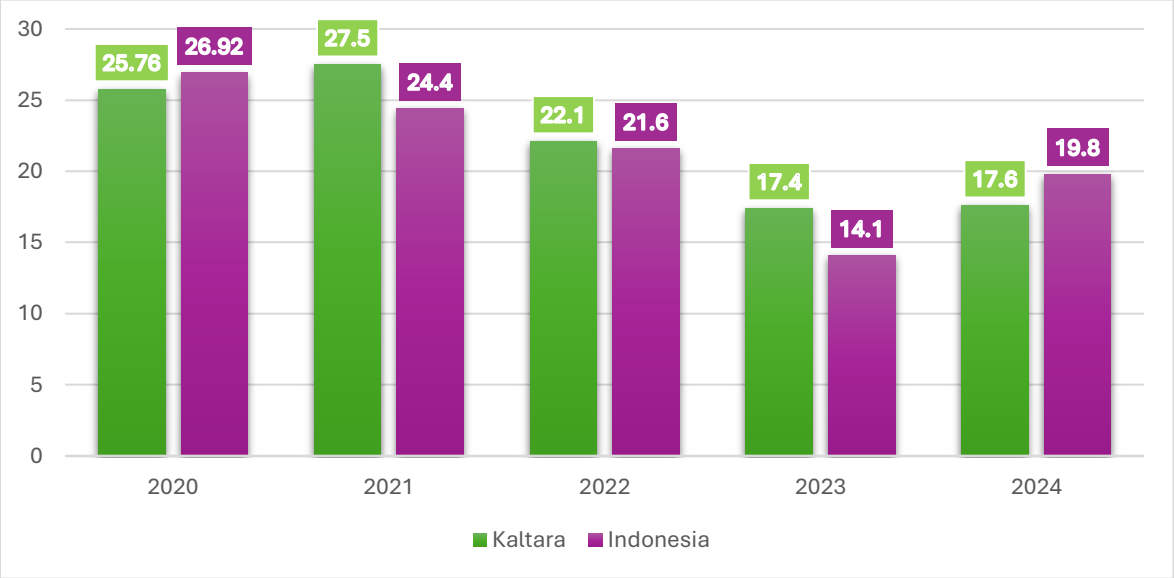
Sumber: BPS Indonesia, 2025

Selama periode 2020-2024, Usia harapan hidup (UHH) kabupaten/kota di Kalimantan Utara menunjukkan tren yang meningkat. Hal tersebut menunjukkan adanya kemajuan pembangunan kesehatan pada masing-masing daerah. Capaian UHH paling tinggi terdapat pada dua daerah yaitu Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Kedua daerah tersebut memiliki capaian UHH di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2024, UHH Kota Tarakan 74,11 dan Kabupaten Bulungan 72,8. Tingginya kualitas kesehatan pada kedua daerah tersebut disebabkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang cukup baik. Kota Tarakan sebagai pusat perkotaan dan Kabupaten Bulungan sebagai pusat pemerintahan memiliki pembangunan yang relatif berkembang, sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan layanan kesehatan yang memadai.

Sedangkan tiga daerah lainnya memiliki capaian UHH di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2024, capaian UHH pada ketiga daerah tersebut yakni Kabupaten Tana Tidung sebesar 71,57, Kabupaten Malinau 71,53, dan

Kabupaten Nunukan 71,44. Ketiga daerah tersebut sama-sama memiliki capaian UHH pada angka 71 tahun, sedangkan rata-rata Provinsi sudah mencapai angka 72 tahun. Belum optimalnya kualitas kesehatan pada ketiga daerah tersebut disebabkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang masih kurang. Dengan demikian, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten perlu memberikan perhatian lebih untuk pembangunan kesehatan pada ketiga wilayah tersebut.

Selain UHH, capaian kesehatan lain yang perlu diperhatikan yaitu prevalensi stunting. Stunting merupakan salah satu isu yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Stunting memiliki dampak tidak hanya pada tinggi badan, namun juga berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dimasa mendatang serta kemampuan daya tahan tubuh yang rentan terhadap penyakit-penyakit kronis. Berikut capaian prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020-2024.



Gambar 2. 29 Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024

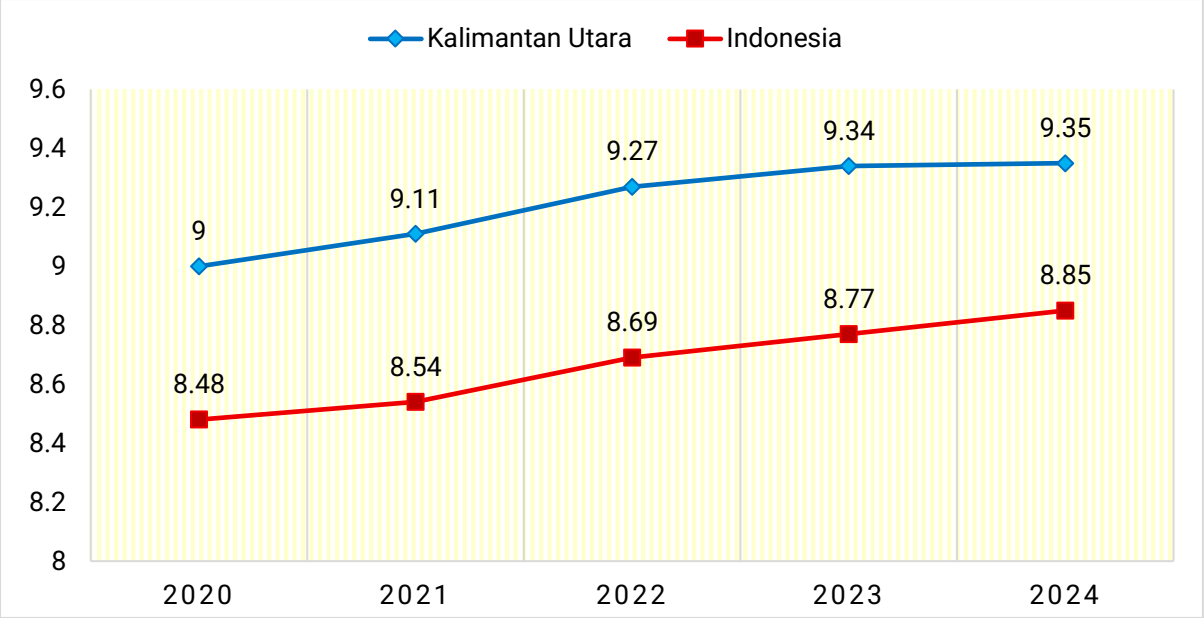
Sumber:Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2020-2024

Selama periode 2020-2024, prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Utara menunjukan trend fluktuatif. Capaian stunting tertinggi pada tahun 2021 sebesar 27,5 persen dan terendah pada tahun 2023 sebesar 17,4 persen. Pada tahun 2024, capaian stunting Kaltara 17,6 persen. Capaian tersebut lebih rendah 2,2 persen dibanding capaian nasional sebesar 19,8 persen. Kondisi tersebut menunjukan upaya penanganan stunting serta perbaikan gizi di Provinsi Kalimantan Utara berjalan cukup

baik. Namun demikian, upaya penanganan stunting masih perlu ditekan hingga titik optimal. Adapun penyebab stunting diataranya asupan gizi ibu hamil dan balita yang yang belum memenuhi standar gizi seimbang, edukasi terkait pola asuh yang baik masih kurang, akses sanitasi aman dan air bersih belum merata pada semua wilayah, pelayanan kesehatan yang belum optimal, serta perkawinan usia anak yang berpotensi pada kehamilan bersiko. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dengan pendekatan ke hulu mulai dari remaja, calon pengantin,ibu hamil, dan balita. Upaya tersebut memerlukan kerjasama lintas sektor mulai dari kecamatan, kelurahan, puskesmas, perangkat daerah terkait, hingga pihak swasta dan masyarakat.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan aspek yang cukup berpengaruh terhadap terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Kedua indikator tersebut menjadi salah satu komponen pembentuk dari indeks pembangunan manusia (IPM). Semakin tinggi capaian RLS dan HLS mencerminkan semakin tinggi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan formal baik ditingkat dasar, menengah hingga tinggi. Pendidikan yang lebih tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan. Berikut capaian RLS dan HLS Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2. 30 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh pendidikan formal. Selama periode 2020-2024, capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang meningkat. Selama periode tersebut, capaian RLS Provinsi Kalimantan Utara meningkat sebesar 0,35 poin. Kenaikan RLS mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk yang mengenyam pendidikan formal, sehingga diharapkan memiliki tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang lebih baik. Pada tahun 2024, capaian RLS Provinsi Kalimantan Utara sebesar 9,35. Artinya, rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Utara telah menempuh pendidikan formal selama 9,35 tahun atau setara kelas 3 SMP.

Capaian RLS Provinsi Kalimantan Utara selalu berada di atas Indonesia. Artinya, pembangunan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara masih lebih baik dibanding rata-rata nasional. Namun demikian, jika dilihat dari tren peningkatan selama lima tahun, maka peningkatan RLS Provinsi Kalimantan Utara masih lebih rendah. RLS Provinsi Kalimantan Utara meningkat 0,35 poin dengan rata-rata peningkatan 0,96 persen per tahun, sedangkan RLS Indonesia meningkat 0,37 poin dengan rata-rata peningkatan 1,07 persen per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan

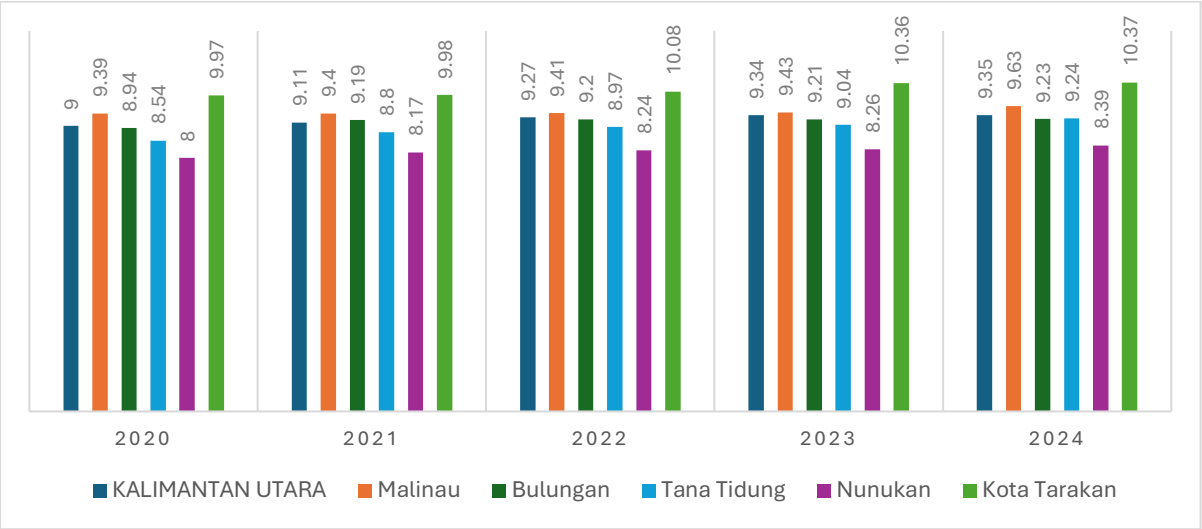
bahwa pertumbuhan RLS Provinsi Kalimantan Utara cenderung lambat. Untuk itu, dibutuhkan upaya percepatan pembangunan bidang pendidikan sehingga tetap memiliki capaian yang lebih tinggi dibanding nasional, serta dapat mewujudkan SDM yang berkualitas.

Meskipun capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) memberikan gambaran makro terhadap akses dan hasil pembangunan pendidikan, indikator tersebut belum sepenuhnya mencerminkan capaian layanan dasar pendidikan sebagaimana dimandatkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. SPM pendidikan memuat jenis layanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah, seperti layanan pendidikan dasar wajib belajar 12 tahun, layanan terhadap anak tidak sekolah (ATS), serta layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.Untuk itu, capaian SPM pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan pendidikan ke depan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal dari akses pendidikan dasar yang layak, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan satuan pendidikan, tenaga pendidik, serta keterjangkauan layanan.

Lebih jauh, pemenuhan layanan dasar pendidikan sebagai bagian dari SPM memiliki kontribusi strategis dalam menanggulangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antardaerah. Akses pendidikan yang merata dan berkualitas memungkinkan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan miskin, untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan guna meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu, integrasi capaian dan pemenuhan SPM pendidikan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Utara.

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan rata-rata sekolah dan meningkatkan kualitas SDM secara lebih luas. Peningkatan akses pendidikan dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana layanan pendidikan, peningkatan jumlah dan distribusi guru dan tenaga pendidikan, serta peningkatan upaya promosi dan edukasi terkait pentingnya

pendidikan sebagai bekal masa depan. Sedangkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta kualitas proses pembelajaran dan fasilitas belajar yang memadai. Secara lebih rinci, berikut capaian RLS dan HLS pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.



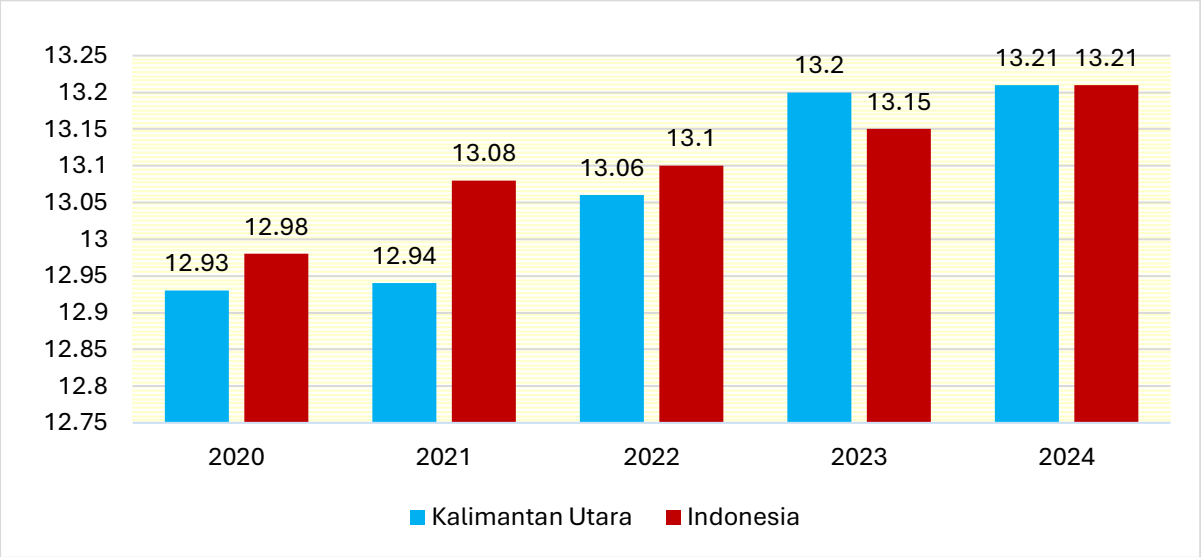
Gambar 2. 31 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Indonesia, 2025

Selama periode 2020-2024, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) kabupaten/kota di Kalimantan Utara menunjukkan tren yang meningkat. Hal tersebut menunjukkan adanya kemajuan pembangunan pendidikan pada masing-masing daerah. Capaian RLS paling tinggi terdapat pada dua daerah yaitu Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau. Kedua daerah tersebut memiliki capaian RLS di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2024, RLS Kota Tarakan 10,37 dan Kabupaten Malinau 9,63. Tingginya capaian RLS disebabkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan yang cukup baik, serta dukungan kebijakan yang berpengaruh terhadap akses pendidikan.

Sedangkan tiga daerah lainnya memiliki capaian RLS di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Bulungan 9,23, Kabupaten Tana Tidung 9,24, dan Kabupaten Nunukan 8,39. Kabupaten Bulungan sebagai pusat pemerintahan memiliki RLS di bawah rata-rata Provinsi. Belum optimalnya capaian pendidikan pada ketiga daerah tersebut disebabkan akses dan kualitas layanan pendidikan yang masih kurang. Dengan demikian, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten perlu

memberikan perhatian lebih untuk pembangunan pendidikan pada ketiga wilayah tersebut.

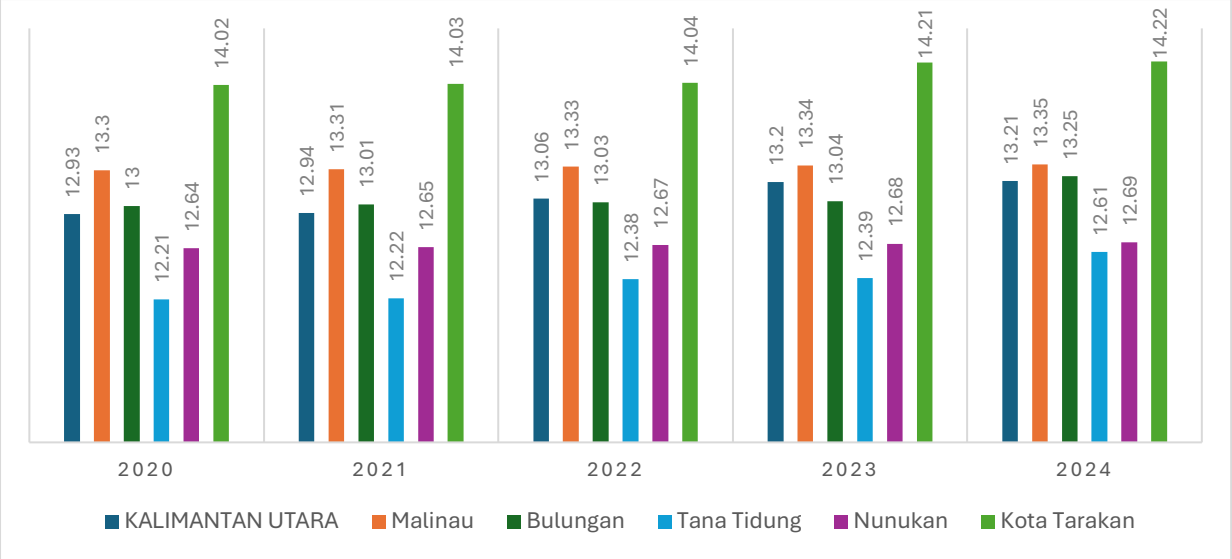


Gambar 2. 32 Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Indonesia, 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan perkiraan jumlah tahun sekolah yang dapat ditempuh oleh anak-anak pada usia tertentu di suatu wilayah. Selama periode 2020-2024, capaian harapan lama sekolah (HLS) Provinsi Kalimantan Utara memiliki tren meningkat. Selama periode tersebut, capaian HLS naik 0,28 poin. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dan 2023 dengan kenaikan sebesar 0,12 dan 0,14. Selain itu, capaian HLS Provinsi Kalimantan Utara berhasil sejajar dengan rata-rata nasional di tahun 2024.

Kenaikan HLS mengindikasikan bahwa peluang untuk menempuh pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi semakin besar. Pada tahun 2024, HLS Provinsi Kalimantan Utara 13,21. Artinya, anak-anak di Kalimantan Utara diproyeksikan dapat menempuh pendidikan hingga 13,21 tahun atau setara kelas Diploma I. Hal tersebut mencerminkan akses pendidikan yang cukup baik, tetapi belum mencapai tingkat pendidikan tinggi secara luas.



Gambar 2. 33 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Indonesia, 2025

Selama periode 2020-2024, Harapan Lama Sekolah (HLS) kabupaten/kota di Kalimantan Utara menunjukkan tren yang meningkat. Hal tersebut menunjukkan peluang untuk menempuh pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi semakin besar. Dari lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, hanya dua daerah yang memiliki capaian di bawah rata-rata Provinsi yakni Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. Hal tersebut berkorelasi dengan capaian RLS yang masih kurang. Dengan demikian, peningkatan akses pendidikan pada kedua daerah tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih, sehingga dapat meningkatkan peluang pendidikan masyarakat ke jenjang lebih tinggi.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang tangguh dan inklusif, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik. Salah satu indikator yang mencerminkan perlindungan yakni cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menerapkan beberapa kebijakan dan program untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja. Kebijakan tersebut diantaranya Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Adanya regulasi tersebut

diharapkan bisa meningkatkan cakupan kepesertaan dan memberikan kemanfaatan bagi perlindungan pekerja, baik pekerja formal, informal bahkan pekerja rentan. Pada tahun 2024, cakupan jaminan ketenagakerjaan Kalimantan Utara sebesar 77,23 persen. Capaian tersebut meningkat dari tahun sebelumnya 76,71 persen. Denga demikian, upaya pemenuhan *universal coverage* Jamsostek (UCJ) telah dilakukan, namun masih perlu ditingkatkan pada periode mendatang.

Meskipun capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan arah positif, perlindungan sosial yang adaptif tidak hanya terbatas pada aspek jaminan ketenagakerjaan, namun juga mencakup pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yang merupakan layanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. SPM sosial mencakup rehabilitasi sosial dasar, baik yang dilakukan di dalam panti (kewenangan provinsi) maupun di luar panti (kewenangan kabupaten/kota), bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti lansia, anak terlantar, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.Saat ini, layanan rehabilitasi sosial di Provinsi Kalimantan Utara masih sangat terbatas. Pemerintah provinsi baru memiliki panti lansia sebagai satu-satunya panti milik pemerintah, sedangkan sebagian besar layanan panti lainnya masih bergantung pada lembaga swasta.

Di sisi lain, pemerintah kabupaten/kota belum sepenuhnya memiliki kelembagaan atau panti layanan rehabilitasi sosial dasar, terutama untuk penyandang disabilitas atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Ke depan, pembangunan dan penguatan kelembagaan layanan rehabilitasi sosial dasar, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, perlu menjadi prioritas dalam agenda perlindungan sosial.Pemenuhan SPM sosial tidak hanya bertujuan untuk memastikan hak dasar kelompok rentan, tetapi juga memiliki dampak strategis dalam upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dengan tersedianya layanan rehabilitasi sosial yang memadai, kelompok rentan memiliki kesempatan untuk mendapatkan intervensi yang terarah dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, integrasi capaian dan rencana pemenuhan SPM sosial ke dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan di Provinsi Kalimantan Utara.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Konsep Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju mencerminkan upaya dalam menciptakan keseimbangan antara kehidupan beragama dan perkembangan budaya. Kehidupan beragama memberikan nilai manfaat nyata bagi masyarakat, sedangkan perkembangan budaya berupaya tetap berpijak pada kearifan lokal dan tetap terbuka terhadap dinamika global. Praktik keagamaan yang maslahat tidak hanya menekankan pada aspek ritual, tetapi juga mendorong kontribusi aktif terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan penguatan etika kolektif. Hal ini menjadi fondasi penting dalam membentuk masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis.

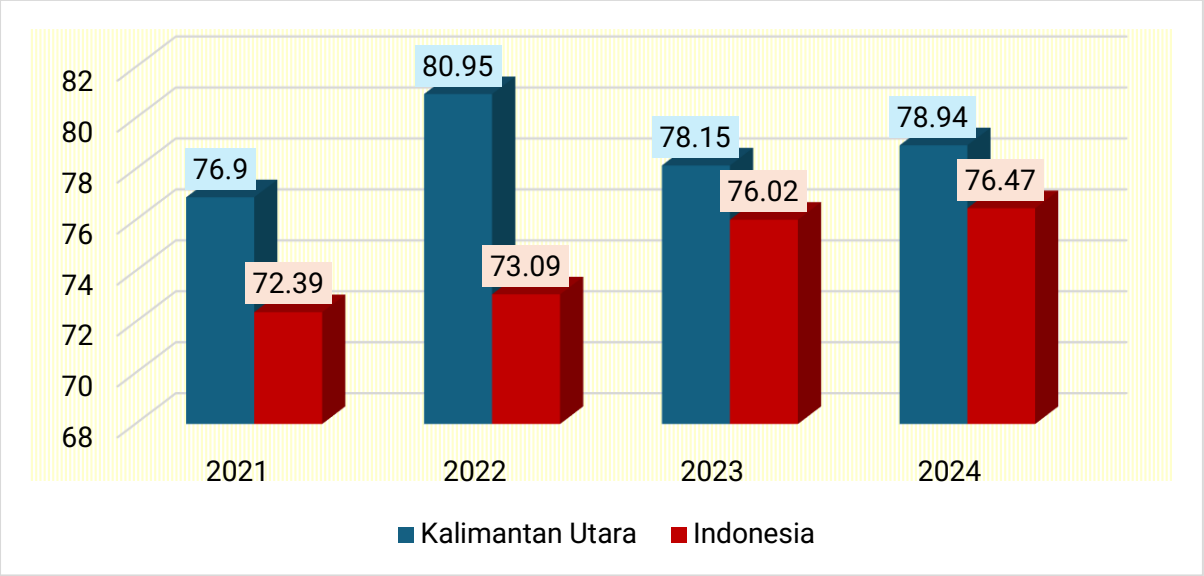
Pada sisi lain, budaya yang maju menggambarkan masyarakat yang mampu melestarikan warisan lokal sembari beradaptasi dengan perkembangan zaman. Proses ini menumbuhkan identitas daerah yang kuat dan menciptakan modal sosial yang mendukung daya saing wilayah. Integrasi antara nilai-nilai agama yang membawa maslahat dan budaya yang dinamis akan menghasilkan masyarakat Kalimantan Utara yang berkarakter, adaptif, dan siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Kedua nilai di atas menjadi acuan penting dalam merancang program dan kebijakan yang berorientasi pada penguatan kohesi sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan pelestarian identitas lokal dalam konteks perencanaan jangka menengah di Kalimantan Utara. Capaian dari sinergi ini dapat dilihat melalui indikator seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Pembangunan Kebudayaan yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan berbasis nilai dan budaya dalam lima tahun mendatang.

2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan masyarakat. Upaya keberlanjutan dibutuhkan untuk membangun, memelihara, dan menguatkan toleransi serta kerja sama antarumat beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) hadir sebagai instrumen untuk mengukur tingkat harmoni antar pemeluk agama di suatu wilayah. Indeks ini tidak hanya menggambarkan kondisi aktual kerukunan, tetapi juga

memberikan pemetaan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk memperkuat kohesi sosial. Berikut merupakan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2. 34 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2024

Sumber: Indeks Kerukunan Umat Beragama, Kemenag, 2024

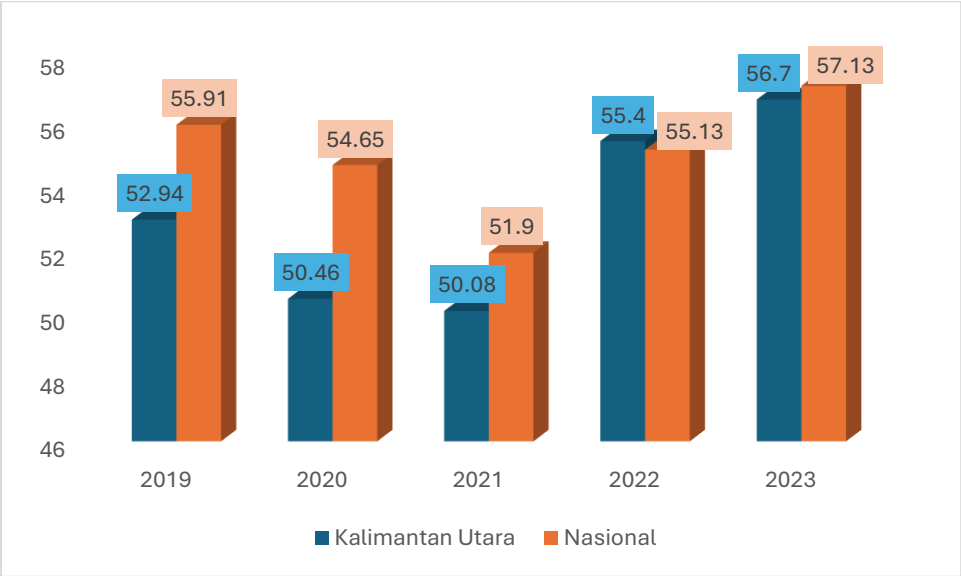
Grafik tersebut menampilkan tren Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) selama empat tahun terakhir di Provinsi Kalimantan Utara dibandingkan dengan rata-rata nasional. Secara umum Indeks Kerukunan Umat Beragama nasional mengalami peningkatan setiap tahun, sedangkan Provinsi Kalimantan Utara mengalami fluktuasi selama empat tahun terakhir. Meskipun berfluktuasi, capaian IKUB Provinsi Kalimantan Utara berada di atas capaian nasional. Provinsi Kalimantan Utara juga sempat menduduki peringkat ketiga terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama tertinggi di Indonesia pada tahun 2022. Hal itu dapat mengindikasikan bahwa Provinsi Kalimantan Utara memiliki karakter masyarakat yang terbuka, inklusif, dan hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman agama dan budaya.

Capaian IKUB Kalimantan Utara yang lebih tinggi dibandingkan skor nasional menunjukkan tingkat toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang relatif tinggi di provinsi tersebut. Peningkatan cukup tinggi terjadi pada tahun 2022 yang dapat dipengaruhi oleh penguatan program moderasi beragama, peran tokoh agama dan masyarakat adat, serta stabilitas sosial-politik di wilayah tersebut. Penurunan IKUB pada tahun 2023 sebesar 2,80 poin bisa jadi dipengaruhi oleh dinamika sosial atau

potensi gesekan kecil antar kelompok. Meskipun begitu, perbaikan yang terjadi pada tahun 2024 menunjukkan bahwa adanya upaya untuk menjaga keharmonisan antarumat beragama.

2.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan fondasi utama dalam membangun identitas, karakter, dan daya saing suatu bangsa. Kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai warisan yang harus dijaga, tetapi juga sebagai kekuatan yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur yang dapat menggambarkan sejauh mana kebudayaan berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) hadir sebagai instrumen untuk mengukur dan mengevaluasi capaian pembangunan kebudayaan secara komprehensif. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai kondisi kebudayaan suatu negara atau daerah serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Berikut merupakan capaian IPK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 hingga 2023.



Gambar 2. 35 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, 2025

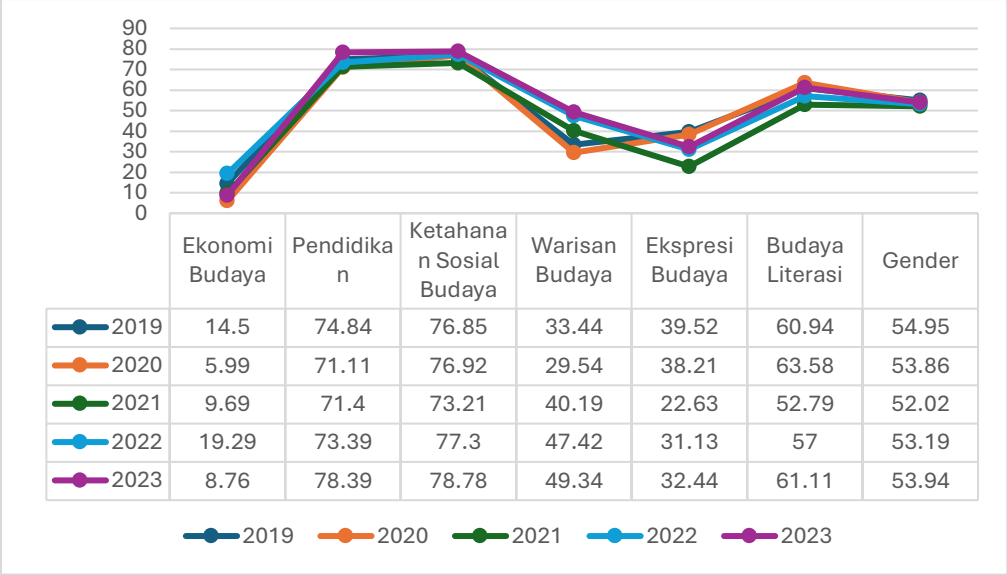
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai perkembangan sektor kebudayaan di suatu daerah. Indeks ini mencerminkan berbagai aspek, seperti pelestarian budaya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, serta kontribusi budaya terhadap pembangunan sosial dan

ekonomi. Data IPK pada grafik di atas merupakan data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Dinamika Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kalimantan Utara dalam rentang tahun 2019 hingga 2023 secara umum mengalami fluktuasi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Penurunan data IPK yang cukup signifikan baik di tingkat provinsi maupun nasional terjadi pada tahun 2021 sebagai salah satu dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas kebudayaan, seperti pagelaran seni, kegiatan komunitas budaya, dan pelestarian warisan budaya yang membutuhkan interaksi sosial. Peningkatan capaian IPK dapat dilakukan pada tahun 2022 yang menandakan bahwa adanya upaya pemulihan budaya pasca pandemi, termasuk kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menghidupkan kembali kegiatan seni dan budaya, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal.

Fluktuasi data capaian IPK yang mengarah pada tren peningkatan di Provinsi Kalimantan Utara dapat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti revitalisasi warisan budaya lokal, seperti seni tradisional, rumah adat, dan bahasa daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, dukungan kebijakan pemerintah daerah termasuk bantuan bagi pelaku seni dan budaya, pemanfaatan teknologi digital untuk promosi budaya lokal dan menarik generasi muda dalam pelestarian budaya.

IPK di Provinsi Kalimantan Utara tersusun oleh tujuh dimensi kebudayaan, yakni ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Berikut merupakan capaian tujuh dimensi indeks pembangunan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023.



	Ekonomi Budaya	Pendidikan	Ketahanan Sosial Budaya	Warisan Budaya	Ekspresi Budaya	Budaya Literasi	Gender
2019	14.5	74.84	76.85	33.44	39.52	60.94	54.95
2020	5.99	71.11	76.92	29.54	38.21	63.58	53.86
2021	9.69	71.4	73.21	40.19	22.63	52.79	52.02
2022	19.29	73.39	77.3	47.42	31.13	57	53.19
2023	8.76	78.39	78.78	49.34	32.44	61.11	53.94

Gambar 2. 36 Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2019-2023

Sumber: Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, 2025

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan dinamika yang mencerminkan kekuatan dan tantangan dalam pembangunan kebudayaan daerah. Berdasarkan data lima tahun terakhir. Capaian tiap dimensi menunjukkan variasi yang signifikan yang menjadi landasan penting dalam perumusan arah kebijakan kebudayaan ke depan.

Capaian dimensi pendidikan dan ketahanan sosial budaya menempati posisi tertinggi dalam struktur IPK Kalimantan Utara. Dimensi Pendidikan terus mengalami peningkatan, dari 71,11 pada tahun 2020 menjadi 78,39 pada tahun 2023. Demikian pula dimensi Ketahanan Sosial Budaya yang meningkat dari 76,85 menjadi 78,78 pada rentang tahun yang sama. Kedua dimensi ini mencerminkan keberhasilan program-program pembangunan yang mendorong akses pendidikan budaya, pelestarian nilai-nilai lokal, serta penguatan integrasi sosial di tengah masyarakat multikultural. Dimensi ekonomi budaya menunjukkan capaian terendah dan berfluktuasi signifikan. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2020 yang dapat dipengaruhi oleh pandemi, dan belum menunjukkan pemulihan signifikan pada 2023. Kondisi ini menandakan perlunya peningkatan dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif, pelestarian usaha budaya lokal, serta optimalisasi peran budaya dalam pembangunan ekonomi daerah. Dimensi Warisan Budaya mengalami tren peningkatan dari 33,44 pada tahun 2019 menjadi 49,34 pada tahun 2023 yang mencerminkan peningkatan dalam pelestarian

objek pemajuan kebudayaan. Sementara Budaya Literasi juga mengalami pertumbuhan dari 60,94 ke 61,11 dalam periode yang sama. Peningkatan ini perlu dijaga melalui penguatan program dokumentasi budaya, revitalisasi bahasa dan tradisi lokal, serta digitalisasi literasi berbasis budaya. Dimensi Ekspresi Budaya cenderung stagnan dan rendah. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan akses dan fasilitasi terhadap ruang ekspresi budaya dan regenerasi seniman lokal. Sementara itu, dimensi Gender relatif stagnan dalam rentang 52-55 yang menandakan masih terbatasnya partisipasi perempuan dalam proses pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Capaian tujuh dimensi pembangunan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Utara memerlukan beberapa kebijakan, seperti penguatan peran budaya dalam pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif, festival budaya, dan inkubasi bisnis berbasis warisan lokal, revitalisasi ekspresi budaya melalui peningkatan dukungan terhadap komunitas seni dan penyediaan ruang budaya publik, pengarusutamaan gender dalam pembangunan kebudayaan dengan memperluas partisipasi perempuan dalam sektor seni, budaya, dan pengambilan keputusan, peningkatan kualitas pendidikan budaya dan literasi, termasuk melalui integrasi nilai budaya dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal, dan penguatan ketahanan sosial budaya sebagai fondasi kohesi sosial di tengah keberagaman etnis dan budaya lokal.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

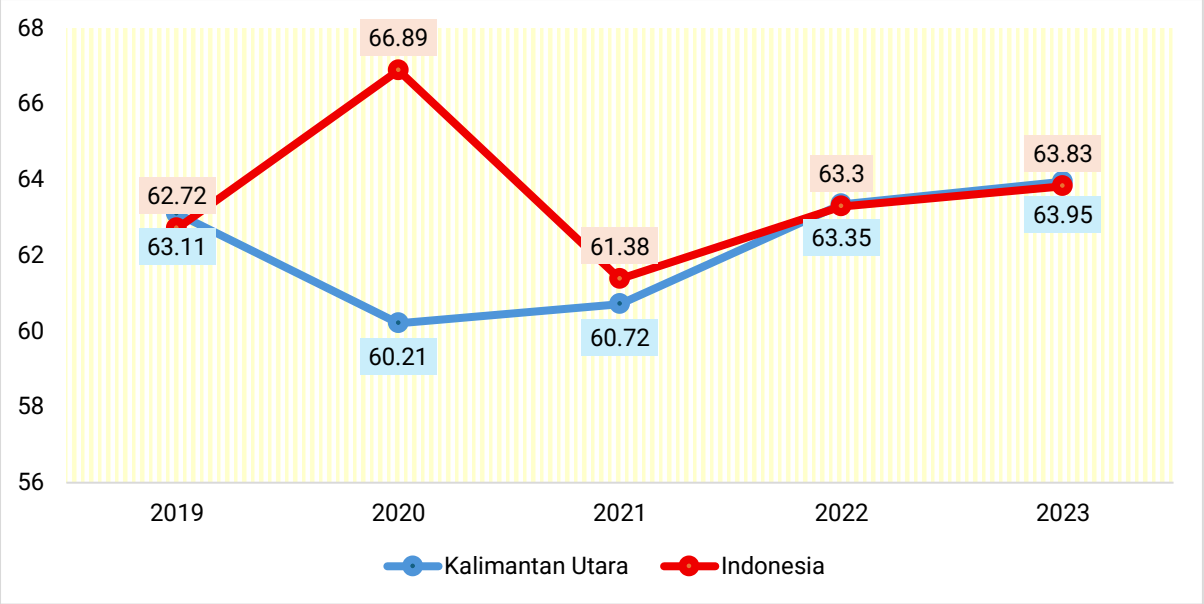
Keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat yang inklusif merupakan pilar utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Keluarga berperan sebagai ruang awal pembentukan karakter, pendidikan, serta kesejahteraan individu, sehingga kualitas keluarga sangat menentukan kualitas sumber daya manusia suatu daerah. Kesetaraan gender menjadi landasan penting dalam menjamin hak dan peluang yang setara bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, dalam mengakses pendidikan, peluang ekonomi, dan ruang-ruang partisipasi sosial. Masyarakat yang inklusif mencerminkan tatanan sosial yang menghargai keberagaman dan memastikan tidak ada kelompok yang terabaikan dalam proses pembangunan. Ketiga elemen ini, keluarga, kesetaraan, dan inklusivitas, saling memperkuat dalam membentuk individu dan komunitas yang

tangguh, kompetitif, dan mampu berkontribusi secara aktif dalam berbagai sektor pembangunan.

Keberhasilan dalam membangun fondasi ini dapat dilihat melalui sejumlah indikator seperti Indeks Perlindungan Anak, Indeks Kualitas Keluarga, Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pembangunan Pemuda, yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

2.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana anak-anak mendapatkan perlindungan yang memadai dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indeks ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program perlindungan anak dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung tumbuh kembang optimal, serta menjamin hak-hak anak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Perlindungan anak menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Dengan adanya sistem perlindungan yang kuat, anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan berdaya, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Berikut merupakan capaian Indeks Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 hingga 2023.



Gambar 2. 37 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

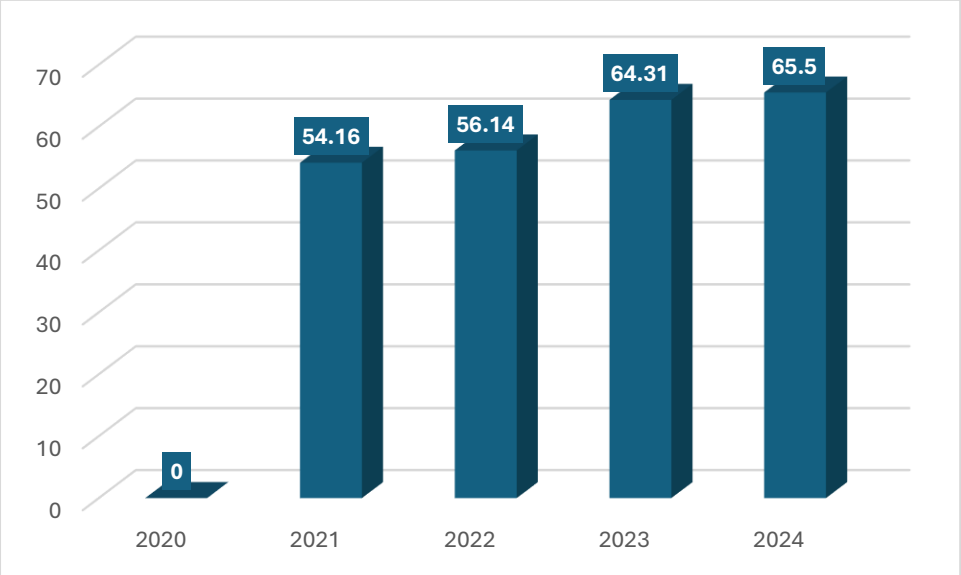
Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator penting dalam mengukur sejauh mana hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta partisipasi anak dalam pembangunan. Grafik di atas menunjukkan perkembangan IPA Provinsi Kalimantan Utara dibandingkan dengan rata-rata nasional selama lima tahun terakhir. Secara umum, Kalimantan Utara menunjukkan fluktuasi dalam capaian indeks. Pada tahun 2019, IPA Kalimantan Utara berada di angka 62,72, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional yang 63,11 poin. Namun, penurunan menjadi 60,21 poin terjadi pada tahun 2020. Hal tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap layanan dasar dan sistem perlindungan anak. Meskipun begitu, Kalimantan Utara secara bertahap memperbaiki capaian indeksnya hingga mencapai 63,95 pada tahun 2023. IPA nasional menunjukkan pola yang berbeda. Fluktuasi terjadi salah satunya akibat dampak pandemi yang luas terhadap perlindungan anak secara nasional.

Capaian tahun 2023 menjadi momentum penting bagi Kalimantan Utara karena untuk pertama kalinya dalam periode ini, IPA daerah melampaui angka nasional. Ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan layanan perlindungan anak, seperti penguatan sistem pengaduan kekerasan terhadap anak, pemberdayaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), serta pengembangan kebijakan ramah anak di tingkat daerah mulai menunjukkan hasil yang positif.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mempertahankan dan memperkuat pencapaian ini dengan strategi yang lebih sistematis dan partisipatif, termasuk pelibatan masyarakat, penguatan kelembagaan perlindungan anak, serta investasi berkelanjutan dalam pendidikan, kesehatan, dan partisipasi anak.

2.2.6.2 Indeks Kualitas Keluarga

Keluarga merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Kualitas keluarga yang baik berkontribusi pada terbentuknya individu yang sehat, cerdas, dan berkarakter, yang pada akhirnya menjadi motor penggerak pembangunan. Kualitas keluarga salah satunya dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). iBangga merupakan indikator komposit yang menggambarkan kondisi ketahanan, kebahagiaan, dan kesejahteraan keluarga. Indeks ini memuat tiga dimensi utama, yakni Ketentraman (aspek ketahanan keluarga), Kemandirian (aspek kesejahteraan keluarga), dan Kebahagiaan (aspek kepuasan dan kualitas relasi dalam keluarga). Berikut merupakan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 hingga 2024.



Gambar 2. 38 Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Satu Data Provinsi Kalimantan Utara, 2025

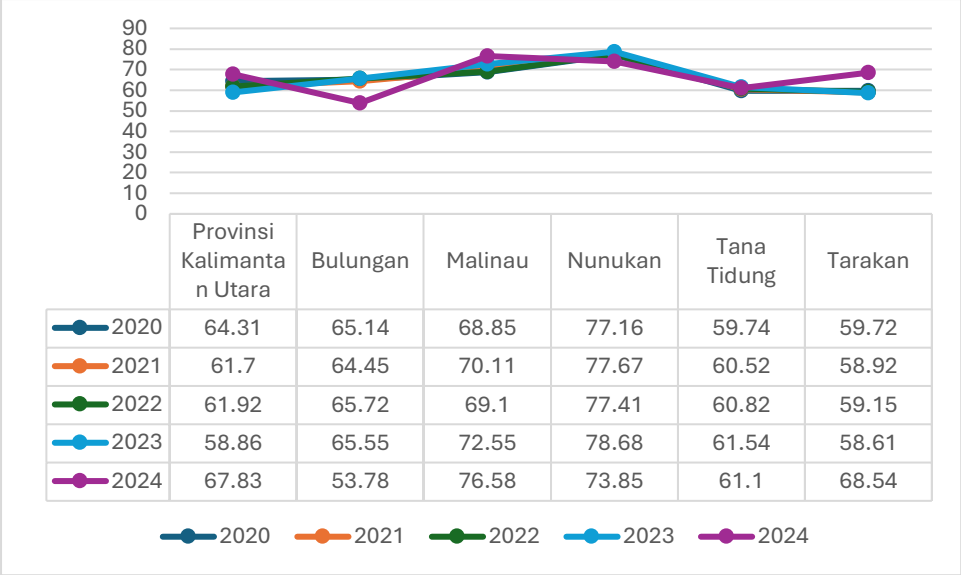
Kinerja iBangga Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2020–2024. iBangga pada tahun 2020 belum memiliki capaian karena baru ditetapkan pada tahun 2021. Capaian iBangga mengalami

peningkatan dengan optimal sebesar 11,34 poin dalam 4 tahun terakhir. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga, meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengasuhan positif, semakin baiknya akses masyarakat terhadap layanan perlindungan keluarga dan anak, pendidikan dan kesehatan, serta semakin menguatnya ketahanan keluarga.

Peningkatan iBangga Kalimantan Utara secara berkelanjutan mencerminkan bahwa kebijakan pembangunan keluarga mulai menunjukkan hasil positif. Ini dapat dikaitkan dengan implementasi program-program yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, seperti penguatan fungsi Pusat Kesejahteraan Sosial dan layanan konseling keluarga. Kalimantan Utara masih perlu memperkuat intervensi di wilayah perbatasan dan pedalaman, memperluas cakupan program ketahanan keluarga, serta meningkatkan literasi pengasuhan dan keuangan keluarga.

2.2.6.3 Indeks Pemberdayaan Gender

Dalam rangka mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan dan inklusif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IDG mencerminkan sejauh mana perempuan memiliki akses, kesempatan, dan partisipasi yang setara dalam kegiatan produktif serta posisi-posisi strategis yang berpengaruh terhadap arah kebijakan pembangunan. IDG tidak hanya mengukur kesetaraan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan pekerjaan, tetapi juga mengukur representasi perempuan di parlemen, jabatan profesional, dan peran manajerial. Oleh karena itu, capaian IDG menjadi gambaran seberapa besar kontribusi perempuan dalam pembangunan dan sejauh mana upaya pemberdayaan gender telah berjalan efektif di suatu daerah. Berikut merupakan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024.



	Provinsi Kalimantan Utara	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung	Tarakan
2020	64.31	65.14	68.85	77.16	59.74	59.72
2021	61.7	64.45	70.11	77.67	60.52	58.92
2022	61.92	65.72	69.1	77.41	60.82	59.15
2023	58.86	65.55	72.55	78.68	61.54	58.61
2024	67.83	53.78	76.58	73.85	61.1	68.54

Gambar 2. 39 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Satu Data Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Utara dan kabupaten/kota di dalamnya menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan IDG dari 64,31 pada tahun 2020 menjadi titik terendah 58,86 pada 2023, kemudian berhasil melakukan *bounce back* menjadi 67,83 pada 2024.

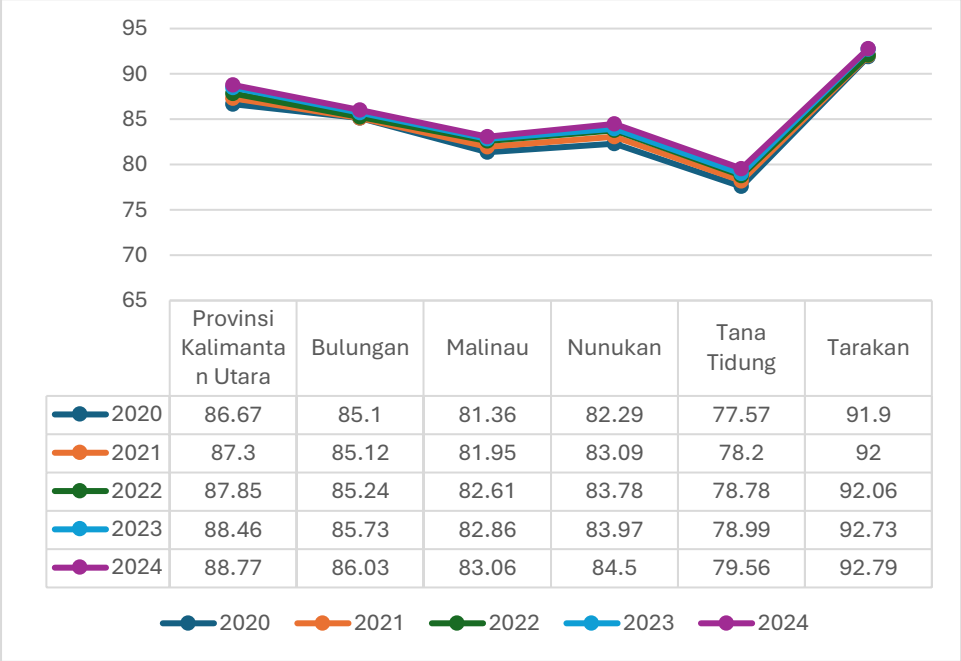
Kabupaten Bulungan cenderung stabil di kisaran 65, namun mengalami penurunan signifikan di 2024 menjadi 53,78. Kabupaten Malinau menunjukkan tren positif yakni meningkat dari 68,85 menjadi 76,58 dalam empat tahun terakhir. Kabupaten Nunukan memiliki IDG tertinggi dibanding daerah lain, yakni mencapai 78,68 pada 2023 meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 73,85 di 2024. Kabupaten Tana Tidung menunjukkan tren peningkatan bertahap hingga selisih 1,36 poin dalam empat tahun terakhir. Kota Tarakan mengalami fluktuasi, namun cenderung meningkat dari 59,72 pada tahun 2020 menjadi 68,54 pada tahun 2024

Peningkatan IDG menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan ke-5, yaitu Kesetaraan Gender. Sebaliknya, capaian IDG yang rendah atau fluktuatif mengindikasikan adanya ketimpangan partisipasi

perempuan yang dapat berdampak pada terhambatnya optimalisasi potensi sumber daya manusia secara menyeluruh.

2.2.6.4 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di suatu wilayah. IPG merefleksikan capaian pembangunan manusia yang dihitung secara spesifik berdasarkan perbedaan peran, akses, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPG tidak hanya menilai perkembangan umum kualitas hidup penduduk, tetapi juga menekankan aspek keadilan dan kesetaraan dalam distribusi hasil pembangunan. Berikut merupakan capaian Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024.



	Provinsi Kalimantan Utara	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung	Tarakan
2020	86.67	85.1	81.36	82.29	77.57	91.9
2021	87.3	85.12	81.95	83.09	78.2	92
2022	87.85	85.24	82.61	83.78	78.78	92.06
2023	88.46	85.73	82.86	83.97	78.99	92.73
2024	88.77	86.03	83.06	84.5	79.56	92.79

Gambar 2. 40 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Satu Data Provinsi Kalimantan Utara, 2025

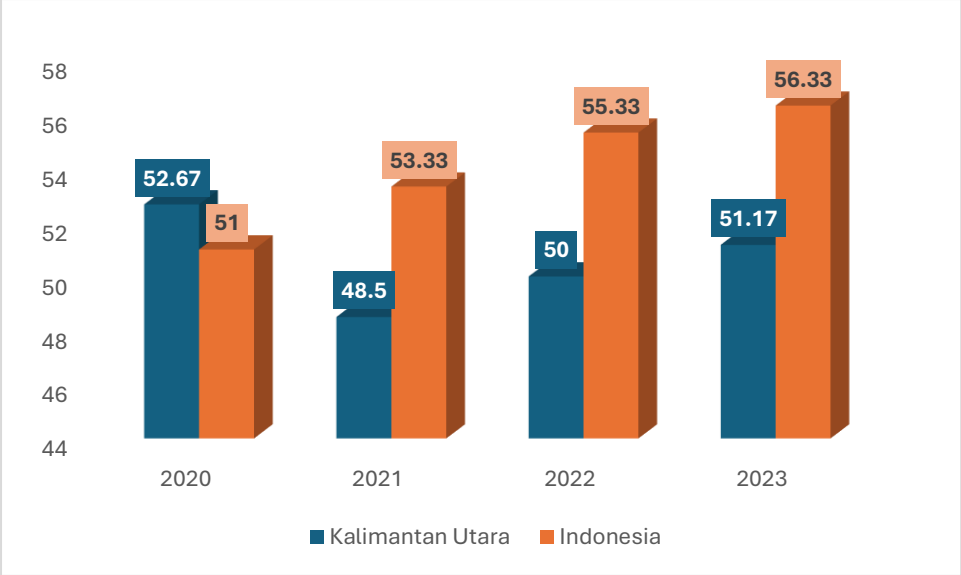
Berdasarkan data IPG Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 hingga 2024 secara umum terjadi tren peningkatan yang stabil baik pada tingkat provinsi maupun di sebagian besar kabupaten/kota. IPG Provinsi Kalimantan Utara meningkat dari 86,67 pada tahun 2020 menjadi 88,77 pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya

kemajuan dalam pembangunan yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan. Secara spesifik, semua daerah menunjukkan kecenderungan peningkatan IPG tiap tahunnya, meskipun dengan kecepatan yang bervariasi. Ssemakin tinggi nilai IPG, semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, dan semakin menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses, kesempatan, dan peran yang setara dalam berbagai bidang kehidupan.

Pencapaian IPG menjadi salah satu tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berperspektif gender. Hal ini juga sejalan dengan komitmen global dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan ke-5 yaitu Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Seluruh Perempuan dan Anak Perempuan. Upaya peningkatan IPG tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang mendorong akses setara terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang adil, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, integrasi perspektif gender dalam seluruh program pembangunan daerah menjadi strategi utama untuk memperkecil ketimpangan dan memastikan seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh manfaat yang setara dari hasil pembangunan.

2.2.6.5 Indeks Pembangunan Pemuda

Pemuda merupakan agen perubahan dan aset penting dalam pembangunan suatu daerah. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) digunakan untuk mengukur sejauh mana pemuda memiliki akses dan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti tingkat kesejahteraan, partisipasi, dan kualitas hidup pemuda dalam suatu wilayah. Indeks Pembangunan Pemuda mencakup berbagai dimensi utama, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, serta akses terhadap teknologi dan informasi. Semakin tinggi skor IPP, semakin baik kondisi yang mendukung perkembangan dan pemberdayaan pemuda sebagai individu yang produktif, inovatif, dan berdaya saing.



Gambar 2. 41 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Satu Data Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Grafik di atas menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi Kalimantan Utara dibandingkan dengan rata-rata nasional Indonesia selama periode 2020 hingga 2023. Secara umum, dapat dilihat bahwa IPP Kalimantan Utara mencapai 52,67 poin sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 51,00 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada awal periode, pembangunan pemuda di Kalimantan Utara berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan pada IPP Kalimantan Utara menjadi 48,50, sementara IPP nasional justru meningkat menjadi 53,33. Kondisi ini menandakan adanya tantangan pembangunan pemuda di Kalimantan Utara pada tahun tersebut, sehingga capaian daerah berada di bawah rata-rata nasional. Capaian IPP Provinsi Kalimantan Utara berhasil mengalami peningkatan hingga 2,67 poin dalam dua tahun. Meskipun begitu, capaian IPP Provinsi Kalimantan Utara masih berada di bawah capaian nasional, baik pada tahun 2022 dan 2023.

Fluktuasi capaian IPP dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti akses pendidikan dan keterampilan, kesempatan kerja dan kemandirian ekonomi, pertisipasi pemuda dalam pembangunan, infrastruktur dan konektivitas, dan adanya program penguatan kepemudaan. Akses pendidikan dan kesehatan dapat berbentuk keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan vokasi, serta fasilitas pengembangan keterampilan di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara

berdampak pada rendahnya daya saing pemuda. Dari segi ekonomi, tingkat pengangguran dan terbatasnya peluang kerja formal. Selain itu, masih minimnya pelibatan generasi muda dalam proses pembangunan, pengambilan keputusan, dan ruang-ruang partisipasi publik turut memengaruhi nilai IPP. Pada sisi lain, keterbatasan infrastruktur dasar, termasuk akses internet dan transportasi di beberapa wilayah Kalimantan Utara, menghambat mobilitas, akses informasi, dan pengembangan potensi pemuda. Selain itu juga perlunya optimalisasi program-program kepemudaan di tingkat daerah, baik dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, pengembangan kreativitas, maupun peningkatan literasi digital agar selaras dengan kebutuhan generasi muda saat ini.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) menjadi elemen strategis dalam menentukan arah kemajuan suatu daerah. SDM yang memiliki kompetensi tinggi tidak hanya mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global, tetapi juga memainkan peran sentral dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Keterampilan, tingkat pendidikan, dan kemampuan berinovasi menjadi faktor utama yang menentukan kontribusi individu terhadap penciptaan nilai tambah di sektor ekonomi lokal.

Kualitas SDM sangat berkaitan dengan tingkat produktivitas. Individu yang terampil dan berdaya saing mampu memanfaatkan potensi sumber daya secara lebih optimal, menghasilkan *output* yang lebih besar, serta meningkatkan efisiensi kerja. Peningkatan produktivitas ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing wilayah dan diharapkan juga menciptakan iklim yang lebih menarik bagi investasi dan pembangunan berkelanjutan.

Daya saing SDM juga tidak terlepas dari dinamika angka ketergantungan, yakni rasio antara penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lansia) dengan penduduk usia produktif. Wilayah dengan tingkat ketergantungan yang tinggi menghadapi tantangan lebih besar karena kelompok usia produktif harus menanggung beban sosial dan ekonomi yang lebih berat. Apabila angka ketergantungan menurun seiring

dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, maka suatu daerah berpotensi memperoleh bonus demografi, yaitu kondisi di mana mayoritas penduduk berada dalam usia kerja produktif yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Angka ketergantungan sendiri merupakan indikator demografis yang mencerminkan beban ekonomi yang ditanggung oleh kelompok usia kerja. Nilai ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat kelahiran, angka harapan hidup, dan mobilitas penduduk. Wilayah dengan kelahiran tinggi umumnya memiliki angka ketergantungan yang tinggi, karena dominasi kelompok usia muda yang belum memasuki usia produktif.

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Bagian ini menjelaskan kondisi tentang Iptek dan inovasi yang menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang. Untuk menggambarkan hal tersebut, digunakan indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif, Rasio Kewirausahaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Indeks Inovasi Daerah.

2.3.2.1 PDRB Industri Pengolahan

Produk domestik regional bruto (PDRB) industri pengolahan adalah nilai total produksi barang dan jasa dari sektor industri pengolahan di suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Sektor industri pengolahan mencakup kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti industri makanan, tekstil, kimia, logam, dan sebagainya. Indikator ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Berikut adalah data PDRB industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2. 51 PDRB Industri Pengolahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

	2020		2021		2022		2023		2024	
	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen
C.Industri Pengolahan	9.209,37	9,17	9.929,87	8,9	10.781,15	7,77	11.298,11	7,67	11.970,15	8,15

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Nilai PDRB industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang meningkat sebesar 2.760,78 miliar rupiah pada tahun 2020 hingga 2024. Walaupun persentase PDRB industri pengolahan terhadap total PDRB mengalami tren yang fluktuatif. Faktor penentu PDRB industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Utara adalah nilai produksi industri. Variabel ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan bahan baku, infrastruktur dan konektivitas, investasi dan kebijakan pemerintah, sumber daya manusia dan teknologi serta permintaan pasar dan ekspor. Faktor-faktor tersebut harus mendapat intervensi kebijakan yang baik agar nilai PDRB industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Utara bisa meningkat secara berkesinambungan.

2.3.2.2 PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Produk domestik regional bruto (PDRB) penyediaan akomodasi dan makan minum adalah nilai total *output* ekonomi yang dihasilkan oleh sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita serta indikator makro ekonomi lainnya. Berikut adalah data PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2. 52 PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023		2024	
	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.537,52	1,53	1.667,88	1,5	1.913,63	1,38	2.132,80	1,45	2.444,82	1,67

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Nilai PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang meningkat sebesar 907,3 miliar rupiah pada tahun 2020 hingga 2024. Walaupun persentase PDRB industri pengolahan terhadap total PDRB mengalami tren yang fluktuatif. Faktor penentu produk domestik regional bruto (PDRB) sektor akomodasi dan makan minum di suatu wilayah, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara, dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti pariwisata dan mobilitas penduduk, infrastruktur dan aksesibilitas, daya beli dan konsumsi masyarakat, investasi dan kebijakan pemerintah, serta digitalisasi dan teknologi. Faktor-faktor

tersebut harus mendapat intervensi kebijakan yang baik agar nilai PDRB akomodasi dan makan minum di Provinsi Kalimantan Utara bisa meningkat secara berkesinambungan.

2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ekonomi yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berusia 15 tahun ke atas, yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik dengan memiliki pekerjaan maupun sedang aktif mencari pekerjaan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk usia kerja berkontribusi dalam pasar tenaga kerja, sehingga dapat mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam sektor ekonomi. TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk yang berpartisipasi dalam dunia kerja, sementara TPAK yang rendah dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam akses ke pekerjaan, seperti keterbatasan kesempatan kerja, tingkat pendidikan, atau faktor sosial lainnya. Berikut adalah data TPAK di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2. 53 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota dan Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
Malinau	66,44	71,49	73,55	74,26	73,23
Bulungan	67,38	68,62	64,24	71,86	71,89
Tana Tidung	67,81	67,35	74,49	75,88	74,01
Nunukan	66,91	66,11	69,1	71,93	75,53
Tarakan	65,65	63,34	65,49	66,14	63,64
Kalimantan Utara	66,51	66,24	67,62	70,35	70,35

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

TPAK di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan sebesar 3,84 persen pada tahun 2020 hingga 2024. Rata-rata TPAK tertinggi sebesar 71,90 persen terdapat di Kabupaten Tana Tidung, sedangkan rata-rata TPAK terendah sebesar 64,85 terdapat di Tarakan. TPAK di Provinsi Kalimantan Utara dipengaruhi oleh struktur demografi dan kependudukan, kondisi ekonomi dan peluang kerja, pendidikan dan keterampilan kerja, peran sektor informal dan wirausaha, faktor sosial dan gender serta kebijakan pemerintah dan program ketenagakerjaan. Faktor-faktor tersebut harus mendapat intervensi kebijakan yang baik agar nilai TPAK di Provinsi Kalimantan Utara bisa meningkat secara berkesinambungan.

2.3.2.4 Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah (IID) merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu berinovasi dalam mendukung pembangunan, meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, serta memperkuat daya saing wilayahnya dalam berbagai sektor. Indeks ini mencerminkan kapasitas suatu daerah dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan berbagai bentuk inovasi, baik dalam aspek kebijakan, program, maupun layanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Melalui IID, dapat diketahui bagaimana pemerintah daerah beradaptasi terhadap tantangan pembangunan, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, serta menghadirkan solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah data indeks inovasi daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2. 54 Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah (IID) *)	3.110	39,63	46,37	45,86	53,35
Predikat IID	Sangat inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

**) Mulai Tahun 2021 Indeks Inovasi Daerah berubah pengukuran yang sebelumnya Tahun 2019 dan 2020 masih dalam ribuan*
Sumber: Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan signifikan sebesar 13,72 poin dari tahun 2021 hingga 2024. Meskipun indikator ini menunjukkan perkembangan positif, predikat inovasi daerah tetap stagnan di kategori "Inovatif" dan belum mengalami peningkatan ke tingkat yang lebih tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, di antaranya minimnya inovasi baru yang berskala besar, yang menyebabkan peningkatan skor tidak cukup signifikan untuk mendorong perubahan predikat. Selain itu, proses adaptasi dan implementasi inovasi masih belum optimal, baik dalam hal pemanfaatan teknologi, digitalisasi layanan publik, maupun efektivitas kebijakan inovatif yang diterapkan.

Faktor lainnya yang turut berkontribusi terhadap stagnasi ini meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang mendukung pengembangan inovasi, serta kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga riset dalam menciptakan inovasi yang lebih berdampak luas. Selain itu, inovasi yang ada masih bersifat sektoral dan belum diadopsi secara menyeluruh di berbagai bidang

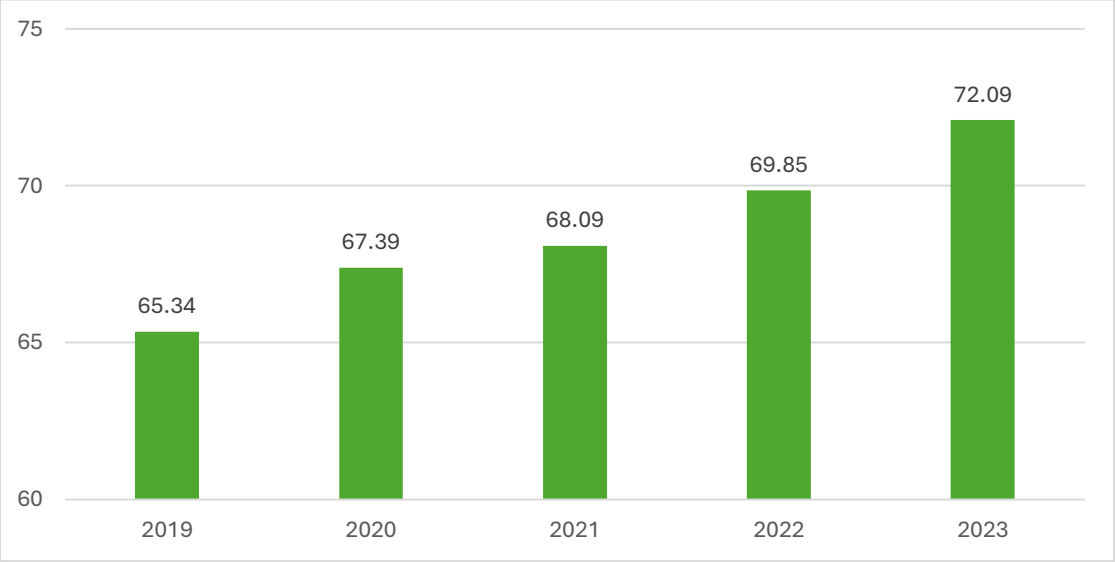
pemerintahan maupun pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk mendorong peningkatan predikat inovasi daerah, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk penguatan ekosistem inovasi, peningkatan investasi dalam riset dan teknologi, serta percepatan adopsi kebijakan inovatif yang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Bagian ini menjelaskan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Ekonomi Biru Indonesia, Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau

Pembangunan ekonomi saat ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan yang tinggi tetapi juga memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mengukur sejauh mana pembangunan ekonomi menggunakan prinsip yang berkelanjutan, maka digunakan indikator Indeks Ekonomi Hijau. Indeks Ekonomi Hijau merupakan indikator yang terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan.



Gambar 2. 42 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023

Sumber: Bappenas, 2024

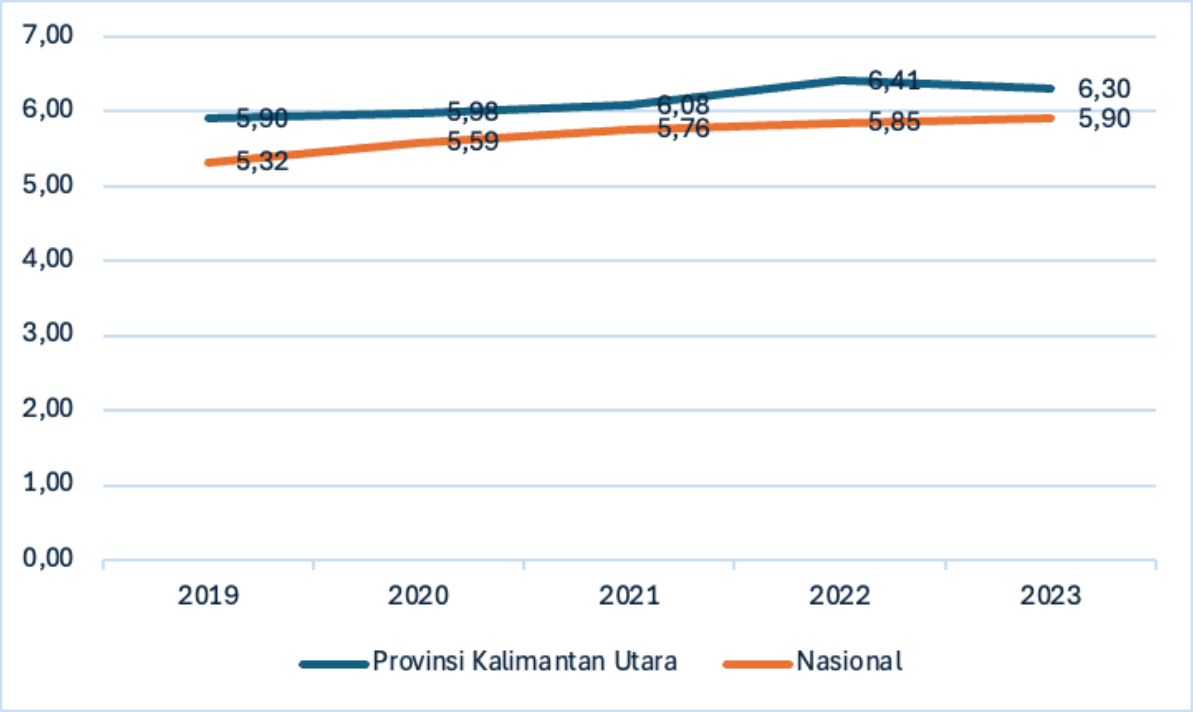
Indeks ekonomi hijau Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kenaikan sebesar 2,49 persen per tahun mencapai 72,09 pada tahun 2023. Capaian indeks ekonomi hijau Provinsi Kalimantan Utara merupakan yang tertinggi di wilayah Kalimantan dan masuk ke dalam rentang Nilai Baik Tier 1. Faktor utama yang mendorong tingginya capaian tersebut adalah luasnya tutupan hutan dari luas daratan dimana 85,23 persen wilayah Provinsi Kalimantan Utara berupa hutan. Selain itu, capaian dari 16 indikator terpilih sebagian besar menunjukkan kondisi yang semakin baik seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran yang semakin turun serta meningkatnya nilai PDRB per kapita, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan beberapa indikator lainnya.

2.3.3.2 Indeks Ekonomi Biru

Potensi perairan Indonesia begitu kaya akan tetapi belum dimanfaatkan dengan optimal. Pemanfaatan sumber daya laut dapat mendorong peningkatan nilai tambah perekonomian daerah yang diharapkan dapat turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indeks ekonomi biru merupakan indikator yang mengukur kontribusi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kemajuan ekonomi biru. Perhitungan dilakukan menggunakan beberapa indikator makro yang mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terkait dengan sektor ekonomi biru. Untuk saat ini, data indeks ekonomi biru belum tersedia di Provinsi Kalimantan Utara dan akan dihitung kemudian.

2.3.4 Transformasi Digital

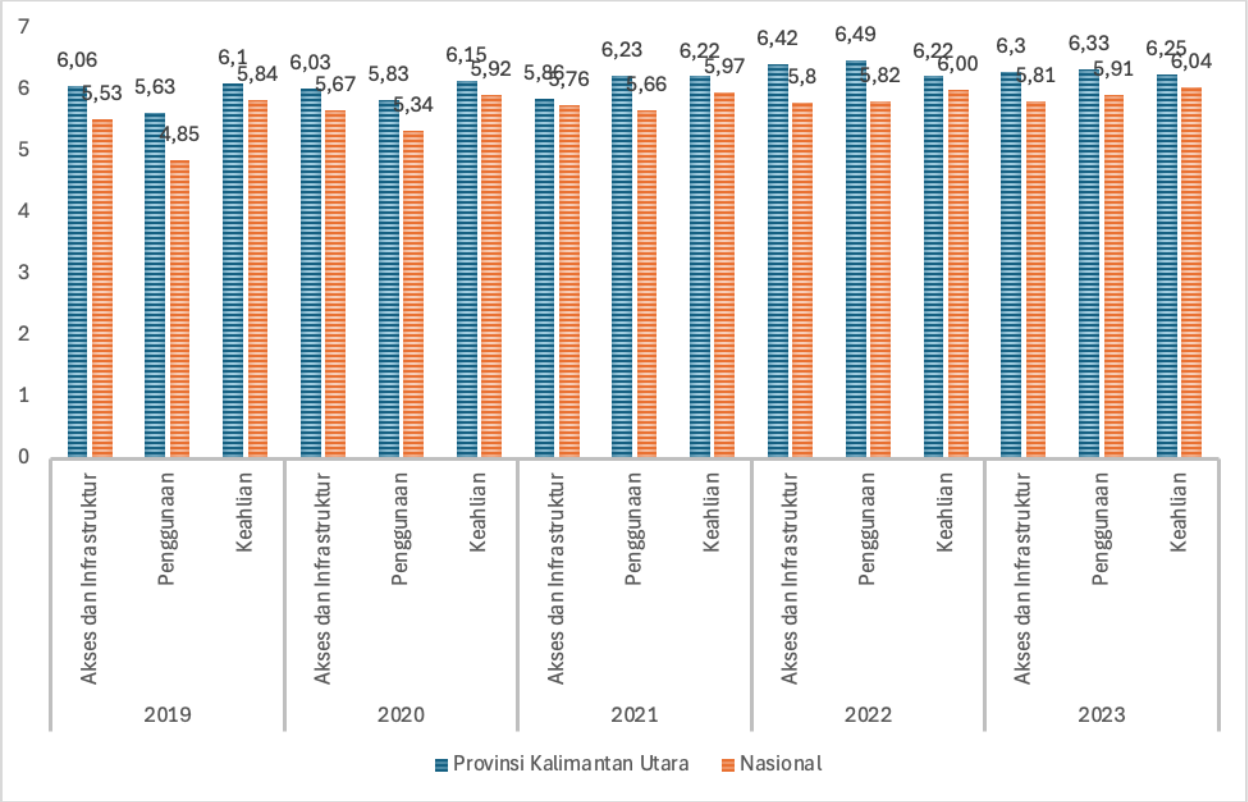
Transformasi digital telah menjadi pengarusutamaan dalam pembangunan daerah yang meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan mencetak talenta digital. Pengembangan transformasi digital bertujuan untuk mendukung aspek pelayanan kepada masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Transformasi digital di Provinsi Kalimantan Utara salah satunya dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Indeks Pembangunan TIK ini merupakan indikator untuk mengukur perkembangan TIK di suatu wilayah yang dinilai dari infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Indeks Pembangunan TIK di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 43 Indeks Pembangunan TIK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023

Sumber: Indeks Pembangunan TIK, BPS (2019-2023)

Dalam kurun waktu lima tahun sejak tahun 2019, Indeks Pembangunan TIK di Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami peningkatan yang cukup konstan, namun sempat mengalami penurunan 0,14 poin pada tahun 2023. Indeks Pembangunan TIK Provinsi Kalimantan Utara lebih tinggi daripada Indeks Pembangunan TIK Nasional, meskipun termasuk dalam kategori sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan transformasi digital di provinsi tersebut lebih pesat dibandingkan pengembangan transformasi digital nasional. Dilihat dari sub indeks penyusunnya, ketiga sub indeks pembangunan TIK di Provinsi Kalimantan Utara dapat digambarkan sebagai berikut.

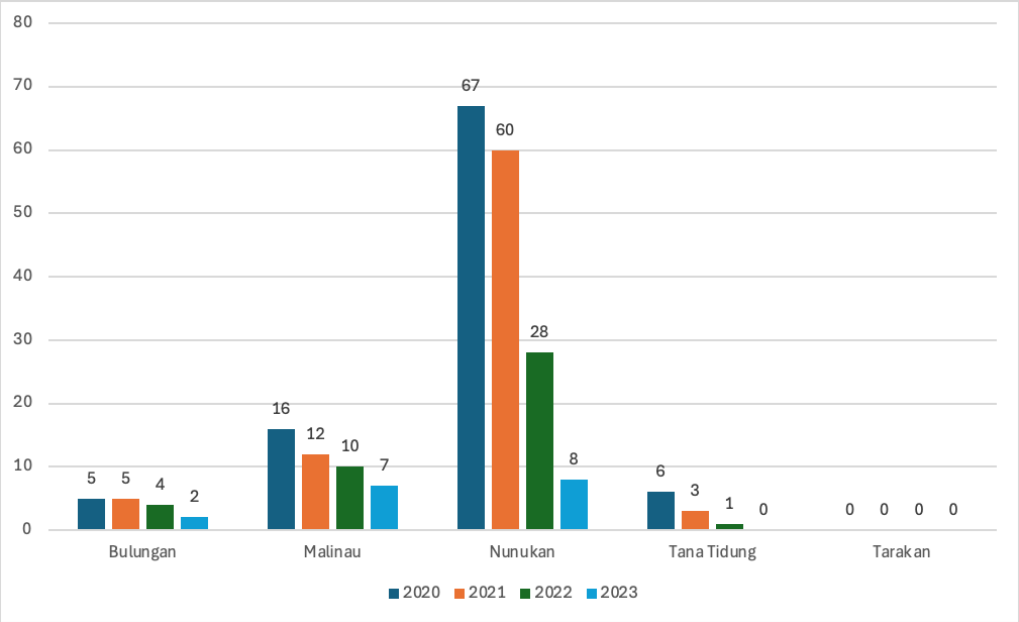


Gambar 2. 44 Sub Indeks Pembangunan TIK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023

Sumber: Indeks Pembangunan TIK, BPS (2019-2023)

Pengembangan transformasi digital di Provinsi Kalimantan Utara paling tinggi didukung oleh aspek akses dan infrastruktur serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2022, meskipun pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan. Capaian pengembangan transformasi digital Provinsi Kalimantan Utara yang lebih tinggi dibandingkan capaian nasional menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki kesiapan dan daya saing dalam pembangunan berbasis digital. Pengembangan akses dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi agar merata di seluruh kabupaten masih perlu ditingkatkan sejalan dengan pengembangan keahlian teknologi informasi dan komunikasi sebagai bentuk luaran dari produk talenta digital.

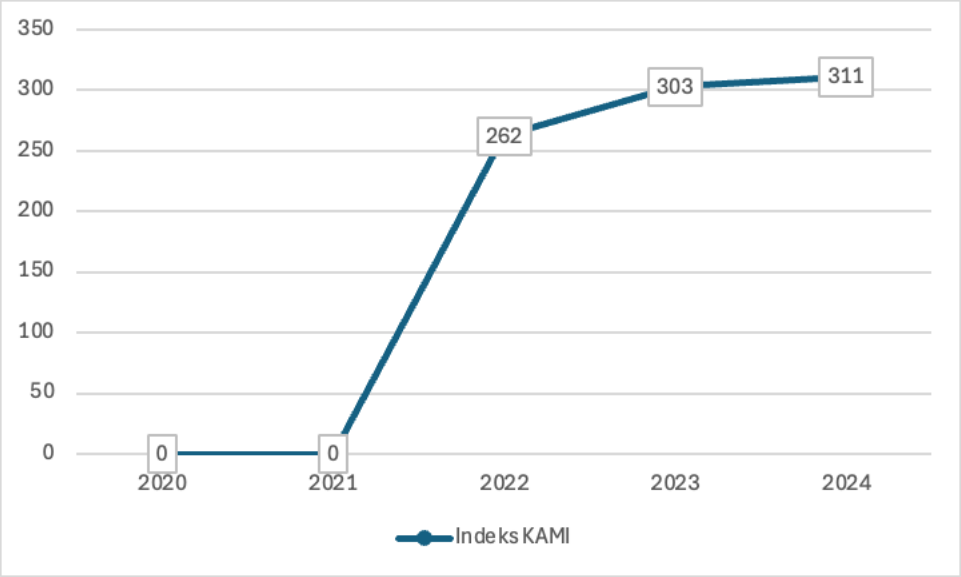
Pembangunan teknologi informasi komunikasi berkaitan dengan ketersediaan layanan internet yang telah menjangkau desa dan kelurahan di kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara. Masih ada beberapa desa dan kelurahan yang berada dalam zona *blankspot* internet. Desa dan kelurahan *blankspot* di Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu tahun 2020-2023 dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 2.xx. Desa dan Kelurahan *Blankspot* di Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: SDI Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan gambar tersebut, jumlah desa dan kelurahan *blankspot* di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan internet telah menjangkau desa dan kelurahan. Jumlah desa/kelurahan *blankspot* tertinggi berada di Kabupaten Nunukan yaitu delapan desa/kelurahan, sedangkan Kota Tarakan telah bebas dari *blankspot*. Jangkauan layanan internet di desa dan kelurahan telah menjadi kebutuhan untuk mendukung pelayanan publik.

Dalam pengembangan transformasi digital, persandian juga berperan penting dalam kaitannya dengan keamanan siber dan sandi di pemerintah daerah. Capaian dari penilaian kematangan keamanan siber dan sandi dapat dilihat dari Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Capaian Indeks KAMI di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.xx. Capaian Indeks KAMI di Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: SDI Provinsi Kalimantan Utara

Capaian Indeks KAMI di Provinsi Kalimantan Utara mengalami tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa keamanan informasi telah diterapkan dalam organisasi perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Semakin meningkatnya indeks, organisasi dapat meningkatkan keamanan informasi, mengurangi risiko, memenuhi kepatuhan, membangun kepercayaan, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Aspek keamanan informasi dan digital berkaitan erat dengan ketersediaan tim tanggap insiden siber atau yang biasa dikenal dengan *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)*. Kondisi CSIRT di Provinsi Kalimantan Utara ditunjukkan dengan jumlah instansi pemerintahan yang terbentuk CSIRT, yang hingga tahun 2024 telah ada satu instansi pemerintahan yang memiliki tim tersebut.

Dalam mendukung upaya pengembangan transformasi digital yang berkaitan dengan statistik telah diukur dengan Indeks Pembangunan Statistik melalui hasil penilaian EPSS pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Statistik di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Indeks Pembangunan Statistik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Indeks	Predikat
Bulungan	3,34	Baik
Malinau	2,34	Cukup
Nunukan	2,61	Baik

Kabupaten/Kota	Indeks	Predikat
Tana Tidung	2,34	Cukup
Kota Tarakan	2,92	Baik
Provinsi Kalimantan Utara	**2,83**	**Baik**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Berdasarkan data tersebut, Kota Tarakan memiliki Indeks Pembangunan Statistik tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara, bahkan nilai indeksnya berada di atas nilai indeks provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan statistik di kota tersebut telah berjalan dengan baik.

Sebagai bagian dari strategi percepatan transformasi digital, Provinsi Kalimantan Utara juga telah menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berhasil meraih predikat Baik dengan skor indeks 2,83. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan sistem informasi, memperkuat tata kelola digital, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Evaluasi ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Utara telah berada pada tingkat kematangan yang cukup hingga baik dalam pelaksanaan SPBE, meskipun masih terdapat ruang perbaikan, khususnya di aspek interoperabilitas dan arsitektur sistem. Hasil penilaian SPBE tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan Indeks Maturitas SPBE dengan predikat yang sangat baik. Secara rinci, Indeks Maturitas SPBE di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Indeks Maturitas SPBE Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Indeks	Predikat
Bulungan	3,93	Sangat Baik
Malinau	2,45	Cukup
Nunukan	2,89	Baik
Tana Tidung	2,84	Baik
Kota Tarakan	3,11	Baik
Provinsi Kalimantan Utara	**3,79**	**Sangat Baik**

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Bulungan memiliki predikat sangat baik dengan nilai Indeks Maturitas SPBE 3,93 dan berada di atas nilai Indeks Maturitas SPBE Provinsi Kalimantan Utara. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan telah berjalan dengan sangat baik. Penerapan SPBE berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Bagian ini menjelaskan kondisi tentang integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Penjelasan ini didukung oleh indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Ekspor Barang dan Jasa.

2.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur nilai investasi yang dilakukan dalam bentuk penambahan, perbaikan, atau penggantian aset tetap di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Aset tetap yang dimaksud mencakup barang-barang berumur panjang yang digunakan dalam proses produksi, seperti bangunan, infrastruktur, mesin-mesin industri, kendaraan operasional, serta peralatan lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi. PMTB menjadi salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, karena mencerminkan tingkat investasi yang dilakukan oleh sektor swasta maupun pemerintah dalam rangka memperkuat struktur ekonomi dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Semakin tinggi nilai PMTB, semakin besar pula potensi peningkatan produktivitas dan daya saing suatu daerah, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah data PMTB Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2. 55 Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Kalimantan Utara (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024

Pembentukan Modal Tetap Bruto	31.022,90	31.788,17	33.825,73	38.317,21	41.862,70

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 10.839,90 miliar rupiah dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya investasi dalam berbagai sektor, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi peningkatan PMTB ini antara lain pertumbuhan investasi di sektor infrastruktur dan industri, yang didorong oleh proyek pembangunan jalan, pelabuhan, dan kawasan industri strategis. Ekspansi sektor pertambangan, perkebunan, dan energi juga menjadi pendorong utama, mengingat Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, peningkatan investasi dari sektor swasta maupun pemerintah, baik dalam bentuk pembangunan gedung, peralatan industri, maupun teknologi, turut berkontribusi terhadap kenaikan PMTB.

Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan ini adalah kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong investasi dan kemudahan berusaha, termasuk insentif bagi investor serta pengembangan kawasan ekonomi khusus. Selain itu, peningkatan belanja modal dan proyek strategis nasional yang berfokus pada percepatan pembangunan di Kalimantan Utara turut mempercepat pertumbuhan investasi di wilayah ini. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, peningkatan PMTB di Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.

2.3.5.2 Net Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor barang dan jasa merupakan selisih antara nilai total ekspor dan impor barang serta jasa yang terjadi dalam suatu negara atau wilayah selama periode tertentu. Indikator ini mencerminkan seberapa besar kontribusi perdagangan internasional terhadap perekonomian suatu daerah dan menjadi salah satu faktor utama dalam perhitungan produk domestik regional bruto (PDRB) dengan pendekatan pengeluaran.Net ekspor yang bernilai positif menunjukkan bahwa suatu negara atau

wilayah memiliki surplus perdagangan, di mana nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor, sehingga terjadi aliran devisa masuk yang dapat memperkuat perekonomian domestik. Sebaliknya, net ekspor yang bernilai negatif mengindikasikan defisit perdagangan, di mana impor lebih besar dari ekspor, yang dapat menyebabkan ketergantungan terhadap produk luar negeri dan berpotensi melemahkan neraca pembayaran. Dalam konteks pembangunan ekonomi, net ekspor barang dan jasa menjadi indikator penting dalam mengukur daya saing suatu negara di pasar global, ketahanan ekonomi terhadap perubahan perdagangan internasional, serta efektivitas kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor dan pengelolaan impor secara berkelanjutan. Berikut adalah data tentang net ekspor barang dan jasa Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2. 56 Net Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Utara (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Net Ekspor Barang dan Jasa	44.692,25	54.466,19	77.749,15	78.586,66	71.653,72

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

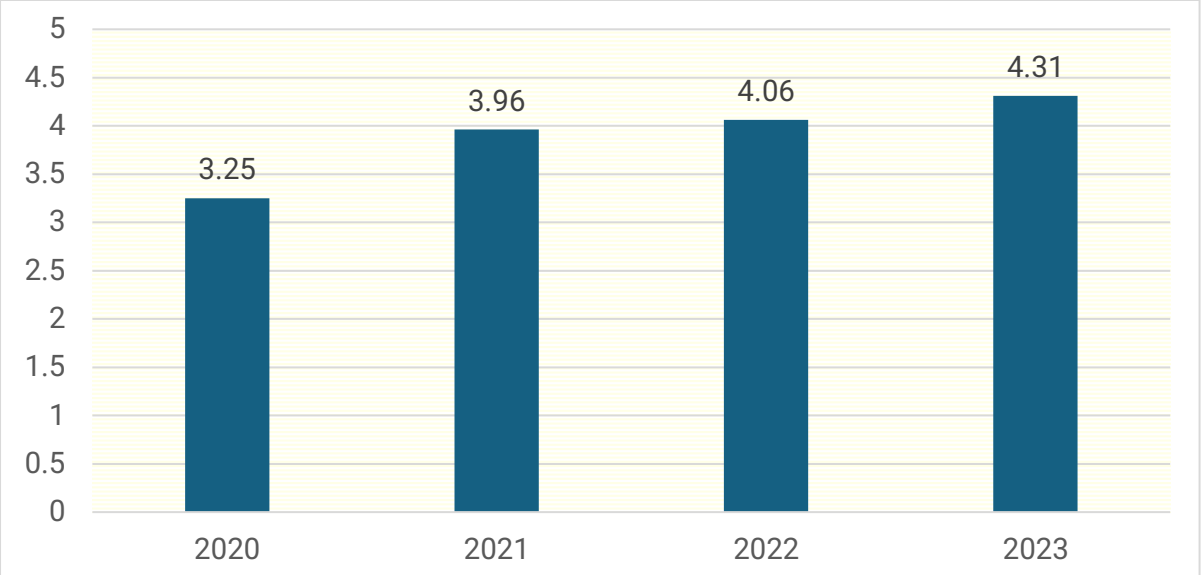
Net ekspor barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan kenaikan sebesar 26.961,47 miliar rupiah dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan daya saing produk ekspor daerah serta meningkatnya kontribusi sektor perdagangan luar negeri terhadap perekonomian wilayah. Faktor utama yang mendorong peningkatan net ekspor ini antara lain pertumbuhan produksi dan ekspor komoditas unggulan, seperti hasil tambang, kelapa sawit, serta produk olahan kayu dan perikanan. Permintaan yang tinggi dari pasar internasional, terutama dari negara tujuan ekspor utama, turut berperan dalam peningkatan nilai ekspor daerah. Selain itu, pengembangan industri hilirisasi yang semakin pesat juga meningkatkan nilai tambah produk ekspor, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap neraca perdagangan daerah.

Selain faktor produksi dan industri, peningkatan infrastruktur pendukung ekspor, seperti pelabuhan, jalur transportasi, serta kawasan industri dan perdagangan,

turut memperlancar arus barang ke pasar internasional. Kebijakan pemerintah dalam mendorong ekspor, seperti insentif perdagangan, perjanjian dagang, serta fasilitasi ekspor bagi pelaku usaha, juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan net ekspor.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi merujuk kepada kondisi terwujudnya integrasi antara kawasan perkotaan dengan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kondisi ini memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur wilayah yang andal dan merata. Kualitas infrastruktur daerah di Provinsi Kalimantan Utara dapat diindikasikan melalui data indeks layanan infrastruktur. Indeks layanan infrastruktur menggambarkan kinerja penyediaan dan pembangunan infrastruktur yang mencakup ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, infrastruktur layanan dasar permukiman, dan kelistrikan.



Gambar 2. 45 Indeks Layanan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2023

Sumber: Dinas PUPR-Perkim Provinsi Kalimantan Utara, 2024, diolah

Indeks layanan infrastruktur mengalami peningkatan selama tahun 2020-2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10 persen per tahun dan mencapai nilai 4,31 pada tahun 2023. Capaian ini diperoleh berdasarkan komponen perhitungan indeks layanan infrastruktur antara lain persentase jalan kondisi baik, persentase panjang jalan per jumlah kendaraan, persentase layanan air minum, dan rasio elektrifikasi.

Tabel 2. 57 Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020-2024

Kondisi Jalan	2020		2021		2022		2023		2024	
	km	%	km	%	km	%	km	%	km	%
Baik	90,54	10,63	119,86	14,07	110,27	12,94	116,65	13,69	124,99	14,67
Sedang	39,91	4,68	7,63	0,90	10,26	1,20	11,66	1,37	11,66	1,37
Rusak	262,31	30,79	5,3	0,62	6,28	0,74	6,69	0,79	6,69	0,79
Rusak Berat	459,12	53,89	719,08	84,41	725,07	85,11	716,89	84,15	708,54	83,17
Total	**851,88**	**100,00**	**851,88**	**100,00**	**851,88**	**100,00**	**851,88**	**100,00**	**851,88**	**100,00**

Sumber: SDI Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Total panjang jalan kewenangan provinsi cenderung stagnan selama periode 2020-2024, yakni mencapai 851,88 km. Jika dilihat berdasarkan kondisi, sekitar 83,17 persen kondisi jalan kewenangan provinsi termasuk dalam kategori rusak berat pada tahun 2024. Persentase ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 yang berada pada kisaran 53,89 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya pergeseran definisi dalam perhitungan kategorisasi kondisi jalan baik dan sedang. Lebih dari itu, sebagian besar jalan provinsi masih berupa tanah dan kerikil.

Tabel 2. 58 Jenis Permukaan Jalan Kewenangan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020-2024

Jenis Permukaan	2020		2021		2022		2023		2024	
	km	%	km	%	Km	%	km	%	km	%
Aspal	88,01	10,33	107,89	12,66	116,95	13,73	133,57	15,68	138,67	16,28
Beton	10,33	1,21	10,66	1,25	11,54	1,35	11,51	1,35	11,46	1,35
Kerikil	121,97	14,32	84,36	9,90	84,14	9,88	77,39	9,08	62,61	7,35
Tanah	631,57	74,14	648,97	76,18	639,25	75,04	629,41	73,88	639,14	75,03
Total	**851,88**	**100,00**	**851,88**	**100,00**	**851,88**	**100,00**	**851,88**	**100,00**	**851,88**	**100,00**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Kondisi jenis permukaan jalan belum mengalami peningkatan yang signifikan selama kurun waktu 2020-2024. Hal ini terlihat dali proporsi jalan dengan permukaan tanah yang mencapai lebih dari 70 persen selama 2020-2024. Lebih dari itu, penambahan jalan dengan permukaan aspal dan beton juga masih lambat. Jika dilihat sebaran berdasarkan lokasi, hampir 50 persen jalan kewenangan provinsi berada di Kabupaten Bulungan. Kondisi ini mengakibatkan besarnya proporsi jalan provinsi dalam kondisi rusak dan jenis permukaan tanah lebih banyak dijumpai di Kabupaten Bulungan.

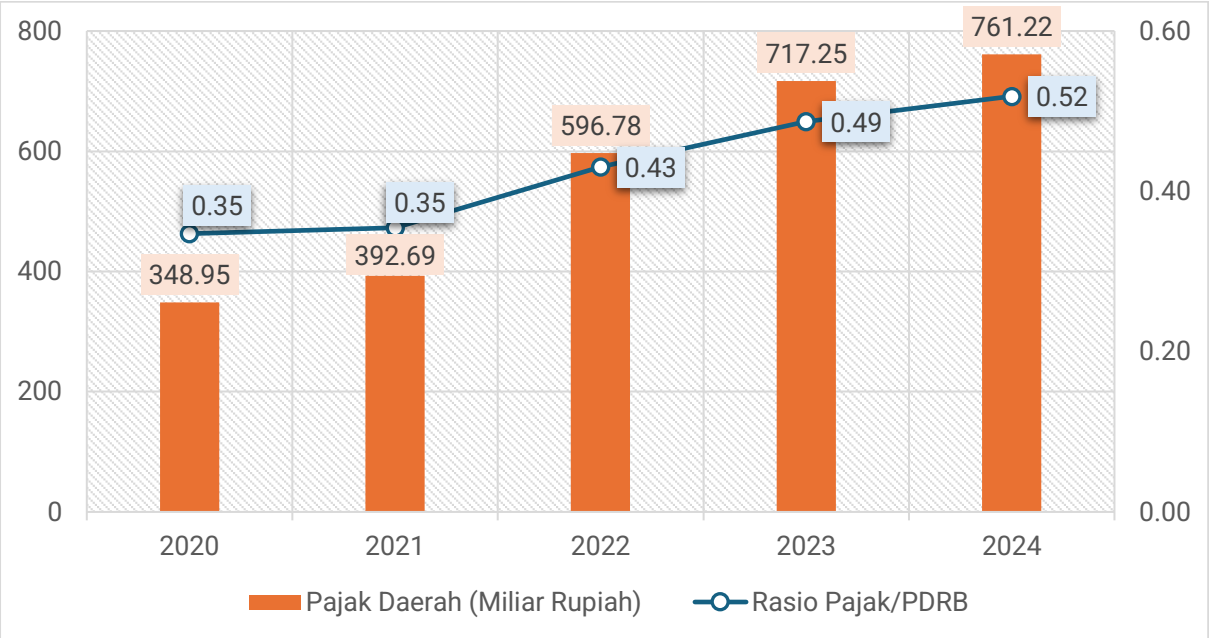
Kualitas jalan menjadi fondasi yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan penguatan ekonomi daerah. Oleh karena itu percepatan pembangunan konektivitas wilayah, salah satunya melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan jalan menjadi fokus pembangunan yang sangat krusial bagi Provinsi Kalimantan Utara selama lima tahun ke depan.

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Bagian ini menjelaskan kondisi tentang stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Penjelasan ini dilengkapi dengan indikator Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB dan tingkat inflasi.

2.3.7.1 Rasio Pajak terhadap PDRB

Rasio pajak terhadap PDRB menggambarkan seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB di daerah. Rasio pajak terhadap PDRB yang semakin tinggi menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah melalui APBD semakin baik.



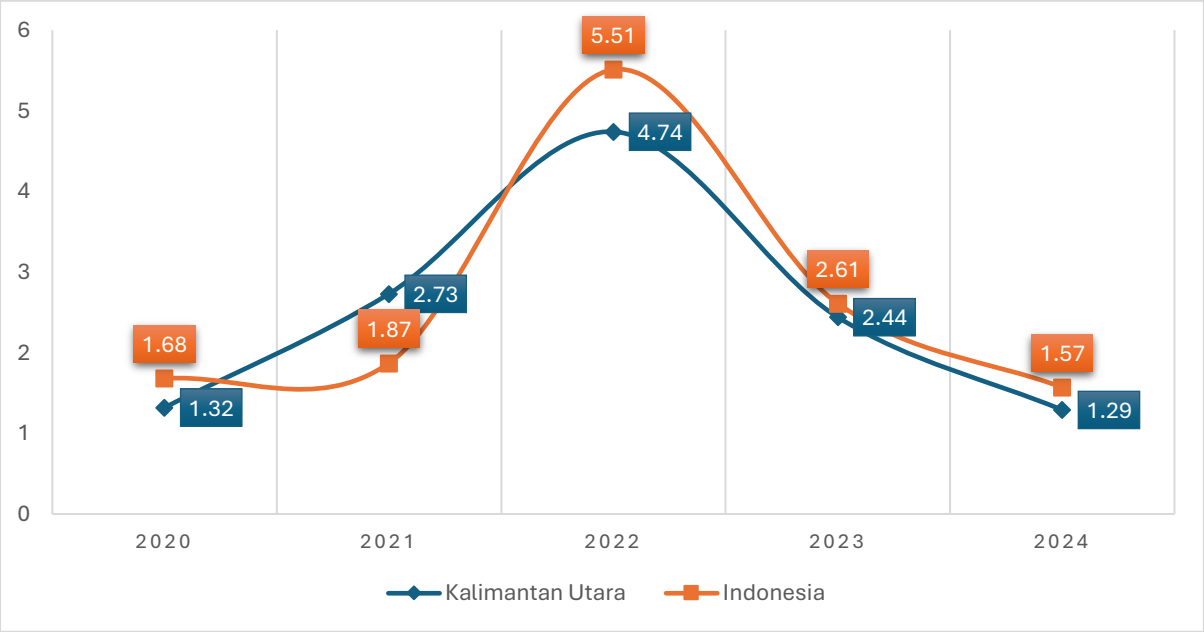
Gambar 2. 46 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Kalimantan Utara dan BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Penerimaan pajak daerah Provinsi Kalimantan Utara terus menunjukkan kenaikan selama periode 2020-2024. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan rasio pajak daerah terhadap PDRB semakin meningkat beriringan dengan perekonomian daerah yang semakin menguat. Rasio pajak daerah terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan sebesar 0,17 poin selama periode 2020-2024. Kenaikan tertinggi tercapai pada tahun 2022 dimana pajak daerah mengalami kenaikan hingga 204,09 miliar rupiah dan mendorong kenaikan rasio pajak sebesar 0,08 poin.

2.3.7.2 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus. Indikator yang digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah ini diukur secara periodik dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang didapatkan melalui survei biaya hidup (SBH) di sejumlah daerah. Di Provinsi Kalimantan Utara, pengukuran inflasi dilakukan di Kota Tarakan, Tanjung Selor, dan pada tahun 2024 ditambah dengan Nunukan. Berikut adalah inflasi Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2. 47 Inflasi Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Utara merupakan gabungan dari inflasi di Kota Tarakan dan Tanjung Selor dan sejak tahun 2024 ditambah dengan Nunukan.

Secara umum, tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Utara sejalan dengan pergerakan inflasi di tingkat nasional dengan kecenderungan semakin rendah. Pada tahun 2020-2023, inflasi di Provinsi Kalimantan Utara masih bergerak di kisaran sasaran inflasi nasional tetapi pada tahun 2024 pergerakan harga semakin melemah dengan tingkat inflasi sebesar 1,29 persen. Kondisi ini perlu menjadi perhatian mengingat rendahnya inflasi dapat mengindikasikan adanya pelemahan daya beli masyarakat.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Aspek ini menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Adapun indikator yang digunakan dalam menggambarkan kinerja aspek pelayanan umum, antara lain adalah Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Indeks Maturitas SPBE, dan Indeks Pelayanan Publik. Secara lebih mendalam, capaian tiap indikator yang diraih oleh Provinsi Kalimantan Utara akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator paling makro yang memberikan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja birokrasi di suatu instansi pemerintah. Pemenuhan indikator ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan *good governance,* di mana suatu pemerintah daerah dapat mencapai tingkat integritas dan kinerja yang tinggi. Semakin tinggi Indeks Reformasi Birokrasi, maka kinerja pemerintah daerah dianggap semakin efektif, efisien, serta bebas KKN. Berikut ini merupakan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2. 59 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2024

Indeks Reformasi	
Tahun	**Nilai**
2021	B
2022	B
2023	BB
2024	A

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2024; satudata menpan

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan reformasi birokrasi di Provinsi Kalimantan Utara sudah berjalan optimal. Kondisi ini disebabkan oleh adanya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan guna memastikan kinerja yang bertanggung jawab untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat akuntabilitas suatu pemerintah daerah adalah Nilai SAKIP. Indikator ini meninjau empat aspek utama dalam tata kelola pemerintahan, yakni perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi. Semakin tinggi nilai SAKIP, maka semakin selaras antara apa yang direncanakan dan apa yang direalisasikan dalam bentuk capaian yang bertanggung jawab. Adapun capaian Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 60 Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Nilai SAKIP		
Tahun	**Nilai**	**Predikat**
2020	71,07	BB
2021	72,13	BB
2022	73,08	BB
2023	73,41	BB
2024	71,05	BB

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026

Capaian Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Utara meningkat sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Salah satu faktor pendukung capaian ini adalah pemilihan program dan kegiatan yang tepat menyasar sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga didukung oleh konsistensi antar dokumen perencanaan dan APBD. Agar peningkatan ini berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu menekankan pada kualitas perencanaan dan pengukuran *output* dan *outcome* dalam mencapai kinerja sasaran organisasi.

Indikator terakhir yang menggambarkan capaian kinerja pelayanan umum adalah Indeks Maturitas SPBE. Indikator ini menjelaskan terkait sejauh mana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diterapkan di suatu daerah. Indeks SPBE memiliki tiga domain utama, yaitu domain kebijakan, domain tata kelola, dan domain layanan.

Tiga domain ini menjadi kerangka dasar dalam mewujudkan integrasi bisnis, data dan informasi, hingga keamanan elektronik. Capaian Indeks Maturitas SPBE Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 61 Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020–2024

Indeks SPBE		
Tahun	**Nilai**	**Kategori**
2020	1,78	Kurang
2021	2,38	Cukup
2022	1,98	Kurang
2023	2,83	Baik
2024	3,79	Sangat Baik

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Tabel 2. 62 Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2024

Nama Instansi	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	3,79	Sangat Baik
Pemerintah Kab. Bulungan	3,93	Sangat Baik
Pemerintah Kab. Malinau	2,45	Cukup
Pemerintah Kab. Nunukan	2,89	Baik
Pemerintah Kab. Tana Tidung	2,84	Baik
Pemerintah Kota Tarakan	3,11	Baik

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025

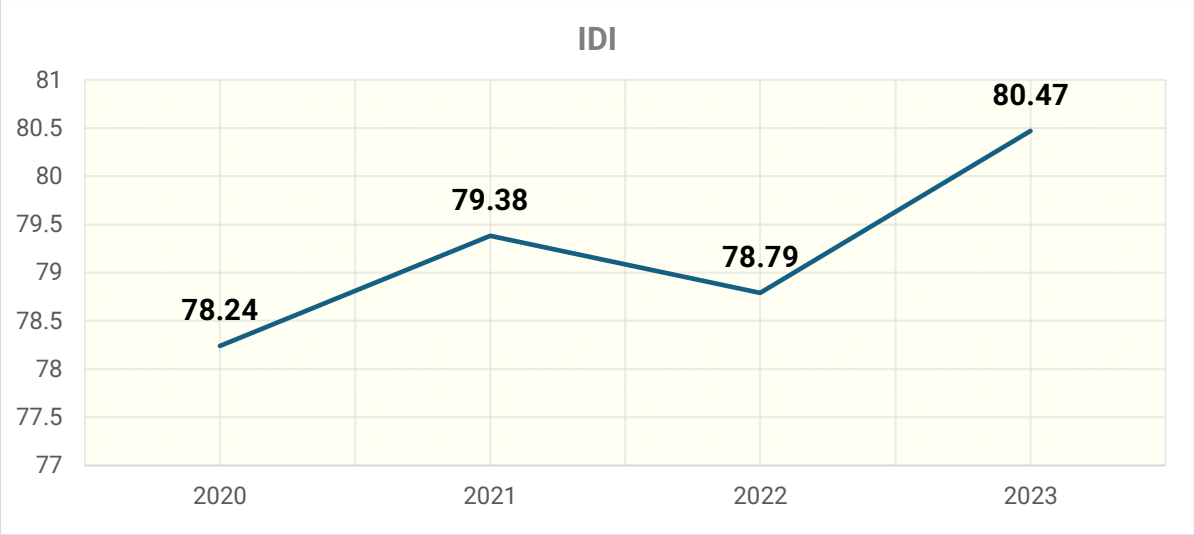
Indeks Maturitas SPBE Provinsi Kalimantan Utara mengalami kinerja fluktuatif dan cenderung naik. Indikator ini sempat menurun sebesar 0,40 poin pada tahun 2022 dan kembali meningkat drastis pada tahun 2023 hingga 2024 dengan rata-rata sebesar 2,5 poin dengan kategori sangat baik. Dari sisi Kabupaten/Kota, Kabupaten Malinau memiliki indeks SPBE lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya karena memiliki kinerja dengan kategori cukup. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja SPBE yang tinggi, yaitu Kabupaten Bulungan. Hal ini mengindikasikan bahwa digitalisasi pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara sudah optimal, namun masih menghadapi tantangan di level pemerintah Kabupaten/Kota terutama Kabupaten Malinau. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara, sarana dan prasarana TIK, dan sebagainya.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Aspek ini menjelaskan tentang kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Pembangunan demokrasi yang diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Kondisi ini dapat dinilai dari indikator, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Rasa Aman, Indeks Ketenteraman dan Ketertiban, dan indeks kerukunan umat beragama.

2.4.2.1 Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI merupakan pengukuran pembangunan politik dari dua sisi yaitu sisi pemerintah dan sisi masyarakat. Perhitungan IDI menggunakan metode terbaru mencakup tiga ranah, yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Tiga aspek IDI memiliki perwakilan indikator berkaitan dengan aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Semenjak tahun 2021, perhitungan IDI menggunakan metode baru dengan mengombinasikan perhitungan kuantitatif dan kualitatif. Adapun kinerja demokrasi di tingkat daerah dapat dilihat pada grafik berikut ini.



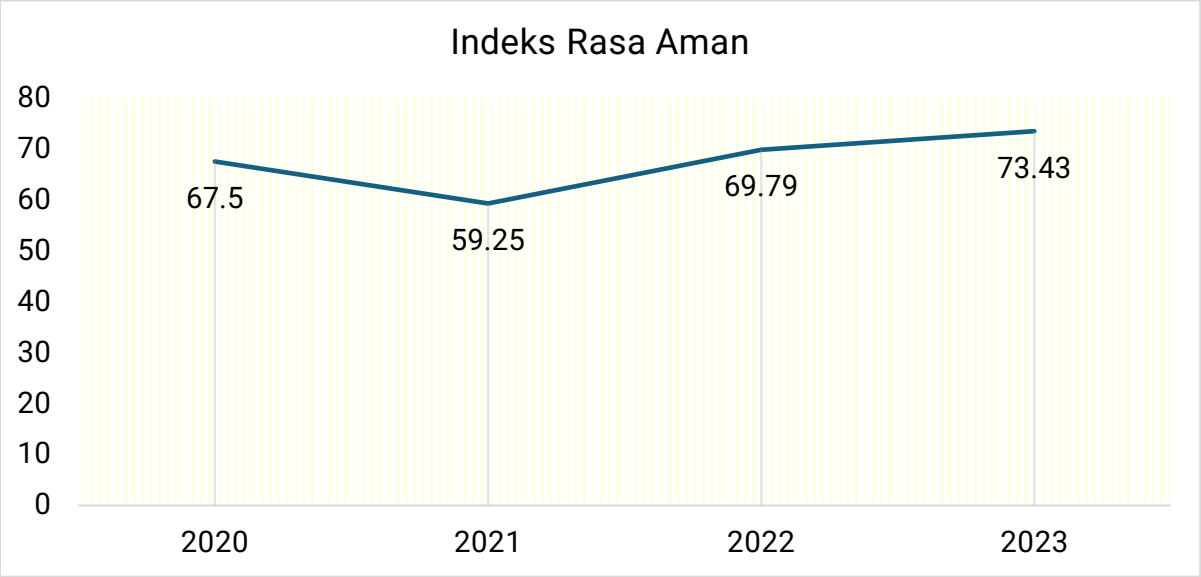
Gambar 2. 48 Grafik Indeks Demokrasi Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara 2024, Diolah

Kinerja IDI menunjukkan perkembangan fluktuatif dan cenderung meningkat. Pada tahun 2022, IDI Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan sebesar 0,59 poin. Akan tetapi, pada tahun 2023 mengalami peningkatan signifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja demokrasi di Provinsi Kalimantan Utara semakin baik.

2.4.2.2 Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman atau IRA merupakan indikator rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Rasa Aman menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 30 Ayat 1 mendefinisikan rasa aman sebagai suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Indeks rasa aman digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dirasakan masyarakat dalam suatu wilayah. Adapun Indeks rasa aman Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 2. 49 Indeks Rasa Aman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2023

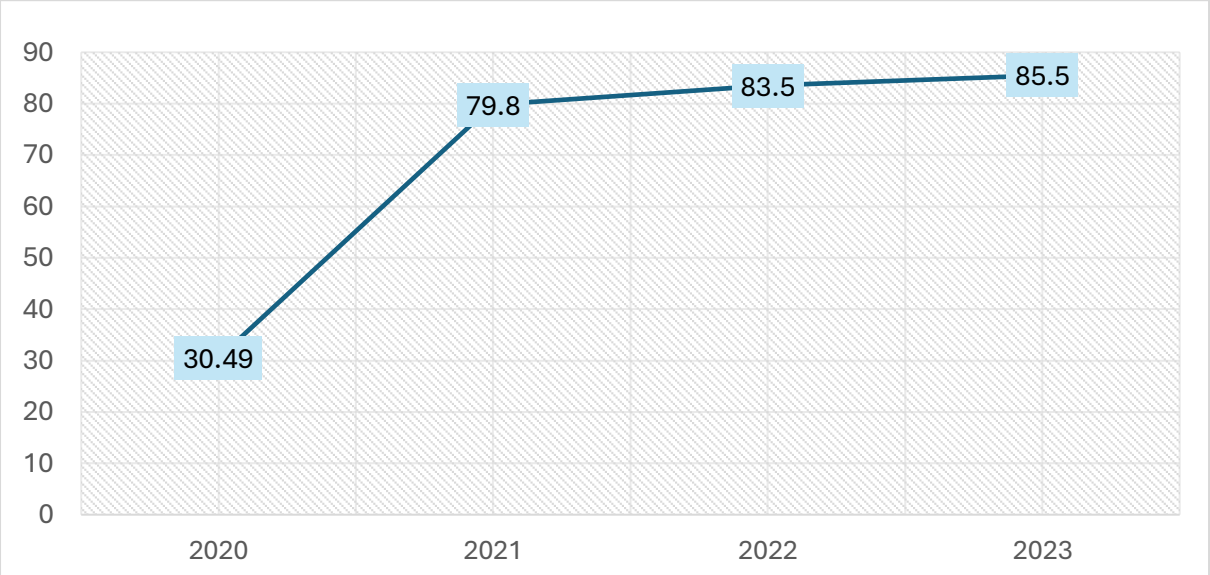
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Indeks rasa aman Provinsi Kalimantan Utara mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung naik. Penurunan kineja IRA terjadi pada tahun 2021, sebesar 8,25 poin. Akan tetapi, pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat rasa aman semakin baik.

2.4.2.3 Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum atau IKKU merupakan instrumen dari implementasi penegakan Perda dan Perkada dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (tibumtranmas). Pada IKKU Provinsi Kalimantan Utara menggunakan tindak kejahatan yang dilaporkan bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi. Data tersebut menggambarkan situasi keamanan daerah/wilayah tersebut melalui pencatatan kejadian kejahatan yang

dilaporkan oleh masyarakat. Data indeks ketentraman dan ketertiban menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan positif. Pada tahun 2018 hingga 2023, indeks ketentraman dan ketertiban mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan nilai indeks tertinggi dengan nilai akhir 79,8.



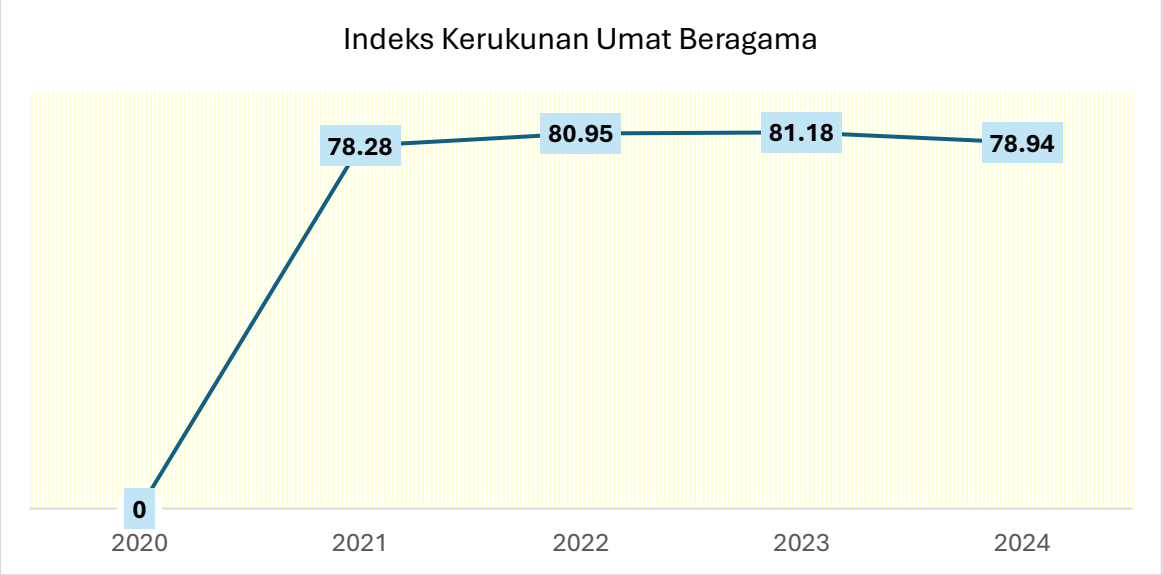
Gambar 2. 50 Grafik Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Indeks ketentraman dan ketertiban menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan positif. Pada tahun 2020 hingga 2023, indeks ketentraman dan ketertiban mengalami peningkatan secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondusifitas daerah semakin baik.

2.4.2.4 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks kerukunan umat beragama yang diatur berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 yaitu instrumen atau alat pengukuran bagi capaian program kerukunan yang berlandaskan pada toleransi, kesetaraan, dan kebagian. Data indeks kerukunan umat beragama dilakukan melalui survei oleh Puslitbang Bimas, Diklat Kementerian Agama, dan instansi terkait. Skor indeks kerukunan umat beragama berada pada rentang 0 hingga 100, yang semakin tinggi nilainya menunjukkan kerukunan umat beragama pada wilayah yang diteliti sangat tinggi.



Gambar 2. 51 Indeks Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Dimensi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaltara, 2025

Indeks KUB menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama perlu diperhatikan karena dapat berpotensi mengganggu stabilitas wilayah. Penurun ini disebabkan oleh adanya penurunan nilai pada seluruh dimensi, yaitu dimensi toleransi, kerja sama, dan kesetaraan.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Menjelaskan tentang ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan. Narasi mengenai sub bagian ini direpresentasikan melalui Indeks Daya Saing Daerah.

Indeks Daya Saing Daerah atau IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing yang merepresentasikan tingkat produktivitas pada provinsi dan kabupaten/kota. Konsep IDSD menggabungkan level makro pada institusi publik dengan level mikro pada perusahaan/industri. Penggabungan perspektif makro-mikro memiliki tiga faktor daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental *(basic requirement factors),* faktor penguat efisiensi *(efficiency enhancers),* dan faktor inovasi dan kecanggihan (*innovation* and *shopistication factors*). Faktor daya saing tersebut dimasukkan pada 12 pilar Indeks Daya Saing Daerah. 12 pilar tersebut

dielaborasikan oleh pengukuran IDSD, yaitu lingkungan pendukung (institusi, infrastruktur, adopsi TK, dan stabilitas ekonomi makro), sumber daya manusia (kesehatan dan keterampilan), pasar (pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar), dan ekosistem inovasi (dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi). Pengukuran IDSD distandarisasi dengan rentang skor 0 hingga 5 pada seluruh indikator.

Tabel 2. 63 Indeks Daya Saing Daerah Kalimantan Utara Tahun 2022 - 2024

Provinsi	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekosistem Inovasi		Skor
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	IDSD
Tahun 2022													
Nasional	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	1,31	5,00	2,61	3,26
Kalimantan Utara	4,46	2,95	3,89	3,22	4,00	3,90	1,81	4,71	2,74	0,30	5,00	1,25	3,19
Tahun 2023													
Nasional	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,01	3,44
Kalimantan Utara	4,55	1,94	3,98	3,79	3,97	3,92	1,81	4,53	1,54	4,06	3,30	1,81	3,26
Tahun 2024													
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
Kalimantan Utara	4,36	2,53	3,58	4,32	3,98	4,10	1,65	3,51	2,65	4,13	2,18	2,15	3,26

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional 2025, Diolah

Keterangan:

Pilar 1	Institusi	**Pilar 7**	Pasar Produk
Pilar 2	Infrastruktur	**Pilar 8**	Pasar Tenaga Kerja
Pilar 3	Adopsi TIK	**Pilar 9**	Sistem Keuangan
Pilar 4	Stabilitas Ekonomi Makro	**Pilar 10**	Ukuran Pasar
Pilar 5	Kesehatan	**Pilar 11**	Dinamisme Bisnis
Pilar 6	Keterampilan	**Pilar 12**	Kapabilitas Inovasi

IDSD Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan sebesar 7 poin pada tahun 2023, namun mengalami stagnansi pada tahun 2024 yakni berada pada angka 3,26. Capaian tersebut masih di bawah rata-rata secara nasional. Meskipun mengalami stagnansi pada tahun 2024, jika dianalisis berdasarkan komponen terdapat beberapa pergeseran capaian berdasarkan masing-masing pilar. Beberapa pilar yang konsisten mengalami peningkatan pada tahun 2022 hingga 2024 terdiri dari Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro, Pilar 6 Keterampilan, Pilar 10 Ukuran Pasar, dan

Pilar 12 Kapabilitas Inovasi. Sementara itu, pilar yang konsisten mengalami penurunan meliputi Pilar 7 Pasar Produk, Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja, dan Pilar 11 Dinamisme Bisnis. Adapun lima pilar sisanya mengalami fluktuasi selama periode 2022 hingga 2024.

Tabel 2. 64 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 - 2024

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
Bulungan	2,87	3,23	3,53
Kota Tarakan	3,41	3,49	3,81
Malinau	2,59	2,8	3,06
Nunukan	2,86	2,82	3,28
Tana Tidung	-	2,76	3,03

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional 2025, Diolah

Capaian skor IDSD kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara mengalami tren peningkatan selama tahun 2022 hingga 2024. Capaian tertinggi diperoleh Kota Tarakan yakni sebesar 3,81, bahkan capaian ini telah melampaui skor IDSD Provinsi Kalimantan Utara. Pencapaian skor IDSD yang cukup baik di tingkat kabupaten/kota ini mengindikasikan adanya tren positif dalam tingkat produktivitas daerah.

2.4.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja urusan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara diukur dengan melihat capaian Indikator Kinerja Kunci (p). IKK merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki IKK sebanyak 62 indikator dan telah dipenuhi seluruhnya. Berikut capaian IKK Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2. 65 Capaian Indikator Kinerja Kunci Provinsi Kalimantan Utara

No	Indikator Kinerja Kunci	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi RKPD 2024	Tingkat Capaian RKPD 2024
1	Indeks Ketahanan Nasional (indeks)	2,80	2,8	2,8	2,52	90,00
2	Angka Kriminalitas Tertangani	100	100	100	100	100
3	Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)	85,25	83,7	83,7	Belum Rilis	
4	Indeks Risiko Bencana (indeks)	153,62	153.62	147	131,84	157,31
5	Indeks RB (indeks)	BB	BB	BB	A	117,62

No	Indikator Kinerja Kunci	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi RKPD 2024	Tingkat Capaian RKPD 2024
6	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB	100
7	Maturitas SPIP	3,3	3,3	3,38	3,048	90,18
8	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (indeks)	Baik	Baik	Baik	Belum rilis	
9	Indeks Maturitas SPBE (indeks)	3,2	3,2	3,2	3,79	118,44
10	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	71,58	72,1	72,95	73,41	100,63
11	Angka Harapan Hidup (tahun)	72,73	72,73	73,61	73,57	99,95
12	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,45	13,45	13,45	13,21	98,22
13	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,53	9,53	9,53	9,35	98,11
14	Angka Kemiskinan (%)	6,10-5,90	5,90-6,10	5,90-6,10	5,38	111,80
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,33	4,11	3,97	3,90	101,76
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	78,62	78,62	80,93	79,95	98,79
17	Tingkat Penurunan Emisi GRK	7,774,605	7,774,605	7,774,605		
18	Indeks Kualitas Air (indeks)	55,12	55,12	55,99	54,31	97,00
19	Indeks Kualitas Udara (indeks)	91.54	91.54	94	92,99	98,93
20	Indeks Tutupan Lahan (indeks)	100	100	100	100	100,00
21	Indeks Kualitas Air Laut (indeks)	74.74	74.74	83,48	84,65	101,40
22	Indeks Layanan Infrastruktur (indeks)	3,85	3,85	4,32	Belum rilis	
23	Cakupan Layanan Transportasi Antar Pusat Kegiatan (%)	80	80	80	67	83.75
24	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	66,11	66,11	66,11	49,00	74,12
25	Cakupan Akses dan Layanan Telekomunikasi (%)	91	91	97,71	98,34	100,64
26	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,01	5,05-5,95	5,05-5,95	4,57	90,50
27	Nilai PDRB (ADHK) (miliar rupiah)	74.201,94	74.201,94	74.201,94	73.008,00	98,39

No	Indikator Kinerja Kunci	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi RKPD 2024	Tingkat Capaian RKPD 2024
28	Nilai PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	136.635,64	136.635,64	147.867,73	146.793,50	99,27
29	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	17,35	17,35	6,48	1,75	27,01
30	Indeks Ketahanan Pangan (indeks)	73,10	73,1	74,96	75,77	101,08
31	Nilai Tukar Petani	103,65	110,45	111,79	112,81	100,91
32	Nilai Tukar Nelayan	104,93	105,98	108,47	105,59	97,34
33	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri (%)	6,32	6,32	6,32	3,37	53,32
34	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	2	2	6,8	9,80	144,12
35	Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)	7.985	7.985	9.772,94	10.197,00	104,34
36	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	670,260	670,26	995.231	1.285.834	129,20
37	Indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks)	81,70	81,7	81,7	78,94	96,62
38	Skor Dimensi Toleransi	80,08	80,08	80,83	79,30	98,11
39	Skor Dimensi Kesetaraan	79,80	79,8	83,04	79,38	95,59
40	Skor Dimensi Kerjasama	79,94	79,94	80,09	78,15	97,58
41	Nilai Intensitas Energi (TOE/ Miliyar Rupiah)	0.27	0,27	0,27	6,389	2.366
42	Cakupan Rumah Tangga Teraliri Listrik (KK)	198.045	198.045	216.015	239.045	110,66
43	Rasio Elektrifikasi (%)	95,08	95,08	95,08	95,08	2366,30
44	Nilai Bauran Energi	5,43	5,43	12,41	23,87	192,34
45	Indeks Pembangunan Gender (indeks)	90,60	90,6	90,6	88,46	98%
46	Rasio Angka Harapan Hidup Perempuan : Laki-/laki	1,020	1,02	1,06	1,06	100%
47	Rasio Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan : Laki-laki	0,970	0,97	0,97	0,94	97%
48	Rasio Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan : Laki-laki	1,006	1,006	1,04	1,05	101%
49	Rasio Pengeluaran Perkapita Perempuan : Laki-laki	0,65	0,65	0,65	0,47	72%
50	Indeks Pembangunan Pemuda (indeks)	57,60	57,6	57,6	Belum rilis	

No	Indikator Kinerja Kunci	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi RKPD 2024	Tingkat Capaian RKPD 2024
51	Laju Pertumbuhan Koperasi dan UMKM (%)	7.41	30,54	30,54	64,46	211,06
52	Pertumbuhan Koperasi Sehat (%)	5	18,6	5	-8,26	-165,14
53	Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada UMKM (%)	6,69	17	6,5	2,35	36,17
54	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMA+PMDN) (%)	3	3	3	83	2766
55	Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi (%)	85	85	85	74	87
56	Indeks Williamson (indeks)	0,16	0,16	0,1595	Belum rilis	
57	Indeks Gini (indeks)	0,282	0,265 – 0,286	0,265 – 0,286	0,259	
58	Proporsi Desa Tertinggal (%)	31,32	31,32	21,27	12,30	137,12
59	Jumlah Desa Mandiri (desa)	40	40	63	72	114,29
60	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal (desa)	140	140	88	55	62,50
61	Tahapan Pembentukan DOB yang Terpenuhi (kecamatan)	1	1	1	0	0
62	Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan (kecamatan)	1	1	1	0	0,00

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

2.5.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah meliputi:

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaan daerah;

d. Pengeluaran daerah;

e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau

f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam upaya mengatur keuangan daerah agar tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, maka dibutuhkan suatu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang diwujudkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda).

Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), sumber-sumber pembiayaan untuk menutupnya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sementara itu, jika pendapatan lebih besar dari belanja daerah (anggaran surplus), maka penggunaan surplus diutamakan untuk pembayaran pokok utang, investasi, pemberian pinjaman dan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. daerah.

Tabel 2. 66 Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Realisasi APBD (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**PENDAPATAN**					
A.	Pendapatan Asli Daerah	557.646.133.462	677.803.723.305	815.664.188.997	980.136.675.968	1.033.747.641.868
B.	Pendapatan Transfer	1.846.607.658.007	1.890.949.863.341	1.908.970.208.199	2.104.954.266.065	2.417.275.881.907
C.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	31.197.933.335	40.748.257.368	6.857.420.256	5.921.818.966	8.002.630.696
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.435.451.724.804**	**2.609.501.844.014**	**2.731.491.817.452**	**3.091.012.760.999**	**3.459.026.154.471**
2	**BELANJA**					
A.	Belanja Operasi	1.727.405.179.222	1.647.219.558.627	1.629.460.884.904	2.042.445.525.499	2.333.169.870.778
B.	Belanja Modal	665.170.894.025	390.900.388.868	496.619.274.367	651.639.401.736	706.181.651.526
C.	Belanja Tidak Terduga	-	11.924.306.413	923.172.706	9.451.453.256	7.566.963.773
D.	Belanja Transfer	287.745.623.322	322.601.636.378	426.574.659.154	538.778.797.545	524.327.592.129
	JUMLAH BELANJA	**2.680.321.696.569**	**2.372.645.890.287**	**2.553.577.991.131**	**3.242.315.178.036**	**3.571.246.078.206**
	Surplus/Defisit	**(244.869.971.764)**	**236.855.953.727**	**177.913.826.320**	**(151.302.417.037)**	**(112.219.923.735)**
3	**PEMBIAYAAN**					
A.	Penerimaan Pembiayaan	343.473.119.415	47.254.756.068	246.200.110.391	316.046.143.553	149.768.722.963
B.	Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000	21.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	20.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	**341.973.119.415**	**26.254.756.068**	**231.200.110.391**	**301.046.143.553**	**129.768.722.963**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**97.103.147.651**	**263.110.709.795**	**409.113.936.711**	**149.743.726.516**	**17.548.799.227**

Sumber:Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2020-2024

Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2020 hingga 2024, terlihat tren pertumbuhan pendapatan daerah yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah pendapatan daerah naik signifikan dari Rp2,43 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,46 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong terutama oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh dari Rp557,6 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1,03 triliun pada tahun 2024, serta pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang juga meningkat dari Rp1,84 triliun menjadi Rp2,41 triliun.

Sementara itu, dari sisi belanja daerah, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada belanja operasi dan belanja modal. Total belanja meningkat dari Rp2,68 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,57 triliun pada tahun 2024. Namun demikian, terdapat fluktuasi dalam struktur belanja, misalnya pada tahun 2021 ketika belanja mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga juga muncul pada tahun-tahun setelah 2020 sebagai respons terhadap kondisi darurat, seperti pandemi.

Surplus atau defisit anggaran menunjukkan dinamika fiskal yang beragam. Tahun 2020, 2023, dan 2024 mengalami defisit anggaran, sedangkan tahun 2021 dan 2022 mencatatkan surplus. Namun, defisit yang terjadi masih dapat ditutupi oleh pembiayaan netto yang positif, terutama dari penerimaan pembiayaan yang signifikan pada tahun-tahun tersebut.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Puncaknya terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp409,1 miliar, menandakan efisiensi pelaksanaan anggaran, meskipun pada tahun 2024 turun drastis menjadi hanya Rp17,5 miliar. Penurunan ini dapat menjadi indikasi menurunnya efisiensi atau meningkatnya realisasi belanja dibandingkan perencanaan sebelumnya.

Secara umum, APBD Kalimantan Utara menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Meskipun beberapa tahun mengalami defisit, manajemen pembiayaan daerah cukup efektif untuk menutupinya. Namun demikian, fluktuasi pada pos-pos strategis seperti belanja modal dan belanja

transfer perlu mendapatkan perhatian lebih agar kesinambungan pembangunan daerah dapat lebih optimal.

2.5.1.1 Pendapatan Daerah

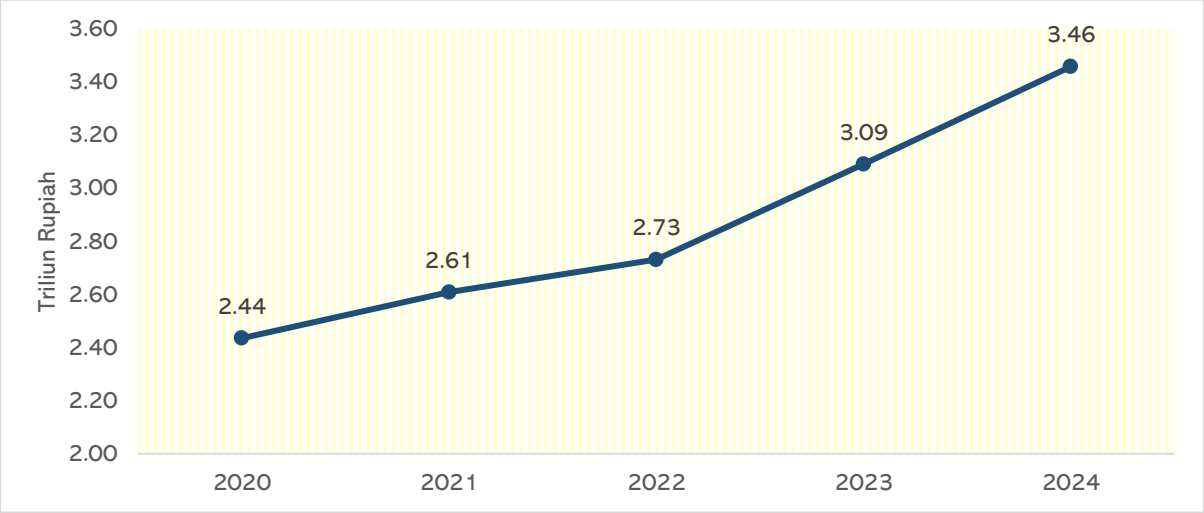
Mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sumber pendapatan daerah meliputi (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2) pendapatan transfer, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat yang mencakup dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa; serta transfer antar daerah yang mencakup pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan; (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Tabel 2. 67 Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan Daerah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	(% per tahun)
1	**PENDAPATAN**						
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**557.646.133.462,35**	**677.803.723.304,94**	**815.664.188.996,50**	**980.136.675.968,05**	**1.033.747.641.867,97**	**16,68**
1.1.1.	Pajak Daerah	348.949.836.778,00	392.686.405.543,00	596.780.850.288,00	717.253.715.401,00	761.219.619.467,00	21,53
1.1.2.	Retribusi Daerah	4.856.242.203,00	6.212.686.828,00	7.053.749.676,00	17.404.890.968,00	10.790.544.538,16	22,09
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	7.455.831.909,73	8.205.702.460,00	9.088.203.219,39	10.114.672.311,44	11.371.469.793,77	11,13
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	196.384.222.571,62	270.698.928.473,94	202.741.385.813,11	235.363.397.287,61	250.366.008.069,04	6,26
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**1.846.607.658.007,00**	**1.890.949.863.341,00**	**1.908.970.208.199,00**	**2.104.954.266.065,00**	**2.417.275.881.907,00**	**6,96**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**1.799.125.383.007,00**	**1.818.653.490.341,00**	**1.875.149.171.199,00**	**2.080.287.939.065,00**	**2.404.627.387.907,00**	7,52
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	81.708.790.232,00	141.163.908.009,00	122.010.301.004,00	126.943.258.367,00	81.492.235.000,00	-0,07
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil SDA	261.070.415.017,00	243.360.751.954,00	444.503.626.692,00	562.836.351.343,00	924.754.700.000,00	37,19
1.2.2.3	Dana Alokasi Umum	1.082.389.409.000,00	1.077.878.230.685,00	1.080.588.578.315,00	1.117.056.619.340,00	1.153.992.670.001,00	1,61
1.2.2.4	Dana Alokasi Khusus	373.956.768.758,00	356.250.599.693,00	228.046.665.188,00	273.451.710.015,00	244.387.782.906,00	-10,09
1.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**47.482.275.000,00**	**72.296.373.000,00**	**33.821.037.000,00**	**24.666.327.000,00**	**12.648.494.000,00**	-28,16
1.2.2.1	Dana penyesuaian	47.482.275.000,00	72.296.373.000,00	33.821.037.000,00	24.666.327.000,00	12.648.494.000,00	-28,16
1.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**31.197.933.335,00**	**40.748.257.367,98**	**6.857.420.256,00**	**5.921.818.966,00**	**8.002.630.696,00**	**-28,83**
1.3.1	Pendapatan hibah	31.197.933.335,00	315.000.000,00	5.776.633.300,00	5.546.233.000,00	6.609.420.000,00	-32,16
1.3.2	Pendapatan Lainnya		40.433.257.367,98	1.080.786.956,00	375.585.966,00	1.393.210.696,00	-67,46
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.435.451.724.804,35**	**2.609.501.844.013,92**	**2.731.491.817.451,50**	**3.091.012.760.999,05**	**3.459.026.154.470,97**	9,17

Sumber:Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2020-2024

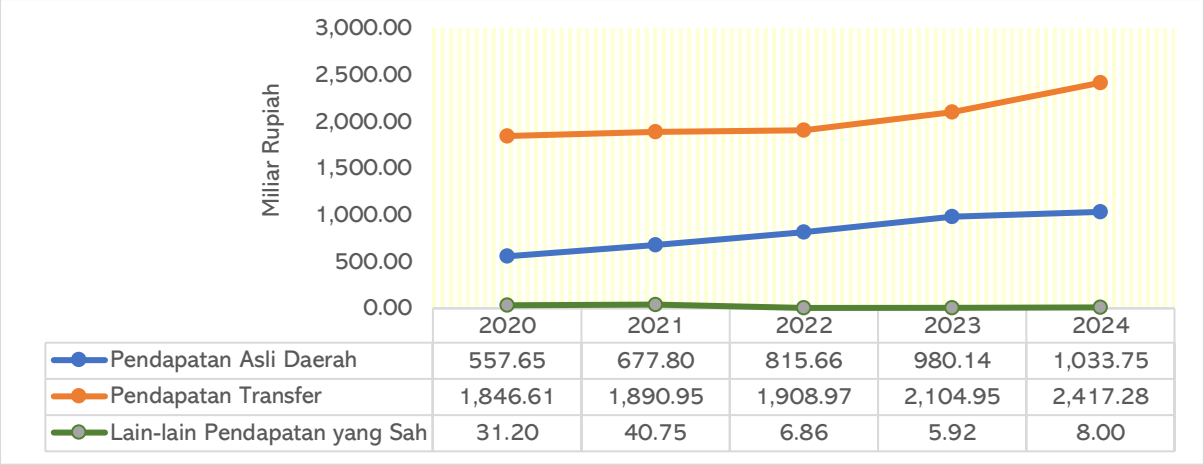
Secara umum, dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, besaran pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan rata-rata peningkatan sebesar 9,17 persen per tahun. Pada tahun 2020 besaran pendapatan daerah provinsi ini tercatat sebesar Rp2.44 triliun yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2024, hingga besarannya menjadi Rp3.46 triliun.



Gambar 2. 52 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber:Olah Data 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, PAD merupakan salah satu komponen yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah. Semakin tinggi capaian PAD pada suatu daerah mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal, dan semakin kecil ketergantungan dan/atau tidak bergantung lagi pada pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk memperoleh PAD mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya, juga menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik.



	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	557.65	677.80	815.66	980.14	1,033.75
Pendapatan Transfer	1,846.61	1,890.95	1,908.97	2,104.95	2,417.28
Lain-lain Pendapatan yang Sah	31.20	40.75	6.86	5.92	8.00

Gambar 2. 53 Perkembangan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

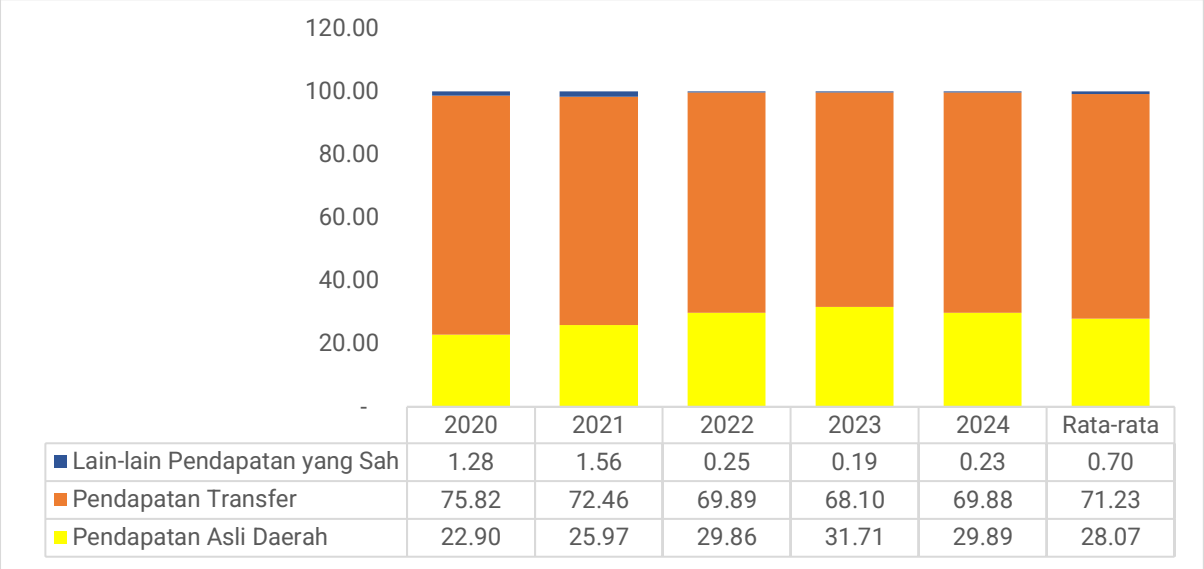
PAD mengalami pertumbuhan rata-rata yang cukup signifikan sebesar 16,68 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 besaran PAD di provinsi ini tercatat sebesar Rp557,65 miliar yang kemudian tumbuh naik hingga tahun 2024 menjadi Rp1.033.75 miliar. Hal ini terutama ditopang oleh peningkatan pendapatan dari pajak daerah yang tumbuh sebesar 21,53 persen dan retribusi daerah sebesar 22,09 persen per tahun.

Pendapatan transfer, yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Transfer ke Daerah lainnya, tetap menjadi kontributor utama dalam struktur pendapatan dengan nilai realisasi yang meningkat dari Rp1.846,61 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.417,28 miliar pada tahun 2024. Namun demikian, laju pertumbuhan pendapatan transfer hanya sebesar 6,96 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi, pemerintah provinsi telah berhasil menekan ketergantungan tersebut melalui peningkatan PAD.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan tren yang tidak stabil dan cenderung menurun. Nilai realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp31,20 miliar menurun drastis menjadi hanya Rp8,00 miliar pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan tahunan pada komponen ini adalah -28,83 persen. Ketidakstabilan ini mengindikasikan bahwa sumber pendapatan dari kategori ini tidak bersifat tetap dan sangat bergantung pada faktor eksternal seperti hibah, pendapatan dari BLUD, atau pendapatan tidak terduga lainnya.

Secara keseluruhan, peningkatan pendapatan daerah, terutama dari PAD, menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Meski demikian, langkah-langkah berkelanjutan diperlukan untuk menjaga konsistensi pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya dengan memperluas basis PAD dan menjaga efisiensi pengelolaannya.

Berdasarkan data proporsi sumber pendapatan daerah, struktur pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih didominasi oleh pendapatan transfer, meskipun tren kontribusinya menunjukkan penurunan secara bertahap. Rata-rata kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah sebesar 71,23 persen, dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2020 (75,82 persen) dan menurun hingga 68,10 persen pada tahun 2023. Meskipun demikian, proporsi ini masih menandakan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana yang bersumber dari pemerintah pusat.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.28	1.56	0.25	0.19	0.23	0.70
Pendapatan Transfer	75.82	72.46	69.89	68.10	69.88	71.23
Pendapatan Asli Daerah	22.90	25.97	29.86	31.71	29.89	28.07

Gambar 2. 54 Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Sebaliknya, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, PAD hanya berkontribusi sebesar 22,90 persen, namun meningkat signifikan hingga mencapai 31,71 persen pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 29,89 persen pada tahun 2024. Secara rata-rata, kontribusi PAD selama lima tahun terakhir mencapai 28,07 persen, menunjukkan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan upaya optimalisasi

sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan. Hal ini patut diapresiasi karena peningkatan PAD mencerminkan semakin kuatnya kapasitas fiskal daerah dan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan.

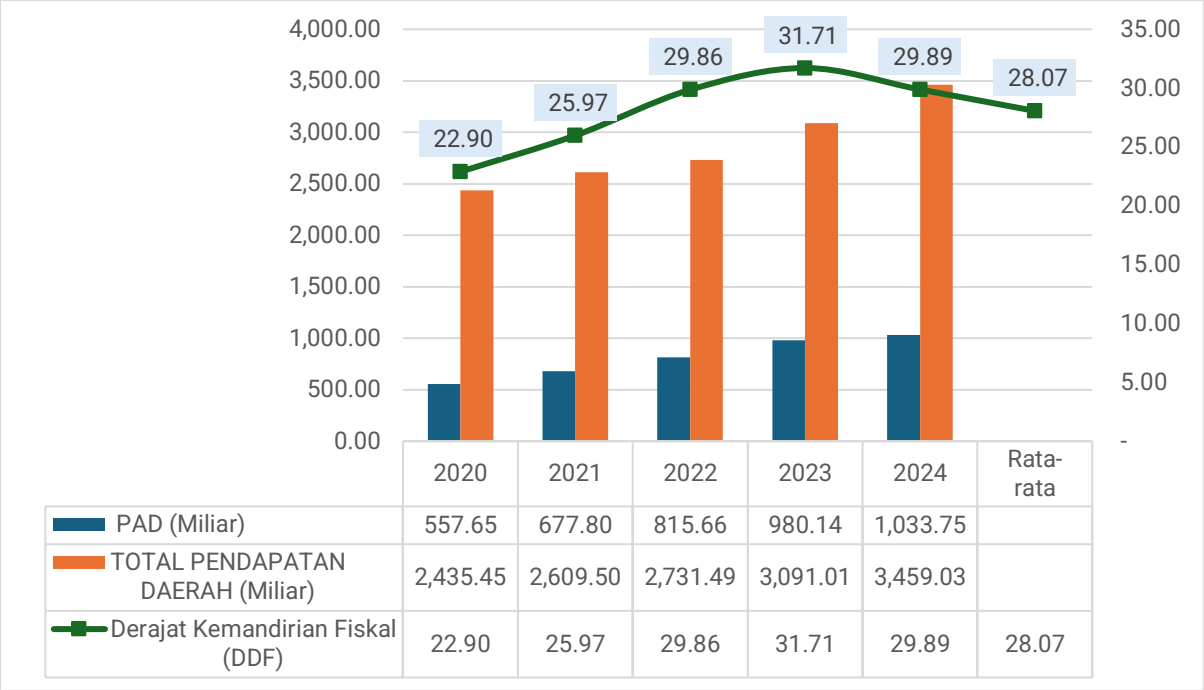
Sementara itu, kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah cenderung tidak stabil dan relatif sangat kecil. Rata-rata kontribusinya hanya sebesar 0,70 persen dari total pendapatan. Penurunan drastis terjadi pasca 2021, di mana sebelumnya sempat mencapai 1,56 persen, namun turun menjadi hanya 0,19 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dari kategori ini bersifat insidental dan tidak dapat dijadikan sumber utama pendapatan daerah.

Secara keseluruhan, terdapat kecenderungan positif dalam perbaikan struktur pendapatan daerah, khususnya melalui peningkatan kontribusi PAD. Meskipun demikian, pemerintah provinsi masih perlu melanjutkan strategi diversifikasi dan intensifikasi sumber PAD agar kemandirian fiskal dapat benar-benar tercapai. Selain itu, optimalisasi pengelolaan pendapatan dari sektor-sektor potensial seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah perlu terus ditingkatkan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam menguji kemampuan keuangan daerah, dapat dilakukan analisis keuangan dengan mengidentifikasi berbagai aspek keuangan berdasarkan laporan realisasi anggaran pemerintah khususnya pada komponen pendapatan daerah. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat adalah derajat kemandirian fiskal. Derajad kemandirian fiskal daerah berguna untuk mengetahui seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai belanja daerah tanpa bergantung pada pendapatan transfer.

Untuk derajat kemandirian fiskal (DDF) daerah ditunjukkan oleh proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan. Kemandirian fiskal daerah dikelompokkan menjadi: (1) Sangat Kurang (DDF ≤ 10,00); (2) Kurang (10,00 < DDF ≤ 20,00); (3) Sedang (20,00 < DDF ≤ 30,00); (4) Cukup Baik (30,00 < DDF ≤ 40,00); (5) Baik (40,00 < DDF ≤ 50,00); dan (6) Sangat Baik (DDF > 50,00). Semakin besar angka

proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah maka kemandirian daerah semakin besar. Berikut adalah grafik derajat kemandirian daerah Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
PAD (Miliar)	557.65	677.80	815.66	980.14	1,033.75	
TOTAL PENDAPATAN DAERAH (Miliar)	2,435.45	2,609.50	2,731.49	3,091.01	3,459.03	
Derajat Kemandirian Fiskal (DDF)	22.90	25.97	29.86	31.71	29.89	28.07

Gambar 2. 55 Derajat Desentralisasi Fiskal (Kemandirian) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

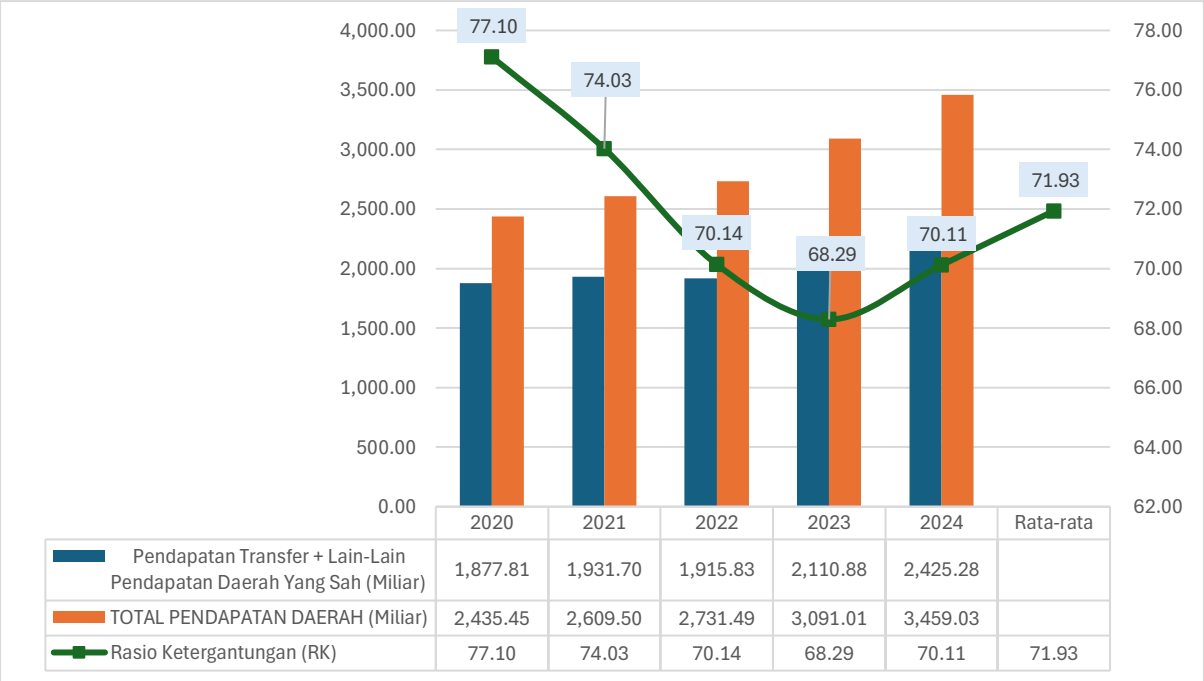
Sumber: Olah Data 2025

Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, derajat kemandirian fiskal (DDF) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren peningkatan, meskipun masih berada dalam kategori “Sedang” secara rata-rata. DDF dihitung dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, yang secara langsung mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2020, DDF tercatat sebesar 22,90 persen, dan mengalami peningkatan berturut-turut hingga mencapai angka tertinggi sebesar 31,71 persen pada tahun 2023. Dengan demikian, pada tahun tersebut Kalimantan Utara mencapai kategori “Cukup Baik” dalam hal kemandirian fiskal. Namun, pada tahun 2024, DDF sedikit menurun ke angka 29,89 persen, yang mengembalikan statusnya ke kategori “Sedang”.

Secara keseluruhan, rata-rata DDF selama periode lima tahun terakhir berada di angka 28,07 persen, yang mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih tergolong cukup bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemandirian fiskal ke level yang lebih tinggi seperti kategori “Baik” atau bahkan “Sangat Baik”, pemerintah daerah perlu terus memperkuat basis PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, optimalisasi retribusi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang dapat menghasilkan pendapatan.

Rasio Ketergantungan (RK) Fiskal suatu daerah dihitung berdasarkan proporsi dana transfer ditambah dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu: (1) Sangat Rendah (RK ≤ 10,00); (2) Rendah (10,00 < RK ≤ 20,00); (3) Sedang (20,00 < RK ≤ 30,00); (4) Cukup Tinggi (30,00 < RK ≤ 40,00); (5) Tinggi (40,00 < RK ≤ 50,00); dan (6) Sangat Tinggi (RK > 50,00). Semakin tinggi angka RK, semakin besar ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Berikut adalah grafik rasio ketergantungan daerah Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Pendapatan Transfer + Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Miliar)	1,877.81	1,931.70	1,915.83	2,110.88	2,425.28	
TOTAL PENDAPATAN DAERAH (Miliar)	2,435.45	2,609.50	2,731.49	3,091.01	3,459.03	
Rasio Ketergantungan (RK)	77.10	74.03	70.14	68.29	70.11	71.93

Gambar 2. 56 Rasio Ketergantungan (RK) Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

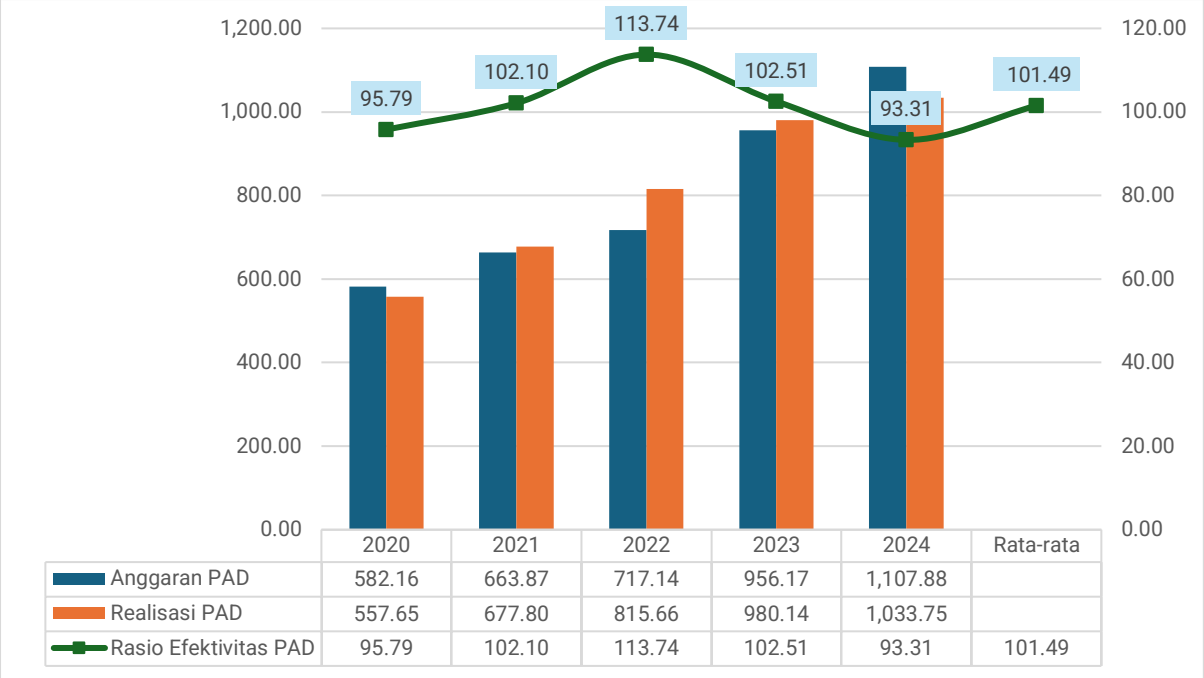
Sumber: Olah Data 2025

Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, Rasio Ketergantungan Fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan angka yang cukup tinggi dan konsisten berada di atas 68 persen setiap tahunnya. Rata-rata rasio ketergantungan dalam periode ini mencapai 71,93 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pendanaan pemerintahan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat serta komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan kategori ketergantungan fiskal, Provinsi Kalimantan Utara masuk dalam kategori “Sangat Tinggi”, yaitu ketika rasio ketergantungan melebihi 50 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa kemampuan fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintahan secara mandiri masih terbatas. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer berimplikasi pada rendahnya fleksibilitas daerah dalam merancang kebijakan fiskal yang otonom serta meningkatkan risiko fiskal apabila terjadi perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting. Diversifikasi sumber-sumber pendapatan lokal, penguatan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta efisiensi belanja daerah merupakan langkah-langkah strategis yang perlu diupayakan untuk mengurangi ketergantungan fiskal dan memperkuat otonomi keuangan daerah.

Untuk kemampuan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi pendapatan asli secara optimal. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator yang menggambarkan tingkat pencapaian realisasi PAD terhadap target yang telah ditetapkan dalam anggaran. Rasio ini dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu: (1) Sangat Tidak Efektif (RE ≤ 60,00); (2) Kurang Efektif (60,00 < RE ≤ 80,00); (3) Cukup Efektif (80,00 < RE ≤ 90,00); (4) Efektif (90,00 < RE ≤ 100,00); dan (5) Sangat Tinggi (RE > 100,00). Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, semakin baik pula kinerja fiskal daerah dalam menggali dan merealisasikan sumber-sumber pendapatan asli yang dimiliki.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Anggaran PAD	582.16	663.87	717.14	956.17	1,107.88	
Realisasi PAD	557.65	677.80	815.66	980.14	1,033.75	
Rasio Efektivitas PAD	95.79	102.10	113.74	102.51	93.31	101.49

Gambar 2. 57 Rasio Efektifitas PAD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, rasio efektivitas PAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan capaian yang konsisten tinggi. Pada tahun 2020, rasio efektivitas PAD tercatat sebesar 95,79 persen, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 102,10 persen, dan bahkan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan 113,74 persen, yang menunjukkan kinerja sangat optimal. Pada tahun 2023, rasio ini masih tergolong sangat baik dengan capaian 102,51 persen, walaupun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 93,31 persen. Secara rata-rata dalam lima tahun terakhir, rasio efektivitas PAD mencapai 101,49 persen, yang termasuk dalam kategori “Sangat Efektif”.

Berdasarkan klasifikasi efektivitas PAD, capaian di atas mencerminkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara konsisten mampu melebihi atau mendekati target pendapatan yang telah dianggarkan. Hal ini menunjukkan perencanaan pendapatan yang realistis, disertai dengan pelaksanaan yang efektif dalam mengelola sumber-sumber PAD. Capaian ini juga mengindikasikan kemampuan teknokratis dalam menilai potensi riil daerah, serta komitmen dalam optimalisasi penerimaan asli daerah.

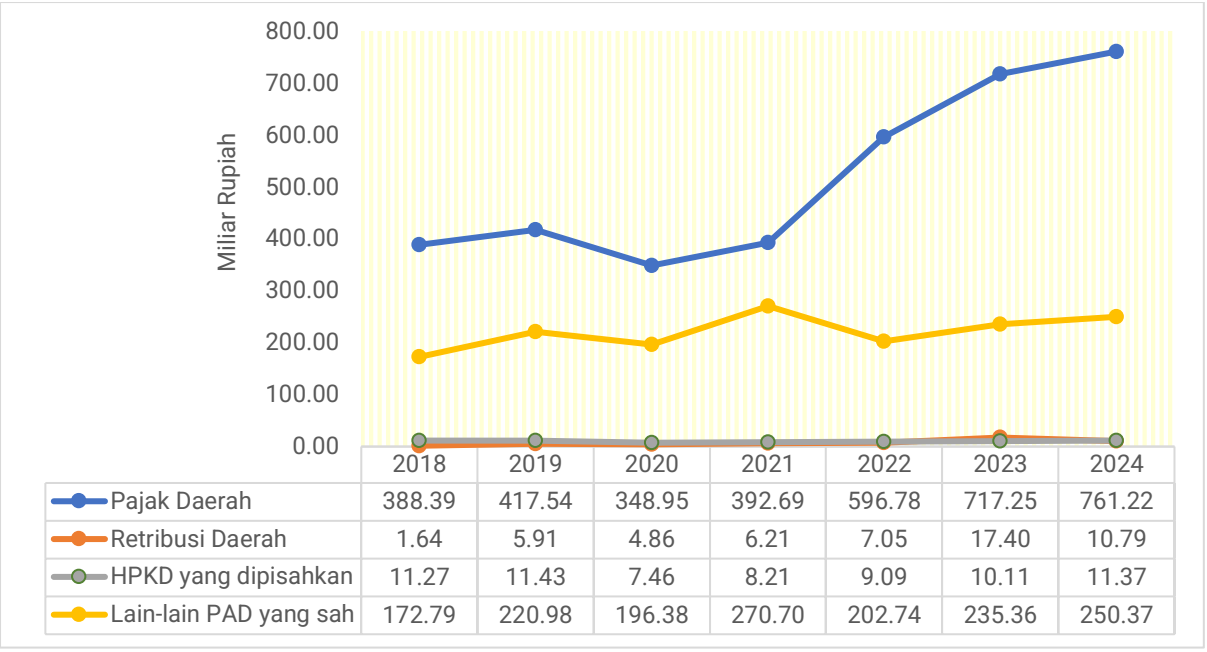
Namun demikian, meskipun efektivitas tinggi menunjukkan pengelolaan yang baik terhadap target, hal ini belum tentu mencerminkan kontribusi PAD yang besar terhadap total pendapatan daerah. Oleh karena itu, selain mempertahankan efektivitas, pemerintah daerah juga perlu mendorong pertumbuhan PAD secara absolut dan meningkatkan proporsinya terhadap keseluruhan pendapatan daerah, guna memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam aspek efektivitas PAD. Langkah selanjutnya yang dapat diprioritaskan adalah penguatan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah agar tidak hanya efektif secara capaian, tetapi juga berdaya saing dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1), terdapat empat sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah.

Dalam struktur PAD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa seluruh komponen PAD menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun dengan variasi pertumbuhan yang berbeda antar komponen. Komponen Pajak Daerah menjadi penyumbang PAD terbesar sepanjang periode tersebut, dengan nilai realisasi yang meningkat secara konsisten dari Rp348,95 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp761,22 miliar pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan tahunannya mencapai 21,53 persen, mencerminkan peran strategis pajak dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah	388.39	417.54	348.95	392.69	596.78	717.25	761.22
Retribusi Daerah	1.64	5.91	4.86	6.21	7.05	17.40	10.79
HPKD yang dipisahkan	11.27	11.43	7.46	8.21	9.09	10.11	11.37
Lain-lain PAD yang sah	172.79	220.98	196.38	270.70	202.74	235.36	250.37

Gambar 2. 58 Perkembangan Realisasi Komponen PAD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Retribusi Daerah, meskipun nominalnya jauh lebih kecil dibandingkan pajak daerah, tumbuh paling tinggi dengan rata-rata 22,09 persen per tahun. Kenaikan paling tajam terlihat pada tahun 2023 yang mencapai Rp17,40 miliar, naik lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan oleh penyesuaian tarif, penambahan objek retribusi, atau peningkatan efisiensi pemungutan.

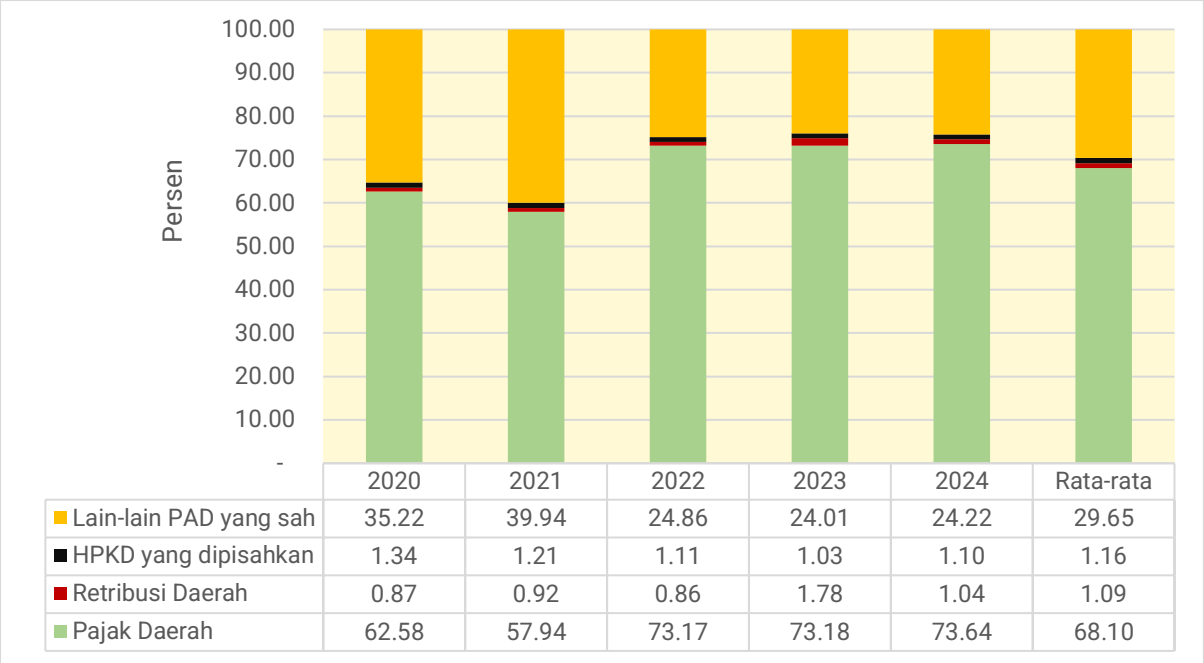
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKD) menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dari Rp7,46 miliar pada 2020 menjadi Rp11,37 miliar pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 11,13 persen. Ini mencerminkan potensi pendapatan dari BUMD atau penyertaan modal yang dikelola daerah secara mandiri.

Sementara itu, Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan fluktuasi dari Rp196,38 miliar pada 2020 menjadi Rp250,37 miliar pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 6,26 persen. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa komponen ini bersifat tidak tetap, tergantung pada kondisi kas dan potensi pendapatan lain seperti hasil kerja sama pihak ketiga, jasa giro, atau pendapatan dari denda dan sanksi administrasi.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berhasil meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui optimalisasi

sumber PAD. Namun, perlu diupayakan agar peningkatan ini juga diikuti dengan kualitas pelayanan publik dan efisiensi pengelolaan anggaran yang lebih baik.

Berdasarkan data proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa Pajak Daerah merupakan kontributor utama dalam struktur PAD dengan rata-rata kontribusi sebesar 68,10 persen. Angka ini menunjukkan dominasi Pajak Daerah dalam menopang PAD provinsi secara konsisten selama lima tahun terakhir, dengan puncak proporsi tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 73,64 persen.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Lain-lain PAD yang sah	35.22	39.94	24.86	24.01	24.22	29.65
HPKD yang dipisahkan	1.34	1.21	1.11	1.03	1.10	1.16
Retribusi Daerah	0.87	0.92	0.86	1.78	1.04	1.09
Pajak Daerah	62.58	57.94	73.17	73.18	73.64	68.10

Gambar 2. 59 Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Retribusi Daerah menunjukkan kontribusi yang relatif kecil terhadap PAD, yakni hanya 1,09 persen secara rata-rata. Meskipun sempat meningkat menjadi 1,78 persen pada tahun 2023, proporsi ini tetap menunjukkan peran yang sangat minor dalam struktur PAD.

Selanjutnya, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKD) juga memberikan kontribusi yang rendah, dengan rata-rata hanya 1,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan dari penyertaan modal atau kekayaan daerah belum dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, komponen Lain-lain PAD yang Sah memberikan kontribusi yang cukup signifikan setelah Pajak Daerah, dengan

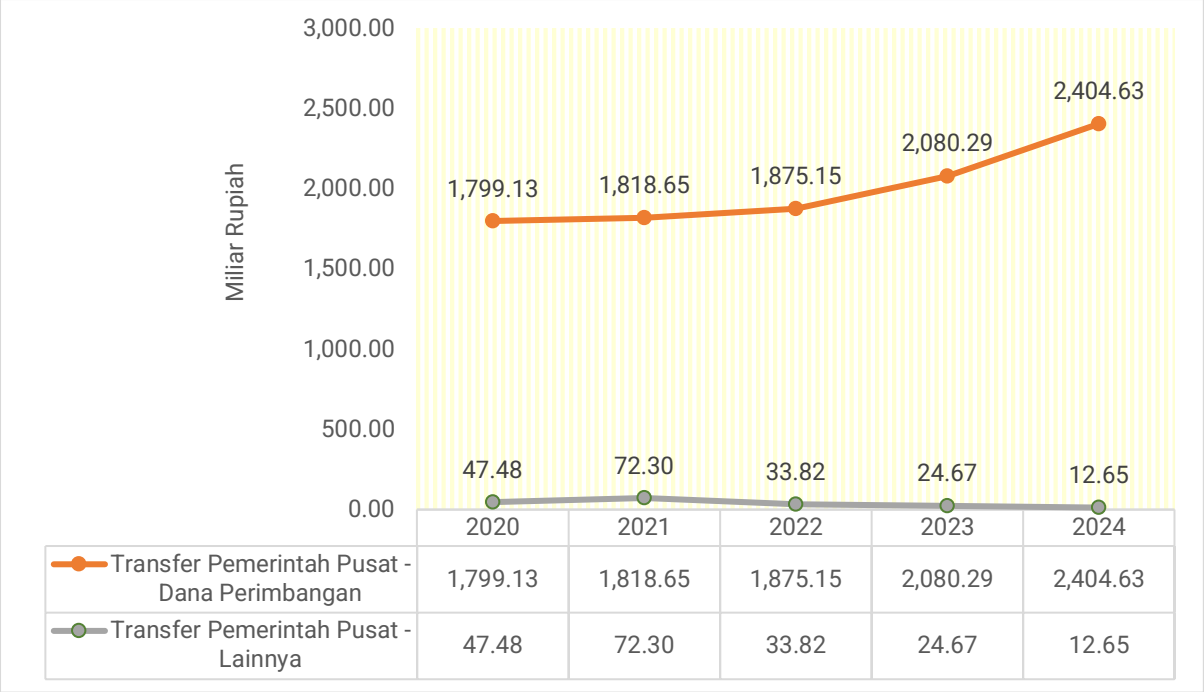
rata-rata sebesar 29,65 persen. Namun, proporsinya cenderung menurun sejak tahun 2021 yang mencatat angka tertinggi 39,94 persen, kemudian menurun menjadi sekitar 24 persen pada tahun 2023 dan 2024.

Secara keseluruhan, struktur PAD Provinsi Kalimantan Utara masih sangat bergantung pada komponen Pajak Daerah. Hal ini mencerminkan potensi optimalisasi yang besar pada komponen lain seperti Retribusi dan HPKD, yang sejauh ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.

2. Pendapatan Transfer

Dalam sistem keuangan daerah, pendapatan transfer merupakan salah satu sumber utama penerimaan yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, dana transfer juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintahan pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan transfer terdiri atas transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Transfer dari Pemerintah Pusat mencakup dana perimbangan, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Penyesuaian.

Dalam periode tahun 2020 hingga 2024, realisasi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan dinamika yang menarik. Transfer dari Dana Perimbangan secara konsisten mengalami peningkatan dari Rp1.799,13 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.404,63 miliar pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,52 persen per tahun. Kenaikan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Pusat dalam mendukung pembiayaan pemerintahan daerah melalui mekanisme dana perimbangan.



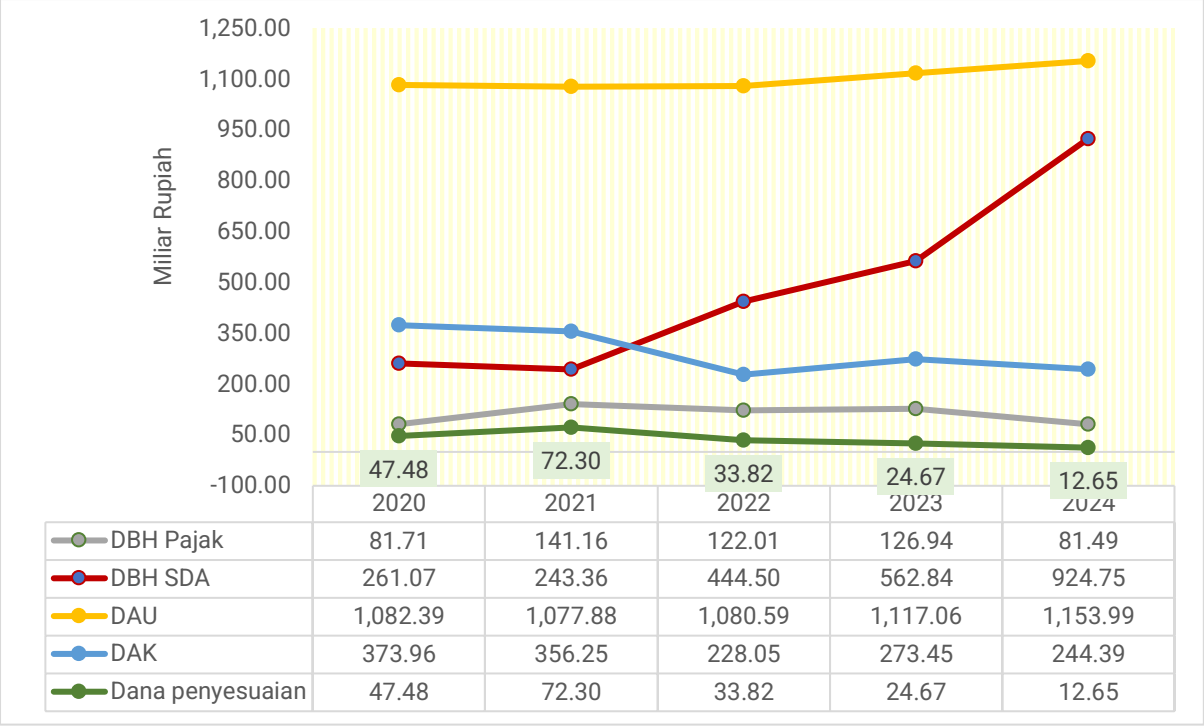
	2020	2021	2022	2023	2024
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,799.13	1,818.65	1,875.15	2,080.29	2,404.63
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	47.48	72.30	33.82	24.67	12.65

Gambar 2. 60 Perkembangan Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Sebaliknya, komponen Transfer Pemerintah Pusat lainnya mengalami penurunan yang cukup tajam. Dari angka realisasi sebesar Rp72,30 miliar pada tahun 2021, turun drastis menjadi hanya Rp12,65 miliar pada tahun 2024. Komponen ini mencatatkan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -28,16 persen, yang menunjukkan adanya pengurangan signifikan dalam skema transfer bersifat khusus, hibah, atau insentif lainnya dari Pemerintah Pusat.

Secara keseluruhan, meskipun salah satu komponen menunjukkan tren penurunan, total pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat masih mengalami kenaikan yang stabil karena kontribusi utama berasal dari Dana Perimbangan. Hal ini menjadi indikasi bahwa ketergantungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terhadap Dana Perimbangan masih cukup tinggi, dan perlu diimbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.



	2020	2021	2022	2023	2024
DBH Pajak	81.71	141.16	122.01	126.94	81.49
DBH SDA	261.07	243.36	444.50	562.84	924.75
DAU	1,082.39	1,077.88	1,080.59	1,117.06	1,153.99
DAK	373.96	356.25	228.05	273.45	244.39
Dana penyesuaian	47.48	72.30	33.82	24.67	12.65

Gambar 2. 61 Perkembangan Realisasi Komponen Transfer Pusat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Data realisasi komponen Dana Perimbangan Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang beragam di setiap komponennya. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Meskipun sempat meningkat signifikan dari Rp81,71 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp141,16 miliar pada tahun 2021, tren selanjutnya menunjukkan penurunan hingga kembali ke angka yang mendekati awal periode, yaitu sebesar Rp81,49 miliar pada tahun 2024. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,07 persen, hal ini mengindikasikan adanya volatilitas dalam penerimaan pajak yang dibagihasilkan oleh pemerintah pusat, yang mungkin dipengaruhi oleh fluktuasi aktivitas ekonomi nasional atau kebijakan fiskal tertentu.

Sebaliknya, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 37,19 persen per tahun. Realisasi DBH SDA melonjak dari Rp261,07 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp924,75 miliar pada tahun 2024. Peningkatan tajam ini mencerminkan kontribusi besar sektor ekstraktif (seperti pertambangan dan kehutanan) terhadap

pendapatan daerah, sekaligus menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas alam sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), tren pertumbuhannya tergolong stabil dan moderat, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 1,61 persen. Jumlah DAU meningkat secara perlahan dari Rp1.082,39 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.153,99 miliar pada tahun 2024. Stabilitas ini mencerminkan fungsi DAU sebagai instrumen pemerataan fiskal yang dijaga kestabilannya oleh pemerintah pusat.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan cukup tajam selama periode lima tahun terakhir. Dari Rp373,96 miliar pada tahun 2020, DAK menurun menjadi Rp244,39 miliar pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -10,09 persen. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya pengurangan prioritas terhadap program-program sektoral tertentu yang selama ini didanai melalui DAK, atau perubahan kebijakan pengalokasian yang lebih diarahkan ke daerah-daerah lainnya dengan tingkat urgensi yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, pertumbuhan positif yang ditunjukkan oleh DBH SDA menjadi penopang utama kenaikan Dana Perimbangan di Provinsi Kalimantan Utara. Namun, dominasi pendapatan dari sektor sumber daya alam juga perlu dicermati dalam konteks keberlanjutan fiskal jangka panjang. Diversifikasi sumber penerimaan tetap menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Dana penyesuaian	2.57	3.82	1.77	1.17	0.52	1.97
DAK	20.25	18.84	11.95	12.99	10.11	14.83
DAU	58.62	57.00	56.61	53.07	47.74	54.61
DBH SDA	14.14	12.87	23.28	26.74	38.26	23.06
DBH Pajak	4.42	7.47	6.39	6.03	3.37	5.54

Gambar 2. 62 Proporsi Komponen Pendapatan Transfer Pusat (Persen) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Struktur proporsi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya pergeseran alokasi yang mencerminkan dinamika kebijakan fiskal nasional serta potensi penerimaan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) tetap menjadi komponen dominan, dengan kontribusi rata-rata sebesar 54,61 persen. Namun, proporsinya terus menurun setiap tahun, dari 58,62 persen pada tahun 2020 menjadi 47,74 persen pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan upaya pemerintah pusat untuk menyeimbangkan alokasi fiskal dengan memperbesar kontribusi dari komponen lain, khususnya Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA).

DBH SDA menunjukkan peningkatan signifikan dari 14,14 persen pada tahun 2020 menjadi 38,26 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata kontribusi mencapai 23,06 persen. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya potensi pendapatan dari sektor sumber daya alam yang menjadi andalan utama Provinsi Kalimantan Utara. Kondisi ini juga menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai sumber penerimaan daerah.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan tren penurunan proporsi, dari 20,25 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 10,11 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata kontribusi 14,83 persen. Penurunan ini dapat mengindikasikan menurunnya prioritas program sektoral tertentu yang didanai oleh DAK atau adanya pergeseran ke bentuk bantuan transfer lain yang lebih fleksibel.

Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) memiliki kontribusi yang relatif kecil dan fluktuatif, dengan rata-rata hanya 5,54 persen. Meskipun terdapat kenaikan pada tahun 2021, proporsi ini menurun kembali pada tahun 2024, mencerminkan keterbatasan kontribusi pajak pusat terhadap transfer daerah di wilayah ini. Dana Penyesuaian, meskipun memiliki kontribusi yang sangat kecil (rata-rata 1,97 persen), tetap relevan untuk diperhatikan karena fungsinya yang adaptif terhadap kebutuhan khusus, seperti penanganan bencana, pemulihan ekonomi, atau program strategis lainnya. Proporsinya juga menurun dari 2,57 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 0,52 persen pada tahun 2024, sejalan dengan tren rasionalisasi anggaran pusat.

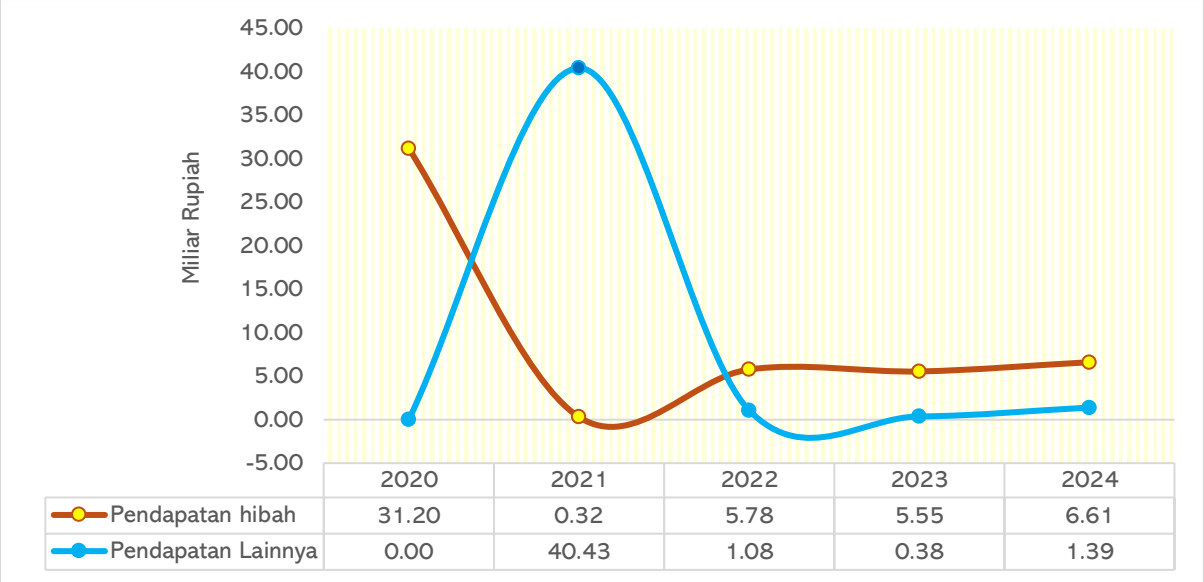
Secara umum, pergeseran proporsi ini menunjukkan adanya orientasi baru dalam kebijakan transfer fiskal yang semakin menekankan pada potensi sumber daya

alam sebagai basis utama pendapatan, serta pengurangan ketergantungan pada skema-skem a transfer sektoral yang kaku. Pemerintah daerah perlu merespons perubahan ini dengan meningkatkan kapasitas fiskal lokal, penguatan tata kelola sumber daya alam, serta efisiensi belanja agar mampu mengoptimalkan setiap komponen pendapatan secara berkelanjutan.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup seluruh pendapatan daerah kecuali PAD dan pendapatan transfer. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: hibah; dana darurat; dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komponen pendapatan yang tercatat di Provinsi Kalimantan Utara adalah hibah dan lain-lain pendapatan yang sah. Komponen pendapatan yang merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat dan pendapatan lainnya ini memiliki kontribusi paling kecil dibandingkan dengan komponen PAD dan pendapatan transfer, yang ditunjukkan dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,70 persen. Pendapatan ini mengalami fluktuasi, tetapi dengan nilai yang lebih stabil dibandingkan dengan dua kategori sebelumnya. Pada tahun 2020, jumlahnya sebesar Rp31,20 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi Rp40,75 miliar rupiah pada tahun 2021, sebelum turun pada tahun 2022 dan 2023, dan kembali sedikit meningkat pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan yang sangat rendah, yaitu -99,62 persen, menunjukkan bahwa pendapatan ini lebih beragam dan mencakup sumber-sumber yang berbeda, sehingga mungkin lebih stabil meskipun tetap terpengaruh oleh kebijakan fiskal dan program-program yang dilaksanakan pemerintah.



Gambar 2. 63 Perkembangan Realisasi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Pendapatan hibah yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan fluktuasi yang signifikan sepanjang periode 2020-2024. Pada tahun 2020, pendapatan hibah tercatat sebesar Rp31,20 miliar rupiah, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2021 menjadi hanya Rp0,32 miliar rupiah. Meskipun demikian, angka ini meningkat kembali pada tahun-tahun berikutnya, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -32,16 persen. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian atau ketergantungan yang tinggi terhadap alokasi hibah dari sumber eksternal, yang bisa terpengaruh oleh perubahan kebijakan atau kondisi makroekonomi.

Pendapatan lainnya yang bersumber dari pendapatan atas pengembalian hibah pada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, meskipun relatif kecil pada tahun 2020 (0,00 miliar rupiah), melonjak tajam pada tahun 2021 menjadi Rp40,43 miliar rupiah. Namun, angka ini kemudian menurun drastis pada tahun 2022 dan 2023, dan kembali sedikit meningkat pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan yang terrendah sebesar 67,46 persen mencerminkan adanya ketergantungan pada sumber pendapatan yang tidak teratur dan tidak dapat diprediksi dengan mudah.

Secara keseluruhan, pendapatan dari hibah dan sumber lainnya cenderung memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi, sementara "Lain-lain Pendapatan

yang Sah" memberikan kontribusi yang lebih stabil terhadap total pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mempertimbangkan kebijakan pengelolaan sumber pendapatan yang lebih terdiversifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada hibah dan pendapatan lainnya yang bersifat sementara dan fluktuatif.

2.5.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan baik urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Analisis belanja daerah digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menggunakan APBD, apakah telah digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, di mana hal tersebut dilakukan untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

Belanja daerah merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, terutama dalam memberikan pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Secara umum, struktur belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Setiap komponen tersebut mencerminkan orientasi kebijakan fiskal daerah dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Selanjutnya, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang dirinci atas jenis belanja modal. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Sementara belanja transfer adalah pengeluaran uang dari

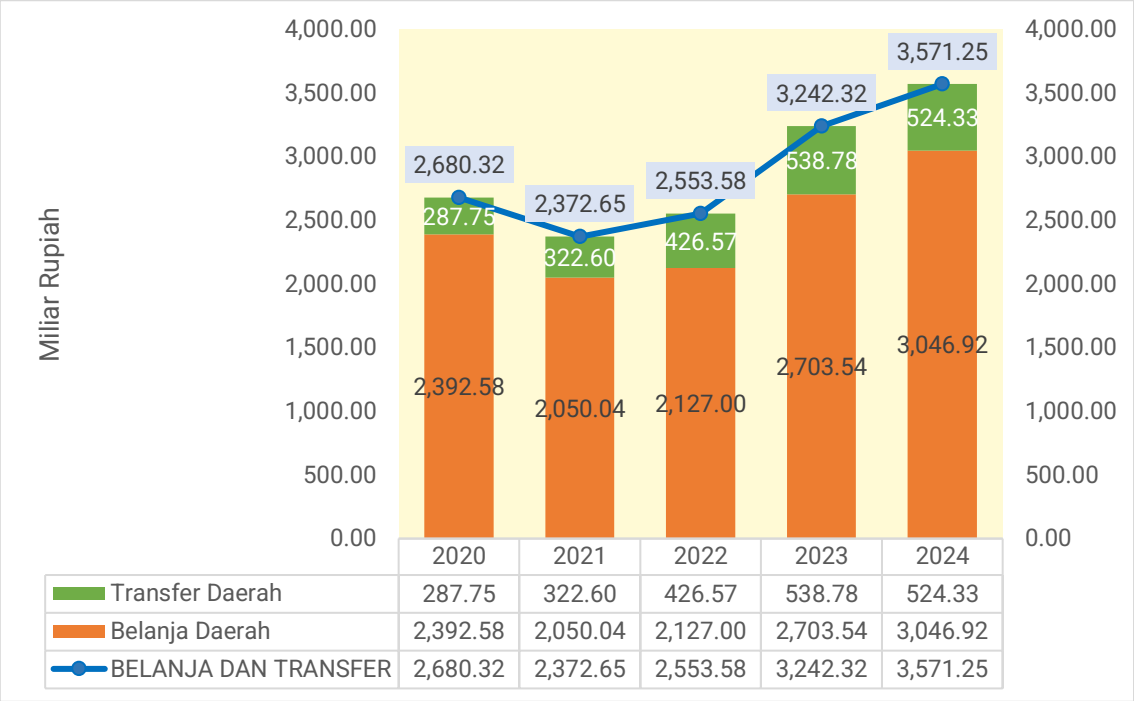
pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Tabel 2. 68 Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Realisasi Belanja Daerah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	(% per tahun)
2	**BELANJA**						
2.1	**Belanja Operasi**	**1.727.405.179.222,05**	**1.647.219.558.627,47**	**1.629.460.884.903,74**	**2.042.445.525.498,82**	**2.333.169.870.777,97**	**7,80**
2.1.1	Pegawai	567.086.139.979,69	638.555.013.259,27	714.859.072.319,00	767.029.049.418,00	868.496.469.825,00	11,24
2.1.2	Barang dan Jasa	738.461.268.648,66	787.157.711.061,20	837.011.356.496,74	1.097.028.389.768,82	1.218.959.056.895,97	13,35
2.1.4	Subsidi	21.188.660.225,92	21.167.303.205,00	13.973.868.842,00	16.513.140.465,00	19.787.303.700,00	-1,70
2.1.5	Hibah	392.994.966.648,78	199.114.237.682,00	63.154.227.474,00	161.141.184.381,00	222.697.836.570,00	-13,24
2.1.6	Bantuan Sosial	7.674.143.719,00	1.225.293.420,00	462.359.772,00	733.761.466,00	3.229.203.787,00	-19,46
2.2	**Belanja Modal**	**665.170.894.024,81**	**390.900.388.868,39**	**496.619.274.367,07**	**651.639.401.736,00**	**706.181.651.526,09**	**1,51**
2.2.1	Tanah	57.360.558.808,00	23.338.573.244,00	51.978.879.050,00	30.379.184.731,00	36.362.332.622,00	-10,77
2.2.2	Peralatan dan Mesin	177.052.283.093,27	95.562.120.412,00	134.331.790.579,07	118.377.089.281,00	163.713.917.310,00	-1,94
2.2.3	Gedung dan Bangunan	264.776.690.040,54	173.436.399.485,39	239.046.835.735,00	345.002.801.783,00	208.505.767.057,00	-5,80
2.2.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	151.910.691.099,00	76.752.834.826,00	67.684.064.690,00	155.513.502.679,00	292.653.376.604,00	17,81
2.2.5	Aset Tetap Lainnya	7.129.830.595,00	21.810.460.901,00	3.577.704.313,00	1.904.007.132,00	743.850.360,00	-43,17
2.2.6	Aset Lainnya	6.940.840.389,00			462.816.130,00	4.202.407.573,09	-11,79
2.3	**Belanja Tak Terduga**	**0,00**	**11.924.306.413,00**	**923.172.706,00**	**9.451.453.256,00**	**7.566.963.773,00**	**-14,07**
2.3.1	Belanja Tak Terduga		11.924.306.413,00	923.172.706,00	9.451.453.256,00	7.566.963.773,00	-14,07
2.4	**Belanja Transfer**	**287.745.623.321,77**	**322.601.636.378,20**	**426.574.659.154,21**	**538.778.797.545,00**	**524.327.592.129,00**	**16,18**
2.4.1	**Bagi Hasil Pendapatan**	**223.698.123.321,77**	**250.853.386.378,20**	**244.301.809.158,00**	**368.800.299.772,00**	**336.426.911.141,00**	**10,74**
2.4.1.1	Bagi hasil pajak daerah	223.698.123.321,77	250.853.386.378,20	244.301.809.158,00	368.800.299.772,00	336.426.911.141,00	10,74
2.4.2	**Bantuan Keuangan**	**64.047.500.000,00**	**71.748.250.000,00**	**182.272.849.996,21**	**169.978.497.773,00**	**187.900.680.988,00**	**30,87**
2.4.2.1	Bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya	64.047.500.000,00	71.748.250.000,00	182.272.849.996,21	169.978.497.773,00	187.900.680.988,00	30,87
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**2.680.321.696.568,63**	**2.372.645.890.287,06**	**2.553.577.991.131,02**	**3.242.315.178.035,82**	**3.571.246.078.206,06**	**7,44**

Sumber:Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2020-2024

Struktur pengeluaran fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas dua komponen utama, yaitu belanja daerah dan transfer daerah. Belanja daerah mencerminkan pengeluaran langsung oleh pemerintah provinsi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan, sedangkan transfer daerah mencerminkan alokasi dana dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya.



Gambar 2. 64 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

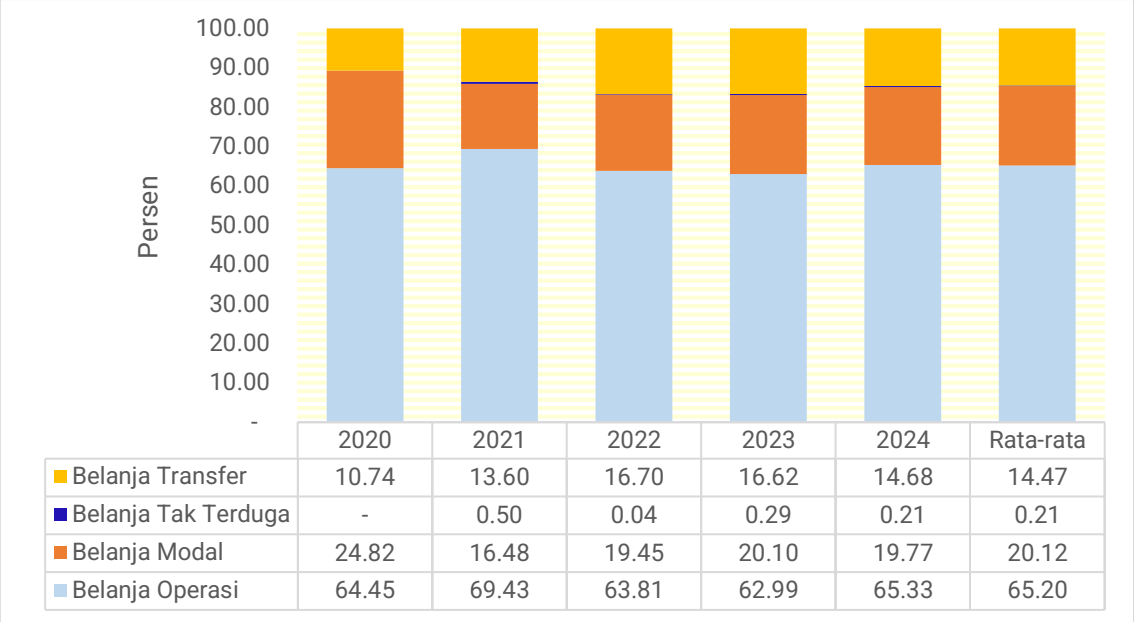
Pada tahun 2020, total belanja daerah tercatat sebesar Rp2.392,58 miliar dan meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp3.046,92 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya tren ekspansif dalam kebijakan pengeluaran, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan serta pelayanan dasar. Peningkatan signifikan terutama terjadi antara tahun 2022 dan 2023, yang mencerminkan respon pemerintah terhadap pemulihan ekonomi pascapandemi serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Di sisi lain, transfer daerah juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan sebesar 16,18 persen per tahun. Dari Rp287,75 miliar pada tahun 2020, angka ini melonjak menjadi Rp538,78 miliar pada tahun

2023, sebelum sedikit menurun menjadi Rp524,33 miliar pada tahun 2024. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun terakhir, secara umum peningkatan transfer menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme transfer fiskal yang berfungsi sebagai bagian dari desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan.

Jika dilihat dari total belanja dan transfer secara keseluruhan, terdapat tren peningkatan yang konsisten dari Rp2.680,32 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp3.571,25 miliar pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan fiskal yang positif dan peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran daerah. Komposisi belanja dan transfer juga menunjukkan bahwa proporsi terbesar dari pengeluaran masih didominasi oleh belanja langsung provinsi, meskipun kontribusi transfer kepada daerah otonom di bawahnya semakin signifikan. Secara rata-rata, pertumbuhan total belanja daerah selama periode lima tahun tersebut mencapai 7,44 persen per tahun, yang mencerminkan ekspansi fiskal yang relatif moderat.

Perhitungan pertumbuhan belanja daerah tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan komponen-komponen belanja dari tahun ke tahun, di mana pada umumnya besaran nilai belanja daerah memiliki kecenderungan meningkat. Peningkatan tersebut biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap tingkat inflasi, perubahan kurs, penyesuaian kondisi makro ekonomi, dan lainnya. Meskipun umumnya besarannya meningkat, namun berkaitan dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja, dan penghematan anggaran.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Belanja Transfer	10.74	13.60	16.70	16.62	14.68	14.47
Belanja Tak Terduga	-	0.50	0.04	0.29	0.21	0.21
Belanja Modal	24.82	16.48	19.45	20.10	19.77	20.12
Belanja Operasi	64.45	69.43	63.81	62.99	65.33	65.20

Gambar 2. 65 Proporsi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

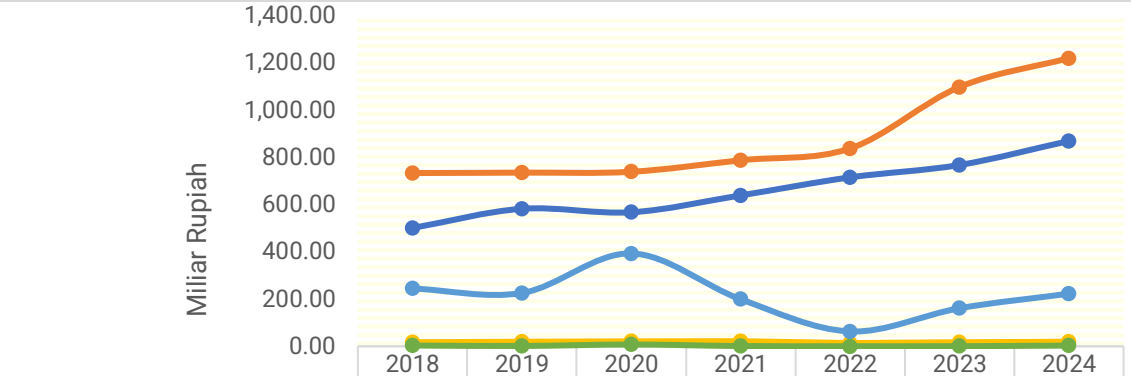
Berdasarkan rata-rata kontribusinya, belanja operasi mendominasi struktur pengeluaran dengan rata-rata sebesar 65,20 persen dari total belanja daerah selama lima tahun terakhir. Persentase tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 69,43 persen, sementara proporsi terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 63,81 persen. Komposisi yang tinggi pada belanja operasi mengindikasikan bahwa sebagian besar alokasi anggaran masih digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja bunga dan hibah. Meskipun penting untuk menjaga kelancaran operasional, tingginya proporsi belanja operasi perlu diimbangi dengan peningkatan belanja yang bersifat produktif dan mendukung pertumbuhan jangka panjang.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan bagian terbesar dalam struktur belanja daerah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Operasi didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pos belanja ini mencakup pengeluaran untuk

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bunga, belanja subsidi, serta belanja bantuan sosial. Tren Belanja Operasi dalam lima tahun terakhir dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan publik serta efektivitas pengelolaan anggaran. Peningkatan atau penurunan pada belanja ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan operasional pemerintahan, kebijakan efisiensi anggaran, serta kondisi ekonomi daerah.

Komponen belanja operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika alokasi anggaran yang mencerminkan prioritas pemerintah dalam pembiayaan kegiatan rutin pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, belanja pegawai terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, dari Rp567,09 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp868,50 miliar pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan tahunan belanja pegawai mencapai 11,24 persen, mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan akan sumber daya manusia dan penyesuaian terhadap kebijakan penggajian, tunjangan, atau beban kerja aparatur sipil negara. Meskipun penting untuk menjaga profesionalisme dan kesejahteraan pegawai, pertumbuhan yang konsisten ini perlu dikendalikan agar tidak menggerus ruang fiskal untuk belanja pembangunan.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja pegawai	500.66	581.81	567.09	638.56	714.86	767.03	868.50
Belanja barang dan jasa	733.09	734.79	738.46	787.16	837.01	1,097.03	1,218.96
Belanja subsidi	17.19	20.68	21.19	21.17	13.97	16.51	19.79
Belanja hibah	244.63	225.56	392.99	199.11	63.15	161.14	222.70
Belanja bantuan sosial	3.51	1.62	7.67	1.23	0.46	0.73	3.23

Gambar 2. 66 Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Operasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Belanja barang dan jasa juga mengalami peningkatan yang cukup tajam, dari Rp738,46 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.218,96 miliar pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 13,35 persen. Kenaikan ini mencerminkan semakin besarnya kebutuhan pengadaan barang operasional dan jasa pelayanan yang digunakan untuk mendukung fungsi pemerintahan. Meski demikian, peningkatan belanja ini perlu diiringi dengan evaluasi efektivitas dan efisiensi agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

Sebaliknya, belanja subsidi, hibah, dan bantuan sosial menunjukkan tren yang menurun selama lima tahun terakhir. Belanja subsidi turun dari Rp21,19 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp19,79 miliar pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -1,70 persen. Penurunan ini kemungkinan mencerminkan efisiensi atau perubahan pendekatan dalam pemberian dukungan harga atau pelayanan kepada masyarakat.

Belanja hibah mencatat penurunan yang paling drastis, dari Rp392,99 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp222,70 miliar pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -13,24 persen. Penurunan belanja hibah dapat menjadi indikasi penguatan selektivitas pemerintah dalam menyalurkan dana hibah, agar lebih tepat sasaran dan berbasis kinerja. Sementara itu, belanja bantuan sosial juga mengalami kontraksi yang tajam, dengan penurunan dari Rp7,67 miliar menjadi hanya Rp3,23 miliar pada akhir periode, dan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -19,46 persen. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut mengingat belanja bantuan sosial memiliki peran penting dalam mendukung kelompok masyarakat rentan.

Secara keseluruhan, struktur belanja operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara cenderung memperlihatkan dominasi belanja untuk kebutuhan internal pemerintahan, terutama belanja pegawai dan barang/jasa. Penurunan pada belanja subsidi, hibah, dan bantuan sosial menunjukkan pergeseran prioritas atau pengetatan kebijakan transfer kepada pihak ketiga dan masyarakat. Ke depan, Pemerintah Provinsi perlu memastikan bahwa pertumbuhan belanja operasi tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi

juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Komposisi belanja operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan arah kebijakan fiskal yang relatif konsisten dalam mengutamakan pembiayaan belanja pegawai serta pengadaan barang dan jasa. Kedua pos belanja ini mendominasi struktur belanja operasi secara keseluruhan, dengan tren yang stabil dari tahun ke tahun.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Belanja bantuan sosial	0.44	0.07	0.03	0.04	0.14	0.14
Belanja hibah	22.75	12.09	3.88	7.89	9.54	11.23
Belanja subsidi	1.23	1.29	0.86	0.81	0.85	1.01
Balanja bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja barang dan jasa	42.75	47.79	51.37	53.71	52.24	49.57
Belanja pegawai	32.83	38.77	43.87	37.55	37.22	38.05

Gambar 2. 67 Proporsi Belanja Operasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Belanja barang dan jasa merupakan komponen terbesar dalam struktur belanja operasi, dengan proporsi rata-rata sebesar 49,57 persen terhadap total belanja operasi. Proporsi ini terus meningkat dari 42,75 persen pada tahun 2020 menjadi 53,71 persen pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 52,24 persen pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan besarnya alokasi anggaran untuk kebutuhan operasional rutin, termasuk pengadaan sarana prasarana, pemeliharaan, dan pelaksanaan program-program pemerintahan. Dominasi belanja ini mengindikasikan fokus pemerintah pada pelayanan publik, namun perlu diimbangi dengan evaluasi efektivitas agar belanja tersebut benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Belanja pegawai menempati porsi terbesar kedua dengan rata-rata 38,05 persen selama lima tahun terakhir. Puncak proporsional terjadi pada tahun 2022 sebesar 43,87 persen, sebelum turun menjadi 37,22 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya upaya rasionalisasi terhadap beban belanja pegawai, meskipun secara nominal masih mengalami kenaikan. Pos ini tetap menjadi beban tetap yang signifikan dalam struktur APBD dan menunjukkan perlunya kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efisien.

Sementara itu, belanja hibah mengalami penurunan proporsional yang sangat signifikan, dari 22,75 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 9,54 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata kontribusi sebesar 11,23 persen. Penurunan ini mencerminkan kebijakan yang lebih selektif dalam pemberian hibah, yang dapat dilihat sebagai bentuk perbaikan tata kelola anggaran agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

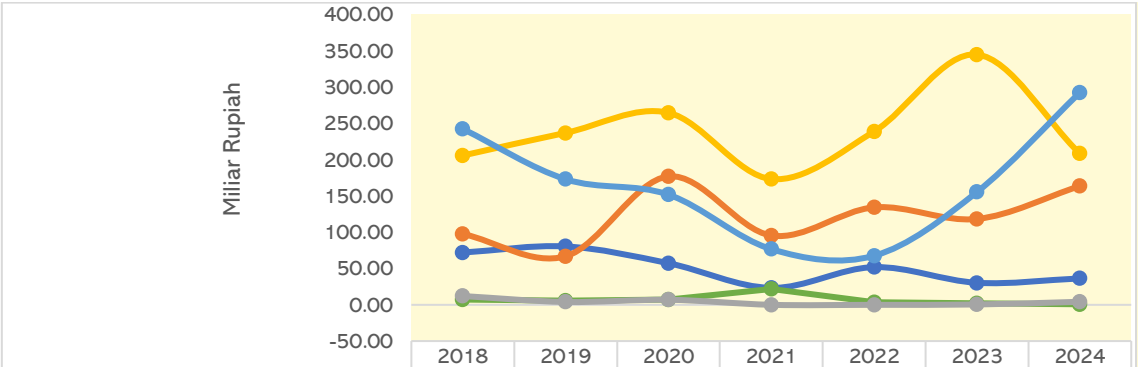
Belanja subsidi hanya menyumbang rata-rata 1,01 persen terhadap total belanja operasi, dan angkanya relatif stabil dari tahun ke tahun. Demikian pula, belanja bantuan sosial berkontribusi sangat kecil, yaitu rata-rata hanya 0,14 persen, menunjukkan bahwa alokasi untuk perlindungan sosial masih belum menjadi prioritas dalam belanja operasi daerah ini. Meskipun kecil, pos ini tetap penting untuk mendukung kelompok rentan dan masyarakat miskin, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Secara keseluruhan, komposisi belanja operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih didominasi oleh belanja rutin pemerintahan, dengan porsi yang besar pada belanja pegawai dan barang/jasa. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran masih berfokus pada pembiayaan fungsi internal pemerintahan, sementara belanja yang bersifat langsung menyentuh masyarakat seperti bantuan sosial dan subsidi belum mendapatkan perhatian yang optimal. Untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, ke depan perlu adanya upaya untuk menyeimbangkan antara belanja administratif dan belanja publik yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Belanja Modal

Belanja Modal mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam pembangunan aset tetap yang memiliki manfaat jangka panjang, seperti infrastruktur, sarana dan prasarana publik, serta pengadaan peralatan. Besaran dan pola perubahan Belanja Modal setiap tahun menunjukkan prioritas pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah serta efisiensi dalam pengelolaan investasi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pos belanja ini mencakup pengeluaran untuk belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; belanja modal aset tetap lainnya; dan belanja modal aset Lainnya.

Belanja modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan fluktuasi dalam prioritas pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset daerah. Secara umum, rata-rata pertumbuhan belanja modal dalam lima tahun terakhir tergolong rendah dan bahkan menunjukkan kecenderungan negatif pada beberapa komponen utama. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam alokasi belanja investasi yang penting untuk mendukung pembangunan jangka panjang.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja tanah	72.07	80.48	57.36	23.34	51.98	30.38	36.36
Belanja peralatan dan mesin	97.76	66.92	177.05	95.56	134.33	118.38	163.71
Belanja gedung dan bangunan	205.85	237.07	264.78	173.44	239.05	345.00	208.51
Belanja jalan, irigasi, dan jaringan	242.48	173.14	151.91	76.75	67.68	155.51	292.65
Belanja aset tetap lainnya	7.41	5.83	7.13	21.81	3.58	1.90	0.74
Belanja aset lainnya	12.10	3.94	6.94	0.00	0.00	0.46	4.20

Gambar 2. 68 Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Modal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Komponen belanja modal terbesar dialokasikan untuk belanja gedung dan bangunan, dengan rata-rata nilai tertinggi dibandingkan pos lainnya meskipun mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -5,80 persen per tahun. Anggaran pada pos ini mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar Rp345,00 miliar, mencerminkan adanya kegiatan pembangunan fisik yang signifikan, namun kembali menurun drastis pada tahun 2024. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan belum optimalnya perencanaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

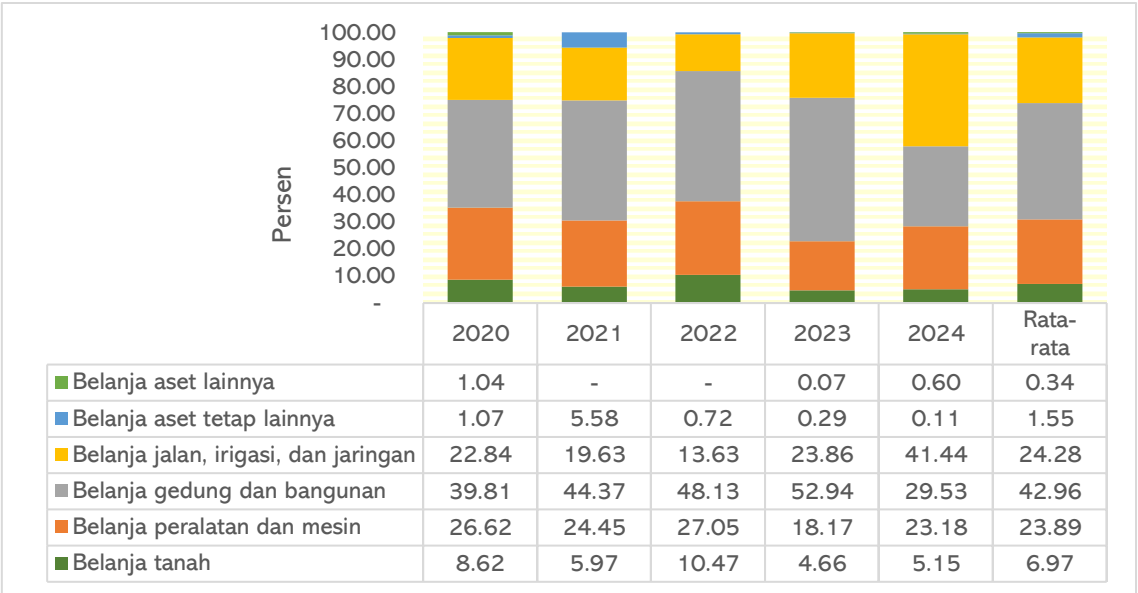
Selanjutnya, belanja peralatan dan mesin merupakan pos belanja terbesar kedua, dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp163,71 miliar. Namun demikian, pos ini juga mengalami pertumbuhan negatif rata-rata sebesar -1,94 persen, yang menunjukkan bahwa pengadaan peralatan dan mesin masih fluktuatif dan belum sepenuhnya mengikuti pola kebutuhan jangka panjang yang stabil dan terencana.

Sebaliknya, belanja jalan, irigasi, dan jaringan mencatatkan pertumbuhan positif yang paling signifikan, yaitu sebesar 17,81 persen per tahun. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan infrastruktur konektivitas dan pengelolaan sumber daya air, meskipun realisasi anggarannya sangat berfluktuasi. Kenaikan drastis dari Rp67,68 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp292,65 miliar pada tahun 2024 mengindikasikan lonjakan prioritas pembangunan jalan dan jaringan pada periode terakhir.

Komponen lainnya seperti belanja tanah, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya masing-masing mengalami pertumbuhan negatif yang cukup besar, dengan penurunan rata-rata masing-masing sebesar -10,77 persen, -43,17 persen, dan -11,79 persen. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam pengadaan tanah serta aset non-fisik lainnya tidak menjadi prioritas selama periode pengamatan, atau terdapat kendala dalam pelaksanaan program pengadaan tersebut.

Secara keseluruhan, komposisi belanja modal Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan dominasi pada pembangunan fisik seperti gedung, bangunan, serta infrastruktur jalan dan jaringan. Namun, fluktuasi yang tinggi dan pertumbuhan negatif pada sebagian besar komponen belanja modal menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk menjamin efektivitas pembangunan jangka panjang. Konsistensi dalam penganggaran belanja modal sangat penting agar pembangunan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Komposisi belanja modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2020–2024 memperlihatkan fokus pembangunan yang dominan pada belanja gedung dan bangunan serta jalan, irigasi, dan jaringan, yang secara kumulatif menunjukkan arah kebijakan yang cenderung pada penguatan infrastruktur fisik daerah. Rata-rata kontribusi belanja gedung dan bangunan terhadap total belanja modal mencapai 42,96 persen, menjadikannya sebagai komponen belanja modal terbesar dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Puncaknya terjadi pada tahun 2023 dengan persentase sebesar 52,94 persen, yang mengindikasikan adanya prioritas tinggi terhadap pembangunan fasilitas fisik.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Belanja aset lainnya	1.04	-	-	0.07	0.60	0.34
Belanja aset tetap lainnya	1.07	5.58	0.72	0.29	0.11	1.55
Belanja jalan, irigasi, dan jaringan	22.84	19.63	13.63	23.86	41.44	24.28
Belanja gedung dan bangunan	39.81	44.37	48.13	52.94	29.53	42.96
Belanja peralatan dan mesin	26.62	24.45	27.05	18.17	23.18	23.89
Belanja tanah	8.62	5.97	10.47	4.66	5.15	6.97

Gambar 2. 69 Proporsi Belanja Modal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Komponen terbesar kedua adalah belanja peralatan dan mesin yang menyumbang rata-rata 23,89 persen terhadap total belanja modal. Persentase ini relatif stabil di kisaran 24–27 persen pada tahun-tahun awal, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 (18,17 persen) sebelum meningkat kembali menjadi 23,18 persen di tahun 2024. Stabilitas proporsi ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap menjaga ketersediaan sarana pendukung layanan publik, meskipun dengan fluktuasi kecil yang mungkin disebabkan oleh kebutuhan sektoral yang berbeda tiap tahunnya.

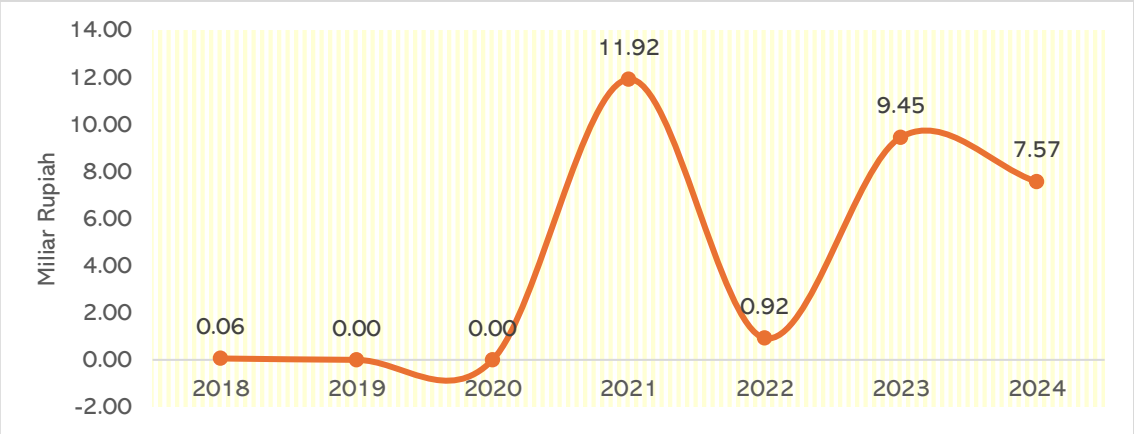
Sementara itu, belanja jalan, irigasi, dan jaringan menunjukkan peran yang cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 24,28 persen. Proporsi ini meningkat tajam dari 13,63 persen pada tahun 2022 menjadi 41,44 persen pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan adanya peningkatan fokus pada pembangunan konektivitas dan penguatan jaringan infrastruktur dasar di tahun-tahun terakhir, yang sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, komponen belanja seperti tanah, aset tetap lainnya, dan aset lainnya menunjukkan proporsi yang relatif kecil. Belanja tanah hanya menyumbang rata-rata 6,97 persen, dan mengalami tren menurun dari 10,47 persen pada tahun 2022 menjadi hanya 5,15 persen pada tahun 2024. Belanja aset tetap lainnya dan aset lainnya berkontribusi sangat kecil, masing-masing rata-rata 1,55 persen dan 0,34 persen, yang menunjukkan bahwa pengadaan jenis aset ini tidak menjadi prioritas strategis dalam pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, komposisi belanja modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan bahwa prioritas pembangunan daerah lebih diarahkan pada penguatan infrastruktur fisik dan sarana penunjang pelayanan publik. Namun demikian, untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan merata, perlu dilakukan evaluasi berkala atas proporsi dan efektivitas masing-masing pos belanja, agar dapat memastikan bahwa seluruh sektor strategis memperoleh alokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi dalam perencanaan anggaran, seperti bencana alam, keadaan darurat, atau kebutuhan mendesak lainnya yang memerlukan respons cepat dari pemerintah daerah. Pos ini memiliki karakteristik yang unik karena jumlah dan realisasinya sangat bergantung pada kondisi yang terjadi dalam suatu tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 2. 70 Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Tak Terduga Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Belanja tak terduga merupakan pos anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat darurat dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti bencana alam, krisis kesehatan, atau keadaan luar biasa lainnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mencatat dinamika alokasi belanja tak terduga yang cukup fluktuatif sepanjang periode 2020 hingga 2024.

Pada tahun 2020, tidak terdapat alokasi belanja tak terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang kemungkinan besar dikarenakan belum munculnya kebutuhan mendesak yang memerlukan penanganan segera. Namun, pada tahun 2021 terjadi lonjakan signifikan dengan

realisasi sebesar Rp11,92 miliar, yang diduga kuat berkaitan dengan kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 dan dampak turunannya.

Selanjutnya, alokasi ini kembali menurun drastis pada tahun 2022 menjadi hanya Rp0,92 miliar, lalu meningkat kembali menjadi Rp9,45 miliar pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi Rp7,57 miliar pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa belanja tak terduga benar-benar digunakan secara situasional dan tidak menjadi komponen anggaran rutin.

Jika dilihat dari tren pertumbuhan rata-rata tahunan selama periode lima tahun terakhir, belanja tak terduga mengalami pertumbuhan negatif sebesar -14,07 persen. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pada tahun-tahun tertentu, secara keseluruhan terdapat penurunan akumulatif belanja tak terduga selama periode analisis. Penurunan tersebut dapat diartikan sebagai indikator menurunnya jumlah kejadian luar biasa atau peningkatan dalam perencanaan dan mitigasi risiko oleh pemerintah daerah.

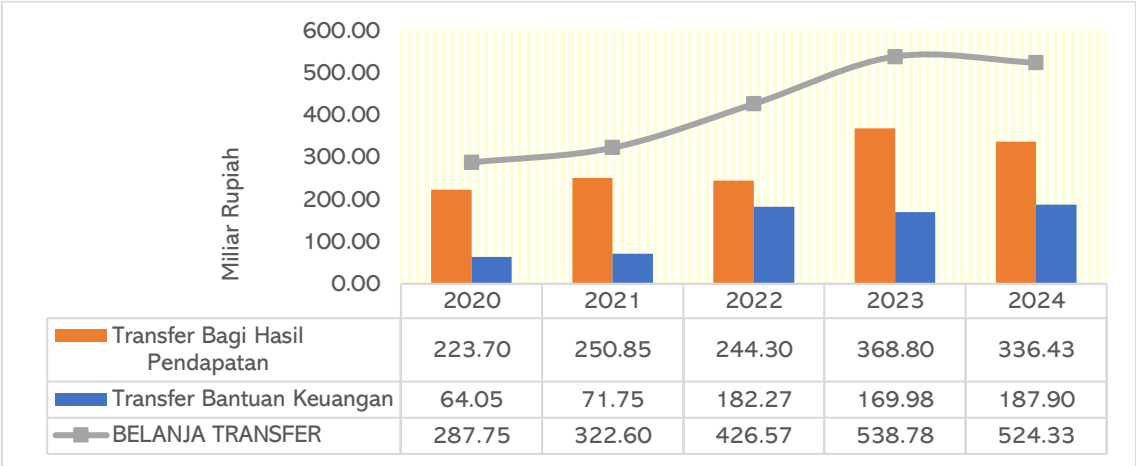
Meskipun kontribusi belanja tak terduga terhadap total belanja daerah relatif kecil, pos ini tetap memegang peran penting dalam menjaga ketanggapan fiskal pemerintah daerah terhadap kondisi darurat. Ke depan, keberadaan cadangan fiskal melalui belanja tak terduga tetap perlu dipertahankan untuk mengantisipasi situasi tidak terduga yang dapat memengaruhi stabilitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer daerah merupakan bentuk alokasi fiskal dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya, yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan. Transfer ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah bawahan.

Selama periode 2020 hingga 2024, total belanja transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan

rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 16,18 persen. Secara lebih rinci, komponen transfer bagi hasil pendapatan menunjukkan pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 10,74 persen, yaitu dari Rp223,70 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp336,43 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mendistribusikan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil lainnya secara lebih merata kepada pemerintah kabupaten/kota.



	2020	2021	2022	2023	2024
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	223.70	250.85	244.30	368.80	336.43
Transfer Bantuan Keuangan	64.05	71.75	182.27	169.98	187.90
BELANJA TRANSFER	287.75	322.60	426.57	538.78	524.33

Gambar 2. 71 Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Transfer Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

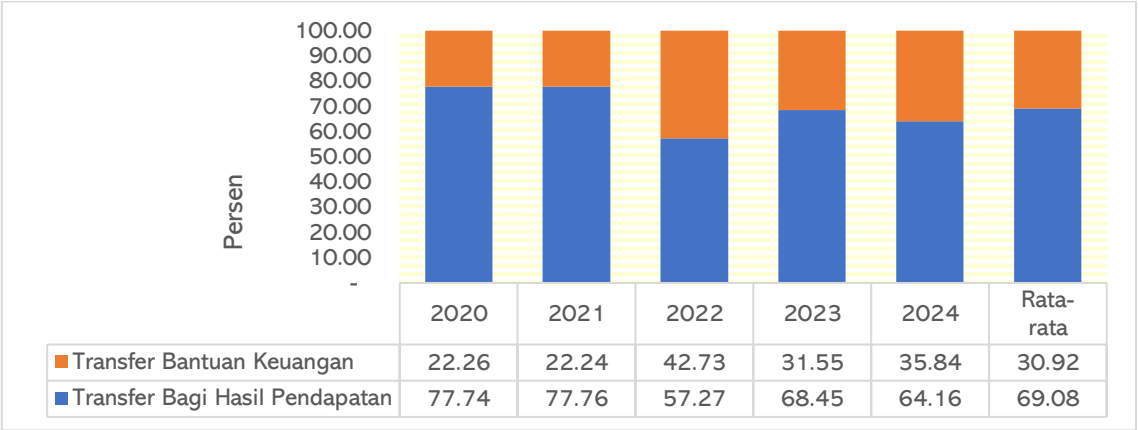
Sumber: Olah Data 2025

Sementara itu, transfer bantuan keuangan mengalami pertumbuhan yang jauh lebih tinggi, yaitu rata-rata sebesar 30,87 persen per tahun. Komponen ini mengalami lonjakan signifikan sejak tahun 2022, dari Rp71,75 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp182,27 miliar pada tahun 2022, dan terus dipertahankan pada kisaran yang tinggi hingga mencapai Rp187,90 miliar pada tahun 2024. Kenaikan yang tajam ini mengindikasikan adanya peningkatan alokasi dukungan fiskal dari provinsi untuk pelaksanaan program prioritas di daerah, baik berupa program berbasis kinerja maupun bantuan khusus untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Konsistensi peningkatan belanja transfer ini mencerminkan peran aktif Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam memperkuat sinergi antarpemerintahan dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata di seluruh wilayah provinsi. Selain itu, alokasi transfer yang progresif juga dapat

memperkuat efektivitas pembangunan daerah melalui pendekatan subsidiaritas, di mana daerah bawahan diberikan ruang dan dukungan untuk menangani kebutuhan lokal secara lebih responsif.

Struktur belanja transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2020–2024 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dalam hal komposisi antar komponen transfer. Pada tahun 2020 dan 2021, transfer bagi hasil pendapatan mendominasi belanja transfer, masing-masing dengan proporsi sebesar 77,74 persen dan 77,76 persen. Hal ini mencerminkan bahwa pada awal periode, kebijakan transfer masih berfokus pada distribusi pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota berdasarkan formula yang bersifat regulatif.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Transfer Bantuan Keuangan	22.26	22.24	42.73	31.55	35.84	30.92
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	77.74	77.76	57.27	68.45	64.16	69.08

Gambar 2. 72 Proporsi Belanja Transfer Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Namun, mulai tahun 2022 terjadi pergeseran signifikan, di mana proporsi TBHP menurun menjadi 57,27 persen, sedangkan kontribusi transfer bantuan keuangan meningkat tajam menjadi 42,73 persen. Pergeseran ini terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana porsi transfer bagi hasil pendapatan berada pada 64,16 persen dan transfer bantuan keuangan mencapai 35,84 persen.

Secara rata-rata selama lima tahun, transfer bagi hasil pendapatan menyumbang sebesar 69,08 persen, sementara transfer bantuan keuangan berkontribusi sebesar 30,92 persen terhadap total belanja transfer. Perubahan komposisi ini mencerminkan pergeseran kebijakan fiskal provinsi yang mulai lebih menekankan pada peran bantuan keuangan sebagai instrumen intervensi

pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung program-program strategis yang membutuhkan dukungan lintas wilayah dan lintas sektor.

Dominasi awal transfer bagi hasil pendapatan yang mulai berimbang dengan transfer bantuan keuangan juga menunjukkan fleksibilitas fiskal yang semakin berkembang, di mana Pemerintah Provinsi tidak hanya mengandalkan skema distribusi pendapatan tetapi juga mengoptimalkan instrumen bantuan keuangan untuk mencapai target pembangunan daerah secara lebih terarah dan terukur.

2.5.1.3 Pembiayaan Daerah

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD, di mana dalam kondisi surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah, sementara ketika APBD dalam kondisi defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari dua komponen, yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang perlu dibayar kembali, sementara pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara yang akan diterima kembali.

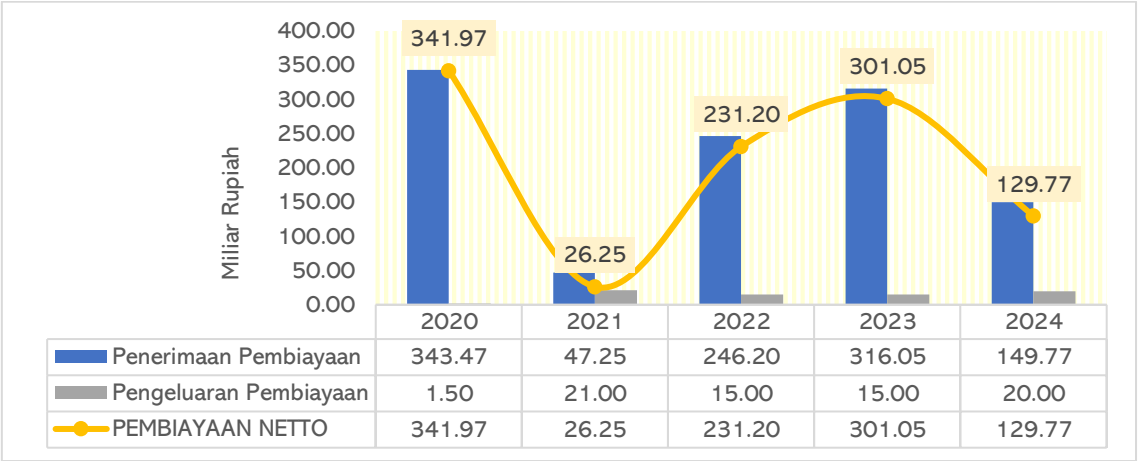
Dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), sumber-sumber pembiayaan untuk menutup APBD Provinsi Kalimantan Utara bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pinjaman dalam negeri (lembaga keuangan bank), dan penerimaan kembali investasi dana bergulir. Sementara itu, dalam hal pendapatan lebih besar dari belanja daerah (anggaran surplus), maka penggunaan surplus diutamakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, serta pembayaran pokok pinjaman dalam negeri (pemerintah pusat).

Tabel 2. 69 Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Realisasi Belanja Daerah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	(% per tahun)
4	**PEMBIAYAAN**						
4.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**343.473.119.415,42**	**47.254.756.068,14**	**246.200.110.390,87**	**316.046.143.553,18**	**149.768.722.962,58**	**-18,74**
4.1.1	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	343.473.119.415,42	47.254.756.068,14	246.200.110.390,87	316.046.143.553,18	149.768.722.962,58	-18,74
4.1.2	Pinjaman dalam negeri						
4.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**1.500.000.000,00**	**21.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**91,09**
4.2.1	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri						
4.2.2	Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah	1.500.000.000,00	21.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00	91,09
	PEMBIAYAAN NETTO	**341.973.119.415,42**	**26.254.756.068,14**	**231.200.110.390,87**	**301.046.143.553,18**	**129.768.722.962,58**	**-21,51**

Sumber:Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2020-2024

Realisasi pembiayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Penerimaan pembiayaan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp343,47 miliar, sementara penerimaan terendah tercatat pada tahun 2021 hanya sebesar Rp47,25 miliar. Secara rata-rata, tren penerimaan pembiayaan mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan laju pertumbuhan negatif sebesar 18,74 persen per tahun. Penurunan ini dapat mencerminkan semakin terbatasnya ruang pembiayaan atau menurunnya kebutuhan pembiayaan dari sisi penerimaan.



	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Pembiayaan	343.47	47.25	246.20	316.05	149.77
Pengeluaran Pembiayaan	1.50	21.00	15.00	15.00	20.00
PEMBIAYAAN NETTO	341.97	26.25	231.20	301.05	129.77

Gambar 2. 73 Realisasi Pembiayaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan mengalami kenaikan yang cukup tajam, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 91,09 persen per tahun. Hal ini terlihat dari lonjakan pada tahun 2021 sebesar Rp21,00 miliar dari hanya Rp1,50 miliar pada tahun sebelumnya. Namun, nilai pengeluaran relatif tetap stabil pada kisaran Rp15,00–Rp20,00 miliar pada tahun-tahun selanjutnya.

Pembiayaan netto, sebagai selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, juga memperlihatkan tren yang berfluktuasi. Nilai tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp341,97 miliar dan mengalami penurunan tajam pada tahun 2021 menjadi hanya Rp26,25 miliar. Meski sempat meningkat kembali pada tahun 2022 dan 2023, nilai pembiayaan netto kembali menurun pada tahun 2024 menjadi Rp129,77 miliar. Secara keseluruhan, pembiayaan netto menunjukkan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 21,51 persen per tahun,

yang mengindikasikan kecenderungan penurunan ketergantungan terhadap pembiayaan dalam mendukung APBD.

Kondisi ini mencerminkan upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan efisiensi fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang atau sumber pembiayaan lainnya. Namun demikian, diperlukan strategi pengelolaan pembiayaan yang lebih cermat untuk menjaga keberlanjutan fiskal serta mendukung stabilitas pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diketahui besaran kemampuan keuangan daerah untuk mendanai belanja daerah. Kemampuan keuangan daerah berasal dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan. Kedua komponen tersebut seharusnya bisa mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka semakin besar pula kemampuan untuk mendanai belanja daerah, begitu pula sebaliknya. Berikut ini adalah tabel kemampuan mendanai belanja daerah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 70 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Penerimaan (Rp.Miliar)			Pengeluaran (Rp.Miliar)			Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
	Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah	Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah	
	(a)	(b)	(c)= (a)+(b)	(d)	(e)	(f)=(d)+(e)	(g)=(c)/(f)
2020	2.435,45	343,47	2.778,92	2.680,32	1,50	2.681,82	1,04
2021	2.609,50	47,25	2.656,76	2.372,65	21,00	2.393,65	1,11
2022	2.731,49	246,20	2.977,69	2.553,58	15,00	2.568,58	1,16
2023	3.091,01	316,05	3.407,06	3.242,32	15,00	3.257,32	1,05
2024	3.459,03	149,77	3.608,79	3.571,25	20,00	3.591,25	1,00

Sumber:Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2020-2024 (Olah Data 2025)

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 besaran kemampuan mendanai belanja daerah di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun meskipun capaiannya masih

pada besaran di sekitar rata-ratanya. Pada tahun 2020, kondisi kemampuan mendanai belanja daerah di provinsi ini ini tercatat sebesar 1,04 dan menunjukkan besaran yang fluktuatif sampai dengan tahun 2024 hingga capaiannya menjadi 1,00.

Berdasarkan capaian rasio kemampuan mendanai belanja daerah tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih perlu mengoptimalkan dan/atau menggali sumber penerimaan daerah maupun pembiayaan lainnya, misalnya dengan melakukan pinjaman/obligasi, maupun melakukan kerja sama dengan badan usaha/swasta.

Selanjutnya, kemampuan keuangan daerah juga dapat digambarkan dengan kapasitas fiskal daerah yang merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan tertentu.

Tabel 2. 71 Kapasitas Fiskal Daerah dan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Komponen A	**2.778,92**	**2.656,76**	**2.977,69**	**3.407,06**	**3.608,79**
Pendapatan	2.435,45	2.609,50	2.731,49	3.091,01	3.459,03
Penerimaan pembiayaan tertentu (SiLPA)	343,47	47,25	246,20	316,05	149,77
Komponen B	**790,78**	**889,41**	**959,16**	**1.135,83**	**1.204,92**
Belanja pegawai	567,09	638,56	714,86	767,03	868,50
Belanja bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja bagi hasil	223,70	250,85	244,30	368,80	336,43
Pengeluaran pembiayaan tertentu (pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapasitas Fiskal Daerah	**1.988,14**	**1.767,35**	**2.018,53**	**2.271,23**	**2.403,87**
Belanja pegawai	567,09	638,56	714,86	767,03	868,50
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	**3,51**	**2,77**	**2,82**	**2,96**	**2,77**
Kategori	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

Sumber:Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2020-2024 (Olah Data 2025)

Berdasarkan data di atas, kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat pada nilai nominal. Kapasitas fiskal daerah mengalami peningkatan dari Rp1.988,14 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.403,87 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Pada tahun 2020, kapasitas fiskal daerah Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar Rp1.988,14 miliar dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,86 persen per tahun, hingga besarannya menjadi Rp2.403,87 miliar.

Meskipun terdapat fluktuasi pada rasio kapasitas fiskal daerah—dengan penurunan dari 3,51 pada tahun 2020 menjadi 2,77 pada tahun 2021 dan kembali pada angka yang sama di tahun 2024—kategori kapasitas fiskal tetap berada pada level "Sangat Tinggi" atau dengan besaran capaian ≥ 2,730.. Hal ini menunjukkan bahwa secara relatif, Provinsi Kalimantan Utara memiliki kemampuan fiskal yang baik jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Kondisi ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal, memperluas basis penerimaan asli daerah, serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Upaya ini perlu diimbangi dengan pengelolaan belanja yang efisien serta penguatan kelembagaan fiskal agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga di masa mendatang.

2.5.1.4 Neraca Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2020 mendefinisikan neraca sebagai laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu, yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan

dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, total aset di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,05 persen per tahun. Pada tahun 2020, total aset di provinsi ini tercatat sebesar Rp7,31 triliun dan dalam perkembangannya hingga tahun 2024 bertumbuh menjadi Rp8,57 triliun. Hal ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menjaga dan meningkatkan kapasitas keuangan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Tabel 2. 72 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Neraca Daerah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	(% per tahun)
1	**ASET**						
1.1	**Aset Lancar**	**444.321.837.754,97**	**518.047.724.132,16**	**777.957.241.296,94**	**578.096.845.903,41**	**767.105.366.112,42**	14,63
1.1.1	Kas di kas daerah	55.576.057.888,84	156.753.403.188,76	388.224.407.956,60	137.659.217.241,37	5.725.309.574,79	-43,35
1.1.2	Kas di bendahara pengeluaran	676.415.414,30	4.385.846,84	5.787.093,80	5.310.824,22	1.433.267,97	-78,55
1.1.3	Kas di bendahara penerimaan	26.374.970,00	8.264.000,00	24.312.510,00	14.725.805,00	7.590.000,00	-26,76
1.1.4	Kas di bendahara BOS				231.629.445,90	0,00	
1.1.5	Kas di BLUD	35.019.889.301,02	104.586.792.713,84	20.089.027.159,63	11.798.137.662,00	10.698.134.567,95	-25,66
1.1.6	Kas lainnya	6.007.625.157,01	3.440.633.263,43	16.020.401.991,32	3.181.705.537,92	1.236.069.216,78	-32,65
1.1.7	Piutang pajak	11.840.918.944,00	149.500.164,00	114.627.040,00	170.452.310,00	159.034.220,00	-65,96
1.1.8	Penyisihan piutang pajak	(5.851.823,80)	(10.386.382,50)	(7.547.425,20)	(9.967.913,50)	(15.753.234,20)	28,09
1.1.9	Piutang retribusi	65.700.000,00	75.858.467,00	50.205.000,00	61.280.000,00	121.393.853,34	16,59
1.1.10	Penyisihan piutang retribusi	(32.310.000,00)	(39.135.000,00)	(20.205.000,00)	(23.872.500,00)	(33.511.500,00)	0,92
1.1.11	Piutang transfer	63.535.068.722,00	1.387.177.315,00	19.044.411.371,00	7.518,00	164.799.761.000,00	26,91
1.1.12	Belanja dibayar dimuka	1.533.287.825,68	1.056.215.825,50	1.095.503.131,07	929.165.055,82	792.864.170,22	-15,20
1.1.13	Piutang lainnya	25.976.027.492,48	38.668.186.095,06	61.728.291.257,78	50.043.317.715,53	46.822.090.410,04	15,87
1.1.14	Penyisih piutang lainnya	(19.110.037.697,76)	(20.288.772.296,91)	(21.945.086.934,51)	(22.600.950.529,01)	(21.578.516.013,36)	3,08
1.1.15	Persediaan	263.212.671.561,20	232.255.600.932,14	293.533.106.145,45	396.636.687.730,16	558.369.466.578,89	20,69
1.2	**Investasi Jangka Panjang**	**195.482.571.221,00**	**217.291.104.232,00**	**235.028.685.421,00**	**248.454.509.623,00**	**264.361.766.466,00**	7,84
1.2.1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	Investasi Permanen (Penyertaan modal)	195.482.571.221,00	217.291.104.232,00	235.028.685.421,00	248.454.509.623,00	264.361.766.466,00	7,84
1.3	**Aset Tetap**	**6.320.118.198.372,40**	**6.444.075.540.240,37**	**6.642.348.672.028,72**	**7.040.506.265.064,41**	**7.398.035.911.449,66**	4,02
1.3.1	Tanah	1.780.346.371.801,00	1.809.164.154.788,00	1.854.730.816.314,00	1.876.910.986.015,12	1.925.997.610.330,99	1,99
1.3.2	Peralatan dan mesin	1.063.594.491.313,79	1.160.384.497.766,79	1.288.693.274.631,50	1.403.150.044.281,00	1.545.324.467.715,18	9,79
1.3.3	Gedung dan bangunan	1.649.621.967.683,50	1.796.583.792.720,14	2.026.099.887.807,39	2.135.668.950.617,39	2.221.942.210.814,08	7,73

No.	Uraian	Neraca Daerah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	(% per tahun)
1.3.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	2.831.032.679.710,98	2.901.616.204.275,98	2.979.751.520.697,98	3.139.207.051.665,98	3.289.100.739.846,29	3,82
1.3.5	Aset tetap lainnya	12.997.900.853,01	14.319.256.905,01	18.043.540.802,01	22.690.023.838,01	24.193.752.126,01	16,80
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	923.006.819.218,97	989.596.562.550,47	990.578.460.761,47	1.277.389.663.931,64	1.410.301.750.290,98	11,18
1.3.7	Akumulasi penyusutan	(1.940.482.032.208,85)	(2.227.588.928.766,02)	(2.515.548.828.985,63)	(2.814.510.455.284,73)	(3.018.824.619.673,87)	11,68
1.4	**Dana Cadangan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.4.1	Dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	**Aset Lainnya**	**348.790.577.717,08**	**356.719.340.188,56**	**116.477.009.359,81**	**466.056.381.683,23**	**137.696.416.672,47**	-20,73
1.5.1	Tuntutan ganti rugi	18.170.333,00	19.325.333,00	19.325.333,00	19.325.333,00	19.325.333,00	1,55
1.5.2	Aset tak berwujud	157.389.820.954,00	159.807.218.454,00	169.502.586.581,00	171.174.169.815,00	189.610.985.759,00	4,77
1.5.3	Amortisasi aset tak berwujud	(107.209.840.497,00)	(130.968.364.564,00)	(145.565.134.179,00)	(155.810.675.079,00)	(162.703.102.799,00)	10,99
1.5.4	Aset lain-lain	312.621.298.471,91	342.800.131.392,39	111.570.607.759,64	471.244.151.666,06	235.497.760.391,30	-6,84
1.5.5	Akumulasi penyusutan aset lain-lain	(14.028.871.544,83)	(14.938.970.426,83)	(19.050.376.134,83)	(20.570.590.051,83)	(124.728.552.011,83)	72,68
	TOTAL ASET	**7.308.713.185.065,45**	**7.536.133.708.793,09**	**7.771.811.608.106,47**	**8.333.114.002.274,05**	**8.567.199.460.700,55**	4,05
2	**KEWAJIBAN**						
2.1	**Kewajiban Jangka Pendek**	**172.655.302.948,33**	**151.001.871.209,18**	**255.444.088.357,83**	**249.115.706.851,09**	**338.605.500.131,08**	18,34
2.1.4	Pendapatan diterima dimuka	109.391.705,00	108.252.654,33	146.016.933,33	7.945.495.040,00	6.091.033.923,33	173,17
2.1.5	Utang belanja	1.531.591.504,00	39.174.561.449,00	25.351.203.906,00	202.207.430.064,17	332.494.728.807,75	283,85
2.1.6	Utang jangka pendek lainnya	171.014.319.739,33	111.719.057.105,85	229.946.867.518,50	38.962.781.746,92	19.737.400,00	-89,64
2.2	**Kewajiban Jangka Panjang**	**256.455.736.957,24**	**285.145.687.338,11**	**1.435.597.731,00**	**1.518.108.304,00**	**1.590.608.804,00**	-71,94
2.2.4	Utang jangka panjang lainnya	256.455.736.957,24	285.145.687.338,11	1.435.597.731,00	1.518.108.304,00	1.590.608.804,00	-71,94
	TOTAL KEWAJIBAN	**429.111.039.905,57**	**436.147.558.547,29**	**256.879.686.088,83**	**250.633.815.155,09**	**340.196.108.935,08**	-5,64
3	**TOTAL EKUITAS**	**6.879.602.145.159,88**	**7.099.986.150.245,80**	**7.514.931.922.017,64**	**8.082.480.187.118,96**	**8.227.003.351.765,47**	4,57
1.1	Ekuitas	6.879.602.145.159,88	7.099.986.150.245,80	7.514.931.922.017,64	8.082.480.187.118,96	8.227.003.351.765,47	4,57
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**7.308.713.185.065,45**	**7.536.133.708.793,09**	**7.771.811.608.106,47**	**8.333.114.002.274,05**	**8.567.199.460.700,55**	4,05

Sumber:Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2020-2024 (Olah Data 2025)

Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Sementara itu, aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan atau yang digunakan masyarakat umum. Berdasarkan rata-rata proporsinya, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, komponen aset lancar tercatat memiliki rata-rata proporsi sebesar 7,77 persen, sementara komponen aset non lancar memiliki rata-rata proporsi sebesar 92,23 persen.

Komponen aset yang menunjukkan pertumbuhan paling signifikan adalah aset lancar, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,63 persen per tahun. Kenaikan ini menunjukkan likuiditas pemerintah daerah yang semakin baik, yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan operasional jangka pendek. Namun demikian, aset lainnya justru mengalami penurunan drastis dengan rata-rata -20,73 persen per tahun, yang memerlukan kajian lebih lanjut mengenai penyusutan atau pengalihan aset tersebut.

Investasi jangka panjang menunjukkan pertumbuhan stabil sebesar 7,84 persen per tahun, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan. Aset tetap, yang merupakan komponen terbesar dari total aset, meningkat secara moderat dengan pertumbuhan rata-rata 4,02 persen per tahun, mencerminkan adanya penambahan atau revaluasi aset tetap, seperti infrastruktur dan bangunan pemerintah.

Selanjutnya, kewajiban menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2020 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiaannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Berdasarkan laporan neraca daerah, secara umum terjadi fluktuasi yang cukup signifikan. Kewajiban jangka pendek meningkat tajam dengan rata-rata pertumbuhan 18,34 persen per tahun, yang dapat menunjukkan peningkatan komitmen pembayaran jangka pendek, termasuk utang kepada pihak ketiga atau

kontraktor. Sebaliknya, kewajiban jangka panjang menurun sangat drastis hingga -71,94 persen per tahun, yang kemungkinan besar disebabkan oleh pelunasan utang atau restrukturisasi kewajiban jangka panjang. Secara keseluruhan, total kewajiban justru mengalami penurunan rata-rata 5,64 persen per tahun.

Terakhir, ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan dalam ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Dalam laporan neraca, jumlah total ekuitas tidak dirinci secara mendetail mengenai besaran ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, maupun ekuitas dana cadangan. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, besaran ekuitas dana Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4,57 persen per tahun di mana pada tahun 2020 ekuitas dana di provinsi ini tercatat sebesar Rp6,87 triliun, yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi Rp8,23 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa aset bersih yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus meningkat, yang mencerminkan kondisi keuangan yang sehat dan pengelolaan sumber daya yang baik.

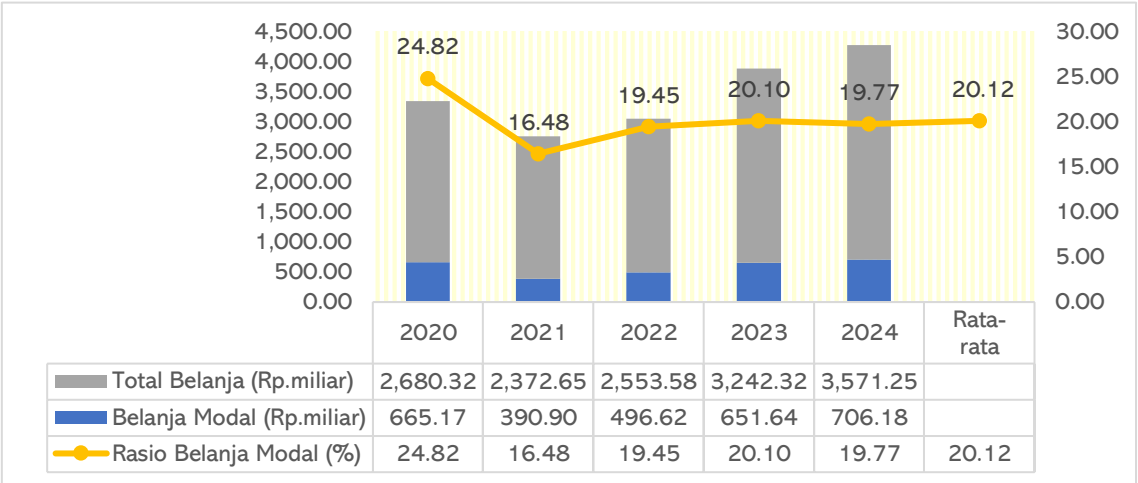
Secara keseluruhan, neraca keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam periode 2020–2024 menunjukkan kinerja keuangan yang cukup positif. Pertumbuhan aset yang sejalan dengan peningkatan ekuitas dan penurunan kewajiban menandakan adanya tata kelola keuangan yang cermat dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal. Kendati demikian, beberapa fluktuasi signifikan, terutama pada aset lainnya dan kewajiban jangka panjang, perlu mendapat perhatian lebih lanjut dalam laporan keuangan mendatang.

Analisis rasio keuangan daerah merupakan analisis yang membandingkan besaran atau nilai yang terdapat dalam laporan keuangan daerah yang bertujuan untuk mengetahui posisi dan kinerja keuangan di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Pada sub bab ini analisis rasio keuangan daerah yang akan dibahas adalah analisis rasio keuangan daerah terkait laporan neraca daerah.

1. Rasio Belanja Modal

Analisis rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja. Rasio ini memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal pada tahun anggaran berkenaan. Semakin tinggi besaran belanja modal maka diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi daerah, di mana komponen di dalamnya dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat, yang diharapkan akan berpengaruh positif pula bagi pertumbuhan ekonomi di daerah, yang kemudian dapat berimbas pula pada peningkatan penerimaan daerah.

Rasio belanja modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang relatif moderat. Pada tahun 2020, rasio belanja modal berada pada angka tertinggi, yaitu sebesar 24,82 persen dari total belanja daerah. Hal ini mengindikasikan adanya fokus yang relatif besar terhadap investasi pembangunan infrastruktur atau aset tetap pada awal periode tersebut. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan tajam hingga mencapai 16,48 persen. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh realokasi belanja daerah untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, yang mendorong peningkatan belanja operasional atau belanja tak terduga dan menyebabkan belanja modal menjadi prioritas yang lebih rendah..



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Total Belanja (Rp.miliar)	2,680.32	2,372.65	2,553.58	3,242.32	3,571.25	
Belanja Modal (Rp.miliar)	665.17	390.90	496.62	651.64	706.18	
Rasio Belanja Modal (%)	24.82	16.48	19.45	20.10	19.77	20.12

Gambar 2. 74 Rasio Belanja Modal Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Rasio belanja modal mengalami tren pemulihan pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 19,45 persen dan 20,10 persen. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah provinsi dalam mendorong kembali pembangunan fisik pasca-pandemi. Pada tahun 2024, meskipun jumlah belanja modal mengalami peningkatan secara nominal menjadi Rp706,18 miliar, namun persentase terhadap total belanja sedikit menurun ke angka 19,77 persen karena peningkatan total belanja secara keseluruhan.

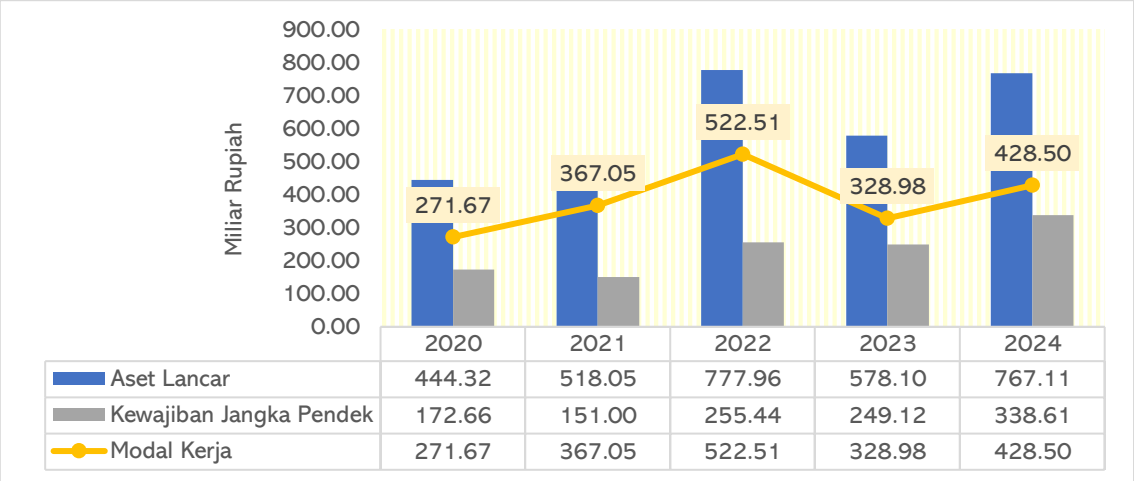
Secara rata-rata, selama periode lima tahun, rasio belanja modal tercatat sebesar 20,12 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa sekitar seperlima dari total belanja daerah diarahkan untuk investasi jangka panjang yang berkontribusi terhadap pembentukan aset dan peningkatan kapasitas pelayanan publik. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan rasio belanja modal agar sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

2. Analisis Modal Kerja

Modal kerja merupakan indikator penting yang menunjukkan kemampuan jangka pendek pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban lancarnya melalui aset lancar yang dimiliki. Analisis modal kerja bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan atau penggunaan pos pembiayaan lainnya. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap indikator modal kerja, didapatkan hasil bahwa modal kerja daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan besaran positif. Besaran positif tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi ini dinilai telah mampu menghadapi krisis keuangan.

Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, modal kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang cukup dinamis. Pada tahun 2020, modal kerja tercatat sebesar Rp271,67 miliar. Nilai ini meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp367,05 miliar, mencerminkan kondisi likuiditas yang

semakin baik seiring dengan menurunnya kewajiban jangka pendek dan meningkatnya aset lancar. Kecenderungan positif ini berlanjut hingga tahun 2022, ketika modal kerja mencapai puncaknya pada angka Rp522,51 miliar. Kenaikan ini didukung oleh lonjakan aset lancar yang cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kewajiban jangka pendek.



	2020	2021	2022	2023	2024
Aset Lancar	444.32	518.05	777.96	578.10	767.11
Kewajiban Jangka Pendek	172.66	151.00	255.44	249.12	338.61
Modal Kerja	271.67	367.05	522.51	328.98	428.50

Keterangan: Kewajiban jangka pende k = Kewajiban lancar

Gambar 2. 75 Modal Kerja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Pada tahun 2023 terjadi penurunan modal kerja menjadi Rp328,98 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya nilai aset lancar yang cukup tajam dari tahun sebelumnya, meskipun kewajiban jangka pendek juga mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2024, modal kerja kembali meningkat menjadi Rp428,50 miliar, meskipun kewajiban jangka pendek juga meningkat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aset lancar berhasil mengimbangi beban kewajiban jangka pendek yang semakin besar.

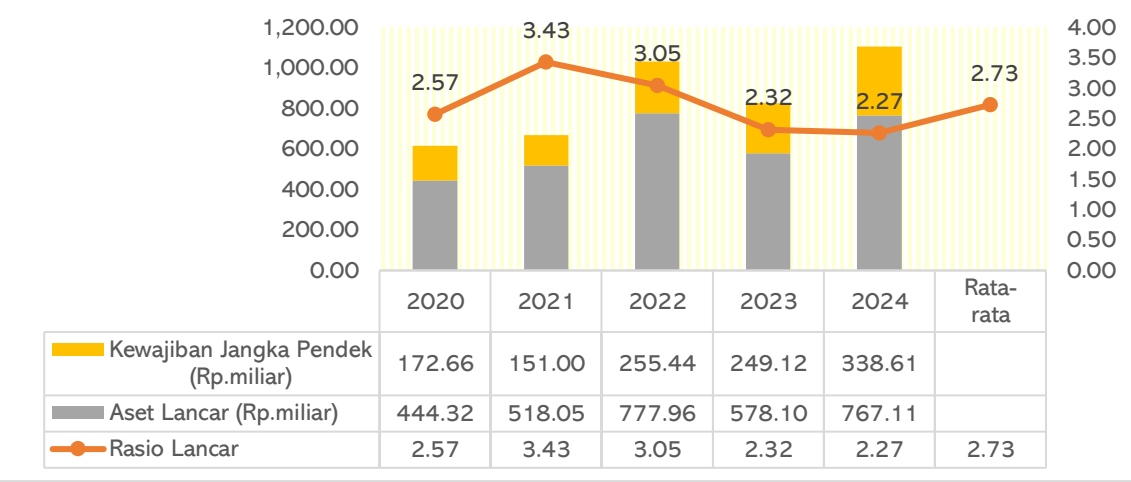
Secara umum, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kinerja keuangan jangka pendek yang relatif sehat, dengan modal kerja yang positif selama lima tahun berturut-turut. Namun, fluktuasi yang terjadi menunjukkan perlunya pengelolaan yang lebih hati-hati terhadap komponen aset lancar dan kewajiban jangka pendek agar likuiditas daerah tetap terjaga secara optimal. Modal kerja yang cukup juga penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik tanpa ketergantungan berlebihan pada pembiayaan jangka pendek atau pinjaman.

3. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Meskipun pemerintah daerah sudah membuat anggaran kas, namun perlu ditunjang oleh analisis likuiditas, di mana untuk dapat memenuhi kewajibannya maka pemerintah daerah harus mempunyai alat-alat yang dapat digunakan untuk membayar yang berupa aktiva-aktiva lancar yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan. Analisis rasio likuiditas meliputi rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan Rasio Cepat (*Quick Ratio*).

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang segera harus dibayar dengan aktiva lancarnya. Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar yang datanya diperoleh dari neraca. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintahan daerah. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya, oleh karena itu kondisi keuangan daerah dapat dikatakan sehat apabila rasio lancarnya berada di atas 1, atau dengan kata lain jumlah aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Kewajiban Jangka Pendek (Rp.miliar)	172.66	151.00	255.44	249.12	338.61	
Aset Lancar (Rp.miliar)	444.32	518.05	777.96	578.10	767.11	
Rasio Lancar	2.57	3.43	3.05	2.32	2.27	2.73

Keterangan: kewajiban lancar = kewajiban jangka pendek=Utang lancar
Gambar 2. 76 Rasio Lancar Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

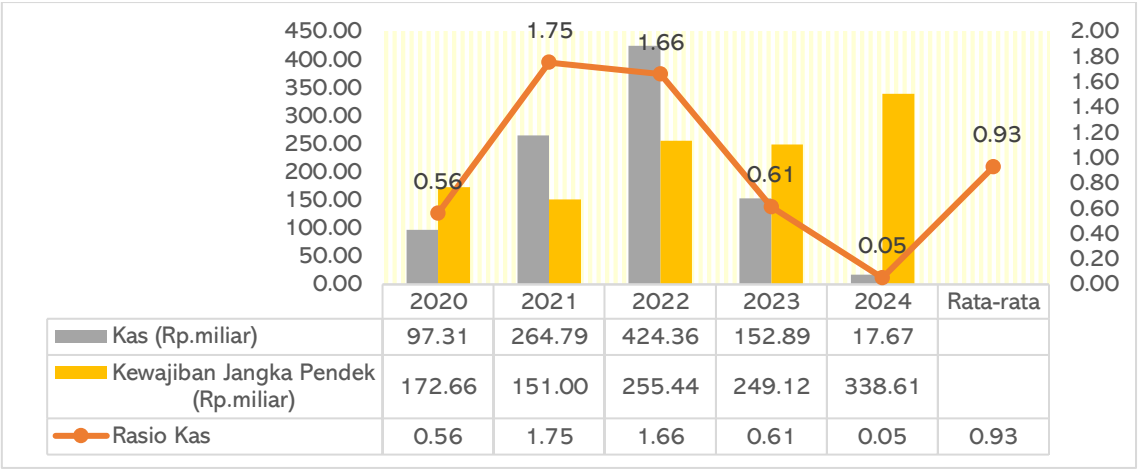
Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, rasio lancar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan nilai yang relatif sehat dan stabil, dengan rata-rata sebesar 2,73. Pada tahun 2020, rasio lancar tercatat sebesar 2,57 dan meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 3,43. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi memiliki likuiditas yang sangat baik, disebabkan oleh peningkatan aset lancar dan penurunan kewajiban jangka pendek secara bersamaan.

Pada tahun 2022, meskipun kewajiban jangka pendek meningkat, aset lancar meningkat lebih tinggi sehingga rasio lancar tetap berada pada angka 3,05. Namun, mulai tahun 2023 hingga 2024, terjadi penurunan rasio masing-masing menjadi 2,32 dan 2,27. Penurunan ini menunjukkan adanya tekanan terhadap likuiditas, terutama akibat peningkatan kewajiban jangka pendek yang signifikan, sementara peningkatan aset lancar tidak sebanding.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tren penurunan dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tetap mempertahankan rasio lancar di atas ambang batas minimal 2, yang mencerminkan kondisi keuangan jangka pendek yang cukup baik. Untuk menjaga keberlanjutan likuiditas, pemerintah daerah disarankan untuk tetap mengontrol kewajiban jangka pendek dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset lancar, khususnya dalam hal piutang dan kas yang tersedia.

b. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas mengukur sejauh mana kas dan setara kas dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Rasio ini memberikan gambaran paling konservatif mengenai likuiditas pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara langsung. Rasio ini lebih ketat dibandingkan rasio lancar karena hanya mempertimbangkan kas (tanpa piutang dan persediaan) sebagai sumber likuiditas. Standar baik untuk menentukan besaran nilai rasio kas sebesar >1.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Kas (Rp.miliar)	97.31	264.79	424.36	152.89	17.67	
Kewajiban Jangka Pendek (Rp.miliar)	172.66	151.00	255.44	249.12	338.61	
Rasio Kas	0.56	1.75	1.66	0.61	0.05	0.93

Keterangan: Kas = jumlah kas + setara kas; kewajiban lancar = kewajiban jangka pendek

Gambar 2. 77 Rasio Kas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, rasio kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2020, rasio kas berada pada angka 0,56, yang mengindikasikan bahwa kas yang tersedia hanya mampu menutupi sekitar 56 persen dari kewajiban jangka pendek. Namun, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2021 dan 2022, di mana rasio kas mencapai angka yang sangat positif yaitu masing-masing sebesar 1,75 dan 1,66. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut, kas yang dimiliki jauh lebih besar dibandingkan kewajiban jangka pendek, mencerminkan kondisi likuiditas yang sangat baik.

Namun demikian, tren tersebut mengalami penurunan drastis pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, rasio kas turun menjadi 0,61, dan anjlok ke angka 0,05 pada tahun 2024. Penurunan tajam ini mengindikasikan adanya penurunan kas yang signifikan disertai dengan peningkatan kewajiban jangka pendek, yang mengakibatkan ketimpangan dalam likuiditas jangka pendek dan berpotensi menimbulkan risiko keuangan.

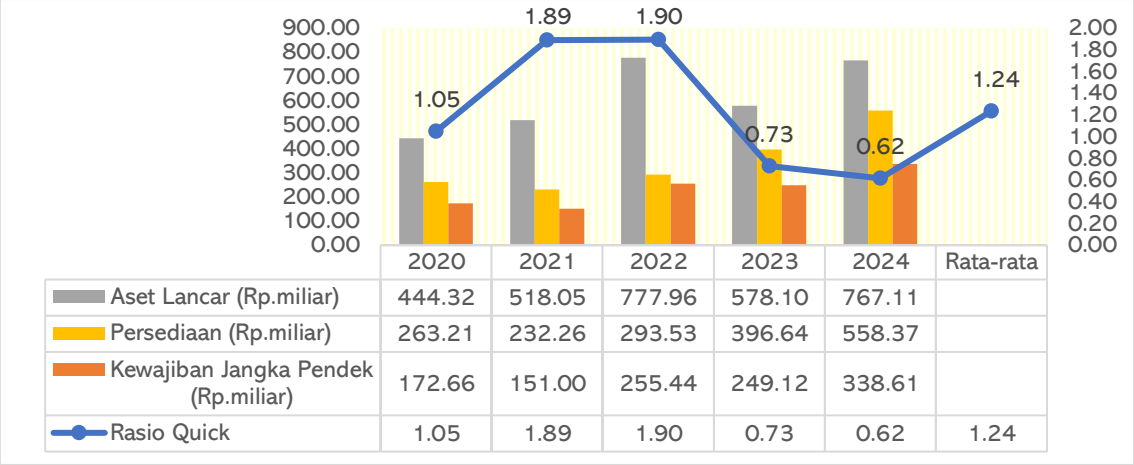
Rata-rata rasio kas selama lima tahun berada pada angka 0,93, yang berada sedikit di bawah angka ideal minimal 1. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata, kas yang tersedia belum sepenuhnya mampu menutupi

seluruh kewajiban jangka pendek, sehingga diperlukan perhatian serius dalam pengelolaan kas agar tetap menjaga keseimbangan likuiditas.

Sebagai rekomendasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mengupayakan penguatan pengelolaan kas dan optimalisasi penerimaan rutin agar mampu menjaga rasio kas pada tingkat yang aman. Selain itu, pengendalian kewajiban jangka pendek dan penjadwalan pembayaran yang efisien menjadi hal yang penting untuk memelihara stabilitas fiskal jangka pendek.

c. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat merupakan salah satu ukuran memberikan gambaran yang lebih konservatif dan realistis mengenai kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan cepat hanya dengan aset yang paling likuid, seperti kas dan piutang. Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (*inventory*), dengan kata lain dalam perhitungan rasio ini mengabaikan nilai sediaan dengan cara dikurangi dari total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan. Standar nilai untuk Rasio cepat adalah sebesar >1, semakin tinggi besaran nilai rasio ini maka semakin tinggi likuiditasnya, namun tidak boleh terlalu besar karena menunjukkan besarnya aset yang tidak tersalurkan sehingga terjadi kelebihan likuiditas.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Aset Lancar (Rp.miliar)	444.32	518.05	777.96	578.10	767.11	
Persediaan (Rp.miliar)	263.21	232.26	293.53	396.64	558.37	
Kewajiban Jangka Pendek (Rp.miliar)	172.66	151.00	255.44	249.12	338.61	
Rasio Quick	1.05	1.89	1.90	0.73	0.62	1.24

Gambar 2. 78 Rasio Cepat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Pada tahun 2020, rasio cepat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 1,05, menunjukkan bahwa aset lancar yang tersedia (dikurangi persediaan) masih cukup untuk menutup kewajiban jangka pendek. Kinerja likuiditas semakin membaik pada tahun 2021 dan 2022, dengan rasio cepat masing-masing mencapai 1,89 dan 1,90. Nilai tersebut mencerminkan kondisi keuangan yang sangat sehat, di mana aset cepat lebih dari cukup untuk membayar seluruh kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan.

Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan tajam dalam rasio ini, yaitu masing-masing menjadi 0,73 dan 0,62. Hal ini menandakan bahwa aset cepat yang dimiliki tidak lagi mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban jangka pendek, yang berpotensi menimbulkan tekanan likuiditas. Peningkatan jumlah persediaan yang signifikan turut menyebabkan berkurangnya komponen aset cepat, meskipun nilai total aset lancar tampak meningkat.

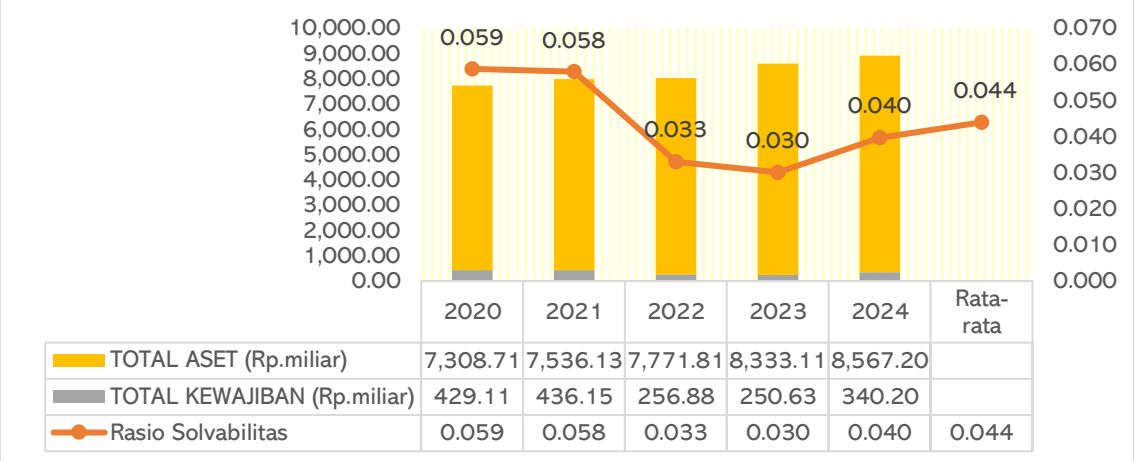
Secara rata-rata selama lima tahun, rasio cepat tercatat sebesar 1,24, masih berada di atas batas aman minimum yaitu 1,0. Namun, penurunan tren dalam dua tahun terakhir menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut terhadap manajemen persediaan dan pengelolaan kewajiban jangka pendek agar kemampuan likuiditas tetap terjaga.

Sebagai langkah strategis, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara disarankan untuk mengkaji ulang kebijakan pengadaan dan pengelolaan

persediaan, serta melakukan penguatan sistem manajemen kas dan piutang agar likuiditas tetap berada pada level yang optimal dan tidak mengganggu operasional pemerintahan.

4. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas merupakan indikator yang mengukur kemampuan suatu entitas dalam memenuhi seluruh kewajibannya dengan menggunakan total aset yang dimiliki. Dalam konteks pemerintah daerah, rasio ini menggambarkan seberapa besar proporsi aset yang dibiayai oleh kewajiban, sehingga semakin kecil nilainya, semakin sehat pula kondisi keuangan daerah tersebut. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva, maka semakin kecil rasionya maka semakin aman (*solvable*), sementara itu apabila semakin besar rasionya maka semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan yang menandakan semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh pemerintah, dengan kata lain porsi utang terhadap aktiva harus lebih kecil.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
TOTAL ASET (Rp.miliar)	7,308.71	7,536.13	7,771.81	8,333.11	8,567.20	
TOTAL KEWAJIBAN (Rp.miliar)	429.11	436.15	256.88	250.63	340.20	
Rasio Solvabilitas	0.059	0.058	0.033	0.030	0.040	0.044

Keterangan: Total utang = total kewajiban

Gambar 2. 79 Rasio Solvabilitas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Pada tahun 2020 dan 2021, rasio solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tercatat masing-masing sebesar 0,059 dan 0,058. Angka ini menunjukkan bahwa kurang dari 6 persen total aset dibiayai oleh kewajiban,

suatu kondisi yang sangat positif karena menunjukkan dominasi pembiayaan melalui ekuitas (aset bersih). Tren penurunan rasio ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing menjadi 0,033 dan 0,030, yang mengindikasikan perbaikan struktur permodalan dan kemampuan pelunasan kewajiban jangka panjang.

Meskipun terjadi kenaikan kembali pada tahun 2024 menjadi 0,040, nilai ini tetap berada dalam batas yang sangat aman. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kewajiban, terutama kewajiban jangka pendek, yang tidak sebanding dengan kenaikan total aset.

Secara rata-rata dalam periode lima tahun, rasio solvabilitas berada pada angka 0,044, yang menandakan bahwa hanya sekitar 4,4 persen dari total aset yang berasal dari kewajiban. Kondisi ini mencerminkan tingkat solvabilitas yang sangat baik dan rendahnya tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terhadap utang atau kewajiban dalam menjalankan operasional dan pembiayaan pembangunan.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dinilai memiliki kapasitas yang sangat baik dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan ketahanan keuangan jangka panjang. Strategi pengelolaan utang yang konservatif dan fokus pada pembiayaan melalui sumber daya internal (ekuitas) patut dipertahankan guna mendukung stabilitas keuangan daerah secara berkelanjutan.

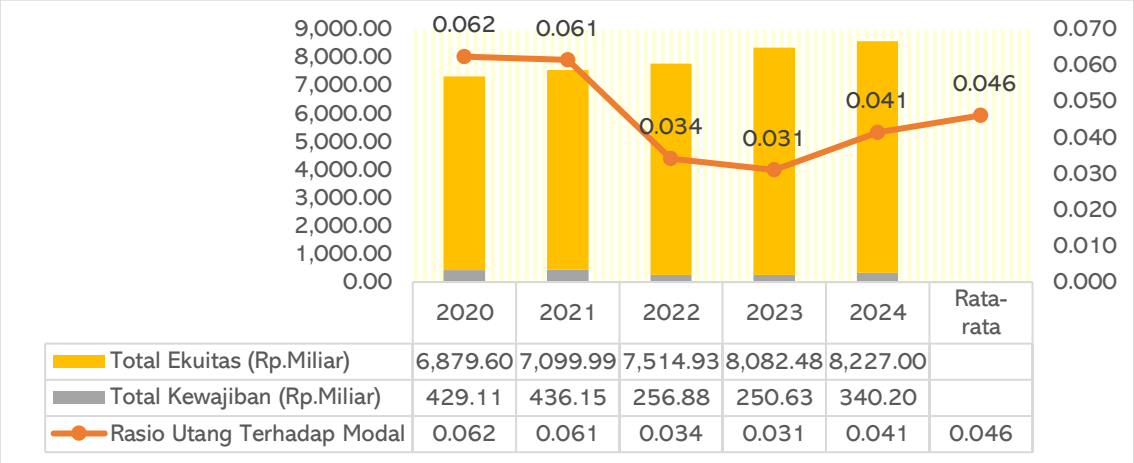
5. Rasio Utang (Leverage Ratio)

Rasio utang sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio-rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio utang terdiri dari rasio utang terhadap modal dan rasio utang terhadap aset modal.

a. Rasio Utang Terhadap Modal (*Total Debt to Equity Ratio/DER*)

Rasio utang terhadap modal merupakan indikator penting dalam mengukur struktur permodalan suatu entitas, termasuk pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan proporsi kewajiban (utang) dibandingkan dengan ekuitas

(aset bersih) yang dimiliki. Rasio yang rendah umumnya mencerminkan struktur keuangan yang sehat karena menandakan bahwa pembiayaan lebih banyak ditopang oleh modal sendiri daripada utang. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemerintah daerah kemungkinan berada pada fase kelebihan utang (*over leverage*), sehingga perlu mencari upaya untuk mengurangi dan/atau melunasi utang tersebut. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang yang semakin besar, atau dengan kata lain kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila rasio utang terhadap modal yang dicapai ini kurang dari satu.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Total Ekuitas (Rp.Miliar)	6,879.60	7,099.99	7,514.93	8,082.48	8,227.00	
Total Kewajiban (Rp.Miliar)	429.11	436.15	256.88	250.63	340.20	
Rasio Utang Terhadap Modal	0.062	0.061	0.034	0.031	0.041	0.046

Gambar 2. 80 Rasio Utang Terhadap Modal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren rasio utang terhadap modal yang sangat rendah dan stabil. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio ini tercatat masing-masing sebesar 0,062 dan 0,061, yang berarti hanya sekitar 6 persen dari modal yang berasal dari kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki ketergantungan yang sangat rendah terhadap utang dalam mendanai operasional maupun belanja modal.

Rasio ini terus menurun pada tahun 2022 dan 2023, mencapai titik terendah sebesar 0,031 pada tahun 2023. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya total kewajiban, terutama kewajiban jangka panjang, dan meningkatnya ekuitas daerah yang menandakan akumulasi aset bersih dari tahun ke tahun. Meski terdapat sedikit kenaikan pada tahun 2024 menjadi 0,041,

nilai ini masih dalam batas yang sangat aman dan menunjukkan struktur pembiayaan yang sangat konservatif.

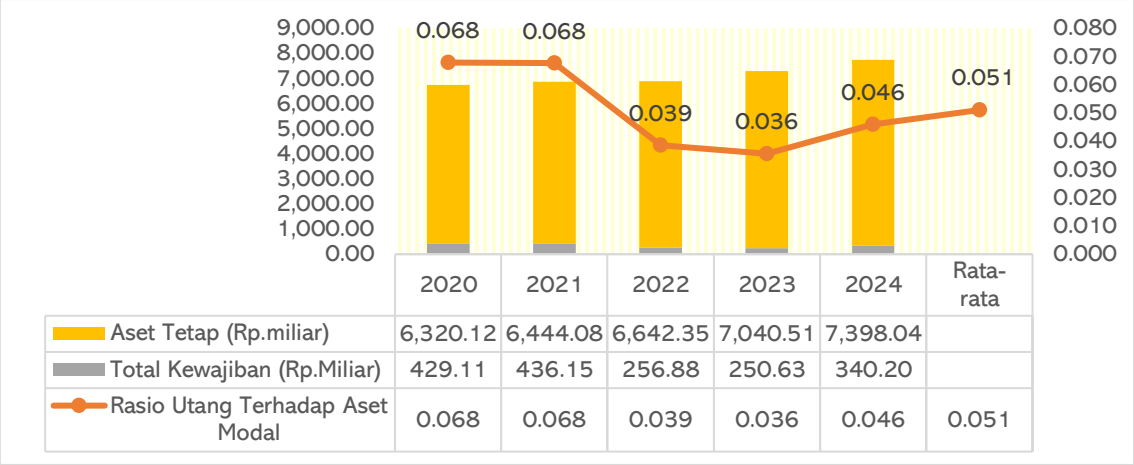
Rata-rata rasio utang terhadap modal selama lima tahun sebesar 0,046 mencerminkan bahwa hanya sekitar 4,6 persen dari modal yang bersumber dari kewajiban. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki struktur permodalan yang sangat kuat dan risiko keuangan yang rendah.

Secara keseluruhan, tingkat rasio utang terhadap modal yang rendah ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Strategi pengelolaan utang yang hati-hati perlu terus dilanjutkan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dengan risiko fiskal yang minimal.

b. Rasio Utang Terhadap Aset Modal (*Total Debt to Total Capital Assets*)

Rasio utang terhadap aset modal ini digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Aset modal diproksikan dengan aset tetap. Rasio ini didapatkan dari perbandingan antara total utang dengan total aset modal. Kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila rasio utang terhadap total aset modal yang dicapai kurang dari atau sama dengan 0,45. Namun, dalam praktik di Indonesia, rasio yang ideal dan mencerminkan kinerja fiskal yang sangat sehat biasanya jauh lebih rendah, yakni: < 0,3 (30%) kategori aman dan konservatif; < 0,1 (10%) menunjukkan ketergantungan yang rendah terhadap utang; < 0,05 (5%) menunjukkan kinerja fiskal sangat kuat, hampir seluruh aset dibiayai dari sumber non-utang.

Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, rasio utang terhadap aset modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang menurun secara umum. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio ini berada pada angka 0,068, mengindikasikan bahwa sekitar 6,8 persen dari nilai aset tetap dibiayai oleh kewajiban. Hal ini mencerminkan kinerja keuangan yang sangat sehat dan tingkat risiko fiskal yang sangat rendah.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Aset Tetap (Rp.miliar)	6,320.12	6,444.08	6,642.35	7,040.51	7,398.04	
Total Kewajiban (Rp.Miliar)	429.11	436.15	256.88	250.63	340.20	
Rasio Utang Terhadap Aset Modal	0.068	0.068	0.039	0.036	0.046	0.051

Keterangan: Total aset modal = aset tetap

Gambar 2. 81 Rasio Utang Terhadap Aset Modal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data 2025

Mulai tahun 2022 hingga 2023, rasio ini mengalami penurunan signifikan, masing-masing menjadi 0,039 dan 0,036. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya penurunan kewajiban dan peningkatan nilai aset tetap yang lebih besar, sehingga struktur permodalan menjadi semakin sehat. Meski pada tahun 2024 terjadi sedikit kenaikan menjadi 0,046, nilai ini masih tergolong sangat rendah dan tidak mengindikasikan beban utang yang signifikan terhadap aset tetap.

Rata-rata rasio utang terhadap aset modal selama lima tahun sebesar 0,051 menunjukkan bahwa hanya sekitar 5,1 persen dari aset tetap dibiayai oleh kewajiban. Artinya, mayoritas aset tetap yang dimiliki pemerintah provinsi diperoleh melalui pembiayaan dari dana sendiri (ekuitas), bukan dari utang. Kondisi ini mencerminkan kinerja keuangan yang sangat sehat dan tingkat risiko fiskal yang sangat rendah.

Secara keseluruhan, rasio ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berhasil menjaga struktur pendanaan aset tetap yang sehat dan konservatif. Kondisi ini mencerminkan kebijakan fiskal yang berhati-hati dan manajemen aset yang efisien, sehingga mengurangi potensi risiko keuangan jangka panjang yang mungkin timbul akibat ketergantungan pada utang.

2.5.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

Proyeksi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkaitan erat dengan kemampuan kapasitas daerah untuk melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode Tahun Anggaran 2020-2024, maka disusun suatu analisis proyeksi keuangan daerah dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2026-2030.

Pada komponen penerimaan, proyeksi disusun dengan memperhatikan kebijakan penganggaran dan asumsi kecenderungan pertumbuhan indikator-indikator makro. Selanjutnya, peningkatan penerimaan daerah tersebut juga memperhitungkan perubahan besaran penerimaan daerah yang dipengaruhi oleh besaran dana perimbangan yang merupakan kewenangan pusat, dan sumber-sumber pendapatan daerah yang berubah karena adanya perubahan kebijakan pajak dan retribusi yang sifatnya dinamis. Selain itu, alokasi belanja daerah yang mendukung masifnya pembangunan diharapkan akan mendorong percepatan peningkatan perekonomian daerah. Kegiatan ekonomi yang semakin maju berdampak positif pada pendapatan daerah. Oleh karena itu, pendapatan daerah diproyeksikan semakin meningkat. Sementara itu, tren belanja daerah di Provinsi Kalimantan Utara menyesuaikan besaran penerimaan daerah yang juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan masifnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, yang salah satunya bertujuan untuk pemerataan wilayah.

Tabel 2. 73 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	*Baseline* Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	**PENDAPATAN**							
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.033.747.641.868	1.123.569.152.000	1.171.634.508.000	1.221.939.375.000	1.274.592.417.000	1.329.707.664.000	4,29
1.2	Pendapatan Transfer	2.417.275.881.907	2.437.774.574.000	2.449.963.447.000	2.462.213.264.000	2.474.524.331.000	2.486.896.952.000	0,50
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.002.630.696	882.000.000	915.390.000	950.236.000	986.605.000	1.024.570.000	3,82
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.459.026.154.471**	**3.562.225.726.000**	**3.622.513.345.000**	**3.685.102.875.000**	**3.750.103.353.000**	**3.817.629.186.000**	**1,75**
2.	**BELANJA**							
2.1	Belanja Operasi	2.333.169.870.778	2.314.461.016.000	2.342.282.550.000	2.370.568.176.000	2.459.326.713.000	2.425.261.458.000	1,19
2.2	Belanja Modal	706.181.651.526	802.500.505.000	818.403.963.000	834.839.692.000	858.188.644.000	882.320.132.000	2,40
2.3	Belanja Tidak Terduga	7.566.963.773	8.342.578.000	8.759.707.000	9.197.692.000	9.657.577.000	10.140.456.000	5,00
2.4	Belanja Transfer	524.327.592.129	534.866.577.000	540.215.243.000	545.617.396.000	551.073.570.000	556.584.306.000	1,00
	JUMLAH BELANJA	**3.571.246.078.206**	**3.660.170.676.000**	**3.709.661.463.000**	**3.760.222.956.000**	**3.878.246.504.000**	**3.874.306.352.000**	**1,44**
	SURPLUS/DEFISIT	**(112.219.923.735,09)**	**(97.944.950.000)**	**(87.148.118.000)**	**(75.120.081.000)**	**(128.143.151.000)**	**(56.677.166.000)**	**-2,50**
3.	**PEMBIAYAAN**							
3.1	Penerimaan Pembiayaan	149.768.722.963	117.944.950.000	137.148.118.000	125.120.081.000	148.143.151.000	76.677.166.000	-5,58
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000	20.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	18,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**129.768.722.963**	**97.944.950.000**	**87.148.118.000**	**75.120.081.000**	**128.143.151.000**	**56.677.166.000**	**4,76**

Sumber: Hasil Analisis 2025

Berdasarkan proyeksi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2026 hingga 2030, terdapat tren pertumbuhan positif pada komponen Pendapatan Daerah secara agregat, meskipun dengan laju pertumbuhan yang moderat. Total pendapatan diproyeksikan meningkat dari Rp3,562 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp3,817 triliun pada tahun 2030, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,75 persen per tahun. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 4,29 persen, naik dari Rp1,123 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp1,329 triliun pada tahun 2030. Komponen lain yang turut menyumbang pertumbuhan adalah pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meskipun relatif kecil nilainya, mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 3,82 persen per tahun.

Sementara itu, Pendapatan Transfer yang merupakan komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan yang sangat lambat, hanya sebesar 0,50 persen per tahun. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD dan pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.

Dari sisi belanja, total belanja daerah diproyeksikan meningkat dari Rp3,660 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp3,874 triliun pada tahun 2030, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 1,44 persen. Belanja Operasi tetap menjadi pos dominan dengan alokasi yang stabil dan pertumbuhan rata-rata 1,19 persen, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik. Belanja Modal tumbuh dengan rata-rata 2,40 persen per tahun, menunjukkan adanya prioritas pada pembangunan infrastruktur dan penguatan aset daerah. Adapun Belanja Tidak Terduga menunjukkan pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 5,00 persen per tahun, yang mencerminkan antisipasi pemerintah terhadap ketidakpastian atau keadaan darurat di masa mendatang. Belanja Transfer kepada pemerintah kabupaten/kota atau pihak ketiga tumbuh sebesar 1,00 persen per tahun, tetap menjaga fungsi koordinatif antarpemerintahan.

Meskipun pendapatan terus meningkat, defisit anggaran masih menjadi tantangan utama. Selama periode 2026–2030, proyeksi menunjukkan defisit anggaran yang fluktuatif, namun cenderung menurun, dari Rp97,9 miliar pada

tahun 2026 menjadi Rp56,6 miliar pada tahun 2030. Defisit ini ditutup melalui pembiayaan netto yang proporsional, dengan rerata pertumbuhan pembiayaan netto sebesar 4,76 persen per tahun. Meskipun demikian, penerimaan pembiayaan cenderung menurun secara rata-rata sebesar 5,58 persen per tahun, menandakan perlunya kebijakan pembiayaan yang lebih inovatif dan efisien. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan diproyeksikan tumbuh sebesar 18,00 persen per tahun, terutama pada tahun-tahun tertentu seperti 2027 dan 2028, yang menunjukkan kebutuhan fiskal yang lebih besar untuk investasi jangka panjang atau kewajiban daerah.

Secara umum, proyeksi keuangan ini menggambarkan kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang relatif stabil, namun masih memerlukan penguatan dari sisi kemandirian pendapatan dan efisiensi belanja. Fokus pada peningkatan PAD, pengendalian belanja operasional, serta pengelolaan pembiayaan yang akuntabel akan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan fiskal dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.5.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi pendapatan adalah berdasarkan analisis tren dari data historis dalam beberapa tahun terakhir untuk setiap obyek pendapatan. Selain itu, proyeksi juga dirumuskan dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan pertumbuhan pendapatan historis, kondisi ekonomi makro yang terjadi, serta kebijakan serta strategi terkait dengan pendapatan daerah di masa mendatang sehingga diharapkan hasil dari proyeksi tersebut menjadi lebih realistis. Berikut Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 74 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	*Baseline* Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	**PENDAPATAN**							
1.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**1.033.747.641.868**	**1.123.569.152.000**	**1.171.634.508.000**	**1.221.939.375.000**	**1.274.592.417.000**	**1.329.707.664.000**	**4,29**
1.1.1	Pajak Daerah	761.219.619.467	839.244.630.000	881.206.862.000	925.267.205.000	971.530.565.000	1.020.107.093.000	5,00
1.1.2	Retribusi Daerah	10.790.544.538	11.896.576.000	12.491.405.000	13.115.975.000	13.771.774.000	14.460.363.000	5,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.371.469.794	11.947.151.000	12.245.830.000	12.551.976.000	12.865.775.000	13.187.419.000	2,50
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	250.366.008.069	260.480.795.000	265.690.411.000	271.004.219.000	276.424.303.000	281.952.789.000	2,00
1.2	**Pendapatan Transfer**	**2.417.275.881.907**	**2.437.774.574.000**	**2.449.963.447.000**	**2.462.213.264.000**	**2.474.524.331.000**	**2.486.896.952.000**	**0,50**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.404.627.387.907	2.428.733.777.000	2.440.877.446.000	2.453.081.833.000	2.465.347.243.000	2.477.673.979.000	0,50
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	12.648.494.000	9.040.797.000	9.086.001.000	9.131.431.000	9.177.088.000	9.222.973.000	0,50
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**8.002.630.696**	**882.000.000**	**915.390.000**	**950.236.000**	**986.605.000**	**1.024.570.000**	**3,82**
1.3.1	Pendapatan Hibah	**6.609.420.000**	357.000.000	364.140.000	371.423.000	378.851.000	386.428.000	2,00
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	**1.393.210.696**	525.000.000	551.250.000	578.813.000	607.754.000	638.142.000	5,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.459.026.154.471**	**3.562.225.726.000**	**3.622.513.345.000**	**3.685.102.875.000**	**3.750.103.353.000**	**3.817.629.186.000**	**1,75**

Sumber: Hasil Analisis 2025

Berdasarkan data proyeksi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2026 hingga 2030, terlihat adanya pertumbuhan positif meskipun dengan laju yang moderat. Secara keseluruhan, jumlah pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp3,459 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp3,818 triliun pada tahun 2030, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,75 persen per tahun. Kenaikan pendapatan ini terutama ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang tumbuh secara konsisten dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 4,29 persen.

Komponen PAD menunjukkan tren positif, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah yang diperkirakan meningkat dari Rp761,22 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp1,02 triliun pada tahun 2030. Komponen lain seperti Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah juga mengalami pertumbuhan, meskipun dengan laju yang lebih rendah. Peningkatan yang stabil dalam PAD mencerminkan potensi kemandirian fiskal yang semakin kuat, seiring dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang masih mendominasi struktur pendapatan daerah hanya tumbuh rata-rata 0,50 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap transfer pusat masih tinggi, meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan cenderung stagnan. Transfer Dana Perimbangan menjadi sumber utama, sedangkan transfer lainnya hanya memberikan kontribusi marginal.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meskipun jumlahnya relatif kecil, menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan 3,82 persen per tahun. Kategori ini mencakup pendapatan hibah dan pendapatan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang masing-masing tumbuh sebesar 2,00 persen dan 5,00 persen.

Secara keseluruhan, meskipun laju pertumbuhan pendapatan daerah masih tergolong moderat, tren kenaikan PAD menunjukkan perbaikan dalam upaya kemandirian fiskal daerah. Untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka

menengah dan panjang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu terus memperkuat kapasitas pengelolaan PAD serta mengoptimalkan potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan proyeksi pertumbuhan pendapatan yang telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mengambil langkah-langkah konkret dan terukur. Oleh karena itu, untuk mencapai target proyeksi pendapatan tersebut diperlukan kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara di masa mendatang diarahkan pada:

a. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
b. Penyesuaian dan penguatan implementasi regulasi pengelolaan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. Inventarisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui: (i) perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah, (ii) penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
d. Pemerintah Daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi;
e. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;

f. Meningkatkan kemampuan SDM dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil;
g. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
h. Kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
i. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
j. Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai dengan penyertaan modal;
k. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana transfer ke daerah; dan
l. Peningkatan kerjasama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pembiayaan pembangunan daerah dilakukan dengan mekanisme kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, atau stakeholders lainnya.
m. Meningkatkan sinergi dengan perusahaan swasta melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang lebih terstruktur, seperti kontribusi dalam bentuk dana hibah atau penyediaan infrastruktur publik.
n. Mendorong kemitraan publik-swasta (*Public Private Partnership* - PPP) dalam pembangunan proyek infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.5.2.2 Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Proyeksi belanja daerah didasarkan pada analisis tren data historis 2020-2024 untuk setiap objek belanja, dengan mempertimbangkan

kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat. Selain itu, kebijakan pembiayaan daerah juga menjadi faktor utama agar hasil proyeksi lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara memperhitungkan kebutuhan belanja secara proporsional, mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Alokasi belanja ini digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memprioritaskan belanja daerah untuk mendukung program strategis yang bersifat mendesak serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah Proyeksi Belanja Provinsi Kalimantan Utara untuk periode 2026–2030:

Tabel 2. 75 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	*Baseline* Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030	
2.	**BELANJA**							
2.1	**Belanja Operasi**	**2.333.169.870.778**	**2.314.461.016.000**	**2.342.282.550.000**	**2.370.568.176.000**	**2.459.326.713.000**	**2.425.261.458.000**	**1,19**
2.1.1	Belanja Pegawai	868.496.469.825	903.583.727.000	921.655.402.000	940.088.510.000	958.890.280.000	978.068.086.000	**2,00**
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.218.959.056.896	1.231.179.121.000	1.237.335.017.000	1.243.521.692.000	1.249.739.300.000	1.255.987.997.000	**0,50**
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Subsidi	19.787.303.700	20.586.711.000	20.998.445.000	21.418.414.000	21.846.782.000	22.283.718.000	**2,00**
2.1.5	Belanja Hibah	222.697.836.570	155.751.793.000	158.866.829.000	162.044.166.000	225.285.049.000	165.285.049.000	**4,10**
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.229.203.787	3.359.664.000	3.426.857.000	3.495.394.000	3.565.302.000	3.636.608.000	**2,00**
2.2	**Belanja Modal**	**706.181.651.526**	**802.500.505.000**	**818.403.963.000**	**834.839.692.000**	**858.188.644.000**	**882.320.132.000**	**2,40**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	36.362.332.622	37.831.371.000	38.587.998.000	39.359.758.000	40.146.953.000	40.949.892.000	2,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.713.917.310	180.494.594.000	189.519.324.000	198.995.290.000	208.945.055.000	219.392.308.000	5,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	208.505.767.057	240.954.478.000	243.484.500.000	246.041.087.000	251.269.460.000	256.608.936.000	1,59
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	292.653.376.604	338.197.559.000	341.748.633.000	345.336.994.000	352.675.405.000	360.169.757.000	1,59
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	743.850.360	820.095.000	861.100.000	904.155.000	949.363.000	996.831.000	5,00
2.2.6	Aset Lainnya	4.202.407.573	4.202.408.000	4.202.408.000	4.202.408.000	4.202.408.000	4.202.408.000	0,00
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**7.566.963.773**	**8.342.578.000**	**8.759.707.000**	**9.197.692.000**	**9.657.577.000**	**10.140.456.000**	**5,00**
2.4	**Belanja Transfer**	**524.327.592.129**	**534.866.577.000**	**540.215.243.000**	**545.617.396.000**	**551.073.570.000**	**556.584.306.000**	**1,00**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	336.426.911.141	343.189.092.000	346.620.983.000	350.087.193.000	353.588.065.000	357.123.946.000	1,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	187.900.680.988	191.677.485.000	193.594.260.000	195.530.203.000	197.485.505.000	199.460.360.000	1,00
	JUMLAH BELANJA	**3.571.246.078.206**	**3.660.170.676.000**	**3.709.661.463.000**	**3.760.222.956.000**	**3.878.246.504.000**	**3.874.306.352.000**	**1,44**
	SURPLUS/DEFISIT	**(112.219.923.735,09)**	**(97.944.950.000)**	**(87.148.118.000)**	**(75.120.081.000)**	**(128.143.151.000)**	**(56.677.166.000)**	**-2,50**

Sumber: Hasil Analisis 2025

Berdasarkan data proyeksi belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026–2030, dapat disimpulkan bahwa alokasi belanja mengalami tren pertumbuhan yang moderat dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,44 persen per tahun. Komponen belanja operasi tetap menjadi porsi terbesar dalam struktur belanja, meskipun cenderung stagnan dengan rata-rata pertumbuhan hanya 1,19 persen. Hal ini mengindikasikan fokus pemerintah provinsi pada pemenuhan kebutuhan rutin, seperti belanja pegawai yang tumbuh rata-rata 2 persen per tahun dan belanja barang dan jasa yang meningkat sangat terbatas sebesar 0,5 persen.

Di sisi lain, belanja modal menunjukkan pertumbuhan yang lebih dinamis dengan rata-rata sebesar 2,4 persen per tahun. Ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset, di mana belanja modal untuk peralatan dan mesin tumbuh paling tinggi, yaitu sebesar 5 persen per tahun, disusul belanja modal tanah dan aset tetap lainnya. Namun demikian, kontribusi belanja modal terhadap total belanja masih relatif lebih kecil dibandingkan belanja operasi.

Selain itu, belanja tidak terduga dan belanja transfer masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,00 persen dan 1,00 persen, yang mengindikasikan adanya upaya peningkatan kesiapsiagaan terhadap kondisi darurat serta peningkatan transfer ke pemerintah kabupaten/kota. Meskipun demikian, sepanjang periode 2026–2030, neraca APBD Provinsi Kalimantan Utara masih mengalami defisit anggaran, meskipun cenderung membaik dari tahun ke tahun, dari defisit sebesar Rp97,94 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp56,68 miliar pada tahun 2030.

Secara keseluruhan, struktur belanja daerah menunjukkan kecenderungan yang konservatif, dengan dominasi belanja rutin dan peningkatan terbatas pada belanja pembangunan. Diperlukan strategi efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan pada belanja operasi yang bersifat konsumtif.

Untuk mewujudkan proyeksi belanja daerah yang telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu menetapkan kebijakan pengelolaan belanja yang konkret, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan. Kebijakan belanja daerah untuk periode 2026–2030 diarahkan pada sejumlah prinsip utama sebagai berikut.

a. penganggaran berbasis kinerja dengan orientasi pencapaian hasil guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
b. belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung efektivitas tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan urusan pemerintahan, dengan peningkatan alokasi yang terukur dan diikuti oleh peningkatan kinerja serta kualitas layanan publik.
c. belanja daerah dialokasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional.
d. Belanja honorarium bagi ASN dianggarkan dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan efektivitas dalam mendukung pencapaian sasaran program. Pemberian honorarium dibatasi dan hanya diberikan kepada pegawai yang memiliki kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan.
e. penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil berdasarkan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai, serta volume pekerjaan, dengan memperhitungkan estimasi sisa persediaan tahun anggaran berjalan. Ketujuh, alokasi belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana yang mendukung peningkatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
f. pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan yang sehat, serta akuntabilitas, dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Perencanaan kebutuhan BMD menjadi dasar bagi SKPD dalam mengusulkan anggaran, baik untuk pengadaan baru maupun pemeliharaan, dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. belanja modal diprioritaskan pada proyek infrastruktur yang memiliki dampak ekonomi langsung, seperti jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
h. Optimalisasi skema Pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek-proyek besar guna mengurangi beban APBD.
i. Efisiensi dalam realisasi belanja modal, dengan memastikan proyek yang direncanakan dapat dieksekusi sesuai target waktu dan anggaran.
j. belanja bantuan keuangan difokuskan pada peningkatan kapasitas pemerintah desa, agar bantuan keuangan dapat digunakan secara optimal dan tidak hanya untuk belanja rutin desa.
k. Monitoring dan evaluasi penggunaan bantuan keuangan lebih diperketat, guna menghindari penyalahgunaan dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana.

2.5.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal daerah beriorientasi keuntungan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pertimbangan utama dalam proyeksi embiayaan daerah didasarkan pada analisis tren data historis dari 2020-2024 untuk setiap objek pembiayaan. Selain itu, proyeksi juga disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro, kebijakan penyelesaian kewajiban daerah, kebijakan efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan daerah, kewajiban kepada pihak ketiga yang menjadi tanggungan pemerintah daerah, serta kebijakan defisit anggaran. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil proyeksi akan lebih realistis. Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dijelaskan pada tabel di bawah berikut ini:

Tabel 2. 76 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	*Baseline* Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030	
3.	**PEMBIAYAAN**							
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**149.768.722.963**	**117.944.950.000**	**137.148.118.000**	**125.120.081.000**	**148.143.151.000**	**76.677.166.000**	**-5,58**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	149.768.722.963	117.944.950.000	137.148.118.000	125.120.081.000	88.143.151.000	76.677.166.000	-8,76
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	60.000.000.000	0	
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**18,00**
3.1.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	
3.1.2	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0	-50,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**129.768.722.963**	**97.944.950.000**	**87.148.118.000**	**75.120.081.000**	**128.143.151.000**	**56.677.166.000**	**4,76**

Sumber: Hasil Analisis 2025

Berdasarkan data proyeksi pembiayaan daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 hingga 2030, terlihat dinamika yang cukup signifikan, khususnya pada komponen penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 5,58 persen per tahun. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh tren menurun pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yang tercatat mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 8,76 persen. Meski demikian, pada tahun 2029 terdapat penerimaan dari pencairan dana cadangan sebesar Rp60 miliar, yang menjadi satu-satunya tahun dalam periode proyeksi tersebut dengan sumber pembiayaan tambahan di luar SiLPA.

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan positif sebesar 18 persen per tahun. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pembentukan dana cadangan untuk persiapan pemilihan kepala daerah secara langsung sebesar Rp30 miliar yang dilakukan pada tahun 2027 dan 2028, di samping pengeluaran rutin untuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp20 miliar setiap tahunnya. Dengan demikian, meskipun terjadi penurunan pada sisi penerimaan, peningkatan pada pengeluaran turut memengaruhi perhitungan pembiayaan netto.

Pembiayaan netto menunjukkan kecenderungan menurun selama periode proyeksi, dari Rp97,94 miliar pada tahun 2026 menjadi hanya Rp56,67 miliar pada tahun 2030. Namun demikian, nilai pembiayaan netto tetap menunjukkan angka positif setiap tahunnya, yang berarti defisit anggaran masih dapat ditutupi melalui mekanisme pembiayaan daerah. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjaga keberlanjutan fiskal melalui pengelolaan pembiayaan yang relatif hati-hati, meskipun perlu diwaspadai tren penurunan SiLPA sebagai salah satu sumber utama pembiayaan.

Adapun kebijakan pembiayaan daerah ke depan diarahkan pada:

a. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

b. Pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran;
c. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
d. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;
e. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
f. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran mendatang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya kebijakan ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik.

2.5.2.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama tahun 2026-2030.

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026-2030 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 77 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	3.459.026.154.471	3.562.225.726.000	3.622.513.345.000	3.685.102.875.000	3.750.103.353.000	3.817.629.186.000
2	Penerimaan Pembiayaan	149.768.722.963	117.944.950.000	137.148.118.000	125.120.081.000	148.143.151.000	76.677.166.000
	Total Penerimaan	**3.608.794.877.434**	**3.680.170.676.000**	**3.759.661.463.000**	**3.810.222.956.000**	**3.898.246.504.000**	**3.894.306.352.000**
3	**KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**	**1.294.307.164.097**	**3.680.170.676.000**	**3.759.661.463.000**	**3.810.222.956.000**	**3.898.246.504.000**	**3.894.306.352.000**
4	**PRIORITAS I (70 %)**		**2.576.119.473.200**	**2.631.763.024.100**	**2.667.156.069.200**	**2.728.772.552.800**	**2.726.014.446.400**
	a. Belanja pegawai	868.496.469.825	903.583.727.000	921.655.402.000	940.088.510.000	958.890.280.000	978.068.086.000
	b. Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000	20.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
	c. Belanja wajib dan mengikat lainnya		1.652.535.746.200	1.660.107.622.100	1.677.067.559.200	1.749.882.272.800	1.727.946.360.400
	PRIORITAS II (20 %)		**736.034.135.200**	**751.932.292.600**	**762.044.591.200**	**779.649.300.800**	**778.861.270.400**
	PRIORITAS III (10 %)		**368.017.067.600**	**375.966.146.300**	**381.022.295.600**	**389.824.650.400**	**389.430.635.200**

Sumber: Hasil Analisis 2025

Berdasarkan data proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (KKKD) Provinsi Kalimantan Utara untuk periode 2026 hingga 2030, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam kapasitas fiskal yang dapat digunakan secara nyata oleh pemerintah daerah. Total penerimaan, yang merupakan akumulasi dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, mengalami tren pertumbuhan dari Rp3,680 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp3,894 triliun pada tahun 2030. Ini menunjukkan upaya konsisten dalam menjaga kestabilan fiskal dan memperkuat basis pendapatan daerah, meskipun penerimaan pembiayaan cenderung fluktuatif dan menurun pada tahun 2030.

Kapasitas riil keuangan daerah—yang pada tahun 2024 hanya sebesar Rp1,294 triliun—diproyeksikan meningkat drastis mulai tahun 2026, menyamai total penerimaan tiap tahun hingga 2030. Hal ini menunjukkan bahwa daerah memiliki potensi fiskal yang cukup untuk mengalokasikan belanja secara optimal sesuai dengan prioritas pembangunan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daearah dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, dengan fokus untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) rangka peningkatan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan;
2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Adapun Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur mancakup:
    a. Pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi
    b. Pemantapan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; Pemantapan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan

c. Pemantapan supremasi hukum dan stabilitas daerah sebagai beranda depan NKRI
d. Transformasi ekonomi daerah yang berkeadilan
e. Transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan; Pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi
f. Transformasi tata kelola yang kolaboratif dan inovatif
g. Pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI); Pengembangan Kawasan Industri Pelabuhan Indonesia (KIPI); Pengembangan pertanian; Pengembangan peternakan; Pengembangan perikanan dan kelautan; Pengembangan kepariwisataan; Pengembangan koperasi dan UMKM.
h. Pengembangan koperasi dan UMKM
i. Peningkatan infrastruktur jalan pada ruas jalan Malinau-Krayan; Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peso.

3. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa struktur kapasitas keuangan Provinsi Kalimantan Utara cukup sehat dan responsif terhadap kebutuhan belanja prioritas. Namun, pemerintah daerah tetap perlu menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran agar pertumbuhan fiskal yang positif ini dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan daerah.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dan isu strategis memiliki peran yang sangat krusial dalam proses perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah di Provinsi Kalimantan Utara. Pemetaan yang tepat dan menyeluruh terhadap berbagai persoalan pembangunan menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan yang terarah dan efektif di Provinsi Kalimantan Utara. Permasalahan pembangunan menggambarkan kondisi daerah atau masyarakat yang masih belum sesuai dengan harapan atau target yang diinginkan.

Sementara itu, isu strategis merujuk pada berbagai tantangan dan peluang yang harus menjadi perhatian utama dalam proses perencanaan, karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah pembangunan di masa mendatang.

2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap data dan informasi yang terdapat dalam gambaran umum kondisi daerah, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi atas kinerja pembangunan pada periode sebelumnya, diperoleh permasalahan utama sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan Kesenjangan Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/ Kota;

   Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara didorong oleh kegiatan perekonomian seluruh kabupaten/kota dengan kontribusi yang beragam dan cenderung timpang. Kondisi ini dapat dilihat dari rentang kontribusi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara dimana kontribusi terbesar disumbangkan oleh Kota Tarakan yakni mencapai 37,47 persen sedangkan kontribusi terkecil disumbangkan oleh Kabupaten Tana Tidung sebesar 6,2 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota juga cukup beragam dengan rata-rata tertinggi yaitu sebesar 5,44 persen per tahun di Kota Tarakan sedangkan yang terendah sebesar 3,10 persen per tahun di Kabupaten Tana Tidung.

   Pada aspek kesejahteraan, tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara juga menunjukkan adanya kesenjangan antara daerah yang satu terhadap daerah yang lain. Kemiskinan tertinggi tercatat di Kabupaten Bulungan yakni mencapai 8,76 persen pada tahun 2024, sedangkan yang terendah tercatat di Kabupaten Tana Tidung sebesar 4,47 persen. Kondisi serupa juga ditunjukkan oleh capaian indikator PDRB per kapita di mana Kabupaten Tana Tidung tercatat mencapai 330,14 juta rupiah sedangkan Kabupaten Bulungan sebesar 160,7 juta rupiah. Kesenjangan capaian pembangunan di antara daerah tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pemerataan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Apabila persoalan ini dibiarkan tanpa adanya dukungan intervensi yang tepat, maka kesenjangan wilayah dan

kesejahteraan antar penduduk di Provinsi Kalimantan Utara dikhawatirkan akan semakin besar. Pemerataan akses infrastruktur perekonomian dan infrastruktur dasar menjadi hal yang utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Jangkauan dan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Masih Perlu Dioptimalkan;

   Pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, jangkauan dan mutu layanan dasar masih belum sepenuhnya merata, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Keterbatasan infrastruktur, distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang belum merata, serta hambatan geografis menjadi faktor yang mempengaruhi aksesibilitas dan kualitas layanan. Dalam aspek pendidikan, kondisi tersebut menyebabkan angka partisipasi sekolah menjadi belum optimal. Masih ditemukannya anak putus sekolah dan buta aksara. Disisi lain distribusi dan kompetensi guru, serta sarana dan prasarana pendidikan masih perlu ditingkatkan.

   Dalam aspek kesehatan, kualitas layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Pada kesehatan ibu dan anak, masih ditemukannya kematian pada bayi, balita, neonatal, dan ibu. Kondisi tersebut disebabkan minimnya kunjungan ibu hamil, kunjungan bayi, serta cakupan imunisasi dasar. Dalam hal penyakit menular dan tidak menular, masih ditemukan beberapa kasus, sehingga upaya pengendalian dan pengobatan masih perlu ditingkatkan. Disisi lain distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta sarana prasarana kesehatan yang berkualitas masih belum merata pada semua wilayah. Dengan demikian, jangkauan dan mutu layanan dasar kesehatan dan pendidikan masih perlu dioptimalkan.

3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Belum Optimal;

   Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih perlu untuk ditingkatkan di Provinsi Kalimantan Utara. Kondisi tersebut diantaranya

ditunjukkan dengan capaian indeks kualitas lingkungan hidup yang memiliki tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut lagi, apabila ditinjau dari sisi komponen pembentuknya, indeks kualitas air dan indeks kualitas udara menjadi penyumbang menurunnya nilai capaian dari indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjukkan dengan penurunan nilai atas kedua komponen tersebut.

Apabila ditinjau dari sisi pengelolaan sampah di Provinsi Kalimantan Utara, juga menunjukkan masih perlu ditingkatkannya intervensi terhadap aspek ini. Pengelolaan secara terintegrasi dan berbasis hulu-hilir (dari masing-masing rumah tangga hingga ke tempat pembuangan akhir) menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan pengoptimalannya, dalam mereduksi timbulan sampah. Melalui pola pengelolaan sampah yang demikian, seringkali dinilai cukup efektif dan efisien dalam mengurai permasalahan persampahan.

Permasalahan lain, berbagai wilayah termasuk di Provinsi Kalimantan Utara juga dihadapkan pada permasalahan global berupa perubahan iklim global yang dapat memberikan dampak ikutan dalam berbagai lini pembangunan, terlebih lagi Provinsi Kalimantan Utara memiliki wilayah pesisir, yang seringkali dapat merasakan dampaknya secara signifikan. Merespon atas fenomena tersebut, maka juga perlu untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan yang tepat terkait pola adaptasi dan mitigasinya. Lebih lanjut, adanya fenomena iklim global yang semakin dinamis tersebut, juga berpeluang atas kemunculan berbagai potensi kebencanaan. Artinya, antara pengelolaan lingkungan terhadap intensitas dan frekuensi kebencanaan suatu wilayah seringkali memiliki keterkaitan. Dengan demikian, secara komprehensif juga perlu untuk dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang mendukung upaya penanggulangan bencana daerah, dengan tujuan dapat meningkatkan ketangguhan daerah dalam merespon bencana yang berpotensi timbul.

4. Belum Meratanya Infrastruktur Dasar dan Penunjang Perekonomian;

Infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian yang belum merata di Provinsi Kalimantan Utara masih menjadi permasalahan pembangunan daerah, terutama di kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Kondisi ini terlihat dari belum meratanya sarana dan prasarana dasar permukiman, belum optimalnya konektivitas wilayah dan akses transportasi, dan akses layanan internet yang belum menjangkau seluruh wilayah. Pada wilayah sekitar perkotaan juga masih terdapat infrastruktur berupa jalan dan drainase dengan kondisi yang belum memadai.

Belum meratanya sarana dan prasarana dasar permukiman ditunjukkan dengan belum meratanya akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan air minum layak, masih adanya rumah tidak layak huni, dan belum optimalnya penataan kawasan kumuh. Selanjutnya, belum optimalnya konektivitas wilayah ditunjukkan dengan belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi, dan masih rendahnya ketersediaan dan kualitas jalan daerah, sedangkan belum meratanya jaringan telekomunikasi ditunjukkan dengan masih adanya *blankspot*. Secara umum, belum optimalnya layanan infrastruktur dasar terutama infrastruktur konektivitas mengakibatkan tingginya harga logistik dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

5. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan.

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan terutama terjadi pada aspek akuntabilitas daerah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan nilai SAKIP daerah pada tahun 2024. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian ke depan karena dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Aspek akuntabiltas yang perlu ditingkatkan, yaitu aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi.

Selain akuntabilitas kinerja, perlu juga memperhatikan kualitas pelayanan publik terutama dalam memastikan akses pelayanan publik yang mudah dan terjangkau terutama bagi wilayah-wilayah yang sulit secara geografis melalui peningkatan infrastruktur TIK. Selain itu,

penguatan pelayanan publik yang inklusif untuk kelompok rentan juga perlu dilakukan karena masih belum optimal. Penguatan sistem pemerintahan yang berintegritas, partisipatif, dan inovatif juga harus menjadi perhatian ke depan.

2.6.2 Isu Strategis Daerah

Identifikasi isu strategis memainkan peran penting yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan serta tantangan yang dihadapi pada suatu daerah. Proses penyusunan isu strategis daerah dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara isu-isu strategis di tingkat global, nasional, dan regional. Selain itu, perumusan isu strategis juga mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta memperhitungkan konteks lokal, potensi daerah, dan berbagai tantangan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Utara. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan arah pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Penjabaran isu-isu strategis tersebut disajikan berikut ini.

Tabel 2. 78 Isu Strategis Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
▪ Potensi bonus demografi ▪ Sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya perikanan dan kelautan ▪ Keberadaan ekosistem mangrove dan gambut ▪ Potensi parawisata alam dan budaya ▪ Potensi pengembangan EBT	▪ Kemiskinan dan kesenjangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/ kota	▪ Belum optimalnya penciptaan nilai tambah sektor sektor ekonomi basis/unggulan	▪ Konstelasi Perdagangan Global ▪ Tata Kelola Keuangan Global ▪ Pertumbuhan Kelas Menengah ▪ Geopolitik dan Geoekonomi	▪ Pergeseran struktur kelas masyarakat ▪ Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif ▪ Geopolitik dan geoekonomi	▪ Ketergantungan perekonomian daerah sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi dan diversifikasi industri ▪ Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, transmigrasi, dan perbatasan negara ▪ Kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan	▪ Produktivitas ekonomi daerah yang inklusif, bernilai tambah dan berkelanjutan ▪ Transformasi ekonomi hijau, ekonomi biru dan penyediaan energi baru terbarukan
	▪ Jangkauan dan mutu pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masih perlu dioptimalkan	▪ Peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar	▪ Demografi Global	▪ Rendahnya kualitas sumber daya manusia	▪ Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan	▪ SDM berkualitas dan kohesivitas masyarakat
	▪ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal	▪ Belum optimalnya implementasi kebijakan dan aturan berbasis ekologis	▪ Perubahan Iklim ▪ Persaingan Sumber Daya Alam	▪ Krisis lingkungan	▪ Tingginya konservasi hutan menjadi lahan tidak produktif	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	▪ Belum meratanya infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian	▪ Peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar ▪ Pengelolaan kawasan perbatasan yang belum optimal	▪ Perkembangan Teknologi ▪ Urbanisasi Dunia	▪ Rendahnya produktivitas	▪ Minimnya ketersediaan sarana dan prasaran layanan dasar yang memenuhi SPM	▪ Konektivitas wilayah dan aksesibilitas layanan dasar yang merata dan berkeadilan
	▪ Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	▪ Potensi segregasi dan konflik sosial		▪ Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah		▪ Tata kelola pemerintahan dan tata kelola perbatasan yang berkualitas

Sumber: Olah Data, 2025

1. Produktivitas Ekonomi Daerah yang Inklusif, Bernilai Tambah dan Berkelanjutan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya yang berlimpah dan telah dikenal dengan berbagai produk unggulan daerah. Potensi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara meliputi sumber daya perikanan dan kelautan, ekosistem mangrove dan gambut, juga kekayaan alam lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan energi baru terbarukan. Meskipun kekayaan alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara berlimpah, pemanfaatan sumber daya alam tersebut masih terbatas pada sektor primer dengan nilai tambah yang rendah. Kondisi tersebut dapat dilihat dari tingginya kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Utara yang mencapai 43,51 persen pada tahun 2024, dimana 28,72 persen disumbang oleh sektor pertambangan dan penggalian.

Besarnya potensi alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaannya. Perekonomian daerah yang bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian yang identik dengan sumber daya alam tidak terbarukan membawa persoalan terkait keberlanjutan dan resiliensi perekonomian daerah ke depan. Oleh karena itu, perekonomian daerah perlu diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam terbarukan yang dikelola dengan prinsip berkelanjutan. Peningkatan nilai tambah produk melalui proses pengolahan perlu didorong dengan berbagai kebijakan ekonomi yang mendukung masuk dan berkembangnya industri di berbagai bidang, baik industri kecil dan menengah maupun industri besar.

Pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara juga wajib menjamin inklusivitas bagi seluruh kelompok masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam agenda pembangunan melalui aktivitas produksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi masih perlu diperkuat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan IKM perlu didorong lebih kuat mengingat pertumbuhan UMKM selama periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Berdasarkan potensi dan masalah yang teridentifikasi maka isu produktivitas ekonomi daerah

yang inklusif, bernilai tambah, dan berkelanjutan perlu untuk diangkat sebagai isu strategis daerah.

2. Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru dan Penyediaan Energi Baru Terbarukan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan transformasi ekonomi hijau yang berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Utara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, provinsi ini dapat mendorong sektor-sektor ramah lingkungan, seperti pertanian, perikanan, kehutanan lestari, pariwisata berbasis alam dan industri hijau. Upaya ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap industri ekstraktif yang berisiko merusak lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Pengembangan ekonomi biru juga menjadi fokus strategis bagi Provinsi Kalimantan Utara. Letak Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan laut memberikan peluang besar dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pengelolaan yang tepat dan penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut.

Penyediaan energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan bagian penting dari transformasi ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Potensi energi surya, air, dan bioenergi di wilayah ini sangat menjanjikan untuk dikembangkan sebagai alternatif energi yang bersih dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur EBT tidak hanya menunjang kebutuhan energi lokal, tetapi juga membuka peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja hijau.

Integrasi antara pembangunan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pengembangan energi terbarukan di Provinsi Kalimantan Utara menjadi kesempatan besar bagi Provinsi Kalimantan Utara untuk menjadi model pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah daerah,

sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan ramah lingkungan.

3. SDM Berkualitas dan Kohesivitas Masyarakat

Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan Indonesia menghadapi tantangan pembangunan diantaranya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan penguatan kohesivitas masyarakat. Dalam peningkatan kualitas SDM, Provinsi Kalimantan Utara masih menghadapi beberapa permasalahan seperti belum meratanya akses dan kualitas pendidikan, kurangnya tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan yang memadai, kurangnya akses pelatihan vokasional, serta ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri lokal. Peningkatan SDM yang berkualitas menjadi hal mendesak mengingat kebutuhan tenaga kerja terampil disektor unggulan seperti industri, pertanian, dan pariwisata. Adapun strategi yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kedepan diantaranya peningkatan kualitas pendidikan dasar hingga menengah, pengembangan pusat pelatihan vokasional, serta peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah, industri, dan lembaga pendidikan untuk program magang dan penempatan kerja.

Pengembangan SDM yang berkualitas dilakukan sejalan dengan penguatan kohesivitas masyarakat. Kohesivitas masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial ditengah kemajemukan etnis, budaya, dan agama di Kalimantan Utara. Keargaman ini menjadi potensi sekaligus tantangan yang harus dijaga agar tidak menimbulkan gesekan/konflik sosial. Perlu upaya sistematis dalam membangun dialog antar komunitas, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu, pelaksanaan forum lintas budaya perlu dilakukan secara rutin. Pelibatan tokoh adat, pemuda, perempuan dan stakeholder lainnya dalam seluruh proses pembangunan, serta mendorong kegiatan sosial bersama seperti gotong royong dan festival budaya. Dengan demikian, peningkatan SDM yang berkualitas dan kohesivitas masyarakat memerlukan sinergi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat terwujud pembangunan yang lebih inklusif, harmonis, dan berdaya saing.

Dengan demikian, peningkatan SDM yang berkualitas dan kohesivitas masyarakat memerlukan sinergi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat terwujud pembangunan yang lebih inklusif, harmonis, dan berdaya saing. Selain itu, untuk menjawab tantangan strategis terkait rendahnya kualitas SDM, akses pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas, serta ketimpangan pelayanan antar wilayah, maka pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama. Upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar, menengah, dan vokasional harus terus diperkuat terutama di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan. Hal ini meliputi perluasan jangkauan layanan, penyediaan tenaga pendidik yang berkualitas, serta penguatan sarana dan prasarana pendidikan.

Demikian pula dalam sektor kesehatan, perlu dilakukan percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya pelayanan ibu dan anak, imunisasi, gizi, dan penanganan penyakit menular. Penguatan sistem layanan kesehatan dasar, penyediaan tenaga medis yang merata, serta fasilitas kesehatan yang memadai di seluruh wilayah akan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan pendidikan yang lebih merata dan layanan kesehatan yang lebih inklusif, Kalimantan Utara dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

4. Konektivitas Wilayah dan Aksesibilitas Layanan Dasar yang Merata dan Berkeadilan

Upaya mewujudkan konektivitas wilayah dan aksesibilitas layanan dasar yang merata dan berkeadilan menjadi isu strategis bagi Provinsi Kalimantan Utara yang perlu untuk segera direspon. Beberapa wilayah di Kalimantan Utara terutama pedalaman dan perbatasan seperti Krayan, belum terhubung dengan jaringan jalan nasional dan provinsi secara memadai. Ruas jalan antar kabupaten dan penghubung ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sering kali dalam kondisi rusak atau belum terbangun. Proporsi jalan kewenangan provinsi dengan permukaan tanah mencapai lebih dari 70 persen selama 2020-2024. Di sisi lain,,

penambahan jalan dengan permukaan aspal dan beton juga berjalan sangat lambat.

Minimnya jalan dan jembatan penghubung di atas sungai besar mengakibatkan transportasi air menjadi alternatif bagi masyarakat. Akses ke daerah-daerah seperti Krayan, Lumbis, dan sebagian wilayah Malinau hanya dapat ditempuh melalui jalur udara atau sungai. Terbatasnya prasarana transportasi yang memadai dan integrasi antar sarana transportasi darat, laut, dan udara masih belum berjalan optimal menjadikan biaya logistik menjadi mahal. Di masa mendatang pengembangan transportasi juga perlu untuk memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, ketahanan terhadap bencana, dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi berbasis digital. Lebih dari itu, akses internet dan jaringan seluler masih terbatas memperparah keterisolasian dan menghambat pendidikan, ekonomi digital, dan pelayanan publik.

Peningkatan konektivitas wilayah dan aksesibilitas layanan dasar dan merata menjadi agenda penting dalam pembangunan selama lima tahun ke depan. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperkuat integrasi wilayah, serta memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan agar dapat mengakses pelayanan publik secara setara. Pemerataan pembangunan infrastruktur akan tetap diarahkan secara kontekstual dan adaptif, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan secara berkeadilan dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan ketersediaan aset (stok infrastruktur) yang terbangun untuk meningkatkan akses; menurunkan biaya produksi, biaya transportasi dan biaya logistik; menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas; serta mengembangkan pariwisata. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak yang baik ke berbagai sektor pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.

5. Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Perbatasan yang Berkualitas

Kalimantan Utara sebagai salah satu provinsi baru di Indonesia yang dimekarkan pada tahun 2013 ini memiliki tantangan sekaligus peluang besar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Kualitas birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan transparan serta inovatif menjadi fondasi utama untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi perlu terus didorong melalui peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi layanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan terjangkau.

Kalimantan Utara secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia. Tata kelola perbatasan menjadi isu strategis yang harus dikelola secara serius, karena menyangkut aspek kedaulatan, keamanan, serta potensi ekonomi lintas negara. Penguatan infrastruktur perbatasan, peningkatan koordinasi antar-instansi, dan pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru menjadi prioritas penting. Dengan pengelolaan yang tepat, wilayah perbatasan dapat menjadi gerbang kemajuan, bukan zona terluar yang terabaikan.

Kualitas tata kelola pemerintahan dan perbatasan yang baik juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berbasis data, serta penguatan peran desa dalam pembangunan wilayah perbatasan, akan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi daerah. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, Kalimantan Utara dapat memanfaatkan posisinya secara strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab 3 memuat kondisi umum yang akan diwujudkan selama periode pembangunan jangka menengah dan agenda-agenda pembangunan dalam rangka mencapai kondisi yang diharapkan. Visi merupakan kondisi yang akan dicapai, sedangkan agenda pembangunan untuk mencapai visi dirumuskan dalam bentuk misi, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan. Rumusan visi, misi, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

3.1 Visi dan Misi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur bertransformasi menjadi visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029. Perumusan visi juga mempertimbangkan keterkaitannya dengan visi RPJPD dan visi RPJMN. Perlunya keterkaitan tersebut dalam rangka membangun keselarasan antar perencanaan berjangka panjang dan menengah, serta keselarasan antara perencanaan pusat dan daerah. Visi pembangunan jangka menengah akan mengarahkan berbagai agenda pembangunan agar mencapai kondisi yang telah ditetapkan selama lima tahun mendatang. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 yaitu:

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

- ***Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan***

Visi RPJMD tersebut selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah. Visi tersebut mempertegas posisi pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai bagian dari periode pertama pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 yang memasuki pentahapan pembangunan berupa memperkokoh fondasi transformasi. Visi RPJMD tidak kalah penting juga memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi RPJMN, yaitu "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045**". Penjelasan kata kunci/kondisi di dalam visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara yaitu:

- **Fondasi Transformasi yang Kokoh:** merupakan arah kebijakan periode pertama dalam rangkaian periode pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045. Perwujudan fondasi transformasi dicapai melalui pelayanan dasar yang merata dan berkualitas, pengembangan ekonomi yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta ditopang tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan stabilitas wilayah yang terjaga.
- **Beranda Depan NKRI:** merupakan letak geografis Provinsi Kalimantan Utara yang berada di wilayah terdepan NKRI dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia maupun kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Letak geografis ini sekaligus menjadi potensi dan tantangan geopolitik dan geoekonomi yang perlu dikelola dengan baik melalui tata kelola perbatasan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- **Maju:** kondisi pembangunan yang diharapkan tercapai yaitu kemajuan di segala bidang. Kemajuan memiliki arti bahwa kinerja pembangunan semakin baik atau progresif dari tahun ke tahun, sehingga masyarakat semakin menikmati manfaat nyata dari pembangunan. Maju juga diarahkan untuk tercapainya daerah yang berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil.
- **Makmur:** kondisi yang tercipta melalui kinerja pembangunan yang semakin baik sehingga mencapai kondisi masyarakat yang tercukupi kebutuhan ekonomi dan sosial-budayanya. Makmur menandakan masyarakat yang semakin sejahtera atau lepas dari garis kemiskinan, serta tidak kalah penting masyarakat yang bahagia lahir dan batin.

Kemakmuran merupakan hasil kolaborasi seluruh bidang pembangunan, yaitu ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat, pembangunan SDM dan sosial agar menghasilkan SDM yang unggul serta terpenuhi jaminan dan perlindungan sosialnya, serta tata kelola yang baik untuk menopang efektivitas kinerja berbagai bidang pembangunan untuk menuju kemakmuran.

- **Berkelanjutan:** kondisi yang tercipta sebagai bentuk komitmen Provinsi Kalimantan Utara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berkelanjutan merupakan kondisi dari keselarasan pembangunan antara orientasi ekonomi, sosial dan lingkungan yang ditopang dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil pembangunan tidak hanya untuk generasi saat ini, sekaligus untuk generasi masa depan. Berbagai agenda pembangunan untuk mendukung pencapaian kondisi berkelanjutan, antara lain melalui pengembangan ekonomi hijau.

Perwujudan visi RPJMD dicapai melalui pelaksanaan misi pembangunan. Misi merupakan rumusan umum tentang upaya mencapai visi. Misi RPJMD juga transformasi dari misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang secara substansi selaras dengan misi pembangunan jangka panjang daerah. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- **Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan**

  Misi transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan bertujuan untuk membangun masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera dalam mencapai kemajuan dan kemakmuran yang berkelanjutan. Transformasi sosial merupakan bagian dari pembangunan beranda depan negara dengan pendekatan *human security* dan *soft border. Human security* berfokus pada upaya kesejahteraan dan keselamatan manusia sebagai individu, sedangkan *soft border* berfokus pada pengelolaan perbatasan secara flexible untuk mempermudah hubungan lintas batas tanpa mengorbankan keamanan.

Prinsip inklusif dan berkeadilan menjadi dasar dalam penyelenggaraan transformasi sosial. Prinsip tersebut merujuk pada perlakuan yang adil dan setara pada semua kelompok masyarakat termasuk perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal serta seluruh wilayah yang ada di Provinsi Kalimantan Utara untuk mendapatkan akses terhadap peluang, sumber daya, dan pengambilan keputusan. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan besar transformasi sosial yakni mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat.

Secara operasional, upaya transformasi sosial diwujudkan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial yang adaptif. Upaya peningkatan layanan pendidikan diantaranya peningkatan partisipasi pendidikan, peningkatan kualitas satuan pendidikan, peningkatan jumlah dan kompetensi pendidik, serta pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas. Upaya peningkatan layanan kesehatan diantaranya perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pemenuhan tenaga kesehatan, serta peningkatan fasilitas kesehatan yang bermutu. Sedangkan upaya perlindungan sosial adaptif diantaranya pengentasan kemiskinan terutama pada daerah 3TP, perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, disabilitas, dan sebagainya, serta peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

- **Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan**

Misi transformasi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah serta posisi geografis yang strategis. Dalam proses ini, indikator laju pertumbuhan ekonomi menjadi acuan utama dalam mengukur keberhasilan transformasi, dengan tetap menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh

karena itu, pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru perlu diutamakan demi menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya alam.

Langkah nyata yang dapat dilakukan meliputi penguatan sektor-sektor unggulan seperti pertanian berkelanjutan, perikanan tangkap dan budidaya ramah lingkungan, serta pariwisata alam berbasis komunitas. Selain itu, pengembangan kawasan industri berbasis energi terbarukan seperti tenaga air dan surya harus didorong sebagai bagian dari implementasi ekonomi hijau. Di wilayah pesisir dan kepulauan, konsep ekonomi biru dapat diterapkan melalui pengelolaan laut secara berkelanjutan, peningkatan produktivitas sektor kelautan, dan pelestarian ekosistem laut. Transformasi ini harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga untuk menciptakan struktur ekonomi yang adil dan tidak eksploitatif.

Pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara harus menekankan pentingnya pemerataan pendapatan sebagai indikator keberhasilan sosial. Ketimpangan ekonomi antara daerah pedalaman dan perkotaan harus ditekan melalui pemerataan infrastruktur, akses pendidikan, serta pelibatan aktif masyarakat lokal dalam rantai nilai ekonomi. Pemerintah daerah perlu menggandeng sektor swasta yang berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, sekaligus menyediakan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Dengan cara ini, transformasi ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan angka, tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Partisipasi masyarakat menjadi pilar penting dalam memastikan transformasi ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Pelibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan ekonomi akan memperkuat akuntabilitas dan mendorong rasa kepemilikan terhadap proses pembangunan. Dengan kolaborasi antarsektor dan dukungan pada prinsip pembangunan hijau, biru, serta

keadilan sosial, Provinsi Kalimantan Utara berpeluang besar menjadi contoh sukses dalam mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan, tangguh, dan berkeadilan di Indonesia.

- **Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif**

  Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi tata kelola yang dimaksud mencakup perubahan mendasar dalam cara pemerintah daerah bekerja, mulai dari penguatan sistem birokrasi yang transparan hingga penerapan prinsip *good governance* dalam setiap lini pelayanan publik. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mampu menjadi fasilitator pembangunan yang profesional, bersih, dan akuntabel.

  Kolaborasi menjadi kunci utama dalam menjalankan transformasi ini. Pemerintah daerah tidak lagi bekerja secara eksklusif, melainkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, maupun lembaga internasional. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk membangun sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak luas. Dalam konteks ini, partisipasi publik juga akan diperkuat agar pembangunan benar-benar menjawab aspirasi masyarakat.

  Inovasi menjadi elemen strategis yang melengkapi transformasi tata kelola tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong pemanfaatan teknologi digital dan sistem kerja baru untuk meningkatkan kualitas layanan publik mengingat kondisi geografi yang cukup sulit diakses. Inovasi ini juga mencakup cara-cara baru dalam menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Dengan mengedepankan kolaborasi dan inovasi, Kalimantan Utara dalam tata kelola pemerintahan diharapkan mampu mewujudkan visi jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara sebagai beranda depan NKRI yang

maju, makmur dan berkelanjutan. Selain itu, juga sejalan dengan arah pembangunan nasional.

- **Misi 4 Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI**

  Misi memantapkan supremasi hukum dan stabilitas daerah sebagai beranda depan NKRI merupakan salah satu kunci dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang berada di kawasan perbatasan negara. Misi ini berfokus pada memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi di tingkat regional Asia Tenggara dan membangun kekuatan pertahanan di kawasan perbatasan. Misi ini menjadi landasan transformasi untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Landasan transformasi tersebut dibentuk melalui perwujudan supremasi hukum, stabilitas ekonomi daerah, kohesivitas sosial dan keamanan, serta demokrasi lokal yang semakin substantif untuk mengawal pembangunan agar berorientasi pada kemakmuran. Landasan tersebut sekaligus sebagai perwujudan beranda depan NKRI yang memiliki stabilitas wilayah terjaga untuk menopang ketahanan nasional.

  Provinsi Kalimantan Utara sebagai beranda depan NKRI memberikan dukungan dan fasilitasi tata kelola perbatasan berbasis *soft border* yang kolaboratif. Hal tersebut mendorong perlunya peningkatan kemitraan strategis di dalam dan luar negeri, stabilitas ekonomi daerah, serta peningkatan stabilitas wilayah dan demokrasi lokal berbasis supremasi hukum. Kolaborasi antarpihak dan pemangku kepentingan pada tingkat nasional dan provinsi diperlukan untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagai beranda depan NKRI.

- **Misi 5 Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**

  Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu provinsi di perbatasan utara Indonesia memiliki peran vital dalam menjaga integrasi nasional serta mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan timur

Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi menjadi pilar penting untuk memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berakar pada kearifan lokal.

Misi memantapkan ketahanan sosial budaya diarahkan pada penguatan identitas lokal dan harmoni sosial di tengah masyarakat yang multietnis dan multikultural. Pelestarian adat istiadat, bahasa daerah, dan nilai-nilai kearifan lokal menjadi fondasi dalam memperkuat karakter daerah dan memperkuat jati diri masyarakat Kalimantan Utara. Pemerintah daerah dapat mendorong revitalisasi budaya lokal melalui pendidikan, pengembangan komunitas budaya, serta dukungan terhadap lembaga adat dan kesenian tradisional. Pada sisi lain, pembangunan sosial juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kohesi sosial melalui pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk kelompok rentan. Hal ini dilandasi oleh prinsip partisipatif dan kolaboratif untuk mendorong pembangunan yang menyatu dengan kebutuhan dan potensi sosial masyarakat setempat.

Ketahanan ekologi menjadi elemen krusial mengingat Provinsi Kalimantan Utara merupakan wilayah dengan kekayaan biodiversitas tinggi serta hutan tropis yang luas. Oleh karena itu, pembangunan ke depan menekankan pada perlindungan kawasan hutan, konservasi lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Upaya penguatan ketahanan ekologi difokuskan pada pembangunan berbasis ekoregion, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengendalian kerusakan lingkungan, serta penguatan tata kelola sumber daya alam yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan potensi ekonomi berbasis ekowisata dan kehutanan sosial juga akan ditingkatkan untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi di Kalimantan Utara harus diletakkan dalam kerangka pembangunan yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis wilayah. Sinergi antar sektor dan antar pelaku pembangunan

menjadi kunci, di mana perencanaan pembangunan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekologis secara seimbang. Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan, informasi, dan teknologi yang relevan juga menjadi prasyarat agar transformasi pembangunan berjalan adil dan berkelanjutan.

- **Misi 6 Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan**

  Misi memantapkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan menjadi fondasi yang sangat penting dalam mendorong terwujudnya transformasi sosial, ekonomi maupun tata kelola. Dalam konteks ini, semangat pembangunan wilayah harus dilaksanakan secara inklusif dan berkualitas di seluruh penjuru Provinsi Kalimantan Utara, tanpa terkecuali meliputi wilayah daratan, daerah perbatasan antarnegara dan antardaerah, serta kawasan kepulauan dan ruang laut yang selama ini cenderung terpinggirkan.

  Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah menjadi faktor pengungkit yang sangat krusial dalam mendukung pembangunan wilayah yang semakin merata dan berkeadilan. Konektivitas yang baik, baik dalam bentuk jaringan transportasi darat, laut, maupun udara, menjadi prasyarat penting untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas barang dan jasa, serta mempercepat arus informasi dan inovasi. Aksesibilitas yang meningkat memungkinkan wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan, seperti daerah perbatasan, kawasan pedalaman, dan wilayah kepulauan, untuk terhubung secara lebih efektif dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan layanan publik.

  Pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan juga diarahkan untuk memperkuat keterkaitan dan sinergi antara kawasan pedesaan dan perkotaan, sehingga tercipta integrasi wilayah yang saling mendukung dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berfokus pada pusat-pusat pertumbuhan saja, melainkan juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

- **Misi 7 Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan**

  Dalam implementasinya, pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan juga perlu disertai dengan pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi penopang keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Karena, ketersediaan sarana prasarana yang memadai menjadi prasyarat dasar, dapat dikatakan pembangunan benar-benar merata dan berkeadilan. Selain itu, misi ini juga menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan implementasi dari transformasi pembangunan.

  Pembangunan sarana dan prasarana yang hanya berorientasi pada kuantitas tanpa memperhatikan kualitas akan rentan terhadap kerusakan, ketidakefisienan, bahkan membebani anggaran daerah untuk pemeliharaan di masa mendatang. Oleh karena itu, upaya memantapkan sarana dan prasarana harus diarahkan pada pencapaian standar mutu yang tinggi, maupun fungsionalitasnya bagi masyarakat luas. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan juga harus berorientasi pada kelestarian lingkungan, menjadi semakin relevan. Kondisi tersebut dengan mempertimbangkan tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang semakin mengancam. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, maka pembangunan yang dilakukan diharapkan akan mampu memberikan manfaat jangka panjang, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik tanpa mengorbankan sumber daya generasi mendatang.

- **Misi 8 Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas**

  Misi ini memastikan bahwa pembangunan Kalimantan Utara berlangsung secara berkelanjutan, terpadu, dan selaras dengan visi misi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dengan menjamin adanya kesinambungan berbagai program pembangunan lintas sektor yang tidak hanya menekankan pencapaian internal semata, tetapi juga berdampak

terhadap pembangunan nasional. Misi ini mendorong integrasi antara pembangunan provinsi dengan Pembangunan di tingkat kabupaten/kota dan nasional yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan hidup, agar Kalimantan Utara dapat menjadi provinsi yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur dan berkelanjutan.

Misi RPJMD sebagai agenda besar pembangunan harus mendukung pelaksanaan misi RPJMN. Misi RPJMN yang disebut sebagai Asta Cita sekaligus merupakan prioritas nasional pembangunan jangka menengah. Keterkaitan antara misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dengan Asta Cita sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Keterkaitan Asta Cita RPJMN dan Misi RPJMD

Asta Cita (Misi RPJMN Tahun 2025-2029)	Misi RPJMD Tahun 2025-2029
Asta Cita 1: Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	**Misi 4** Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI
Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.	**Misi 4** Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI **Misi 2** Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan
Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	**Misi 2** Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan **Misi 7** Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.	**Misi 1** Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan
Asta Cita 5: Melanjutakan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	**Misi 2** Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan

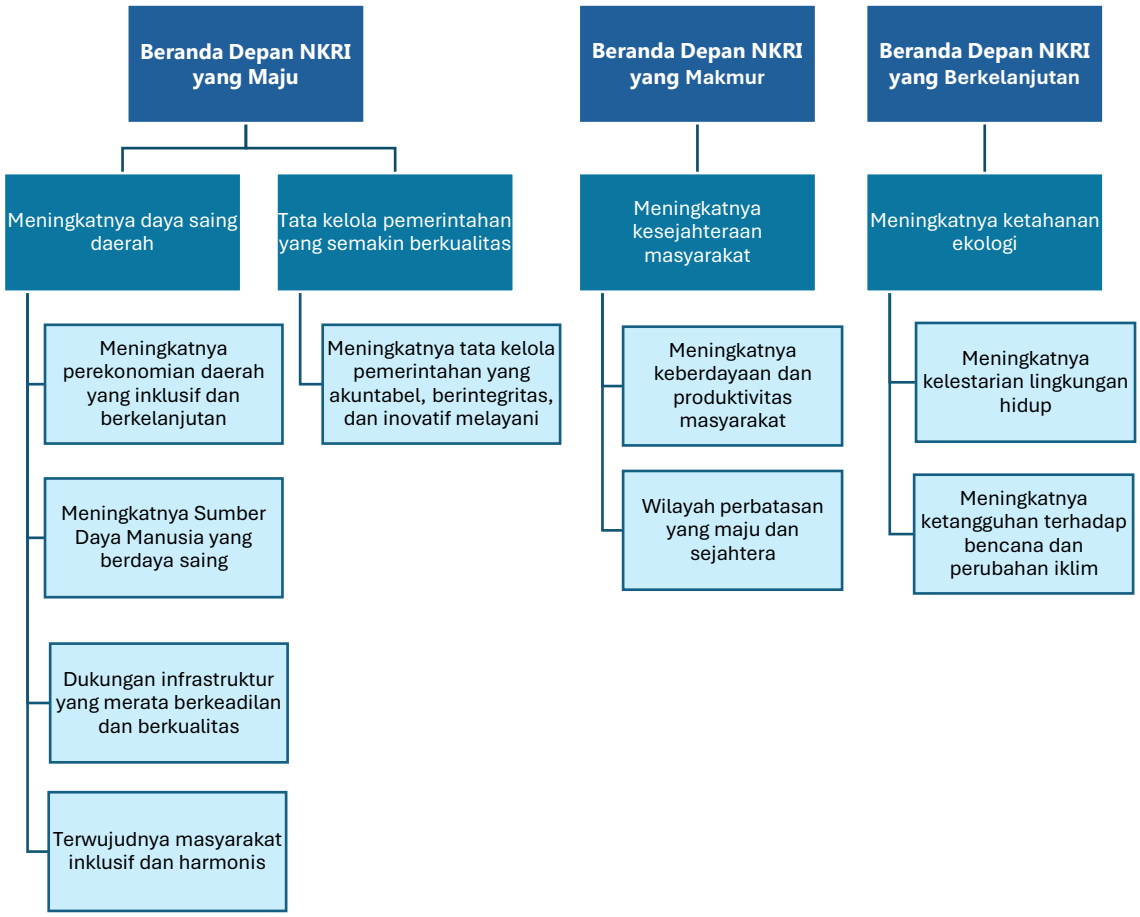
Asta Cita (Misi RPJMN Tahun 2025-2029)	Misi RPJMD Tahun 2025-2029
Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	**Misi 2** Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan **Misi 6** Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.	**Misi 3** Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif **Misi 4** Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI **Misi 8** Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas
Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	**Misi 5** Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Keterkaitan antara Asta Cita atau Prioritas Nasional di dalam RPJMN dengan misi RPJMD merupakan langkah penting untuk membangun keselarasan agenda pembangunan antara pusat dan daerah dalam periode pembangunan jangka menengah. Keselarasan tersebut untuk kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan, strategi dan program pembangunan yang juga merujuk pada arah kebijakan RPJMN dan mendukung kegiatan prioritas utama RPJMN.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Visi sebagai rumusan umum yang akan dicapai memerlukan berbagai prakondisi untuk mencapainya. Kondisi sebagai prasyarat untuk mencapai visi dirumuskan dalam bentuk tujuan dan sasaran. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama lima tahun, sedangkan sasaran merupakan rangkaian kinerja dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang diturunkan dari tujuan. Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD bersifat *ultimate*

outcome, makro, lintas sektor dan memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan pencapaian kondisi tujuan dan sasaran. Indikator kinerja tujuan dan sasaran akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah. Tujuan dan sasaran dirumuskan menggunakan mekanisme *cascading* berbasis kata kunci visi dan menggunakan rumusan misi sebagai acuan substantif untuk merumuskan kalimat tujuan dan sasaran.



Gambar 3. 1 *Cascading* Kinerja Visi, Tujuan dan Sasaran

Sumber: Analisis, 2025

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan **Misi 1** Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan **Misi 2** Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan	Meningkatnya daya saing daerah		Indeks Daya Saing Daerah	3,26	3,34	3,38	3,42	3,46	3,57	3,63
			Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,57	4,80	5,0	5,90	6,45	7,00	7,55
		Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks Ekonomi Hijau	N/A	70,47	71,78	73,79	75,93	77,14	79,36
			Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;	14,78	14,99	15,20	15,42	15,63	15,86	16,08
			Indeks Ekonomi Biru	N/A	25,17	26,40	27,63	28,86	30,09	31,32
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Indeks Modal Manusia	N/A	0,56	0,57	0,58	0,58	0,59	0,60
		Dukungan infrastruktur yang merata berkeadilan dan berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah	83,00*	86,27	88,61	90,91	93,15	95,33	97,46
		Terwujudnya masyarakat inklusif dan harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,94	79,24 - 79,27	79,62 - 79,65	80,01 - 80,04	80,39 - 80,53	80,77 - 80,91	81,15 - 81,29
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,7	57,87 - 57,97	58,40 - 58,50	58,93 - 59,03	59,46 - 59,75	59,99 - 60,28	60,52 - 60,81
			Indeks Pembangunan Gender	88,77	89,38	89,91	90,44	90,97	91,51	92,04
	Tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	82,87	83,00	83,40	83,80	84,20	84,60	85,00

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif **Misi 4** Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI **Misi 5** Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi **Misi 6** Memantapkan Pembangunan Wilayah yang	yang semakin berkualitas	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melayani	Nilai SAKIP	71,05	72,52	72,64	72,77	72,89	73,02	73,14
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik*	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Indeks Pelayanan Publik	N/A	3,46	3,49	3,52	3,55	3,58	3,61
			Indeks inovasi Daerah	53,35	56,17	60,30	64,44	68,57	72,71	76,84
			Survei Penilaian Integritas KPK		*Ditarget kemudian*					
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Tingkat kemiskinan	6,32	4,33 – 5,07	4,11 – 5,00	3,78 – 4,20	3,39 – 3,77	2,33 – 3,33	2,17 – 2,90
			Indeks Gini	0,259	0,256	0,253	0,251	0,249	0,246	0,244
		Meningkatnya keberdayaan dan produktivitas masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,90	3,84	3,80	3,68	3,56	3,45	3,34
			Indeks Kesejahteraan Sosial		*Ditarget kemudian*					
		Wilayah perbatasan yang maju dan sejahtera	Persentase desa wilayah perbatasan yang berstatus maju dan mandiri		*Ditarget kemudian*					
			Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK		55,77	60,27	63,46	66,66	69,85	72,12

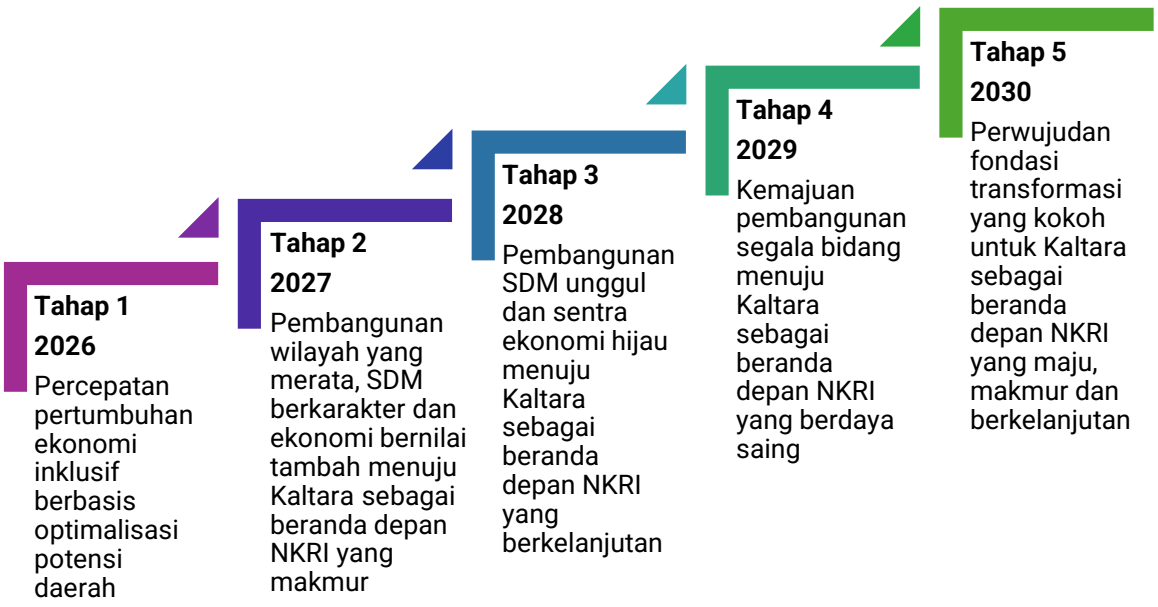
Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Merata dan Berkeadilan **Misi 7** Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan **Misi 8** Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas	Meningkatnya ketahanan ekologi	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,54	77,77	77,97	78,17	78,37	78,57	78,78
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	131,84	130,88	125,11	119,34	113,57	107,80	102,02

*Keterangan: *) Data tahun 2023*

Sumber: Analisis, 2025

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan kondisi dalam bentuk visi, tujuan dan sasaran membutuhkan berbagai agenda pembangunan untuk mencapainya. Agenda pembangunan merupakan rangkaian kerja yang dirumuskan berbasis misi yaitu dalam bentuk strategi dan arah kebijakan. Strategi merupakan pentahapan dan prioritas pembangunan setiap tahun selama lima tahun mendatang. Strategi sebagai pentahapan pembangunan dirumuskan dalam bentuk tema pembangunan tahunan yang selanjutnya dapat menjadi tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tema pembangunan setiap tahun Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Pentahapan Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara

Strategi juga terkait arah pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Arah pembangunan wilayah memiliki peran penting untuk memandu arah pembangunan kabupaten/kota agar terpadu dan kolaboratif dengan pembangunan provinsi. Strategi Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Strategi Provinsi Kalimantan Utara

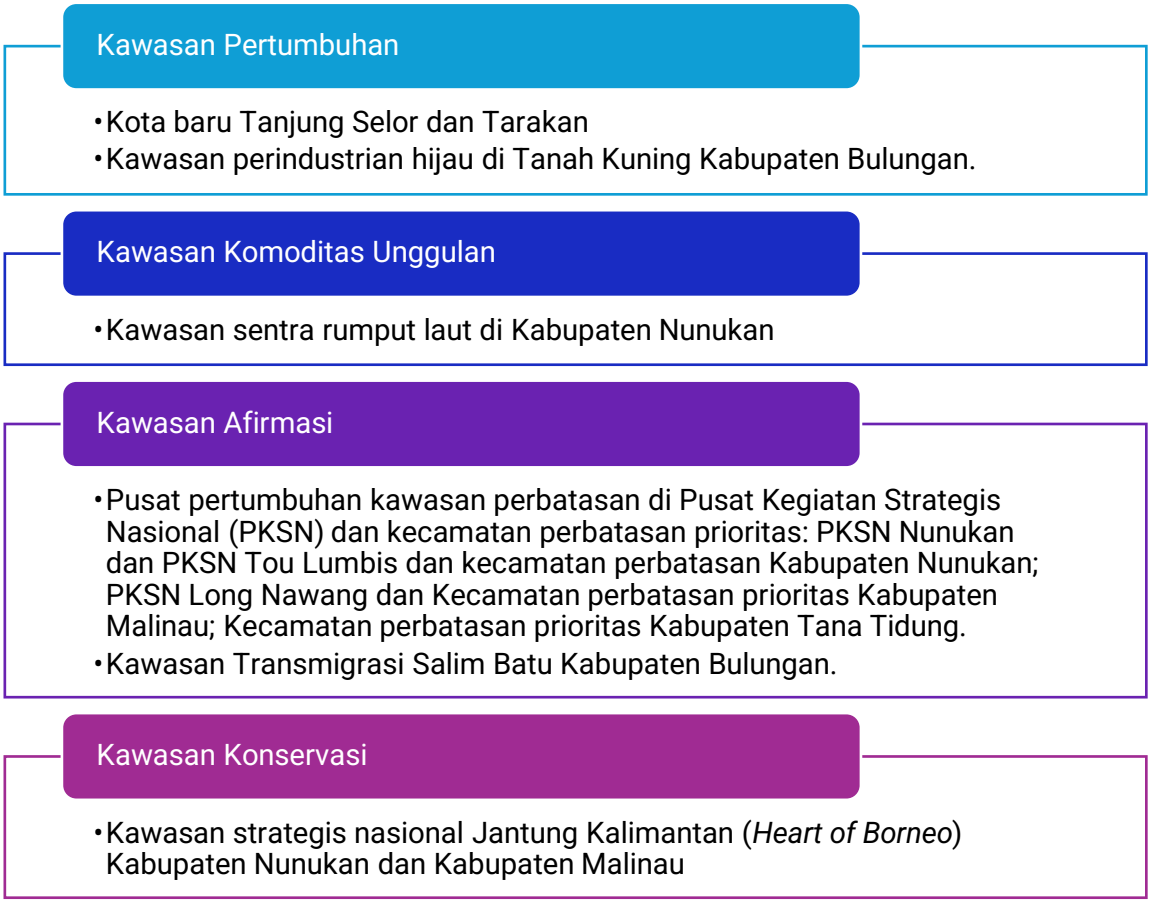
Kabupaten/Kota	Strategi Pembangunan
Kabupaten Nunukan	• Peningkatan konektivitas kawasan perbatasan. • Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pemukiman. • Pembangunan fasilitas ketenagalistrikan. • Dukungan optimalisasi PLBN dan pengembangan pusat pertumbuhan di kawasan sekitarnya. • Akselerasi peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. • Akselerasi peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan. • Fasilitasi pengembangan ruang pertahanan dan keamanan. • Penguatan dan konsistensi kerjasama pengelolaan kawasan perbatasan dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri. • Pengembangan kawasan pariwisata berbasis ekowisata dan budaya. • Pengembangan kawasan pedesaan dan peningkatan kemandirian desa. • Pelestarian fungsi lingkungan kawasan mangrove. • Pengembangan kawasan kampung nelayan. • Pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kelautan. • Optimalisasi potensi ekonomi perairan. • Optimalisasi pemanfaatan poros maritim ALKI II sebagai jalur perdagangan internasional. • Pengembangan Kawasan Sentra Rumput Laut dan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan PKSN Nunukan
Kabupaten Malinau	• Peningkatan konektivitas di kawasan perbatasan. • Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman. • Pembangunan fasilitas ketenagalistrikan. • Akselerasi peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar. • Optimalisasi kawasan PLBN dengan pengembangan fasilitas ekonomi.

Kabupaten/Kota	Strategi Pembangunan
	• Pembangunan permukiman terintegrasi yang adaptif terhadap budaya. • Pelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai.
Kabupaten Tana Tidung	• Akselerasi kualitas pelayanan dasar • Pengembangan pusat kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan tambak. • Pengembangan Pelabuhan logistik • Pelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai. • Pengembangan kawasan kampung nelayan. • Penataan permukiman yang layak huni.
Kabupaten Bulungan	• Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar • Pengembangan pelabuhan internasional sebagai hub perekonomian • Pengembangan pelabuhan logistik • Pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kelautan. • Pelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai • Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa. • Pengembangan kawasan industri hijau • Pengembangan pusat kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan tambak. • Pengembangan kawasan perkotaan • Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman. • Penataan kawasan permukiman yang layak huni. • Peningkatan konektivitas wilayah • Pengembangan kawasan *green economy* • Pengembangan kawasan perdesaan.
Kota Tarakan	• Akselerasi kualitas pelayanan dasar • Pengembangan Pelabuhan internasional sebagai hub perekonomian. • Pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kelautan. • Pengembangan kawasan industri hijau • Pelestarian fungsi lingkungan kawasan mangrove • Pengembangan kawasan kampung nelayan • Penataan permukiman layak huni • Optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi perairan

Kabupaten/Kota	Strategi Pembangunan
	• Optimalisasi pemanfaatan poros maritim ALKI II sebagai jalur perdagangan internasional.

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045

Strategi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara perlu selaras dengan arah kebijakan yang terdapat di dalam RPJMN tahun 2025-2029. Arah kebijakan Provinsi Kalimantan Utara yang terdapat di dalam RPJMN yaitu:



Gambar 3. 3 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029

Highlight indikasi intervensi pada setiap kawasan prioritas tersebut dan intervensi kebijakan untuk seluruh Provinsi Kalimantan Utara yang terdapat di RPJMN, yaitu:

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kota baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan	• Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan *output*: pembangunan SPAM kabupaten/kota, pembangunan SPAM regional, dan

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat. • Penyediaan hunian publik vertikal sewa dengan *output:* penyediaan bantuan pembangunan rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI. • Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R dan peningkatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan *output*: pengembangan sistem persampahan berbasis masyarakat. • Penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik dan persampahan dengan *output*: penyediaan bantuan prasarana sarana utilitas umum bidang persampahan. • Pembangunan embung air tampungan air skala kecil lainnya di Kota Tanjung Selor dengan *output*: pembangunan embung dan tampungan air skala kecil lainnya. • Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap serta kampung/sentra nelayan di Kota Tanjung Selor dengan *output*: pengembangan sentra perikanan tangkap yang ditingkatkan fasilitasnya. • *On farm* di Kota Tanjung Selor dengan *output*: penyediaan bantuan sarana produksi pertanian di satuan permukiman dan pusat SKP. • Pembangunan dan pengembangan bandara di Kota Tarakan dengan *output*: pengembangan bandar udara Juwata. • Penguatan kewirausahaan afirmatif di Kota Tarakan dengan *output*: pengembangan sentra perikanan tangkap yang ditingkatkan fasilitasnya. • Pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi di Kota Tarakan dengan *output*: pengembangan angkutan udara perintis penumpang, layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang. • Pengembangan kawasan konservasi mangrove dan bekantan termasuk pengembangan sarana dan prasarana serta dukungan promosi di Kota Tarakan.
Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning Kabupaten Bulungan	• Peningkatan investasi kawasan dengan *output*: pembentukan *eco industrial park* (KI berwawasan lingkungan), *Investment Object Ready to Offer* (IPRO)

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	bidang jasa dan kawasan, peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan pada bidang jasa dan kawasan, penguatan strategi dan inovasi perencanaan penanaman modal. • Pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok dengan *output*: pengembangan IKM logam, mesin elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan fasilitas perluasan akses pasar. • Pengembangan pembangunan PLTA Kayan terintegrasi dengan output: pengawasan dan pengendalian konsumsi listrik per kapita, rumusan kebijakan pembinaan BUMN dalam pembangunan infrastruktur energi IKN, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital, serta AI data Kayan. • Pengembangan kawasan industri Kalimantan Industrial Park Indonesia. • Penambahan penerbangan umum dan perintis. • Peningkatan/perbaikan jalan akses ke lokasi sumber daya dan kawasan. • Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas.
Kawasan Sentra Rumput Laut Kabupaten Nunukan	• Pengembangan industri dan hilir rumput laut dengan *output*: peningkatan kapasitas produksi rumput laut kering, dan promosi produk rumput laut skala internasional. • Peningkatan produktivitas budidaya rumput laut dengan output: pengembangan skema penjualan petani ke pabrik pengolahan melalui *platform* digital yang meningkatkan harga jual di tingkat petani. • Fasilitasi pembiayaan dan investasi. • Penelitian dan pengembangan budidaya rumput spesies baru serta inovasi teknologi untuk diversifikasi produk rumput laut (karagenan, agar-agar, biostimulan, nutraseutikal, pakan ternak).
Pusat pertumbuhan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan kecamatan perbatasan prioritas:	• Pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan dengan *output*: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
• PKSN Nunukan dan PKSN Tou Lumbis dan kecamatan perbatasan Kabupaten Nunukan (Kec. Krayan Selatan, Krayan, Tulin Onsoi, Sei Menggaris, Sebatik Tengah, Krayan Tengah, Krayan Timur, Krayan Barat); • PKSN Long Nawang dan Kecamatan perbatasan prioritas Kabupaten Malinau (Kec. Kayan Hilir dan Bahau Hulu); • Kecamatan perbatasan prioritas Kabupaten Tana Tidung (Kec. Tana Lia).	• Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan dengan *output*: pembangunan jalan perbatasan dan akses kawasan PLBN, penataan bangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan PLBN Long Midang beserta sarana dan prasarana pendukungnya, pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan, pembangunan jalan koridor logistik (*backbone*), pengembangan bandar udara Long Apung tahap II, Kab. Malinau, pengembangan bandar udara Seluwing Kab. Malinau, pengembangan bandar udara Yuvai Semaring Kab. Nunukan, pengembangan bandar udara Nunukan Kab. Nunukan, pengembangan fasilitas pelabuhan Sungai Nyamuk Kab. Nunukan, pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar, dan layanan validasi dan verifikasi pupuk. • Penataan ruang dan penanggulangan bencana di Kawasan Perbatasan, dengan *output*: dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN), penguatan desa/kelurahan tangguh bencana, dan penguatan instrumen peringatan dini bencana. • Penguatan tata kelola pemerintahan di Kawasan Perbatasan, dengan *output*: bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara.
Kawasan Transmigrasi Salim Batu Kabupaten Bulungan	• Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman. • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: penyediaan bantuan sarana produksi pertanian. • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output*: penyediaan fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi. • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output*: perpindahan dan penempatan transmigran.
Kawasan strategis nasional Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) Kabupaten	• Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Nunukan dan Kabupaten Malinau	• Konservasi komoditas pertanian dan praktik pertanian berkelanjutan, dengan *output*: penyusunan rekomendasi perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. • Pelaksanaan penataan aset reforma agraria, dengan *output*: penguatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
Provinsi Kalimantan Utara	Penguatan pengembangan pangan nabati, hilirisasi komoditas pertanian strategis/unggulan serta modernisasi dan digitalisasi pertanian yang adaptif dan inklusif, melalui: • Penguatan pasca panen pangan nabati, dengan *output*: pengembangan sarana pascapanen tanaman pangan dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan. • Sertifikasi dan peredaran benih nabati, dengan *output*: penyaluran benih padi. • Jaminan ketersediaan bahan baku bioindustri agro, dengan *output*: penyediaan bahan tanam komoditi perkebunan. • Adopsi teknologi pertanian, dengan *output*: penerapan teknologi pertanian. • Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, termasuk peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi).
Provinsi Kalimantan Utara	Penguatan konektivitas (konektivitas jalan dan udara) dan pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah 3TP, melalui: • Penguatan infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan *output*: pengembangan Jalan Koridor Logistik-Sekatak Buji-Malinau, Jalan Akses Simpul Transportasi Lingkar Pulau Sebatik, serta Pengembangan Bandar Udara Long Apung Tahap III. • Penanganan konektivitas jalan/jembatan non lintas utama, dengan *output*: pengembangan jalan koridor logistik serta pembangunan jembatan koridor logistik (*backbone*).
Provinsi Kalimantan Utara	Swasembada energi serta penguatan konektivitas dan transisi energi listrik melalui: • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan, dengan *output* pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Kabupaten Nunukan dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG). • Pembangunan jaringan distribusi dan listrik pedesaan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga yang belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T. • Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk.
Provinsi Kalimantan Utara	Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya, pengendalian penyakit menular (TBC dan malaria) melalui: • Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi peserta didik, dengan output: penyediaan bantuan pengembangan peningkatan mutu UKS. • Penguatan intervensi sensitif *stunting*, dengan *output*: pengembangan infrastruktur air minum berbasis masyarakat. • Intensifikasi penemuan kasus dan pengobatan TBC, dengan *output*: penyediaan layanan survei faktor risiko penyakit TB di Kota Tarakan. • Pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: penyediaan layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS di Kota Tarakan. • Pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria di Kota Tarakan.
Provinsi Kalimantan Utara	Penguatan kualitas pendidikan dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah, melalui: • Pelatihan vokasi di sektor strategis, dengan *output*: pelatihan berbasis kompetensi di Provinsi Kalimantan Utara. • Peningkatan kualitas infrastruktur sosial, dengan *output*: pengembangan gedung perguruan tinggi vokasi yang direvitalisasi di Kabupaten Nunukan. • Peserta didik penerima bantuan operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan *output*: penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada siswa Raudlatul Athfal (RA). • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan.
Provinsi Kalimantan Utara	Pengentasan kemiskinan terutama di daerah afirmasi 3T melalui:

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi melalui registrasi sosial ekonomi. • Penyaluran bantuan sosial yang adaptif dengan *output*: siswa SMTK/SMAK penerima PIP, gerakan pangan murah yang dilaksanakan. • Penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif.
Provinsi Kalimantan Utara	Penguatan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan melalui: • Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi peserta didik dengan *output*: penyediaan bantuan pengembangan peningkatan mutu UKS/M. • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat. • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat.

Sumber: Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029

Strategi sebagai pentahapan pembangunan dan lokus pembangunan kewilayahan, diperkuat dengan arah kebijakan pada setiap misi RPJMD. Arah kebijakan merupakan rincian agenda pembangunan dari setiap misi. Arah kebijakan disusun berbasis pada pemetaan masalah, rumusan strategi dan keselarasan dengan arah kebijakan nasional. Arah kebijakan setiap misi RPJMD sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Setiap Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara

Misi	Arah Kebijakan
Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan	• Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat • Intensifikasi penemuan kasus dan pengobatan penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, Malaria) • Pemenuhan tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan spesialis) terutama di daerah 3T • Pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan • Percepatan penurunan *stunting* melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif • Peningkatan cakupan *Universal Health Coverage* (UHC) • Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) • Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan

Misi	Arah Kebijakan
	• Perkuatan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif • Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi daerah • Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka • Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi 3TP • Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan • Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan
Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan	• Peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk sektor ekonomi unggulan dan potensial secara berkelanjutan • Peningkatan kapasitas pemasaran produk UMKM dan IKM • Pengembangan riset dan inovasi pendukung pengembangan produk unggulan daerah dan diversifikasi produk • Hilirisasi kelapa sawit, kelapa, rumput laut, dan komoditas unggulan daerah lainnya • Pengembangan kawasan industri hijau • Pengembangan *blue economy,* revitalisasi pelabuhan perikanan, dan pengembangan pelabuhan logistik • Peningkatan iklim investasi • Pengembangan *ecotourism* destinasi wisata mangrove dan wisata kawasan pesisir dan perairan • Peningkatan diversifikasi pangan • Pengembangan ekonomi digital • Pengembangan destinasi, promosi dan pemasaran dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan pariwisata

Misi	Arah Kebijakan
	• Pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih
Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah • Peningkatan kerjasama pembangunan daerah • Penguatan layanan publik yang mudah dijangkau dan berbasis TIK • Peningkatan inovasi daerah dalam mendukung pembangunan daerah • Penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan pembangunan daerah • Peningkatan profesionalitas dan integritas ASN berbasis sistem merit
Misi 4 Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI	• Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas • Penyelesaian permasalahan Outstanding *Boundary Problems (OBP)* di kawasan perbatasan • Penguatan ketangguhan diplomasi lintas batas yang kolaboratif • Peningkatan kekuatan pertahanan di kawasan perbatasan • Peningkatan kapasitas fiskal daerah • Penguatan pengendalian inflasi daerah
Misi 5 Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	• Peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berimbang • Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, melalui penguatan mitigasi struktural dan non struktural khususnya di Kawasan Perbatasan • Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi • Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan (termasuk lahan gambut) dan bakau • Mempertahankan luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (*home range*) dan konektivitas spesies yang dilindungi

Misi	Arah Kebijakan
	• Konservasi komoditas pertanian dan praktik pertanian berkelanjutan, melalui perlindungan lahan pertanian, untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan • Penataan aset reforma agraria, melalui penguatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
Misi 6 Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	• Peningkatan konektivitas wilayah terutama pada daerah 3TP (tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan) • Pengembangan transportasi antarmoda dan multi moda untuk mendukung pengembangan ekonomi superhub IKN • Memperkuat kerja sama antar daerah dalam peningkatan rantai pasok domestik, regional, dan global • Penuntasan rencana umum dan rencana rinci tata ruang, termasuk kewenangan tata ruang laut • Pengembangan bandara yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah • Fasilitasi penuntasan jalan Trans Kalimantan • Pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah • Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi • Pengembangan transportasi perkotaan yang andal, sesuai, dan modern • Pembangunan infrastruktur yang ramah kaum rentan terutama kelompok disabilitas
Misi 7 Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan	• Swasembada energi serta penguatan konektivitas dan transisi energi listrik, diantaranya melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG). • Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi • Pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan • Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman

Misi	Arah Kebijakan
	• Penanganan permukiman kumuh secara komprehensif dan inklusif • Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif • Pengembangan sistem persampahan berbasis masyarakat melalui fasilitasi pengelolaan sampah berbasis 3R dan Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) • Pemenuhan layanan dasar khususnya kepada kelompok rentan dan di kawasan perbatasan
Misi 8 Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas	• Memperkuat sinkronisasi dan integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan koordinasi pembangunan antar pusat dan daerah • Memperkuat penerapan manajemen risiko pembangunan daerah • Optimalisasi potensi pembiayaan alternatif

Sumber: Analisis, 2025

3.4 Program Prioritas

Program prioritas memiliki sifat lintas sektor/*cross-cutting*, sehingga pelaksanaannya tidak hanya dijalankan oleh satu Perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab program prioritas memiliki peran sebagai koordinator dan tetap menjaga kolaborasi dengan perangkat daerah atau pemangku kepentingan lain. Program prioritas dirumuskan menggunakan metode *cascading* mulai dari tujuan, sasaran dan *outcome*. Dalam rangka membangun sinergi antara pendekatan politik dan teknokratik, program prioritas juga berupaya mengkerangkai program janji politik Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah dengan rumusan kinerja. Rumusan program prioritas RPJMD sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Program Prioritas RPJMD Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
Visi Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan **Misi 1** Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan **Misi 2** Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan	Meningkatnya daya saing daerah			Indeks Daya Saing Daerah		
				LPE		
		Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan		Indeks Ekonomi Hijau		
				Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		
				Ekonomi Biru		
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	**Program Unggulan 4. Pengembangan sektor unggulan**, meliputi : 1) Pembangunan Sentra Produksi Pertanian, Tanaman Pangan, Peternakan, Hortikultura dan Perkebunan; 2.)Pengembangan Budidaya Komoditi Unggulan Daerah; 3.)Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan Berkelanjutan 4) Pengembangan (Diversifikasi) Produk Pangan Lokal; 5) Peningkatan Produksi Pangan Lokal 6) Penjaminan Mutu dan
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan ekspor	Program Pengembangan UMKM	
			Meningkatnya daya tarik investasi	Persentase kebijakan daerah terkait penanaman modal yang ditetapkan	Program Pengembangan iklim penanaman modal	
			Meningkatnya daya tarik investasi	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program Promosi penanaman modal	
			Meningkatnya pelaku usaha yang memiliki izin usaha	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan penanaman modal	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif **Misi 4** Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI **Misi 5** Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi **Misi 6** Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan **Misi 7** Memantapkan Sarana dan			Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Kualitas Pangan Lokal. **Program Unggulan 5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru,** meliputi; 1) Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon; 2) Akselerasi Hilirisasi Industri SDA Berkelanjutan. 3) optimalisasi potensi kawasan pesisir dan kepulauan **Program Unggulan 6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara**, meliputi; 1) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata; 2) Penyelenggaraan Festival Budaya; 3) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif.
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	
			Meningkatnya pengelolaan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan dan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan	Jumlah luasan wilayah laut yang dikelola	Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	
				Nilai Evaluasi, efektivitas, pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA)		
			Meningkatnya Layanan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah pendapatan retribusi atas pelayanan pelabuhan perikanan	Pengelolaan perikanan tangkap	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap		
			Meningkatnya Akses dan Pemanfaatan Benih/Bibit Ikan Bermutu	Jumlah pendapatan retribusi atas pelayanan bibit/benih ikan	Pengelolaan perikanan budidaya	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan **Misi 8** Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya		
			Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah produk hasil perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	
			Meningkatnya Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah produk hasil perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan		
			Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat sebagai sumber pangan bergizi, sehat dan berkelanjutan	Angka Konsumsi Ikan		
			Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang aktif dan bersertifikat	Jumlah unit pengolahan ikan (UPI) aktif dan tersertifikasi		
			Meningkatnya Kualitas Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Peningkatan daya tarik pariwisata	
			Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Pemasaran pariwisata	
			Meningkatnya Kualitas Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	
			Meningkatnya penyediaan dan pegembangan prasrana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	
			Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian		
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	
			Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Pengelolaan hutan	
				Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan		
			Meningkatnya kualitas sumber daya	Persentase peningkatan kelas KUPS	Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			manusia di bidang kehutanan		masyarakat di bidang kehutanan	
			Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan kaidah lingkungan dan teknik pertambangan yang baik	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan	Pengelolaan mineral dan Batubara	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Perencanaan dan pembangunan industri	
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi	Pengendalian izin usaha industri	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase usulan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Perekonomian dan pembangunan	
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		**Indeks Modal Manusia**		
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	Pengelolaan pendidikan	**Program Unggulan 1. SDM sehat, cerdas, dan setara gender,** meliputi: 1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia; 2. Peningkatan Pelayanan dan Akses Kesehatan; 3. Peningkatan Akses Pendidikan yang berkualitas dan inklusif; 4. Ketersediaan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Berkualitas 5. Penguatan Literasi Digital. 6. Peningkatan kompetensi vokasional berbasis potensi daerah
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilita		
			Meningkatnya kualitas Lulusan	Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi		
				Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI		
				Persentase lulusan SLB yang mandiri		
			Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PersentaseÂ PTKÂ Profesional		
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Lulusan Satuan Pendidikan	Persentase lulusan SLB yang mandiri		
				Persentase sekolah terakreditasi minimal B		
				Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI		
				Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi		
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Lulusan Satuan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas		
			Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan		
			Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan	Persentase sekolah terakreditasi minimal B		
			Meningkatnya kualitas PTK	Indeks Pemerataan Guru	Pendidikan dan tenaga pendidikan	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Standar Perpustakaan Nasional	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Pembinaan perpustakaan	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase usulan kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Kesejahteraan rakyat	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita		
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minum	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR)	Pengendalian penduduk	
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age spesific fertility rate/ ASFR 15-19)		
			Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	Pengembangan daya saing keolahragaan	
		Dukungan infrastruktur yang merata berkeadilan dan berkualitas		**Indeks Infrastruktur Daerah**		
			Persentase jalan dalam kondisi baik	Persentase jalan mantap	Program Penyelenggaraan jalan	**Program Unggulan 7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara,** meliputi ; 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2. Pembangunan Pelabuhan, Dermaga, Terminal dan Bantuan Transportasi Udara (SOA Barang dan Penumpang); 3. Peningkatan kualitas layanan perhubungan yang inklusif 4. Pembangunan Jaringan Telekomunikasi
			Meningkatnya Layanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	
				Presentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal		
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Rasio Konektivitas Angkutan Perairan	Program Pengelolaan pelayaran	
				Persentase kecelakaan Angkutan perairan		
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung strategis yang terbangun	Program Penataan bangunan gedung	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyidiaan air minum	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik dan berfungsi	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	(Keterjangkauan Telekomunikasi Digital).
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	Program Pengelolaan sumber daya air	
				Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir		
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi		
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase infrastruktur persampahan regional terbangun	Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase lahan kawasan strategis daerah yang tuntas pematangan lahannya	Program penataan bangunan dan lingkungan	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Program Pengembangan perumahan	
				Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Relokasi Program Provinsi		
			Meningkatnya kualitas	Nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			penyelenggaraan penataan ruang			
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani	Program kawasan permukiman	
			Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu	Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik	Program aplikasi informatika	
			Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan Terhadap Penggunaan Energi Listrik dan EBT	Capaian rumah tangga berlistrik	Program pengelolaan kelistrikan	
		Terwujudnya masyarakat inklusif dan harmonis		**Indeks Kerukunan Umat Beragama;**		
				Indeks Pembangunan Kebudayaan		
				Indeks Pembangunan Gender		
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	**Program Unggulan 1, SDM sehat, cerdas, dan setara gender**, meliputi ; 1. Peningkatan Peran

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Rehabilitasi sosial	Gender dalam semua Sektor Pembangunan; 2. Meningkatkan Ketahanan Keluarga serta peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak; 3. Peningkatan Peran dan Kualitas Kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) 4. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Perlindungan dan jaminan sosial	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase anggaran responsif gender (ARG)	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Perlindungan perempuan	
			Terjaminnnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks pemenuhan hak anak (IPHA)	Pemenuhan hak anak	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Pengembangan kebudayaan	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	
				Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan		
			Meningkatnya kesadaran akan ideologi Pancasila	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			dan karakter kebangsaan			
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase usulan kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Kesejahteraan rakyat	
	Tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas			**Indeks Reformasi Birokrasi**		
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melayani		**Nilai SAKIP**		
				IPKD;		
				Indeks Pelayanan Publik;		
				Indeks Inovasi Daerah ;		
				SPI KPK		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	**Program Unggulan 8, Peningkatan tata kelola kolaboratif dan inovatif,** meliputi ; 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 2. Penyelenggaraan Inovasi Daerah; 3. Peningkatan kualitas perencanan dan penganggaran berbasis kinerja 4. Digitalisasi pelayanan publik 5. Optimalisasi PAD 6. Peningkatan kualitas Penyelengaraan Pemerintahan Daerah
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
			Meningkatnya kualitas TLHP	Persentase TLHP yang diselesaikan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase PD yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	
			Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	Program Pengelolaan keuangan daerah	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			Meningkatnya Capaian PAD Melalui Upaya Intensifikasi dan Eksetensifikasi	Persentase Realisasi Target PAD Perangkat Daerah	Program Pengelolaan pendapatan daerah	dan penguatan *quality assurance*
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi	
			Meningkatnya capaian program pembangunan daerah	Persentase capaian program pembangunan daerah	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	
			Meningkatnya tata kelola data pembangunan daerah	Persentase data kinerja yang lengkap dan update		
			Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan provinsi dan nasional	Persentase keselarasan dokumen perencanaan provinsi dengan nasional	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Program penataan organisasi	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD	Program penyelenggaraan statistik sektoral	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Program pendaftaran penduduk	
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	Program pencatatan sipil	
				Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
				Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
				Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat			**Tingkat kemiskinan**		
				Indeks Gini		
		Meningkatnya keberdayaan dan produktivitas masyarakat		**Tingkat Pengangguran Terbuka**		
				Indeks Kesejahteraan Sosial		
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	Program Penempatan tenaga kerja	**Program Unggulan 3. Produktivitas ekonomi kerakyatan dan pedesaan,** meliputi ; 1. Pemberdayaan wirausaha muda 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja 3. Pembentuikan dan pengembangan koperasi merah putih 4. Fasilitasi Permodalan UMKM 5. Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Usaha
			Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan ekspor	Pengembangan UMKM	6. Peningkatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan ekonomi pedesaan 7. Peningkatan perlindungan sosial adaptif
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum dalam pembangunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	Program Penempatan tenaga kerja	
			Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan ekspor	Pengembangan UMKM	
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum dalam pembangunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
				Persentase desa wilayah perbatasan yang berstatus maju dan mandiri		
		Wilayah perbatasan yang maju dan sejahtera	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pengelolaan kawasan perbatasan dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Rencana Induk yang Diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah	Pengelolaan perbatasan negara	**Program Unggulan 2. Membangun kawasan perbatasan yang sejahtera**, meliputi ; 1. Menyusun regulasi tingkat daerah khusus untuk pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan Pesisir; 2. Mengalokasikan pembiayaan pembangunan secara berimbang untuk pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan Pesisir; 3. Pengembangan potensi unggulan kawasan perbatasan dan kawasan Pesisir 4. Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar 5. Fasilitasi Pembentukan DOB
			Meningkatnya koordinasi pengelolaan kawasan perbatasan	Persentase Kegiatan Rencana Aksi Berdasarkan Rencana Induk yang Direalisasikan oleh Perangkat Daerah Pengampu		
			Meningkatnya kualitas monev terhadap pelaksanaan pengelolaan kawasan perbatasan	Persentase rekomendasi hasil monev yang dikeluarkan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan rencana aksi tahunan		
			Meningkatnya kualitas penataan desa	persentase fasilitasi penataan desa	Penataan desa	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan desa	Persentase fasilitasi tata kelola desa	Administrasi pemerintahan desa	
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			masyarakat hukum dalam pembangunan			
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	Pengelolaan pendidikan	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilita		
			Meningkatnya kualitas Lulusan	Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi		
				Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI		
				Persentase lulusan SLB yang mandiri		
			Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PersentaseÂ PTKÂ Profesional		
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Lulusan Satuan Pendidikan	Persentase lulusan SLB yang mandiri		
				Persentase sekolah terakreditasi minimal B		
				Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI		
				Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi		
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Lulusan Satuan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas		
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan		
			Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan	Persentase sekolah terakreditasi minimal B		
			Meningkatnya kualitas PTK	Indeks Pemerataan Guru	Pendidikan dan tenaga pendidikan	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita		
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	
			Persentase jalan dalam kondisi baik	Persentase jalan mantap	Penyelenggaraan jalan	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses SPAM perpipaan	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Pengembangan perumahan	
				Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Relokasi Program Provinsi		
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	
			Meningkatnya kepatuhan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			masyarakat terhadap Perda dan Perkada			
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Perlindungan dan jaminan sosial	
			Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	
			Meningkatnya Layanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	
				Presentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal		
				Rasio Konektivitas Angkutan Perairan	Pengelolaan pelayaran	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase kecelakaan Angkutan perairan		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Pengelolaan aplikasi informatika	
			Meningkatnya pengelolaan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan dan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan	Jumlah luasan wilayah laut yang dikelola	Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	
				Nilai Evaluasi, efektivitas, pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA)		
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	
			Meningkatnya penyediaan dan pegembangan prasrana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	
			Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian		
			Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	Pembangunan kawasan transmigrasi	
			Meningkatnya kualitas kebijakan	Nilai LPPD	Pemerintahan dan otonomi daerah	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			pemerintahan dan otonomi daerah			
	Meningkatnya ketahanan ekologi			**Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)**		
		Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	Program Keanekaragaman hayati	**Program Unggulan 9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**, meliputi; 1. Pengendalian kualitas lingkungan hidup 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; 3. Mitigasi Perubahan Iklim. 4. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca; 5. Pengembangan Energi Terbarukan,
			Meningkatnya Status Mutu Air Sungai, Udara dan Air Laut	Persentase pemenuhan Status mutu Air Sungai dengan Kategori Baik (%)	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	
				Persentase Parameter Status Mutu Udara tidak melampaui Baku Mutu (%)		
				Persentase Status mutu Air laut Kategori Baik berdasarkan Baku Mutu Air laut (%)		
			Meningkatnya pelaku usaha dan/ kegiatan kewenangan provinsi yang dilakukan pengawasan	Persentase Pelaku Usaha dan/Kegiatan kewenangan provinsi yang dilakukan pengawasan	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	
			Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penanganan pengaduan lingkungan hidup	
			Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang dikelola	Program Pengelolaan persampahan	
			Meningkatnya penanganan bahan	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Program Pengelolaan limbah B3	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)			
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan Terhadap Penggunaan Energi Listrik dan EBT	Jumlah pasokan energi yang bersumber dari EBT	Program Pengelolaan energi baru dan terbarukan	
			Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Luas kawasan bernilai ekosistem Provinsi yang dikelola	Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	
			Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS	Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim		**Indeks Risiko Bencana**		
			Meningkatnya penanganan bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Program Penanggulangan bencana	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Program pencegahan, penanggulanagan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
			Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS	Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	
			Meningkatnya penanganan bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Program Penanggulangan bencana	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	

3.5 Dukungan Program RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Kegiatan Prioritas Utama RPJM Nasional Tahun 2025-2029

RPJMD Provinsi Kalimantan Utara mendukung penuh pelaksanaan dan pencapaian agenda pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum di dalam RPJM Nasional. Sinkronisasi antara kegiatan prioritas utama dengan program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara dilakukan untuk menjamin sinergitas antara pusat dan daerah. Berikut adalah dukungan program prioritas daerah yang diselaraskan dengan kegiatan prioritas utama RPJM Nasional tahun 2025-2029:

Tabel 3. 6 Penyelarasan Program dan Kegiatan Prioritas RPJMN dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

No	Kegiatan Prioritas Utama	Program Prioritas Daerah
1.	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2.	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan
3.	Pencegahan dan penurunan stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4.	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	Program Pengelolaan Persampahan
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
5.	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6.	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
7.	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

No	Kegiatan Prioritas Utama	Program Prioritas Daerah
8.	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
9.	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
10.	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Program Pengelolaan Persampahan
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
11.	Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
12.	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
13.	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
14.	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan indikasi rencana program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah, sekaligus memenuhi layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah. Selain mencakup target program, bab ini juga memuat pagu indikatif sebagai proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk alokasi dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan.

1.1 Program Perangkat Daerah

Sub bab ini memuat seluruh program Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mencapai kinerja pembangunan daerah pada periode 2025-2029. Nomenklatur program mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 4. 1. Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				525.558.806.851		532.610.787.393		553.408.115.717		575.962.452.461		599.743.490.269	
Meningkatnya pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100	100	519.067.418.971	100	526.071.737.393	100	546.990.088.717	100	569.591.057.461	100	593.352.687.769	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100	100	2.121.900.000	100	2.122.260.000	100	2.122.260.000	100	2.077.260.000	100	2.077.260.000	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi				1.322.440.000		1.410.000.000		1.373.000.000		1.428.000.000		1.473.000.000	
Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100	100	953.000.000	100	953.000.000	100	953.000.000	100	953.000.000	100	953.000.000	Cabang Dinas Nunukan
Terwujudnya Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang optimal				1.000.000.000		1.015.000.000		1.030.000.000		1.045.000.000		1.060.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terwujudnya Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang optimal	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100	100	1.094.047.880	100	1.038.790.000	100	939.767.000	100	868.135.000	100	827.542.500	Cabang Dinas Tarakan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				242.656.765.860		226.930.699.760		228.375.863.960		223.924.142.510		232.237.584.260	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18			1.267.000.000		1.267.000.000		1.267.000.000		1.267.000.000		1.267.000.000	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilita			85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000	
Meningkatnya kualitas Lulusan	Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi	44,45	78,31	11.736.300.000	80,81	11.821.300.000	83,01	12.071.300.000	85,01	12.071.300.000	86,81	12.171.300.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI	86,66	87,74		88,28		88,82		89,36		89,89		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase lulusan SLB yang mandiri	18,98	22,22		27,47		32,97		38,72		44,75		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PersentaseÂ PTKÂ Profesional	58,28	60,28	54.459.060.760	62,28	54.595.060.760	64,28	54.765.060.760	66,28	54.850.060.760	68,28	54.860.060.760	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Lulusan Satuan Pendidikan	Persentase lulusan SLB yang mandiri	18	26	858.150.000	28	1.086.500.000	32	1.116.400.000	36	1.135.000.000	40	1.141.000.000	Cabang Dinas Tarakan
	Persentase sekolah terakreditasi minimal B	80	81		85		89		93		96		Cabang Dinas Tarakan
	Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI	41,38	43,9		45,22		46,57		47,97		49,41		Cabang Dinas Tarakan
	Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi	53,18	56,42		58,11		59,85		61,65		63,5		Cabang Dinas Tarakan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Lulusan Satuan Pendidikan				620.000.000		635.000.000		650.000.000		665.000.000		680.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Lulusan Satuan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	82,64	83,74	858.150.000	84,44	1.086.500.000	85,24	1.116.400.000	86,14	1.135.000.000	87,14	1.141.000.000	Cabang Dinas Tarakan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas	74	76		77		78		79		80		Cabang Dinas Tarakan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	78,89	80,17	165.317.795.100	80,81	149.077.379.000	81,46	149.957.643.200	82,1	145.337.321.750	82,74	153.469.763.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas	73,93	76,11		77,2		78,29		79,,38		80,47		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	100	100	2.382.000.000	100	2.382.000.000	100	2.382.000.000	100	2.382.000.000	100	2.382.000.000	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan	Persentase sekolah terakreditasi minimal B	91,23	93	5.931.460.000	95	5.981.460.000	97	6.081.460.000	99	6.131.460.000	100	6.181.460.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				900.000.000		950.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000		1.080.000.000	
Meningkatnya kualitas PTK	Indeks Pemerataan Guru	0,17	1,49	900.000.000	2,15	950.000.000	2,81	1.000.000.000	3,48	1.050.000.000	4,14	1.080.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				394.691.252.242		458.187.361.564		417.588.551.456		400.688.973.581		402.268.973.581	
Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi dan Operasional Perkantoran				26.965.000.000		90.542.537.218		48.593.683.500		31.094.105.625		32.674.105.625	
Terwujudnya program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang Eketif dan Efisien	CAPAIAN NILAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL	85	87	367.726.252.242	89	367.644.824.346	92	368.994.867.956	95	369.594.867.956	98	369.594.867.956	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				121.233.050.878		125.309.789.436		128.310.757.850		131.787.270.589		135.217.270.589	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatanyang berkualitas baik, adil, dan terjangkau				96.011.338.640		83.759.789.436		86.760.757.850		90.237.270.589		93.667.270.589	
Terwujudnya Pemenuhan Upaya Kesehatan UKM dan UKP yang Efektif dan Efisien	CAPAIAN NILAI AKREDITASI	84	86	25.221.712.238	87	41.550.000.000	88	41.550.000.000	89	41.550.000.000	90	41.550.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				19.700.000.000		19.830.000.000		20.030.000.000		20.230.000.000		20.380.000.000	
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDMK				700.000.000		830.000.000		1.030.000.000		1.230.000.000		1.380.000.000	
Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yang sesuai Standar	CAPAIAN NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	82	84,44	19.000.000.000	85,2	19.000.000.000	85,96	19.000.000.000	86,72	19.000.000.000	87,12	19.000.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				250.000.000		275.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000	
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar				250.000.000		275.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				1.200.000.000		1.850.000.000		2.450.000.000		3.150.000.000		3.650.000.000	
Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat				1.200.000.000		1.850.000.000		2.450.000.000		3.150.000.000		3.650.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				27.165.000.000		22.315.000.000		23.815.000.000		23.815.000.000		25.315.000.000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100	100,00	27.165.000.000	100,00	22.315.000.000	100,00	23.815.000.000	100,00	23.815.000.000	100,00	25.315.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				139.280.000.000		189.030.000.000		137.980.000.000		108.480.000.000		69.730.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	0	0,00	139.280.000.000	0,00	189.030.000.000	0,00	137.980.000.000	0,00	108.480.000.000	0,00	69.730.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	33,11	37,00		39,00		41,00		43,00		45,00		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	58,35	60,00		61,00		62,00		63,00		64,00		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				39.000.000.000		14.000.000.000		14.000.000.000		14.000.000.000		14.000.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum				39.000.000.000		14.000.000.000		14.000.000.000		14.000.000.000		14.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				12.500.000.000		12.500.000.000		32.500.000.000		42.500.000.000		42.500.000.000	
Meningkatnya layanan persampahan regional				12.500.000.000		12.500.000.000		32.500.000.000		42.500.000.000		42.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		53.000.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah				3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		53.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000	
Meningkatnya sistem drainase perkotaan				10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				139.661.121.503		139.938.019.276		139.820.999.514		139.720.594.554		139.766.787.362	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung				139.661.121.503		139.938.019.276		139.820.999.514		139.720.594.554		139.766.787.362	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				3.823.200.000		2.458.600.000		5.589.600.000		1.994.000.000		4.452.600.000	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata				3.823.200.000		2.458.600.000		5.589.600.000		1.994.000.000		4.452.600.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				280.000.000.000		280.000.000.000		280.000.000.000		280.000.000.000		280.000.000.000	
Persentase jalan dalam kondisi baik	Persentase jalan mantap			280.000.000.000		280.000.000.000		280.000.000.000		280.000.000.000		280.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				5.058.352.600		5.564.187.860		6.120.606.646		6.732.667.310		7.405.934.041	
Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih di Kalimantan Utara	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di Provinsi Kalimantan Utara dibuktikan dengan sertifikat pelatihan	4,32	7,93	5.058.352.600	9,73	5.564.187.860	11,53	6.120.606.646	13,34	6.732.667.310	15,14	7.405.934.041	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Presentase kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan				11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		900.000.000		900.000.000	
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	20	20,00	1.000.000.000	20,00	1.000.000.000	20,00	1.000.000.000	20,00	900.000.000	20,00	900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				8.350.000.000		7.850.000.000		8.350.000.000		7.850.000.000		8.350.000.000	
Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	2,53	11,05	8.350.000.000	11,05	7.850.000.000	11,05	8.350.000.000	11,05	7.850.000.000	11,05	8.350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				20.200.000.000		20.200.000.000		20.200.000.000		20.200.000.000		20.200.000.000	
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana	20	20,00	20.200.000.000	20,00	20.200.000.000	20,00	20.200.000.000	20,00	20.200.000.000	20,00	20.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT													
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				59.647.513.500		49.487.013.500		34.018.152.154		34.750.722.741		34.879.359.358	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Administrasi dan Penunjang Kinerja ASN BPBD Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Penunjang Kinerja ASN BPBD Provinsi Kalimantan Utara	99	99,00	40.440.000.000	99,00	30.440.000.000	99,00	15.440.000.000	99,00	15.440.000.000	99,00	15.540.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Administrasi dan Penunjang Kinerja ASN	Indeks Kepuasan Layanan ASN	0	100,00	19.207.513.500	100,00	19.047.013.500	100,00	18.578.152.154	100,00	19.310.722.741	100,00	19.339.359.358	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3.181.452.370		3.076.345.345		3.197.525.148		3.343.658.250		3.363.761.144	
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	0	100,00	434.412.000	100,00	473.715.700	100,00	516.949.770	100,00	564.507.247	100,00	616.820.472	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	94	100,00	593.170.000	100,00	523.853.000	100,00	576.238.300	100,00	633.862.130	100,00	697.248.343	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	0	100,00	1.685.319.250	100,00	1.695.066.325	100,00	1.681.205.958	100,00	1.638.876.553	100,00	1.636.211.209	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	0	100,00	468.551.120	100,00	383.710.320	100,00	423.131.120	100,00	506.412.320	100,00	413.481.120	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				8.015.000.000		7.215.000.000		7.215.000.000		6.965.000.000		6.765.000.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	0	20,00	4.115.000.000	20,00	2.765.000.000	20,00	3.315.000.000	20,00	2.515.000.000	20,00	2.865.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	0	100,00	1.200.000.000	100,00	950.000.000	100,00	1.200.000.000	100,00	950.000.000	100,00	1.200.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	100	100,00	2.700.000.000	100,00	3.500.000.000	100,00	2.700.000.000	100,00	3.500.000.000	100,00	2.700.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				2.415.010.180		701.123.610		162.160.180		660.230.610		333.495.610	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	0	100,00	1.011.475.000	100,00	588.963.430	0,00	50.000.000	100,00	548.070.430	0,00	221.335.430	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	0	100,00	1.403.535.180	100,00	112.160.180	100,00	112.160.180	100,00	112.160.180	100,00	112.160.180	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.088.263.116		17.634.039.933		17.976.786.374		18.352.966.476		17.970.848.581	
Meningkatnya Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat		85,25	12.864.061.026	85,5	13.554.437.843	85,75	13.396.184.284	86	13.899.864.386	86,25	14.005.246.491	Dinas Sosial
Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi				5.224.202.090		4.079.602.090		4.580.602.090		4.453.102.090		3.965.602.090	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				1.532.406.208		1.639.674.642,56		1.754.451.867,53		1.877.263.498,27		2.008.671.943,14	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	0	100	1.532.406.208	100	1.639.674.642,56	100	1.754.451.867,53	100	1.877.263.498,27	100	2.008.671.943,14	
	2. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	0	100		100		100		100		100		
	3. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	0	100		100		100		100		100		
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				4.391.890.710		7.057.350.000		7.807.100.000		7.155.500.000		7.322.000.000	
Meningkatnya rehabilitasi sosial				1.892.290.710		4.550.250.000		5.297.500.000		4.662.500.000		4.829.000.000	
Meningkatnya rehabilitasi sosial				2.499.600.000		2.507.100.000		2.509.600.000		2.493.000.000		2.493.000.000	
1.06.05PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN				3.325.253.086		3.755.000.000		4.055.000.000		4.385.000.000		4.760.000.000	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial				3.325.253.086		3.755.000.000		4.055.000.000		4.385.000.000		4.760.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.06.06PROGRAM PENANGANAN BENCANA				2.176.920.000		3.092.080.000		3.212.080.000		3.287.080.000		3.227.080.000	
Meningkatnya pemberdayaan sosial				2.176.920.000		3.092.080.000		3.212.080.000		3.287.080.000		3.227.080.000	
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14.887.276.806		15.678.952.839		18.960.738.123		17.665.201.936		19.290.812.129	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100	100	14.887.276.806	100	15.678.952.839	100	18.960.738.123	100	17.665.201.936	100	19.290.812.129	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				249.502.526								499.005.052	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	100	100	249.502.526							100	499.005.052	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				3.562.742.764		3.740.879.902		3.927.923.897		4.320.716.287		4.752.787.916	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,2	3,58	3.562.742.764	3,96	3.740.879.902	4,34	3.927.923.897	4,72	4.320.716.287	5,1	4.752.787.916	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				12.273.881.968		12.378.381.968		12.473.381.968		12.634.881.968		12.779.831.968	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).			12.273.881.968		12.378.381.968		12.473.381.968		12.634.881.968		12.779.831.968	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				1.500.165.624		1.575.173.905		1.653.932.600		1.819.325.861		2.001.258.447	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	18059	18259	1.500.165.624	18459	1.575.173.905	18659	1.653.932.600	18859	1.819.325.861	19059	2.001.258.447	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				550.410.000		551.550.000		574.885.000		544.350.000		594.700.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terlindunginya Hak-hak Pekerja	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	26707	28660	550.410.000	30618	551.550.000	32812	574.885.000	32813	544.350.000	35163	594.700.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				21.600.000.000		22.600.000.000		24.600.000.000		25.600.000.000		26.600.000.000	
	Nilai dan Predikat SAKIP			2.600.000.000		2.600.000.000		2.600.000.000		2.600.000.000		2.600.000.000	
	Nilai dan Predikat SAKIP			19.000.000.000		20.000.000.000		22.000.000.000		23.000.000.000		24.000.000.000	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				1.350.000.000		1.350.000.000		1.550.000.000		1.650.000.000		1.950.000.000	
Presentase ARG pada belanja langsung APBD				1.350.000.000		1.350.000.000		1.550.000.000		1.650.000.000		1.950.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				2.250.000.000		2.750.000.000		2.850.000.000		2.450.000.000		3.700.000.000	
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)				1.650.000.000		2.150.000.000		2.250.000.000		1.850.000.000		3.100.000.000	
Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan)				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				700.000.000		715.000.000		730.000.000		800.000.000		850.000.000	
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan				700.000.000		715.000.000		730.000.000		800.000.000		850.000.000	
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				750.000.000		750.000.000		750.000.000		800.000.000		850.000.000	
Jumlah dokumen yang berisi data, Simfoni, gender dan anak				750.000.000		750.000.000		750.000.000		800.000.000		850.000.000	
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				2.275.000.000		1.125.000.000		1.975.000.000		825.000.000		1.975.000.000	
Persentase Kab/Kota Layak Anak (KLA)				2.275.000.000		1.125.000.000		1.975.000.000		825.000.000		1.975.000.000	
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				3.150.000.000		3.250.000.000		3.050.000.000		3.550.000.000		3.800.000.000	
2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				400.000.000		500.000.000		600.000.000		700.000.000		800.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	82,4	83,4	400.000.000	84	500.000.000	85	600.000.000	86	700.000.000	87	800.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				500.000.000		600.000.000		700.000.000		800.000.000		900.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan yang ditangani	5	3	500.000.000	2	600.000.000	1	700.000.000	0	800.000.000	0	900.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				250.000.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000		600.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	100	100	250.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
2.10.03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				250.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu			250.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				400.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat			400.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				3.200.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan			3.200.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000	
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				1.150.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap TORA	Tersedianya Tanah Objek Landform yang siap didistribusikan			1.150.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000	
2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				11.158.097.360		12.063.286.249		12.503.056.249		11.737.199.999		12.125.000.000	
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	9.455.000.000	100,00	9.580.000.000	100,00	9.825.000.000	100,00	9.960.000.000	100,00	10.325.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	1.703.097.360	100,00	2.483.286.249	100,00	2.678.056.249	100,00	1.777.199.999	100,00	1.800.000.000	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN				1.000.000.000		1.000.000.000		1.650.000.000		1.000.000.000		350.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
LINGKUNGAN HIDUP													
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.650.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				3.020.000.000		3.134.000.000		3.456.800.000		3.739.360.000		3.950.000.000	
Meningkatnya Status Mutu Air Sungai, Udara dan Air Laut	Persentase Parameter Status Mutu Udara tidak melampaui Baku Mutu		63,00	2.500.000.000	65,00	2.550.000.000	68,00	2.800.000.000	70,00	3.000.000.000	73,00	3.150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Status mutu Air laut Kategori Baik berdasarkan Baku Mutu Air laut	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase pemenuhan Status mutu Air Sungai dengan Kategori Baik	21,57	24,50		25,50		26,50		27,50		28,50		Dinas Lingkungan Hidup
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air Laut	84,65	84,75	520.000.000	84,80	584.000.000	84,85	656.800.000	84,90	739.360.000	84,95	800.000.000	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air	72,58	74,80		75,00		75,20		75,40		75,60		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	70,53	72,35		72,65		72,95		73,25		73,55		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI				1.300.000.000		750.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	0,03	0,03	1.300.000.000	0,03	750.000.000	0,03	400.000.000	0,03	450.000.000	0,03	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000	
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola.	95,01	95,80	550.000.000	96,00	600.000.000	96,30	650.000.000	96,60	700.000.000	97,00	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				850.000.000		900.000.000		950.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/Kegiatan kewenangan provinsi yang dilakukan pengawasan	75,00	78,00	850.000.000	79,00	900.000.000	80,00	950.000.000	82,00	1.000.000.000	84,00	1.100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				550.000.000		550.000.000		600.000.000		600.000.000		750.000.000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	100,00	100,00	550.000.000	100,00	550.000.000	100,00	600.000.000	100,00	600.000.000	100,00	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		400.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	15,00	250.000.000	20,00	300.000.000	25,00	350.000.000	30,00	400.000.000	35,00	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				300.000.000		320.000.000		350.000.000		375.000.000		400.000.000	
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Lingkungan Hidup	100,00	100,00	300.000.000	100,00	320.000.000	100,00	350.000.000	100,00	375.000.000	100,00	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH				1.500.000.000		1.700.000.000		2.000.000.000		2.200.000.000		2.500.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang dikelola.	68,60	75,00	1.500.000.000	79,00	1.700.000.000	84,00	2.000.000.000	87,00	2.200.000.000	90,00	2.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL													
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				8.121.727.585		8.198.384.480		8.263.446.791		8.666.837.460		9.098.841.182	
Terpenuhinya layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah lingkup Dinas Dukcapil	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100	100	8.121.727.585	100	8.198.384.480	100	8.263.446.791	100	8.666.837.460	100	9.098.841.182	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				930.000.000		930.000.000		930.000.000		930.000.000		930.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1. Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	30		930.000.000		930.000.000		930.000.000		930.000.000		930.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	70							80				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL				1.332.000.000		1.332.000.000		1.332.000.000		1.332.000.000		1.332.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	99	100	1.332.000.000	100	1.332.000.000	100	1.332.000.000	100	1.332.000.000	100	1.332.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				600.000.000		705.000.000		875.000.000		975.000.000		1.150.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan		100	600.000.000	100	705.000.000	100	875.000.000	100	975.000.000	100	1.150.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan		100	100.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	100	200.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.473.399.485		13.098.828.016		12.547.914.887		15.410.894.721		16.000.000.000	
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	10.473.399.485	100	13.098.828.016	100	12.547.914.887	100	15.410.894.721	100	16.000.000.000	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA													
Meningkatnya kualitas penataan desa	persentase fasilitasi penataan desa		5,37		8,05	460.000.000	10,74	495.000.000	14,54	505.000.000	18,34	525.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				117.769.650		500.000.000		510.000.000		520.000.000		530.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase kerja sama desa yang difasilitasi			117.769.650		500.000.000		510.000.000		520.000.000		530.000.000	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				573.109.944		4.050.000.000		4.258.000.000		4.445.000.000		4.502.000.000	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan desa	Persentase fasilitasi tata kelola desa			573.109.944		4.050.000.000		4.258.000.000		4.445.000.000		4.502.000.000	
Mendorong terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Persentase desa/kelurahan yang memiliki Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih												
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				3.759.614.246		5.302.000.000		5.591.000.000		5.919.000.000		6.125.000.000	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum dalam pembangunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa			3.759.614.246		5.302.000.000		5.591.000.000		5.919.000.000		6.125.000.000	
Meningkatnya cakupan penerima manfaat perlindungan sosial untuk Pemerintah Desa dan BPD	Persentase pemerintah desa dan BPD yang mendapatkan manfaat perlindungan jaminan sosial berupa kesehatan dan ketenagakerjaan												
Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Persentase Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya												
2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR)			1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)			700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA				1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga			1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000	
2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				36.812.218.593		32.175.568.593		32.858.718.593		32.021.618.593		31.948.318.593	
Menigkatnya Pemenuhan Layanan Administrasi Peyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkup Dinas Perhubungan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas Perhubungan	100	100,00	21.875.862.384	100,00	18.325.212.384	100,00	18.932.162.384	100,00	17.800.462.384	100,00	17.651.762.384	Dinas Perhubungan
Menigkatnya Pemenuhan Layanan Administrasi Peyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkup UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup UPTD Pelabuha Liem Hie Djung Nunukan	100	100,00	3.431.511.383	100,00	3.431.511.383	100,00	3.431.511.383	100,00	3.431.511.383	100,00	3.431.511.383	Dinas Perhubungan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Menigkatnya Pemenuhan Layanan Administrasi Peyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkup UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan	100	100,00	5.469.516.655	100,00	4.926.516.655	100,00	4.949.616.655	100,00	5.066.916.655	100,00	5.049.616.655	Dinas Perhubungan
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan	100	100,00	6.035.328.171	100,00	5.492.328.171	100,00	5.545.428.171	100,00	5.722.728.171	100,00	5.815.428.171	UPTD Pelabuhan Tengkayu I
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
Meningkatnya Layanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	0,60	0,80	13.850.000.000	0,80	13.800.000.000	0,80	13.500.000.000	0,50	13.900.000.000	0,50	13.850.000.000	Dinas Perhubungan
	Presentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	42	42,00		45,00		47,00		48,00		49,00		Dinas Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				17.210.000.000		25.210.000.000		21.360.000.000		29.960.000.000		23.960.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Rasio Konektivitas Angkutan Perairan	0,70	0,76:0,76	17.210.000.000	0,76:0,76	25.210.000.000	0,76:0,76	21.360.000.000	0,76:0,76	29.960.000.000	0,76:0,76	23.960.000.000	Dinas Perhubungan
	Persentase kecelakaan Angkutan perairan	0,10	0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		Dinas Perhubungan
2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14.862.928.000		14.587.928.000		15.157.928.000		15.027.928.000		15.027.928.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100	100	14.862.928.000	100	14.587.928.000	100	15.157.928.000	100	15.027.928.000	100	15.027.928.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				24.231.610.000		25.931.610.000		27.431.610.000		28.731.610.000		30.031.610.000	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik	0	81	24.231.610.000	82	25.931.610.000	83	27.431.610.000	84	28.731.610.000	84	30.031.610.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				3.922.570.000		9.610.000.000		10.675.000.000		11.565.000.000		13.480.500.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE		3,84	3.922.570.000	3,9	9.610.000.000	3,96	10.675.000.000	4	11.565.000.000	4	13.480.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	13,64	13,7	300.000.000	14,1	330.000.000	15,2	363.000.000	16,15	399.300.000	17,3	439.230.000	
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi aktif	88,64	88,7	88,75	50.000.000	88,8	55.000.000	88,83	60.500.000	88,86	66.550.000	88,9	
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	61	63	200.000.000	64	220.000.000	65	242.000.000	66	266.200.000	67	292.820.000	
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				650.000.000		630.000.000		648.000.000		679.300.000		719.230.000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	13,64	15	650.000.000	16	630.000.000	17	648.000.000	18	679.300.000	19	719.230.000	
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				1.730.000.000		1.627.500.000		1.786.750.000		2.085.125.000		2.144.937.500	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha	17,53	19	1.730.000.000	20	1.627.500.000	21	1.786.750.000	22	2.085.125.000	23	2.144.937.500	
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				1.075.000.000		802.500.000		1.232.750.000		966.025.000		1.376.007.500	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan ekspor	2,1	4	1.075.000.000	5	802.500.000	6	1.232.750.000	7	966.025.000	8	1.376.007.500	
2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				11.508.056.625		10.308.269.614		10.203.778.614		10.199.778.614		10.189.778.614	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	96	100	11.508.056.625	100	10.308.269.614	100	10.203.778.614	100	10.199.778.614	100	10.189.778.614	
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				2.126.753.560		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000	
Meningkatnya daya tarik investasi	Persentase kebijakan daerah terkait penanaman modal yang ditetapkan	-	100	2.126.753.560	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				3.290.000.000		3.550.000.000		3.750.000.000		3.750.000.000		4.050.000.000	
Meningkatnya daya tarik investasi	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	4	5	3.290.000.000	5	3.550.000.000	5	3.750.000.000	5	3.750.000.000	5	4.050.000.000	
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				2.764.294.586		3.338.000.000		3.859.000.000		4.353.000.000		4.825.000.000	
Meningkatnya pelaku usaha yang memiliki izin usaha	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	85	87	2.764.294.586	90	3.338.000.000	92	3.859.000.000	95	4.353.000.000	95	4.825.000.000	
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				1.345.194.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000	
Meningkatnya kualitas pembinaan kegiatan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	100	1.345.194.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				859.149.144		729.847.680		731.847.680		732.847.680		733.847.680	
Meningkatnya kualitas pembinaan kegiatan penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100	100	859.149.144	100	729.847.680	100	731.847.680	100	732.847.680	100	733.847.680	
2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13.769.500.000		13.769.500.000		13.769.500.000		14.314.150.000		14.533.765.000	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, efesien, dan efektif	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65,45	68,9	13.769.500.000	74,55	13.769.500.000	75	13.769.500.000	77,5	14.314.150.000	80	14.533.765.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA				5.800.000.000		5.800.000.000		5.800.000.000		5.800.000.000		5.800.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SAING KEPEMUDAAN													
Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	50,05	50,25	5.800.000.000	50,5	5.800.000.000	50,75	5.800.000.000	50,85	5.800.000.000	51	5.800.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				44.843.140.000		44.843.140.000		44.843.140.000		47.936.659.800		51.246.725.986	
Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	100	100	44.843.140.000	100	44.843.140.000	100	44.843.140.000	100	47.936.659.800	100	51.246.725.986	Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				6.850.000.000		6.850.000.000		6.850.000.000		6.850.000.000		6.850.000.000	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	100	100	6.850.000.000	100	6.850.000.000	100	6.850.000.000	100	6.850.000.000	100	6.850.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				600.000.000		640.000.000		650.000.000		700.000.000		700.000.000	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD		72	600.000.000	74	640.000.000	76	650.000.000	78	700.000.000	78	700.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, efesien, dan efektif	Nilai SAKIP Perangkat Daerah												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				2.700.000.000		3.100.000.000		3.500.000.000		3.900.000.000		3.900.000.000	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kematangan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	31,26	34	2.700.000.000		3.100.000.000		3.500.000.000		3.900.000.000		3.900.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				12.898.000.000		13.053.500.000		16.953.500.000		13.253.500.000		13.453.500.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase tradisi budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	16	20	11.053.500.000	40	11.053.500.000	60	14.853.500.000	80	11.053.500.000	100	11.053.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase Pelaksanaan Program Pengembangan Kebudayaan				1.844.500.000		2.000.000.000		2.100.000.000		2.200.000.000		2.400.000.000	
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	13,44	15,05	1.500.000.000	16,13	1.500.000.000	16,93	1.500.000.000	17,99	1.500.000.000	19,05	1.500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	0	20	1.250.000.000	40	1.250.000.000	60	1.250.000.000	80	1.250.000.000	100	1.250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				2.300.000.000		1.500.000.000		1.450.000.000		1.600.000.000		1.500.000.000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	0,31	0,41	2.300.000.000	0,46	1.500.000.000	0,51	1.450.000.000	0,56	1.600.000.000	0,61	1.500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				1.500.000.000		654.500.000		1.054.500.000		1.054.500.000		7.654.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pelestarian museum daerah	Persentase museum yang dilestarikan	28,57	42,86	1.500.000.000	57,14	654.500.000	71,43	1.054.500.000	85,71	1.054.500.000	100	7.654.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				84.427.909.610		28.893.284.462		16.223.774.462		16.225.134.462		16.292.634.462	
Meningkatnya pemenuhan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara efektif	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup DPK	97,27	100	84.427.909.610	100	28.893.284.462	100	16.223.774.462	100	16.225.134.462	100	16.292.634.462	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				6.992.355.619		9.713.517.529		8.315.702.070		9.265.835.619		6.957.365.619	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Standar Perpustakaan Nasional	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	72,8	74	6.992.355.619	74,5	9.713.517.529	75	8.315.702.070	75,5	9.265.835.619	76	6.957.365.619	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				320.905.000		320.905.000		361.905.000		370.605.000		313.905.000	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Pelaksanaan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	0	100	320.905.000	100	320.905.000	100	361.905.000	100	370.605.000	100	313.905.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				1.238.845.000		1.238.845.000		3.998.276.000		1.389.245.000		1.389.245.000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersediaan arsip	79,27	81	1.238.845.000	82	1.238.845.000	83	3.998.276.000	84	1.389.245.000	85	1.389.245.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP										100.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya efektivitas upaya pencarian arsip yang dinyatakan hilang untuk menjamin keberlanjutan informasi dan memori kelembagaan	Persentase Pencarian atas Arsip yang dinyatakan hilang								100	100.000.000			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP								14.280.000		3.190.000		3.190.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang tertutup	Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup						100	14.280.000	100	3.190.000	100	3.190.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				24.477.369.092		32.646.548.643		28.026.587.776		28.353.962.984		29.396.136.482	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyediaan layanan pendukung pemerintahan daerah	Persentase layanan administrasi penunjang yang efisien dan sesuai standar	100	100	21.058.565.907	100	21.690.322.884	100	22.341.032.571	100	23.011.263.548	100	23.701.601.454	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyediaan layanan pendukung pemerintahan daerah	Persentase layanan administrasi penunjang yang efisien dan sesuai standar	97,49	100	2.083.023.442	100	2.291.325.786	100	2.520.458.365	100	2.772.504.201	100	3.049.754.621	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Penyediaan Layanan Pendukung Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi penunjang yang efisien dan sesuai standar	100	100	803.654.877	100	8.079.562.621	100	2.521.225.752	100	1.861.937.039	100	1.865.696.391	Dinas Kelautan dan Perikanan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Penyediaan Layanan Pendukung Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi penunjang yang efisien dan sesuai standar	100	100	532.124.866	100	585.337.352	100	643.871.088	100	708.258.196	100	779.084.016	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				3.000.000.000		2.500.000.000		2.750.000.000		3.025.000.000		3.327.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya pengelolaan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan dan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan	Jumlah luasan wilayah laut yang dikelola	292084,4	310797,02	3.000.000.000	329574,34	2.500.000.000	336696,77	2.750.000.000	347768,91	3.025.000.000	356121,58	3.327.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Nilai Evaluasi, efektivitas, pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA)	29	35		37		40		45		50		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				4.863.860.000		5.170.246.000		5.687.270.600		6.255.997.660		6.881.597.426	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Layanan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah pendapatan retribusi atas pelayanan pelabuhan perikanan	208.417.847	2191700000	1.063.860.000	2213617000	1.170.246.000	2235753170	1.287.270.600	2258110702	1.415.997.660	2280691809	1.557.597.426	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	36.867	37604	3.800.000.000	38356	4.000.000.000	39123	4.400.000.000	39906	4.840.000.000	40704	5.324.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				4.550.000.000		4.740.000.000		6.876.000.000		8.051.599.999		8.787.759.999	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Akses dan Pemanfaatan Benih/Bibit Ikan Bermutu	Jumlah pendapatan retribusi atas pelayanan bibit/benih ikan	9.002.400	16.000.000	250.000.000	17.000.000	280.000.000	18.000.000	320.000.000	19.000.000	340.000.000	20.000.000	355.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	604720	608.082	4.300.000.000	609.763	4.460.000.000	611.444	6.556.000.000	613.125	7.711.599.999	614.806	8.432.759.999	Dinas Kelautan dan Perikanan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				3.000.000.000		2.500.000.000		2.750.000.000		3.025.000.000		3.327.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh	70,52	65	3.000.000.000	70	2.500.000.000	75	2.750.000.000	80	3.025.000.000	85	3.327.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelanggaran di wilayah pesisir dan laut	87,3	89		90,8		92,5		94,3		96		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				2.104.247.000		4.359.459.350		3.239.932.318		3.068.178.933		3.436.962.880	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah produk hasil perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan			500.000.000		3.000.000.000		1.500.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah produk hasil perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	10	12	104.247.000	14	109.459.350	16	214.932.318	18	240.678.933	20	276.712.880	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat sebagai sumber pangan bergizi, sehat dan berkelanjutan	Angka Konsumsi Ikan	40,69	42,97	1.000.000.000	43,79	740.000.000	44,63	1.004.800.000	45,44	1.296.896.000	46,2	1.619.033.920	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang aktif dan bersertifikat	Jumlah unit pengolahan ikan (UPI) aktif dan tersertifikasi	57	61	500.000.000	63	510.000.000	65	520.200.000	67	530.604.000	69	541.216.080	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				9.772.000.000		11.227.000.000		11.346.500.000		12.009.200.000		14.159.420.000	Dinas Pariwisata

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			9.772.000.000		11.227.000.000		11.346.500.000		12.009.200.000		14.159.420.000	Dinas Pariwisata
3.26.02 - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				7.325.000.000		16.885.000.000		9.023.000.000		11.345.000.000		11.520.000.000	Dinas Pariwisata
Meningkatnya Kualitas Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan			7.325.000.000		16.885.000.000		9.023.000.000		11.345.000.000		11.520.000.000	Dinas Pariwisata
3.26.03 -Program Pemasaran Pariwisata				17.500.000.000		17.800.000.000		17.500.000.000		17.500.000.000		17.500.000.000	Dinas Pariwisata
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata		20	17.500.000.000	20	17.800.000.000	20	17.500.000.000	20	17.500.000.000	20	17.500.000.000	Dinas Pariwisata
3.26.04 - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				2.900.000.000		3.600.000.000		3.800.000.000		2.800.000.000		2.350.000.000	Dinas Pariwisata
Meningkatnya Kualitas Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual		20	2.900.000.000	30	3.600.000.000	30	3.800.000.000	30	2.800.000.000	30	2.350.000.000	Dinas Pariwisata
3.26.05 - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				8.525.000.000		16.885.000.000		9.023.000.000		11.345.000.000		11.520.000.000	Dinas Pariwisata
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tervalidasi		5	8.525.000.000	10	16.885.000.000	10	9.023.000.000	10	11.345.000.000	10	11.520.000.000	Dinas Pariwisata
3.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				16.740.640.591		17.350.000.000		17.900.000.000		18.500.000.000		19.100.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100	100	16.440.640.591	100	17.000.000.000	100	17.500.000.000	100	18.000.000.000	100	18.500.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				13.000.000.000		14.000.000.000		14.500.000.000		15.000.000.000		15.500.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Tanaman Pangan	74199	77196	13.000.000.000	78740	14.000.000.000	80315	14.500.000.000	81921	15.000.000.000	83560	15.500.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				4.400.000.000		5.450.000.000		6.000.000.000		6.550.000.000		7.100.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya penyediaan dan pegembangan prasrana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	100	100	4.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.500.000.000	100	6.000.000.000	100	6.500.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian	100	100	400.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERENIER				800.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000		1.400.000.000		1.600.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	1,5	2,5	500.000.000	3	600.000.000	3,5	700.000.000	4	800.000.000	4,5	900.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	1,5	2,5	300.000.000	3	400.000.000	3,5	500.000.000	4	600.000.000	4,5	700.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				500.000.000		600.000.000		700.000.000		800.000.000		900.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	50	60	500.000.000	65	600.000.000	70	700.000.000	75	800.000.000	78	900.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.07 -PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	100	100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	1.200.000.000	100	1.300.000.000	100	1.400.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi												Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				250.000.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000		600.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	80	85	250.000.000	90	300.000.000	95	400.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.28. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55.299.949.155		57.710.226.626		59.936.072.457		62.331.823.080		64.867.786.233	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100		49.827.700.000		51.769.416.625		53.901.012.456		56.240.263.079		58.696.226.233	
Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100	100,00	1.673.820.000	100,00	1.607.250.000	100,00	1.701.500.000	100,00	1.702.500.000	100,00	1.760.000.000	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung
Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi			100,00	1.428.060.000	100,00	1.372.560.000	100,00	1.372.560.000	100,00	1.428.060.000	100,00	1.372.560.000	UPT KPH Kabupaten Bulungan
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.864.000.000		1.786.000.001		1.786.000.001		1.786.000.001		1.864.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				44.269.155		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				182.500.000		355.000.000		355.000.000		355.000.000		355.000.000	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				59.600.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				120.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000	
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan			55.372.560.002		61.790.000.000		61.760.000.000		62.810.000.000		63.380.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan			14.595.000.000		13.830.000.000		14.630.000.000		15.910.000.000		16.010.000.000	
	Persentase peningkatan produtivitas hasil hutan			11.830.000.000		11.400.000.000		11.270.000.000		11.430.000.000		11.900.000.000	
	Persentase peningkatan produtivitas hasil hutan	22,63	22,80	17.150.000.000	22,90	17.310.000.000	23,00	17.310.000.000	23,10	17.320.000.000	23,20	17.320.000.000	Dinas Kehutanan
Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				6.550.000.002		8.800.000.000		8.100.000.000		7.700.000.000		7.700.000.000	
Terlaksananya Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara				2.000.000.000		4.350.000.000		4.350.000.000		4.350.000.000		4.350.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				350.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	
Terlaksananya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				2.397.560.000		4.650.000.000		4.650.000.000		4.650.000.000		4.650.000.000	
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000	
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanegarakaman Hayati	1,80	2,00	1.300.000.000	2,20	1.300.000.000	2,30	1.300.000.000	2,40	1.300.000.000	2,50	1.300.000.000	Dinas Kehutanan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				21.731.200.000		24.169.600.000		24.710.000.000		24.710.000.000		25.110.000.000	
	Jumlah ijin PS yang diterbitkan			1.850.000.000		1.850.000.000		1.850.000.000		1.850.000.000		1.850.000.000	
	Jumlah ijin PS yang diterbitkan			10.250.000.000		10.250.000.000		10.250.000.000		10.250.000.000		10.250.000.000	
	Jumlah ijin PS yang diterbitkan			5.280.650.000		5.269.600.000		5.960.000.000		5.960.000.000		5.960.000.000	
	Jumlah Ijin PS yang Diterbitkan			2.850.000.000		2.900.000.000		2.700.000.000		2.650.000.000		3.000.000.000	
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Presentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	80	84,00	1.500.000.000	86,00	1.550.000.000	88,00	1.600.000.000	90,00	1.650.000.000	92,00	1.700.000.000	Dinas Kehutanan
Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	50	60,00	550.000	65,00	2.350.000.000	70,00	2.350.000.000	75,00	2.350.000.000	80,00	2.350.000.000	Dinas Kehutanan
3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				22.300.000.000		23.300.000.000		24.300.000.000		25.300.000.000		26.300.000.000	
Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas DAS yang dipulihkan			2.300.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000	
	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS	70	74,00	20.000.000.000	76,00	21.000.000.000	78,00	22.000.000.000	80,00	23.000.000.000	82,00	24.000.000.000	Dinas Kehutanan
3.29. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL													
3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15.536.000.000		16.439.000.000		15.831.000.000		16.271.000.000		16.741.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya tata kelola perangkat daerah yang efektif dan efisien	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100	100	15.536.000.000	100	16.439.000.000	100	15.831.000.000	100	16.271.000.000	100	16.741.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				2.960.000.000		1.925.000.000		700.000.000		525.000.000		550.000.000	
Meningkatnya pengelolaan air tanah yang sesuai dengan ketentuan	Persentase izin pemanfaatan air tanah sesuai dengan kaidah konservasi air tanah	53	60	2.960.000.000	67	1.925.000.000	73	700.000.000	80	525.000.000	87	550.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				1.751.910.000		1.779.974.000		2.130.245.000		2.401.244.330		2.876.295.000	
Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan kaidah lingkungan dan teknik pertambangan yang baik	Persentase IUP dan SIPB MBLB yang memenuhi penyusunan dokumen teknis studi kelayakan dan rencana pengembangan	77.27	78	1.751.910.000	78	1.779.974.000	79	2.130.245.000	79	2.401.244.330	80	2.876.295.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				28.180.000.000		28.720.000.000		28.911.500.000		28.854.650.000		26.449.615.000	
Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan Terhadap Penggunaan Energi Listrik dan EBT	Jumlah pasokan energi yang bersumber dari EBT	2339.20	2.645,66	28.180.000.000	2.854,53	28.720.000.000	3.063,40	28.911.500.000	3.272,26	28.854.650.000	1.882.939,13	26.449.615.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				7.770.000.000		7.720.000.000		7.720.000.000		7.720.000.000		7.720.000.000	
Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan Terhadap Penggunaan Energi Listrik dan EBT	Capaian rumah tangga berlistrik	239045	267.007	7.770.000.000	281.265	7.720.000.000	295.708	7.720.000.000	310.336	7.720.000.000		7.720.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			300.000.000		320.000.000		375.000.000		380.000.000		385.000.000	300.000.000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	10	10	300.000.000	10	320.000.000	10	375.000.000	10	380.000.000	10	385.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			1.700.000.000		1.750.000.000		1.850.000.000		1.900.000.000		1.975.000.000	1.700.000.000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	-	25	1.700.000.000	25	1.750.000.000	25	1.850.000.000	25	1.900.000.000	0	1.975.000.000	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			2.950.000.000		2.950.000.000		2.950.000.000		2.950.000.000		2.950.000.000	2.950.000.000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	6	6	2.950.000.000	6	2.950.000.000	6	2.950.000.000	6	2.950.000.000	6	2.950.000.000	
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				1.050.000.000		1.250.000.000		1.360.000.000		1.390.000.000		1.580.000.000	
Meningkatnya pelaku usaha berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	42.365.078.964.000	44.365.078.964.000	1.050.000.000	45.365.078.964.000	1.250.000.000	46.365.078.964.000	1.360.000.000	47.365.078.964.000	1.390.000.000	48.365.078.964.000	1.580.000.000	
3.30.06 - PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGNAN KONSUMEN				650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN			700.000.000		800.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PRODUK DALAM NEGERI													
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	25	700.000.000	30	800.000.000	25	900.000.000	40	1.000.000.000	45	1.100.000.000	25	
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13.060.000.000		13.060.000.000		13.120.000.000		13.120.000.000		13.120.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Terpenuhinya Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	Persentase cakupan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	13.060.000.000	100	13.060.000.000	100	13.120.000.000	100	13.120.000.000	100	13.120.000.000	
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				2.600.000.000		2.750.000.000		2.850.000.000		2.950.000.000		2.950.000.000	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	20	30	2.600.000.000	35	2.750.000.000	40	2.850.000.000	45	2.950.000.000	50	2.950.000.000	
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				200.000.000		250.000.000		250.000.000		225.000.000		250.000.000	
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	1	2	200.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	3	225.000.000	4	250.000.000	
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				54.997.000		57.027.000		60.042.000		60.057.000		65.072.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	0	100	54.997.000	100	57.027.000	100	60.042.000	100	60.057.000	100	65.072.000	
3.32.03 -PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				117.444.000		122.474.000		137.519.000		139.534.000		143.399.000	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	0	100	117.444.000	100	122.474.000	100	137.519.000	100	139.534.000	100	143.399.000	
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				355.094.000		460.624.000		398.939.000		601.038.000		397.669.000	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	50	74	355.094.000	74	460.624.000	74	398.939.000	74	601.038.000	74	397.669.000	
4. URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4.01. SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				143.274.117.383		148.727.738.545		154.088.981.566		159.300.772.092		165.369.129.428	
Meningkatnya Kualitas Layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkup sekretariat daerah provinsi kalimantan utara	100	100	2.216.076.000	100	2.217.076.000	100	2.651.576.000	100	2.333.076.000	100	2.400.576.000	Biro Kesejahteraan Rakyat

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas layanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkup sekretariat daerah provinsi kalimantan utara	100	100	2.069.020.000	100	1.583.460.000	100	1.692.020.000	100	1.625.460.000	100	1.629.020.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Internal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Umum	86,74	86,8	120.344.710.029	86,9	124.992.447.137	87	129.371.119.275	87,1	133.968.725.019	87,2	138.796.211.051	Biro Umum
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Internal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pimpinan	86,57	86,75	9.235.882.395	86,88	9.935.655.244	87	10.149.416.736	87,1	10.429.816.303	87,25	10.645.535.847	Biro Administrasi Pimpinan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Penyelenggaraan Pemeintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkup sekretariat daerah provinsi kalimantan utara	86,74	86,8	1.520.600.000	86,9	1.748.690.000	87	2.038.229.525	87,1	2.343.963.953	87,2	2.689.789.102	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkup sekretariat daerah provinsi kalimantan utara	100	100	2.416.000.000	100	3.029.500.000	100	2.693.000.000	100	2.746.500.000	100	2.965.000.000	Biro Hukum
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkup sekretariat daerah provinsi kalimantan utara	100	100	1.396.028.959	100	1.387.610.164	100	1.409.620.030	100	1.453.730.817	100	1.477.997.428	Biro Perekonomian

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara			1.163.300.000		1.286.800.000		1.383.500.000		1.467.500.000		1.503.000.000	
Terlasananya Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkup sekretariat daerah provinsi kalimantan utara	100	100	2.912.500.000	100	2.546.500.000	100	2.700.500.000	100	2.932.000.000	100	3.262.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				3.750.725.398		3.787.550.000		3.808.500.000		4.017.150.000		4.232.150.000	
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	37,4	38,9	3.750.725.398	39,01	3.787.550.000	41,25	3.808.500.000	43,6	4.017.150.000	46,1	4.232.150.000	Biro Organisasi
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				3.297.000.000		2.545.000.000		3.580.000.000		3.015.000.000		4.655.000.000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Nilai LPPD		3,1	3.297.000.000	3,4	2.545.000.000	3,43	3.580.000.000	3,5	3.015.000.000	3,52	4.655.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				63.000.000.000		65.700.000.000		69.300.000.000		75.350.000.000		79.800.000.000	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase usulan kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	**95**	100	63.000.000.000	100	65.700.000.000	100	69.300.000.000	100	75.350.000.000	100	79.800.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				2.310.000.000		2.370.000.000		2.430.000.000		2.490.000.000		2.560.000.000	
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang dihasilkan sesuai standar	90	90	2.310.000.000	90	2.370.000.000	90	2.430.000.000	90	2.490.000.000	90	2.560.000.000	Biro Hukum

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				3.158.777.500		3.242.104.050		3.329.155.418		3.420.169.228		3.515.402.597	
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase usulan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti		100	3.158.777.500	100	3.242.104.050	100	3.329.155.418	100	3.420.169.228	100	3.515.402.597	Biro Perekonomian
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				2.332.040.000		2.618.000.000		2.852.050.000		3.176.707.500		3.465.413.625	
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	30	30	2.332.040.000	30	2.618.000.000	30	2.852.050.000	30	3.176.707.500	30	3.465.413.625	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				1.860.000.000		2.150.000.000		2.410.000.000		2.680.000.000		2.970.000.000	
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Persentase usulan kebijakan administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti	0	100	1.860.000.000	100	2.150.000.000	100	2.410.000.000	100	2.680.000.000	100	2.970.000.000	Biiro Administrasi Pembangunan
4.02. SEKRETARIAT DPRD													
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
Meningkatnya tatakelola pemerintahan di lingkungan Sekretariat DPRD	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (DPRD) TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		83	44.269.191	84	7.849.697.612	85	75.899.697.612	86	891	87	8.131	Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD													
Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Utara melalui dukungan fasilitasi yang optimal sesuai standar operasional prosedur	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		1	5.345	1	72.734.785.137	1	72.734.785.137	1	72.934.785.137	1	72.734.785.137	
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N		25		27		3		32		35		
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N		1		1		1		1		1		
5. URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5.01. PERENCANAAN													
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
Meningkatnya kualitas layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang				16.224.821.197		18.626.991.581		18.564.651.197		18.974.051.197		17.405.651.197	
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				7.928.390.000		7.928.390.000		7.928.390.000		7.928.390.000		7.928.390.000	
Meningkatnya capaian program pembangunan daerah	Persentase capaian program pembangunan daerah			7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000	
Meningkatnya tata kelola data pembangunan daerah	Persentase data kinerja yang lengkap dan update			928.390.000		928.390.000		928.390.000		928.390.000		928.390.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan provinsi dan nasional	Persentase keselarasan dokumen perencanaan provinsi dengan nasional			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
5.02. KEUANGAN													
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				166.085.659.019		167.729.357.500		175.366.443.500		179.478.096.700		177.380.150.540	
Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		79,5	600.000.000	81,5	700.000.000	83	800.000.000	85	900.000.000	86,5	1.000.000.000	Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SKM Perangkat Daerah		90,9	71.687.470.000	91,4	74.241.000.000	91,9	73.401.500.000	92,4	74.591.000.000	92,9	72.468.000.000	Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		90,9	3.500.000.000	91,4	3.312.500.000	91,9	3.332.500.000	92,4	3.337.500.000	92,9	4.013.500.000	UPT Bapenda Bulungan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai SKM Perangkat Daerah		90,9	3.600.000.000	91,4	4.255.000.000	91,9	4.728.000.000	92,4	5.353.000.000	92,9	5.871.000.000	UPT Bapenda Nunukan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		90,9	4.682.000.000	91,4	3.068.000.000	91,9	8.530.000.000	92,4	2.584.000.000	92,9	3.647.000.000	UPT Bapenda Tana Tidung
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai SKM Perangkat Daerah		90,9	7.801.400.000	91,4	9.291.680.000	91,9	11.151.016.000	92,4	13.380.019.200	92,9	15.451.223.040	UPT Bapenda Tarakan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		90,9	2.408.500.000	91,4	2.371.750.000	91,9	2.699.000.000	92,4	8.038.150.000	92,9	3.635.000.000	UPT Bapenda Malinau
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				705.174.532.602		711.291.085.791		761.458.716.640		762.882.004.031		762.882.004.031	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100	100	705.174.532.602	100	711.291.085.791	100	761.458.716.640	100	762.882.004.031	100	762.882.004.031	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03 -PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				6.650.000.000		6.816.250.000		6.986.656.250		7.221.247.680		7.221.247.680	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100	100	6.650.000.000	100	6.816.250.000	100	6.986.656.250	100	7.221.247.680	100	7.221.247.680	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				6.853.094.434		7.828.070.000		8.642.344.000		9.586.352.800		10.530.719.360	
Meningkatnya Capaian PAD Melalui Upaya Intensifikasi dan Eksetensifikasi	Persentase Realisasi Target PAD Perangkat Daerah	88,92	100	732.600.000	100	879.120.000	100	1.054.944.000	100	1.265.932.800	100	1.519.119.360	UPT Bapenda Tarakan
	Persentase Realisasi Target PAD Perangkat Daerah	88,92	100	660.000.000	100	710.000.000	100	710.000.000	100	710.000.000	100	810.000.000	UPT Bapenda Bulungan
	Persentase Realisasi Target PAD Perangkat Daerah	88,92	100	1.050.000.000	100	1.225.000.000	100	1.400.000.000	100	1.600.000.000	100	1.690.000.000	UPT Bapenda Nunukan
	Persentase Realisasi Target PAD Perangkat Daerah	88,92	100	255.500.000	100	283.950.000	100	303.200.000	100	337.470.000	100	346.600.000	UPT Bapenda Malinau
	Persentase Realisasi Target PAD Perangkat Daerah	88,92	100	3.700.000.000	100	4.050.000.000	100	4.400.000.000	100	4.800.000.000	100	5.200.000.000	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Realisasi Target PAD Perangkat Daerah	88,92	100	288.000.000	100	330.000.000	100	374.200.000	100	422.950.000	100	465.000.000	UPT Bapenda Tana Tidung
Meningkatnya Transaksi Non Tunai Realisasi PAD	Persentase Transaksi Non Tunai Terhadap Realisasi PAD	50	60	166.994.434	62	350.000.000	64	400.000.000	66	450.000.000	68	500.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.03. KEPEGAWAIAN													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15.353.528.480		16.138.101.238		15.470.150.466		16.586.537.720		18.320.313.996	Badan Kepegawaian Daerah
Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Kepegawaian	Persentase SDM pengelola kepegawaian yang meningkatkan kapabilitas/ kompetensinya	0		189.593.600	100	201.198.600	100	211.803.600	100	225.408.600	100	231.078.600	
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian dan Layanan Pembinaan Kepegawaian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,07		15.163.934.880	87,02	15.936.902.638	87,52	15.258.346.866	88,02	16.361.129.120	88,52	18.089.235.396	
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				4.493.882.938		4.632.946.330		5.665.131.541		6.029.020.760		7.308.671.925	
Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal sesuai standar jabatan	48	52	321.220.773	54	324.806.814	56	329.392.855	58	335.978.896	60	339.568.896	
Meningkatnya Kinerja, Kesejateraan, dan Disiplin ASN	Persentase ASN dengan predikat kinerja "Baik" dan "Sangat Baik"	80	84	1.180.049.519	86	886.102.452	88	1.372.879.849	89	1.065.464.047	90	1.481.628.011	
	Persentase kedisiplinan ASN	80	84	-	87	-	90	-	93	-	96	-	
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian dan Layanan Pembinaan Kepegawaian	Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan kepegawaian	6,68	11,86	449.898.247	17,05	463.278.553	22,23	486.776.111	27,42	494.855.506	32,6	505.249.866	
Meningkatnya kualitas pemenuhan jabatan ASN	Persentase Pemenuhan Jabatan ASN berdasarkan Anjab, ABK dan Standar Kompetensi Jabatan	53,56	70	958.356.000	72	1.109.084.038	74	1.315.702.189	76	1.605.926.222	80	2.024.029.651	
Terlaksananya Manajemen Talenta PNS	Persentase tingkat kesesuaian kompetensi PNS dengan kompetensi jabatan	20,58	26,12	1.584.358.399	29,35	1.849.674.473	33,12	2.160.380.537	37,22	2.526.796.089	40,1	2.958.195.501	
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12.635.785.147		13.143.612.000		13.069.612.000		13.718.612.000		13.527.612.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Nilai Kualitas Tata Kelola Organisasi	Nilai kualitas tata kelola organisasi		84	12.635.785.147	85	13.143.612.000	86	13.069.612.000	87	13.718.612.000	88	13.527.612.000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				6.050.000.000		5.975.000.000		6.105.000.000		6.030.000.000		6.030.000.000	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		80	1.550.000.000	80	1.750.000.000	85	1.900.000.000	90	2.300.000.000	90	2.300.000.000	
Meningkatnya layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, managerial dan fungsional	70	72	4.500.000.000	74	4.225.000.000	75	4.205.000.000	77	3.730.000.000	78	3.730.000.000	
Terwujudnya Pengembangan Kompetensi berbasis Corpu Kaltara	Persentase strategi penerapan Corpu	41	43		44		45		46		47		
5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				700.000.000		700.000.000		800.000.000		800.000.000		900.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan			700.000.000		700.000.000		800.000.000		800.000.000		900.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				300.000.000		350.000.000		350.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan		75	300.000.000	80	350.000.000	85	350.000.000	90	400.000.000	90	400.000.000	
5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN													
5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				7.912.690.028		7.332.200.454		7.103.398.954		8.160.444.854		7.119.098.954	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Terpenuhinya layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah lingkup Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah lingkup Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Utara		100	7.912.690.028	100	7.332.200.454	100	7.103.398.954	100	8.160.444.854	100	7.119.098.954	
5.06.03 - PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA				4.117.569.366		4.017.569.366		4.017.569.366		3.917.569.366		3.917.569.366	
Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pengelolaan kawasan perbatasan dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Rencana Induk yang Diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah		0	107.249.976	0	107.249.976	0	107.249.976	0	107.249.976	0	107.249.976	
Meningkatnya koordinasi pengelolaan kawasan perbatasan	Persentase Kegiatan Rencana Aksi Berdasarkan Rencana Induk yang Direalisasikan oleh Perangkat Daerah Pengampu		0	2.185.719.390	0	2.085.719.390	0	2.085.719.390	0	1.985.719.390	0	1.985.719.390	
Meningkatnya kualitas monev terhadap pelaksanaan pengelolaan kawasan perbatasan	Persentase rekomendasi hasil monev yang dikeluarkan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan rencana aksi tahunan		100	1.824.600.000	100	1.824.600.000	100	1.824.600.000	100	1.824.600.000	100	1.824.600.000	
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.478.963.413		12.446.800.000		27.419.000.000		18.005.000.000		17.087.000.000	Badan Penghubung
Terlaksananya dukungan fasilitasi, koordinasi, dan representasi Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien di tingkat nasional				18.478.963.413		12.446.800.000		27.419.000.000		18.005.000.000		17.087.000.000	
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				3.464.842.000		3.550.000.000		3.650.000.000		3.850.000.000		4.100.000.000	
Meningkatnya efektivitas koordinasi, komunikasi, dan fasilitasi kepentingan Pemerintah Daerah di tingkat pusat.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pimpinan	85	87,50	3.464.842.000	90,00	3.550.000.000	92,50	3.650.000.000	95,00	3.850.000.000	95,00	4.100.000.000	
6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH													
6.01. INSPEKTORAT DAERAH													
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													Inspektorat
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dilingkungan Inspektorat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		82	32.923.320.000	85	26.697.320.000	87	29.036.000.000	90	26.943.887.600	93	28.725.827.332	
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				6.750.000.000		7.500.000.000		8.300.000.000		8.800.000.000		9.100.000.000	
Meningkatnya kualitas TLHP	Persentase TLHP yang diselesaikan			6.750.000.000		7.500.000.000		8.300.000.000		8.800.000.000		9.100.000.000	
PROGRAM Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				5.180.000.000		6.230.000.000		6.430.000.000		6.630.000.000		6.130.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase PD yang mendapatkan pendampingan dan asistensi			5.180.000.000		6.230.000.000		6.430.000.000		6.630.000.000		6.130.000.000	
8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8.1. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				6.207.824.112		6.207.824.112		6.207.824.112		6.207.824.112		6.207.824.112	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	**100**	100	6.207.824.112	100	6.207.824.112	100	6.207.824.112	100	6.207.824.112	100	6.207.824.112	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				2.113.283.764		2.263.283.764		2.513.283.764		2.763.283.764		2.862.837.764	
Meningkatnya kesadaran akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	100	2.113.283.764	100	2.263.283.764	100	2.513.283.764	100	2.763.283.764	100	2.862.837.764	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				3.342.250.000		3.342.250.000		3.342.250.000		158.342.250.000		3.342.250.000	
Meningkatnya Peran Parpol dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik				3.342.250.000		3.342.250.000		3.342.250.000		158.342.250.000		3.342.250.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				2.100.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	100	100	2.100.000.000	100	2.100.000.000	100	2.100.000.000	100	2.100.000.000	100	2.100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				277.450.000		277.450.000		277.450.000		277.450.000		277.450.000	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi	**100**	100	277.450.000	100	277.450.000	100	277.450.000	100	277.450.000	100	277.450.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				2.227.663.134		2.227.663.134		2.227.663.134		2.227.663.134		2.227.663.134	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase potensi konflik sosial yang teridentifikasi	100	100	2.227.663.134	100	2.227.663.134	100	2.227.663.134	100	2.227.663.134	100	2.227.663.134	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bagian ini menyajikan tentang gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2025-2030. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

4.1.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Utara

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	76,71	77,74	78,77	79,80	80,83	81,86	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	14,228	13,15	12,08	11,01	9,9342	8,86	
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ kapita	856	1188,75	1521,50	1854,25	2187,00	2519,75	
4	Intensitas Energi Primer	SBM/ Rp Miliar	57757	54095,25	50433,50	46771,75	43110	39448,25	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	77,77	77,97	78,17	78,37	78,57	78,78	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	48,32	51,55	54,78	58,01	61,24	64,47	
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	16	32,25	48,50	64,75	81	97,25	
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	91	93,25	95,50	97,75	100	102,25	
10	Persentase Penurunan Emisi GRK								
	a. Kumulatif	%	34,65	35,60	36,55	37,49	38,44	39,39	
	b. Tahunan	%	45,93	48,42	50,91	53,39	55,88	58,37	
11	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	55,77	60,27	62,81	66,33	69,85	73,37	
12	Indeks Risiko Bencana	Indeks	130,88	125,11	119,34	113,57	107,8	102,02	
13	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,55	0,62	0,69	0,76	0,83	0,90	
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	7,95	7,32	6,68	6,05	5,42	5,16	
15	Rasio Penduduk	%							
16	Kepadatan Penduduk	Orang/ km^2	10,00	10,22	10,45	10,67	10,89	11,00	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,80	5,00	5,90	6,45	7,00	7,55	
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,33 – 5,07	4,11 – 5,00	3,78 – 4,20	3,39 – 3,77	2,33 – 3,33	2,17 – 2,90	
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	227,1	251,15	275,20	299,25	323,3	347,35	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,84	3,80	3,68	3,56	3,45	3,34	
6	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	46,00	48,20	50,40	52,60	54,80	57,00	
7	Indeks Gini	Angka	0,256	0,253	0,251	0,249	0,246	0,244	
8	Indeks Modal Manusia	Angka	0,56	0,57	0,58	0,58	0,59	0,60	
9	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,96	74,16	74,37	74,57	74,77	74,97	
10	Indeks Keluarga Sehat	Angka							
11	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	143	130,25	117,50	104,75	92	79,25	
12	Prevalensi Stunting	%	15,1	14,18	13,25	12,33	11,4	10,48	
13	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):								
	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	85	85,00	85,00	85,00	85	85,00	
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	90	90,00	90,00	90,00	90	90,00	
14	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	98,6	98,70	98,80	98,90	99	99,10	
15	a) Persentase kabupaten/kota yang								

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								
	i) Literasi Membaca	%	20,00-20,00	30,00	40,00	50,00	60,00-60,00	70,00	
	ii) Numerasi	%	0,00-20,00	25,00	30,00	35,00	20,00-40,00	45,00	
16	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								
	i) Literasi Membaca	%	44,82-47,32	46,17	47,53	48,88	50,23-52,73	51,58	
	ii) Numerasi	%	32,18-34,68	33,18	34,18	35,18	36,18-38,68	37,18	
17	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,7-9,71	9,83	9,95	10,08	10,2-10,22	10,33	
18	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,32-13,33	13,38	13,45	13,51	13,57-13,58	13,63	
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	67	67,5	68	68,5	69	69,5	
20	Indeks Literasi Digital	Angka							
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	55,59	56,51	57,44	58,36	59,28	60,20	
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	79,24 - 79,27	79,62 - 79,65	80,01 - 80,04	80,39 - 80,53	80,77 - 80,91	81,15 - 81,29	
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	57,87 - 57,97	58,40 - 58,50	58,93 - 59,03	59,46 - 59,75	59,99 - 60,28	60,52 - 60,81	
24	Indeks Perlindungan Anak	Angka	64,75	65,31	65,87	66,43	66,99	67,55	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
25	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	77,5	78,15	78,80	79,44	80,09	80,74	
26	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,434	0,43	0,42	0,41	0,398	0,39	
27	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	50,67	51,18	51,69	52,20	52,73	53,25	
28	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	11,92	11,98	12,04	12,09	11,92-12,15	12,21	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Angka Ketergantungan	%	41,79	42,37	42,95	43,53	43,97	44,11	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,14-8,20	7,56	6,97	6,39	5,8-5,8	5,22	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,62	1,64	1,66	1,67	1,69	1,71	
4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	2,14	2,25	2,36	2,46	2,57	2,68	
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%							
6	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%	1,94	1,96	1,99	2,01	2,03	2,05	
7	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	%	1,17	1,29	1,41	1,53	1,65	1,77	
8	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,37	3,56	3,75	3,93	4,12	4,31	
9	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,41	0,44	0,47	0,49	0,52	0,55	
10	Return on Aset (ROA) BUMD	%	0,97	1,13	1,29	1,45	1,61	1,77	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,56	72,54	73,42	75,41	76,30	78,28	
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	53,17-56,06	53,40-56,60	53,62-56,84	53,85-57,08	54,07-58,05	54,30-57,55	
13	Indeks Inovasi Daerah	Angka	56,17	60,3	64,44	68,57	72,71	76,84	
14	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	70,47	71,78	73,79	75,93	77,14	79,36	
15	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka	25,17	26,40	27,63	28,86	30,09	31,32	
16	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	27,12	29,03	30,94	32,85	34,76	36,67	
17	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	6,5	6,63	6,75	6,88	7,00	7,13	
18	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Angka	8,4	8,28	8,15	8,03	7,9	7,78	
19	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	26,2	27,00	27,79	28,59	29,38	30,18	
20	Ekspor Barang dan Jasa	%	20,26-20,32	20,77-21,80	21,27-22,33	21,78-22,86	22,28-22,87	22,79-23,92	
21	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	86,27	88,61	90,91	93,15	95,33	97,46	
22	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	74,85	76,42	78,00	79,57	81,14	82,71	
23	Persentase Desa Mandiri	%	1,79	2,27	2,74	3,22	3,69	4,17	
24	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,7	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	
25	Tingkat Inflasi	%	3,2-3,8	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	1,4-3,4	1,4-3,4	
26	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	77,18	77,97	78,77	79,56	80,35	81,14	
27	Persentase Penyandang	%	40,00	42,50	45,00	47,50	50	52,50	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Disabilitas Bekerja di Sektor Formal								
28	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	18,97	22,81	26,64	30,48	34,31	38,15	
29	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	0,23	0,48	0,74	0,99	1,24	1,49	
30	Nilai Transaksi Saham per Kapita Per Provinsi	Rupiah	3.449.809,08	5.235.330,10	7.020.851,11	8.806.372,13	10.591.893,14	12.377.414,16	
31	Total Kredit/PDRB	%	12	15,58	19,15	22,73	26,3	29,88	
32	Inklusi Keuangan	%	97,3	97,65	98,01	98,36	98,71	99,06	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	70	70,38	70,75	71,13	71,5	71,88	
2	Indeks Pemdi (Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Angka	3	3,07	3,14	3,21	3,28	3,35	
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,46	3,49	3,52	3,55	3,58	3,61	
4	Indeks Integritas Nasional	Angka	75,22	75,99	76,76	77,53	78,3	79,07	
5	Persentase Penegakan Perda	%	70	71,43	72,85	74,28	75,7	77,13	
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	65	68,75	72,50	76,25	80	83,75	
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%	79,41-82,59	79,62-82,80	79,83-83,02	80,03-83,23	80,24-83,24	80,45-83,67	
8	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,34	3,38	3,42	3,46	3,57	3,63	
9	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	68,5	69,25	70,00	70,75	71,5	72,25	
10	Indeks Ketahanan Nasional	Angka	2,67	2,76	2,85	2,93	3,02	3,11	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
A	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**								
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**								
1	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	%	79,53	80,17	80,81	81,46	82,1	82,74	
2	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	75,02	76,11	77,2	78,29	79,38	80,47	
3	Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	73,41	74,01	74,61	75,21	75,81	76,41	
4	Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61,92	63,52	65,12	66,72	68,32	69,92	
5	Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	70,84	72,14	73,44	74,74	76,04	77,34	
6	Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	60,81	63,01	65,21	67,41	69,61	71,81	
7	Rata-rata kompetensi literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	81,99	83,59	85,19	86,79	88,39	89,99	
8	Rata-rata kompetensi numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	74,77	75,37	75,97	76,57	77,17	77,77	
9	Rata-rata kompetensi literasi SMPLB	Nilai	81,48	81,98	82,48	82,98	83,48	83,98	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	berdasarkan Asesmen Nasional								
10	Rata-rata kompetensi numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	7920	7945	7970	7995	8020	8045	
11	Rata-rata kompetensi literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	80,4	80,9	81,4	81,9	82,4	82,9	
12	Rata-rata kompetensi numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	71,57	72,07	72,57	73,07	73,57	74,07	
13	Tingkat penyerapan lulusan SMK	%	87,2	87,74	88,28	88,82	89,36	89,89	
14	Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79,54	80,08	80,62	81,16	81,7	82,24	
15	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMA	Nilai	81,97	83,17	84,37	85,57	86,77	87,97	
16	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMK	Nilai	71,58	72,78	73,98	75,18	76,38	77,58	
17	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SDLB	Nilai	72,17	72,67	73,17	73,67	74,17	74,67	
18	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMPLB	Nilai	83,2	84,4	85,6	86,8	88	89,2	
19	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMALB	Nilai	79,8	81,1	82,4	83,7	85	86,3	
20	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMA	Nilai	73,65	74,65	75,65	76,65	77,65	78,65	
21	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMK	Nilai	73,45	74,75	76,05	77,35	78,65	79,95	
22	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SDLB	Nilai	74,67	75,67	76,67	77,67	78,67	79,67	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
23	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMPLB	Nilai	82,8	84,6	86,4	88,2	90	91,8	
24	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMALB	Nilai	79,5	81,5	83,5	85,5	87,5	89,5	
25	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMA	Nilai	60,59	62,09	63,59	65,09	66,59	68,09	
26	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMK	Nilai	59,48	61,78	64,08	66,38	68,68	70,98	
27	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SDLB	Nilai	68,63	69,93	71,23	72,53	73,83	75,13	
28	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMPLB	Nilai	83,9	85,3	86,7	88,1	89,5	90,9	
29	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMALB	Nilai	82,1	83,7	85,3	86,9	88,5	90,1	
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**								
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup							
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen							
3	Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	%							
4	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%							

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB	%							
6	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	%							
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Provinsi	%							
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob di wilayah kewenangan Provinsi	%							
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan Provinsi	%							
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan Provinsi	%							
5	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%							

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Persentase kabupaten/kota yang dibina penyelenggaraan SPAM	%							
7	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%							
8	Persentase kabupaten/kota yang dibina dalam sistem pengelolaan air limbah domestik	%							
9	Persentase kabupaten/kota yang dibina sistem pengelolaan persampahan	%							
10	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%							
11	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi	%							
12	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%							
13	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	%							
14	Jumlah hari layanan penerbitan Kesesuaian Kegiatan	Hari							

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pemanfaatan Ruang /KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah								
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**								
1	Persentase warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni	%							
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%							
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%							
4	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%							
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**								
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	70	72	72	75	75	80	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75	100	100	100	100	100	
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	orang	4	5	6	7	8	8	
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
6	Presentase Pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional	%	21	25	25	30	35	40	
7	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	5	10	15	20	25	30	
8	Persentase Dokumen Layanan Pencegahan Kebakaran	%	20	20	80	80	100	100	
9	Persentase Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan legal	%	0	100	100	100	100	100	
10	Persentase Aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0	14	28	42	56	70	
11	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan untuk mengisi jabatan fungsional	%	0	0	25	25	25	25	
12	Persentase Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang telah dilakukan pembinaan	%	0	30	50	50	50	50	
13	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	%	0	30	50	50	50	50	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pemadam kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan standar								
14	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100	
15	persentase penanganan pra bencana	%	60	60	60	60	60	60	
16	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	20	20	20	20	20	20	
6	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**								
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan	%	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dasarnya di dalam panti								
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan /atau gelandangan dan pengemis di dalam panti yang layak dan sesuai standar	%							
6	Persentase Pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan /atau gelandangan dan pengemis sesuai standar kompetensi dan/atau layanan	%							
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar	%							
9	Persentase pekerja sosial /tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca	%							

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	bencana sesuai standar								
10	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%							
11	Persentase sarana prasarana bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar	%							
12	Persentase Pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	%							
13	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%							
14	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%							
B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**								
1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	%	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	3,59	3,59	4,24	4,57	4,9	5,23	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Org							
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	4,45	4,98	5,5	6,02	6,54	7,06	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	%	53,2	55,2	57,2	59,2	61,2	63,2	
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	2,66	3,01	3,36	3,71	4,05	4,4	
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks							
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG	Indeks							
3	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD	%							
4	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%							

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%							
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**								
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	%							
2	Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Skor 0-100							
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%							
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%							
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**								
1	Tersedianya Tanah Obyek *Landreform* (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	10	10	10	10	10	
2	Persentase Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
3	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu kota atau kabupaten lengkap secara berkualitas	%							
4	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	50	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	
5	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan	%							

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu								
6	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Provinsi	%							
7	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan Peta Nilai Tanah dalam pelayanan BPHTB	%							
8	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%							
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indeks	77,77	77,97	78,17	78,37	78,57	78,77	
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%							
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi	Indeks							
6	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%							
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%							
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%							
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%							
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%							
6	Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun	%							
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%							
7	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**								
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%							
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%							
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%							
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%							
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%							

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	2,24				2,2		
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	79,5				82,7		
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%							
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	25,8				25,3		
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (skala 0-100)	66,85				74,85		
9	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**								
1	Konektivitas Provinsi	Rasio							
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan daerah	%							
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%							
4	Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor yang laik jalan	%							
10	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**								
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan	%							

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo								
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%							
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%							
11	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**								
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%							
2	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%							
3	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%							
4	Pertumbuhan Wirausaha	%							
12	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**								
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	3	14	9	4	2	6	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	100	100	100	100	
13	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**								
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi	Indeks							
2	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	%							
14	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**								

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin							
15	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**								
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintahan daerah	%							
16	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**								
1	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	0,36	0,41	0,46	0,51	0,56	0,61	
2	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	%							
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi di bidang kebudayaan	%	0,48	0,53	0,58	0,63	0,68	0,73	
17	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	73,5	74	74,5	75	75,5	76	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai							
18	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**								
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	54,5	58	61,5	65	68,5	72	
C	**Urusan Pemerintahan Pilihan**								
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**								
1	Persentase Kawasan konservasi daerah yang operasional	%	33,5	38,5	43,5	48,5	53,5	58,5	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Produksi Perikanan Tangkap	%	88	88	89	88	89	88	
3	Produksi Perikanan Budi Daya	%	81	82	83	84	85	86	
4	Produksi Garam	%							
5	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	%	60	65	70	75	80	85	
2	**Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata**								
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	1,75	1,88	2,02	2,17	2,33	2,5	
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang)	%							
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%							
4	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%							
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**								
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%							
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%							
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%							
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan**								
1	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%							
2	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB daerah	%							

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarkatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan	%							
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**								
1	Persentase cekungan air tanah dalam provinsi yang telah ditetapkan								
2	Perda/Pergub terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan								
3	Penerimaan Nilai perolehan air tanah telah ditetapkan melalui perda/pergub								
4	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan								
6	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**								
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah per provinsi	%							
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen per Provinsi	%							
3	Nilai Ekspor Barang Per Provinsi	%							
7	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**								
1	Pencapaian sasaran pembangunan	%							

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	industri daerah, meliputi:								
	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi								
	2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi								
	3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi								
	4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi								
	5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi								
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%							
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan	%							
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri	%							

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	yang sudah dilakukan pembinaan.								
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%							
D	**Urusan Penunjang Pemerintahan**								
1	**Perencanaan**								
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%							
2	**Keuangan**								
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%							
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	32	35	37	39	42	45	
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%							
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%							
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%							
6	Persentase Penurunan SILPA	%							
3	**Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**								
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	74,5	75	75,5	76	76,5	77	
4	**Penelitian dan Pengembangan**								
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan	%							

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah								
2	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%							
5	**Pengawasan**								
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori/Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	3	3	3	3	3	3	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (2-5)	3	3	3	3	3	3	
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai (1-5)	3	3	3	3	3	3	
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	80	80	80	80	80	80	
6	**Fungsi Pengadaan**								
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin							
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	poin							
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	poin							
7	**Hubungan dengan Perwakilan Daerah**								
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	
8	**Pelayanan Publik**								
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai							

4.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode ke depan.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kalimantan Utara

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Indikator Tujuan									
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,34	3,38	3,42	3,46	3,57	3,63	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,80	5,35	5,90	6,45	7,00	7,55	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83,00	83,40	83,80	84,20	84,60	85,00	
4	Tingkat kemiskinan	%	4,33 – 5,07	4,11 – 5,00	3,78 – 4,20	3,39 – 3,77	2,33 – 3,33	2,17 – 2,90	
5	Indeks Gini	Angka	0,256	0,253	0,251	0,249	0,246	0,244	
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	55,77	60,27	63,46	66,66	69,85	72,12	
Indikator Sasaran									
1	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	70,47	71,78	73,79	75,93	77,14	79,36	
2	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	14,99	15,20	15,42	15,63	15,86	16,08	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Indeks Ekonomi Biru	Angka	25,17	26,40	27,63	28,86	30,09	31,32	
4	Indeks Modal Manusia	Angka	0,56	0,57	0,58	0,58	0,59	0,60	
5	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	86,27	88,61	90,91	93,15	95,33	97,46	
6	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	79,24 - 79,27	79,62 - 79,65	80,01 - 80,04	80,39 - 80,53	80,77 - 80,91	81,15 - 81,29	
7	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	57,87 - 57,97	58,40 - 58,50	58,93 - 59,03	59,46 - 59,75	59,99 - 60,28	60,52 - 60,81	
8	Indeks Pembangunan Gender	Angka	89,38	89,91	90,44	90,97	91,51	92,04	
9	Nilai SAKIP	Angka	72,52	72,64	72,77	72,89	73,02	73,14	
10	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
11	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,46	3,49	3,52	3,55	3,58	3,61	
12	Indeks Inovasi Daerah	Angka	56,17	60,30	64,44	68,57	72,71	76,84	
13	Survei Penilaian Integritas KPK	Angka	*Ditarget kemudian*						
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,84	3,80	3,68	3,56	3,45	3,34	
15	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	*Ditarget kemudian*						

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16	Persentase desa wilayah perbatasan yang berstatus maju dan mandiri	%	*Ditarget kemudian*						
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	77,77	77,97	78,17	78,37	78,57	78,78	
18	Indeks Risiko Bencana	Angka	130,88	125,11	119,34	113,57	107,80	102,02	

BAB V
PENUTUP

Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 memiliki peran strategis dalam memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dokumen perencanaan jangka menengah ini menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen rencana strategis (Renstra) dan juga menjadi acuan bagi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun dokumen RPJMD kabupaten/kota. Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara digunakan untuk menjaga keselarasan antara visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dengan kabupaten/kota di wilayahnya.

Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah dan mendukung pencapaian pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana yang selalu dicita-citakan oleh semua.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2029 dapat terwujud ketika adanya komitmen, kolaborasi, dan partisipasi seluruh *stakeholders* pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan kaidah pelaksanaan sebagai ketentuan umum yang harus dipedomani dalam pelaksanaan dokumen RPJMD ini. Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen pembangunan 5 (lima) tahun yang harus dipedomani bersama dalam pelaksanaan pembangunan daerah baik oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun swasta, seperti visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas serta program unggulan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing pihak;
2. RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 juga menjadi pedoman masa transisi tahun 2030. Dengan demikian, penargetan kinerja

tujuan, sasaran, dan program ditetapkan hingga tahun 2030 dan menjadi pedoman dalam masa transisi ke depan;

3. Setiap Perangkat Daerah (PD) atau unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara wajib memedomani dalam setiap perumusan kebijakan, seperti RKPD, Renstra, Renja, dan kebijakan lainnya;
4. Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara wajib memedomani dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2029;
5. Peningkatan sinkronisasi substansi antara RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2029 dengan RPJMN 2025-2029 dan dokumen lainnya;
6. Peningkatan konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen RPJMD dengan kebijakan pendanaan harus dilakukan dalam rangka meningkatkan perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran;
7. Pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan APBD semata, namun dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan pembiayaan alternatif-inovatif melalui perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pembiayaan yang baru, peningkatan kelembagaan pembiayaan yang adaptif, pemanfaatan TIK dalam proses bisnis, dan optimalisasi peran sektor keuangan daerah;
8. Penerapan kaidah pelaksanaan ini harus didukung oleh pemanfaatan TIK melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh siklus pembangunan.
9. Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2029 didesain secara adaptif. Oleh karena itu, memuat mekanisme perubahan yang memastikan adanya ruang penyesuaian terhadap berbagai faktor yang tidak dapat dikendalikan. Mekanisme perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan *force majeure*, yaitu perubahan geopolitik, geoekonomi, bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan daerah;
10. Setiap penyesuaian atau perubahan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2029 harus dengan prinsip, yaitu akuntabel, transparan, efektif, dan efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi;

11. Untuk memastikan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2029 dapat berjalan baik, maka dibutuhkan penerapan manajemen risiko pembangunan daerah mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Dokumen RPJMD perlu dievaluasi untuk memastikan perumusan dan pelaksanaan kebijakannya telah sesuai dengan peraturan maupun kondisi daerah. Untuk memastikan hal tersebut, pedoman umum pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Ruang lingkung pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah; dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- Perangkat Daerah yang mengampu bidang urusan perencanaan bertanggungjawab melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD tahun 2025-2029;
- Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJMD tahun 2025-2029 dilakukan setiap tahun;
- Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan tingkat Perangkat Daerah, dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan dikoordinir oleh unit kerja yang membidangi perencanaan.



Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara

Rancangan Akhir

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2025 - 2029